



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang; a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat; 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 2022/122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6794);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan bagian dari Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI PEMALANG,

Ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 7 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023	I-9
1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	I-9
1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026	I-10
1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKPDesa Tahun 2023	I-10
1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	I-11
1.3.6. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Dokumen Sektoral Lainnya	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan	I-12
1.4.1. Maksud	I-12
1.4.2. Tujuan	I-12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demograsi	II-1
a. Kondisi Geografi dan Administrasi	II-1
b. Topografi	II-2
c. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah	II-4
d. Hidrologi	II-6
e. Kondisi Klimatologi	II-7
f. Penggunaan Lahan	II-10
g. Potensi Pengembangan Wilayah	II-11
h. Wilayah Rawan Bencana	II-17
i. Kondisi Demografis	II-21

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-23
a. Pertumbuhan Ekonomi.....	II-23
b. PDRB Perkapita	II-29
c. Laju Inflasi.....	II-30
d. Kesenjangan	II-31
e. Kemiskinan.....	II-32
f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	II-44
g. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	II-56
h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-59
i. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-62
j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja	II-65
k. Reformasi Birokrasi	II-67
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-70
A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-70
1. Pendidikan.....	II-70
2. Kesehatan.....	II-74
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-79
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-80
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-82
6. Sosial.....	II-85
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar	II-87
1. Tenaga Kerja.....	II-87
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak....	II-88
3. Pangan	II-90
4. Pertanahan	II-91
5. Lingkungan Hidup	II-92
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-93
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-96
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-98
9. Perhubungan	II-99
10. Komunikasi dan Informatika	II-101
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-102
12. Penanaman Modal Daerah	II-103
13. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-104
14. Statistik.....	II-104

15. Persandian.....	II-105
16. Kebudayaan.....	II-105
17. Perpustakaan.....	II-106
18. Kearsipan	II-107
C. Urusan Pilihan	II-108
1. Urusan Kelautan dan Perikanan.....	II-108
2. Pariwisata	II-109
3. Pertanian	II-111
4. Perdagangan	II-113
5. Perindustrian	II-115
6. Transmigrasi.....	II-116
D. Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah.....	II-116
1. Sekretariat Daerah.....	II-116
2. Sekretariat DPRD.....	II-118
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-119
1. Perencanaan Pembangunan.....	II-119
2. Keuangan	II-120
3. Kepegawaian.....	II-122
4. Penelitian dan Pengembangan	II-122
F. Unsur Pengawas.....	II-123
1. Inspektorat	II-123
G. Unsur Kewilayahan.....	II-124
1. Kecamatan.....	II-124
H. Unsur Pemerintahan Umum	II-128
1. Kesatuan Bangsa dan Politik	II-128
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-129
a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-130
b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-131
c. Fokus Iklim Berinvestasi.....	II-131
d. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-132
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-133
A. Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah.....	II-133
B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	II-149
C. Capaian Program Unggulan.....	II-167
D. Capaian Penanggulangan Kemiskinan.....	II-169
E. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-171

1. Pendidikan	II-171
2. Kesehatan	II-172
3. Pekerjaan Umum.....	II-174
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-177
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	II- 178
6. Sosial	II-179
F. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-180
1.Tenaga Kerja	II-180
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-181
3. Pangan	II-182
4. Pertanahan	II-183
5. Lingkungan Hidup	II-184
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	II-186
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-187
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-188
9. Perhubungan	II-188
10. Komunikasi dan Informatika	II-189
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	II-190
12. Penanaman Modal.....	II-191
13. Kepemudaan dan Olahraga	II-192
14. Statistik	II-193
15. Persandian	II-194
16. Kebudayaan	II-194
17. Perpustakaan	II-195
18. Kearsipan.....	II-195
G. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-196
1.Kelautan dan Perikanan.....	II-196
2. Pariwisata	II-197
3. Pertanian	II-198
4. Perdagangan	II-199
5. Perindustrian	II-200
6. Transmigrasi	II-201
H. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	II-202
1.Sekretariat Daerah	II-202
2. Sekretariat DPRD	II-203
I. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II-203

1. Perencanaan	II-203
2. Keuangan.....	II-204
3. Kepegawaian	II-206
4. Penelitian dan Pengembangan.....	II-207
J. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan	II-208
1. Inspektorat.....	II-208
K. Unsur Kewilayahan	II-209
1. Kecamatan	II-209
L. Unsur Pemerintahan Umum	II-209
1. Kesatuan Bangsa dan Politik.....	II-209
2.3. Rangkuman Evaluasi Kinerja Pembangunan.....	II-211
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	II-211
2.4.1. Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-211
2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-212
A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar .	II-212
1. Pendidikan.....	II-212
2. Kesehatan.....	II-212
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	II-213
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-213
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-214
6. Sosial.....	II-214
B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-214
1. Tenaga Kerja.....	II-214
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak....	II-215
3. Pangan	II-215
4. Pertanahan	II-215
5. Lingkungan Hidup	II-215
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-216
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	II-216
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-216
9. Perhubungan	II-216
10. Komunikasi dan Informatika	II-216
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-217
12. Penanaman Modal	II-217
13. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-217

14. Statistik	II-217
15. Persandian.....	II-218
16. Kebudayaan.....	II-218
17. Perpustakaan.....	II-218
18. Kearsipan	II-218
C. Urusan Pemerintahan Pilihan	II-218
1. Kelautan dan Perikanan	II-218
2. Pariwisata	II-218
3. Pertanian	II-219
4. Perdagangan	II-219
5. Perindustrian	II-219
6. Transmigrasi.....	II-219
D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-219
1. Sekretariat Daerah.....	II-219
2. Sekretariat DPRD.....	II-220
E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-220
1. Perencanaan	II-220
2. Keuangan	II-220
3. Kepegawaian.....	II-221
4. Penelitian dan Pengembangan	II-221
F. Unsur Pengawas.....	II-221
1. Inspektorat	II-221
G. Unsur Kewilayahan.....	II-221
1. Kecamatan.....	II-221
H. Unsur Pemerintahan Umum	II-221
1. Kesatuan Bangsa dan Politik	II-221
2.4.3. Isu Strategis Pembangunan.....	II-222
1. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berday saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar	II-222
2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi.....	II-224
3. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	II-224
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah	II-225
5. Belum Optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan .	II-225

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-6

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	III-7
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-10
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-13
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023	IV-3
4.2.1 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 ...	IV-3
4.2.2. Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	IV-6
4.2.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang	IV-9
4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023	IV-10
4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	IV-46
4.4. Pagu Indikatif Per Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-55
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	V-1
5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023.....	V-1
5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah	V-2
5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	V-18
5.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	V-29
5.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan	V-45
5.2.4. Unsur Pendukung	V-51
5.2.5. Unsur Penunjang.....	V-53
5.2.6. Unsur Pengawas	V-57
5.2.7. Unsur Kewilayahan.....	V-58
5.2.8. Unsur Pemerintahan Umum	V-59
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Hari Hujan Per Bulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (hari)	II-8
Tabel 2.3	Curah Hujan Perbulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (mm)	II-9
Tabel 2.4	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020	II-10
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan.....	II-10
Tabel 2.6	Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.7	Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-21
Tabel 2.8	Persebaran Penduduk Usia Nonproduktif, Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-22
Tabel 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2020	II-24
Tabel 2.10	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang 2017-2021	II-25
Tabel 2.11	PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.	II-26
Tabel 2.12	Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-28
Tabel 2.13	PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-29
Tabel 2.14	Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-30
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-33

Tabel 2.16	Perubahan Jumlah Penduduk Berkesejahteraan Sosial Rendah Tiap Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2021	II-34
Tabel 2.17	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-35
Tabel 2.18	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-37
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021.....	II-38
Tabel 2.20	Perubahan Persentase Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021.....	II-38
Tabel 2.21	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.22	Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.23	Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional Periode 2017-2021	II-41
Tabel 2.24	Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021	II-42
Tabel 2.25	Capaian Intervensi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-43
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-45
Tabel 2.28	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 .	II-46
Tabel 2.29	Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-47
Tabel 2.30	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-48
Tabel 2.31	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-49

Tabel 2.32	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.33	Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-51
Tabel 2.34	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-52
Tabel 2.35	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-53
Tabel 2.36	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun 2018-2020.....	II-54
Tabel 2.37	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021	II-55
Tabel 2.38	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-57
Tabel 2.39	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2017-2021.....	II-58
Tabel 2.40	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2017-2021.	II-59
Tabel 2.41	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.42	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-62
Tabel 2.43	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.44	Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.45	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020	II-67
Tabel 2.46	Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.47	Status Pelaporan Keuangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-69
Tabel 2.48	APS dan APK Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021..	II-70

Tabel 2.49	Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.50	Persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi B Tahun 2017-2021	II-72
Tabel 2.51	Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik dan Persentase Tenaga Pendidik Berkompeten Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-73
Tabel 2.52	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2021	II-74
Tabel 2.53	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Balita Stunting Kabupaten Pemalang 2017-2021	II-75
Tabel 2.54	Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-76
Tabel 2.55	Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.56	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2021	II-78
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-79
Tabel 2.58	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021.....	II-80
Tabel 2.59	Capaian Kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-81
Tabel 2.60	Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-82
Tabel 2.61	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021	II-82
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-83
Tabel 2.63	Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 .	II-85
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-85

Tabel 2.65	Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Tahun 2021	II-87
Tabel 2.66	Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-87
Tabel 2.67	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-88
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017– 2021	II-90
Tabel 2.69	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-91
Tabel 2.70	Rekap bantuan keuangan PTSL Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2021	II-92
Tabel 2.71	Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-92
Tabel 2.72	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang Tahun 2017- 2021	II-94
Tabel 2.73	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-96
Tabel 2.74	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-98
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-99
Tabel 2.76	Data V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten ...	II-99
Tabel 2.77	Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugiannya Tahun 2021	II-100
Tabel 2.78	Kondisi Fasilitas Utama Pada Terminal Tipe C	II-100
Tabel 2.79	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-101
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-102
Tabel 2.81	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-103
Tabel 2.82	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-104

Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-105
Tabel 2.85	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-106
Tabel 2.86	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-107
Tabel 2.87	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-108
Tabel 2.88	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-109
Tabel 2.89	Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-110
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-111
Tabel 2.91	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-114
Tabel 2.92	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-115
Tabel 2.93	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.94	Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-116
Tabel 2.95	Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-118
Tabel 2.96	Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-119
Tabel 2.97	Capaian Kinerja Keuangan (Bapenda) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-120
Tabel 2.98	Capaian Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-121
Tabel 2.99	Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-122

Tabel 2.100	Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-123
Tabel 2.101	Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-124
Tabel 2.102	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%) Tahun 2017-2021	II-122
Tabel 2.103	Persentase Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan (%) Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.104	Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (%) Tahun 2017-2021	II-125
Tabel 2.105	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi Tahun 2017-2021.....	II-126
Tabel 2.106	Persentase Jalan Kewenangan Kelurahan Kondisi Baik (%) Tahun 2017-2021	II-126
Tabel 2.107	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Tahun 2017-2021	II-127
Tabel 2.108	Jumlah Potensi Konflik (kasus) Tahun 2017-2021.....	II-127
Tabel 2.109	Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik (%) Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.110	Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021	II-128
Tabel 2.111	Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021	II-133
Tabel 2.112	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021.....	II-149
Tabel 2.113	Capaian Program Unggulan Tahun 2021	II-167
Tabel 2.114	Capaian Penanggulangan Kemiskinan Sampai Dengan Tahun 2021	II-169
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	II-171
Tabel 2.116	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	II-172
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum.....	II-174
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-177
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-178
Tabel 2.120	Capaian Kinerja Urusan Sosial	II-179

Tabel 2.121	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja	II-180
Tabel 2.122	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-181
Tabel 2.123	Capaian Kinerja Urusan Pangan	II-182
Tabel 2.124	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan.....	II-183
Tabel 2.125	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup.....	II-184
Tabel 2.126	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-186
Tabel 2.127	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-187
Tabel 2.128	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-188
Tabel 2.129	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan.....	II-188
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika ..	II-189
Tabel 2.131	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-190
Tabel 2.132	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal.....	II-191
Tabel 2.133	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ..	II-192
Tabel 2.134	Capaian Kinerja Urusan Statistik.....	II-193
Tabel 2.135	Capaian Kinerja Urusan Persandian	II-194
Tabel 2.136	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	II-194
Tabel 2.137	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	II-195
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan.....	II-195
Tabel 2.139	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	II-196
Tabel 2.140	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	II-197
Tabel 2.141	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	II-198
Tabel 2.142	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	II-199
Tabel 2.143	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	II-200
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	II-202
Tabel 2.145	Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah.....	II-202
Tabel 2.146	Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD	II-203
Tabel 2.147	Capaian Kinerja Unsur Perencanaan	II-203
Tabel 2.148	Capaian Kinerja Unsur Keuangan.....	II-204
Tabel 2.149	Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian	II-206
Tabel 2.150	Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan..	II-207

Tabel 2.151	Capaian Kinerja Unsur Pengawas	II-208
Tabel 2.152	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan.....	II-209
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik....	II-210
Tabel 2.154	Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021	II-211
Tabel 3.1	Realisasi dan Target Capaian Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023	III-2
Tabel 3.2	Realisasi PDRB ADHK Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	III-4
Tabel 3.3	Realisasi Distribusi % PDRB ADHB Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021	III-5
Tabel 3.4	Realisasi PDRB ADHB Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)	III-6
Tabel 3.5	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	III-9
Tabel 3.6	Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-9
Tabel 3.7	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020- 2024	III-12
Tabel 3.8	Target/Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-13
Tabel 3.9	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2024..	III-15
Tabel 3.10	Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023	III-16
Tabel 4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	IV-2
Tabel 4.2	Prioritas dan Fokus Pembangunan dalam RKP 2023	IV-5
Tabel 4.3	Prioritas dan Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	IV-7
Tabel 4.4	Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023	IV-11
Tabel 4.5	Keterkaitan Isu Strategi, Prioritas Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Pemalang Tahun 2023	IV-15

Tabel 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun	IV-21
Tabel 4.7	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Misi dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023	IV-27
Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-29
Tabel 4.9	Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022.....	IV-46
Tabel 4.10	Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Tahun 2023.....	IV-50
Tabel 4.11	Intervensi Program Pada Tahun 2023 Berdasar SWP	IV-51
Table 4.12	Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023	IV-55
Tabel 5.1	Kerangka Proyeksi Pendanaan dan Belanja Daerah Tahun 2023	V-2
Tabel 5.2	Program dan Kegiatan Prioritas RKPD 2023.....	V-3
Tabel 5.3	Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023	V-61
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah Beserta Target Tahun 2023	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kabupaten Pemalang Beserta Target Tahun 2023.....	VI-10
Tabel 6.3	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM	VI-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RKPD	I-3
Gambar 1.2. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-9
Gambar 1.3. Sinergitas Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Desa	I-10
Gambar 1.4. Proses Iteratif Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	I-11
Gambar 1.5. Hubungan RKPD dengan Dokumen Sektorai Lainnya	I-12
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang	II-1
Gambar 2.2. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan (mdpl)	II-3
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pemalang	II-4
Gambar 2.4. Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang	II-6
Gambar 2.5. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038	II-11
Gambar 2.6. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038	II-12
Gambar 2.7. Perkembangan Jumlah Kasus Positif Covid-19 dan Kasus Meninggal Positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang Periode Maret 2020 – Desember 2021	II-19
Gambar 2.8. Persebaran Kumulatif Kasus Positif dan Meninggal Covid-19 Per Kecamatan Hingga 31 Desember 2021	II-20
Gambar 2.9. Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2022	II-21
Gambar 2.10. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	II-23
Gambar 2.11. Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Sebelum Masa Pandemi dan Pada Masa Pandemi Tahun 2020 dan tahun 2021	II-25
Gambar 2.12. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang Menurut Lima Kelompok Lapangan Usaha Utama Tahun 2017-2021	II-27
Gambar 2.13. Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021	II-31

Gambar 2.14.Perbandingan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-31
Gambar 2.15.Penurunan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah Kabupaten Pemalang, Jawa Tahun 2011- 2021	II-32
Gambar 2.16.Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021	II-32
Gambar 2.17.Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021	II-33
Gambar 2.18.Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Nasional Tahun 2017-2021	II-35
Gambar 2.19.Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-36
Gambar 2.20.Perubahan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Nasional Periode 2017-2021	II-37
Gambar 2.21.Penurunan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Nasional Tahun 2017-2021	II-39
Gambar 2.22.Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2016-2020	II-40
Gambar 2.23.Perubahan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-41
Gambar 2.24.Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-42
Gambar 2.25.Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-45
Gambar 2.26.Perubahan IPM Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-46
Gambar 2.27.Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-47
Gambar 2.28. Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-48

Gambar 2.29 Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-49
Gambar 2.30. Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.31. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-52
Gambar 2.32. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-53
Gambar 2.33. Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-54
Gambar 2.34. Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-56
Gambar 2.35. Rasio Komponen IPG Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021.....	II-57
Gambar 2.36. Perubahan IPG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2020	II-58
Gambar 2.37. Rasio Komponen IPG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021	II-59
Gambar 2.38. Nilai Komponen IDG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-60
Gambar 2.39. Perubahan IDG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021	II-61
Gambar 2.40. Komponen IDG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2020	II-62
Gambar 2.41. Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021.....	II-63
Gambar 2.42. Jumlah Penganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	II-63
Gambar 2.43. Pengurangan TPT Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2021	II-64

Gambar 2.44. TPAK Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021	II-65
Gambar 2.45. Penduduk Usia Kerja Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2017-2020	II-65
Gambar 2.46. Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 (jiwa)	II-66
Gambar 2.47. Nilai Komponen Evaluasi SAKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2020	II-68
Gambar 2.48. Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021	II-68
Gambar 2.49. Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2020	II-69
Gambar 2.50. Persentase Ketersediaan Informasi Publik Tahun 2020- 2021	II-70

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

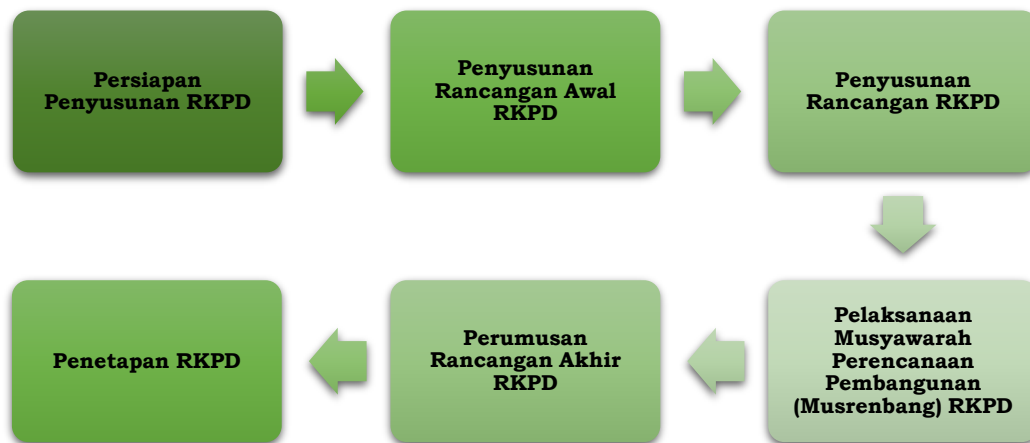
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD memuat gambaran umum kondisi Kabupaten Pemalang yang dilihat dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing Daerah, evaluasi pelaksanaan program RKPD sampai Tahun 2022 dan realisasi RPJMD, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan serta kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditargetkan pada Tahun 2023.

Mendasari Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, RKP Tahun 2023, Program Strategis Nasional (PSN) serta pedoman penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menggunakan 5 (lima) pendekatan proses, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) serta menggunakan pendekatan substansi secara THIS yaitu *tematik, holistik, integratif* dan *spasial*. Melalui kelima pendekatan tersebut, proses penyusunan RKPD telah melibatkan dan diupayakan untuk mengakomodir masukan dari *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media). Pelibatan *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan dimaksudkan agar terbangun kebersamaan, kolaborasi dan sinergi dalam pembangunan serta rasa memiliki.

Dengan melaksanakan seluruh tahapan penyusunan RKPD, mempertimbangkan seluruh unsur yang saling berkaitan, proses yang sinergi dari beberapa sektor, fokus pembangunan yang jelas dan berdasar pada pembangunan kewilayahan, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat berkualitas.

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Disusun berpedoman pada RPJMD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD;
 - b. Mendasari hasil Musrenbang desa/kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
 - c. Dibahas bersama *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan dalam forum konsultasi publik;
 - d. Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil forum konsultasi publik oleh Kepala Bappeda, Kepala Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat;
 - e. Rancangan awal RKPD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Penyusunan Rancangan RKPD
 - a. Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dan hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional;
 - b. Mendasari hasil forum Perangkat Daerah dan forum pokok-pokok pikiran DPRD.
4. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD
 - a. Dihadiri oleh *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan;
 - b. Membahas rancangan RKPD;
 - c. Penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD oleh unsur yang mewakili *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan.
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD
 - a. Proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD;
 - b. Difasilitasi oleh Bappeda Provinsi.
6. Penetapan RKPD
 - a. Ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. Dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan RKPD

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dimana dalam proses penyusunannya masih dalam suasana penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan kondisi kesejahteraan masyarakat, sehingga Daerah diharapkan mampu melakukan formulasi upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Maka tema yang diangkat dalam RKPD Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diarahkan juga pada dukungan Kabupaten Pemalang terhadap prioritas dan target pembangunan nasional dalam RKP serta prioritas dan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada RKPD Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat mendukung realisasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang serta mendukung proses pembangunan di kawasan Provinsi Jawa Tengah utamanya kawasan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang).

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA PPAS Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang akan dipakai sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Selanjutnya RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 juga akan dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dengan demikian setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan ditindaklanjuti dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Secara teknis penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Secara rinci dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Bagi Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Konvention Nomor 138 *Concerning Minimum Age For admission to Employment* (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

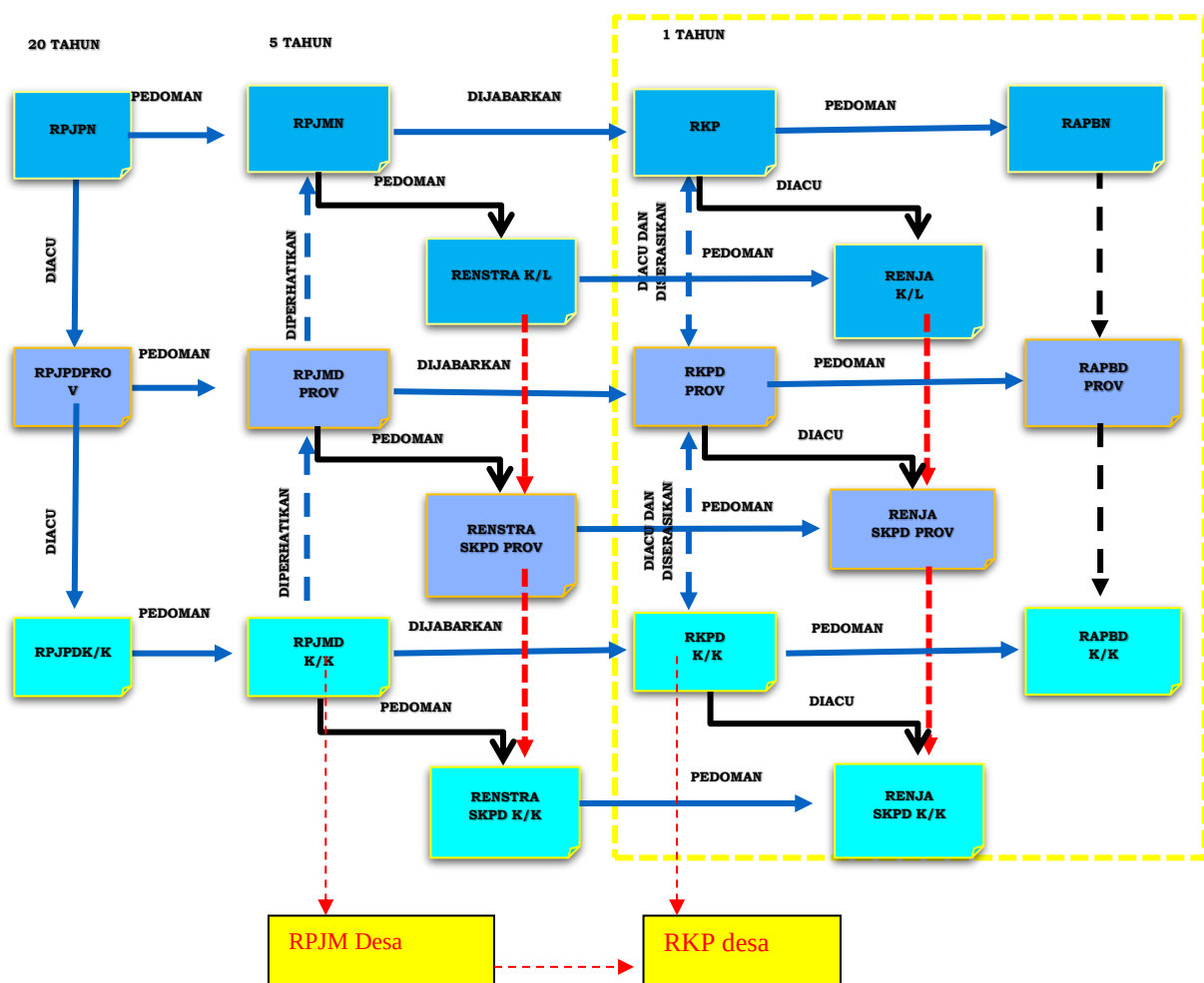
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
26. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi – Pemalang Tahun 2016 - 2036 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 28);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 168);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 129);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pemalang Tahun 2019 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 143);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6)
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor xxx);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.3.1. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKP Tahun 2023

RKP Tahun 2023 menjadi masukan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dimana isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, termasuk pelaksanaan Perpres 79 Tahun 2019 dijadikan acuan dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan pembangunan yang akan dilakukan Kabupaten Pemalang untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Pemalang. Melalui sistem aplikasi Krisna, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengusulkan prioritas pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan pusat dan prioritas kewenangan Daerah yang mendukung prioritas nasional.

1.3.2. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dimana isu-isu strategis dan program prioritas pembangunan di Jawa Tengah, termasuk rencana pengembangan kewilayahan BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang) menjadi salah satu acuan penentuan isu strategis dan prioritas pembangunan Daerah yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023, yang juga

diselaraskan dengan rencana pembangunan dalam penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

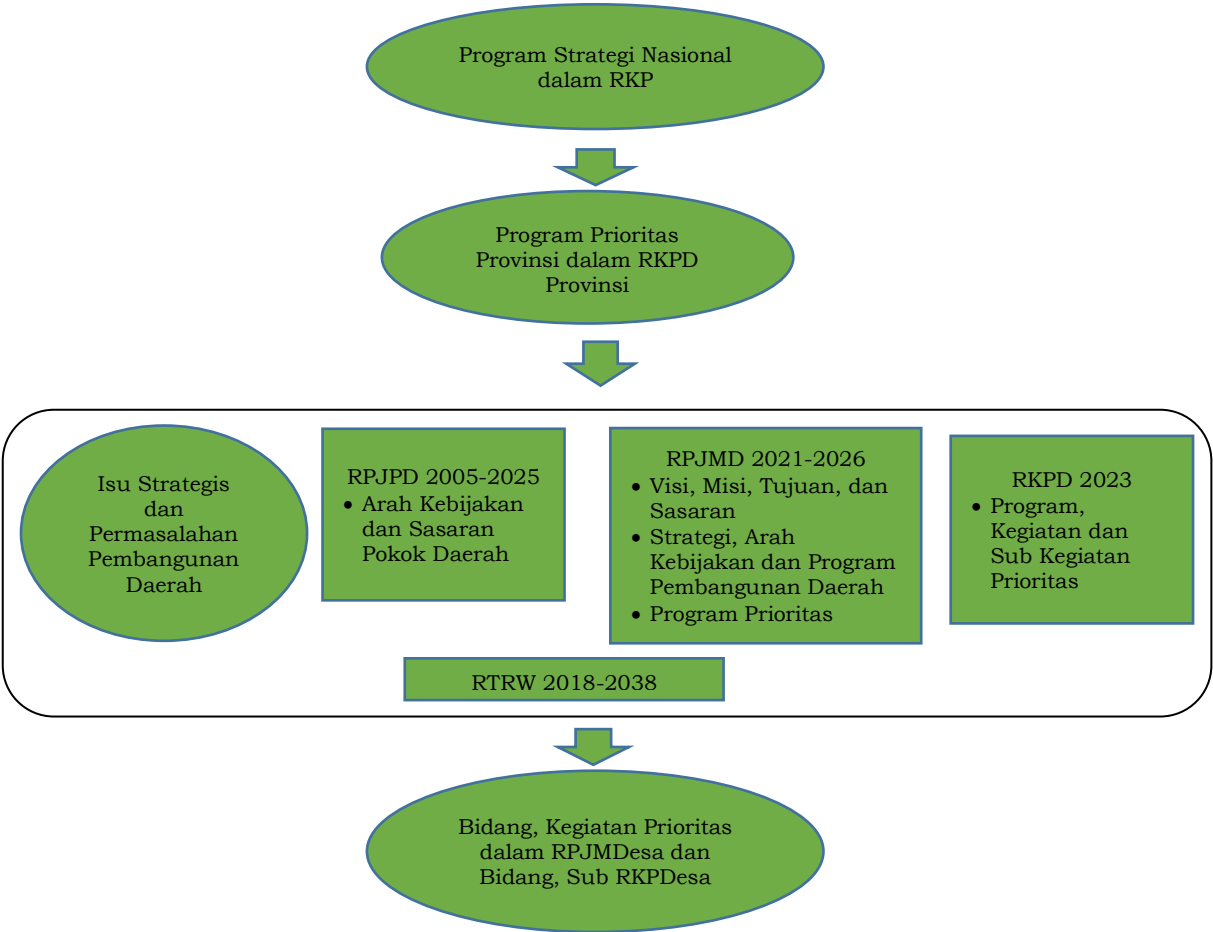
1.3.3. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Program prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023 merupakan program-program yang berkelanjutan dari RPJMD, yang selanjutnya dijabarkan pada RKPD dan disesuaikan dengan isu-isu strategis yang dirumuskan berdasar permasalahan-permasalahan pembangunan Daerah yang ada. Dengan demikian, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD yang dijabarkan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah guna mewujudkan visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**.

1.3.4. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan RKPDesa Tahun 2023

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan RKPDesa Tahun 2023, dimana isu-isu strategis dan program prioritas pembangunan Kabupaten menjadi salah satu acuan penentuan isu strategis dan prioritas pembangunan desa yang dituangkan dalam RKPDesa Tahun 2023, yang juga diselaraskan dengan rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi kepala desa.

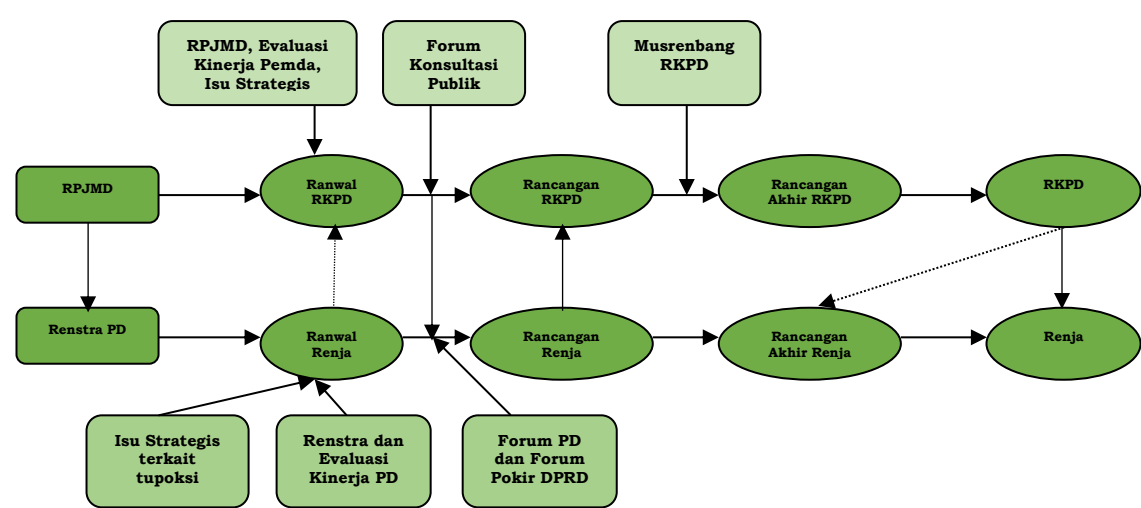
Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan desa dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.3
Sinergitas Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Program Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Desa

1.3.5. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Daerah yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2023 selain merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 juga berasal dari identifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan sektoral Tahun 2023 yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Selanjutnya permasalahan sektoral tersebut dirumuskan menjadi isu-isu strategis pembangunan Daerah Tahun 2023. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 yang disinkronkan dengan hasil Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah dan Forum Pokok-pokok Pikiran DPRD. Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi dan dikompilasi menjadi Rancangan RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, Rancangan RKPD Tahun 2023 dibahas dalam Musrenbang RKPD dan disepakati sehingga menjadi RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut :

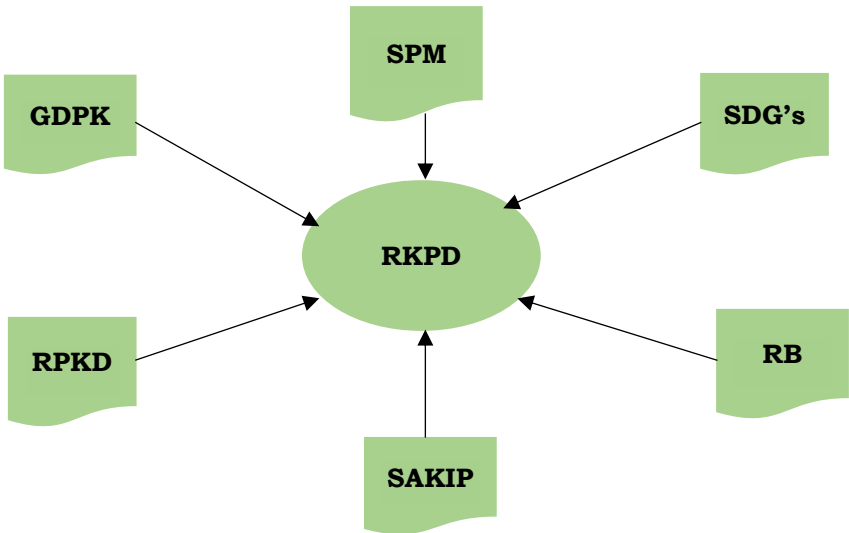


Gambar 1.4
Proses Iteratif Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah

1.3.6. Hubungan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dengan Dokumen Sektoral Lainnya

Beberapa dokumen sektoral yang menjadi bahan masukan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Sustainable Development Goals* (SDG's), Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, dan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan

(GDPK) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2045. Indikator kinerja SPM dan SDG's dijadikan acuan dalam penentuan indikator kinerja yang akan dicapai dalam RKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan RB dan SAKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2021 menjadi bahan masukan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sekaligus sebagai dasar perbaikan yang akan dilaksanakan di Tahun 2023. Target RPKD dan GDPK Kabupaten Pemalang Tahun 2023 menjadi target yang akan dicapai untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan kependudukan pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023.



Gambar 1.5
Hubungan RKPD dengan Dokumen Sektoral Lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah:

- 1. Menjabarkan program pembangunan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- 2. Menentukan arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023;
- 3. Mewujudkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah :

- 1. Sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- 2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 yang menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Kondisi Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, serta Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat Daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan diuraikan sesuai urusan.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII: PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

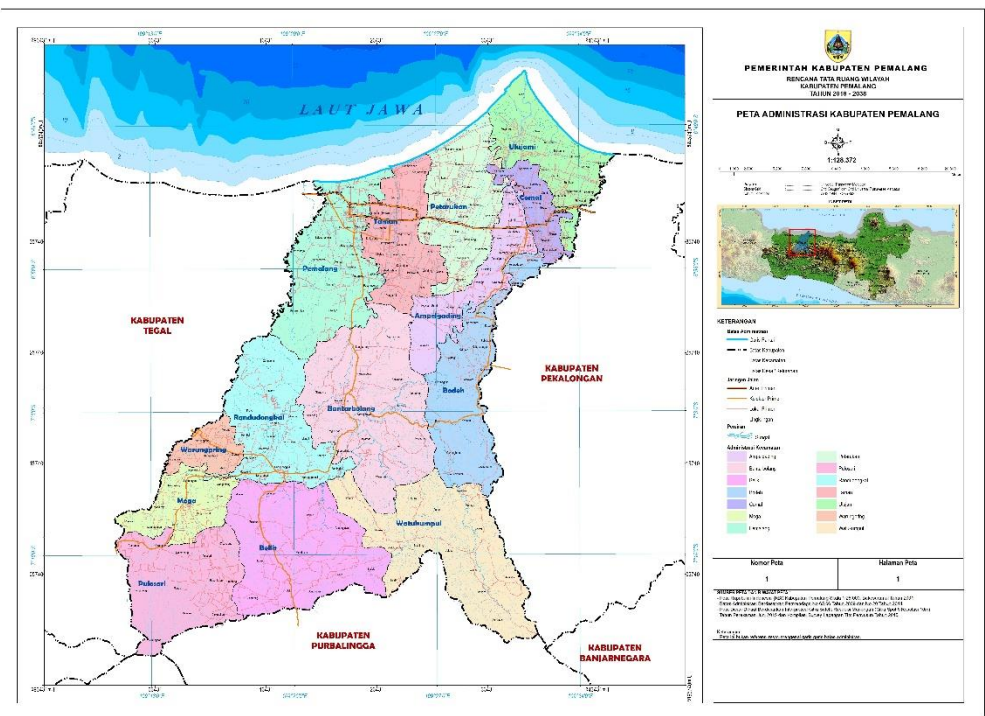
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

a. Kondisi Geografi dan Administrasi

Kabupaten Pemalang terletak antara 109°11'13.452"–109°35'45.969" Bujur Timur (BT) dan antara 6°46'22.17"–7°14'55.879" Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah 1.115,30 Km². Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pekalongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Tegal

Batas wilayah administrasi Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Peta RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 - 2038.

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa dengan ibu kota di kawasan perkotaan Pemalang. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang Tahun 2016-2036, Kabupaten Pemalang masuk dalam Kawasan Perkotaan Inti II yang merupakan pusat pengembangan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan, jasa pemasaran buah-buahan dan kawasan industri. Kegiatan jasa perkulakan pertanian tanaman pangan dan jasa pemasaran buah-buahan dipusatkan di Kecamatan Pemalang, sedangkan kegiatan industri dipusatkan di Kecamatan Comal.

Kabupaten Pemalang memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 76,63 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap, selain itu juga sangat strategis karena berada pada jalur pengembangan pembangunan poros Jakarta – Cirebon – Semarang – Surabaya. Kabupaten Pemalang dilintasi oleh jalur transportasi utama, meliputi :

- Jalan Tol Trans Jawa (Trans Pejagan – Pemalang dan Pemalang – Batang)
- Jalan Arteri Pantura Semarang – Cirebon
- Jalur Kereta Api Jakarta – Semarang – Surabaya

Kabupaten Pemalang terdiri dari 14 kecamatan, 211 desa, 11 kelurahan dan 1 desa persiapan di wilayah Kecamatan Belik, 1.307 RW serta 6.426 RT. Kecamatan yang memiliki wilayah administratif paling luas adalah Kecamatan Bantarbolang seluas 139,19 Km² (12,48%) dan yang paling sempit adalah Kecamatan Warungpring seluas 26,31 Km² (2,36%).

Secara rinci pembagian luas wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Pemalang Menurut Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)	Desa	Desa Persiapan	Kelurahan	RW	RT
1	Moga	41,40	3,71	10	-	-	60	305
2	Pulosari	87,52	7,85	12	-	-	55	292
3	Belik	124,54	11,17	12	1	-	85	393
4	Watukumpul	129,02	11,57	15	-	-	77	249
5	Bodeh	85,98	7,71	19	-	-	78	310
6	Bantarbolang	139,19	12,48	17	-	-	79	361
7	Randudongkal	90,32	8,10	18	-	-	74	494
8	Pemalang	101,93	9,14	13	-	7	186	840
9	Taman	67,41	6,04	19	-	2	182	823
10	Petarukan	81,29	7,29	19	-	1	101	812
11	Ampelgading	53,30	4,78	16	-	-	92	412
12	Comal	26,54	2,38	17	-	1	101	439
13	Ulujami	60,55	5,43	18	-	-	106	504
14	Warungpring	26,31	2,36	6	-	-	31	192
Jumlah		1.115,30	100	211	1	11	1.307	6.426

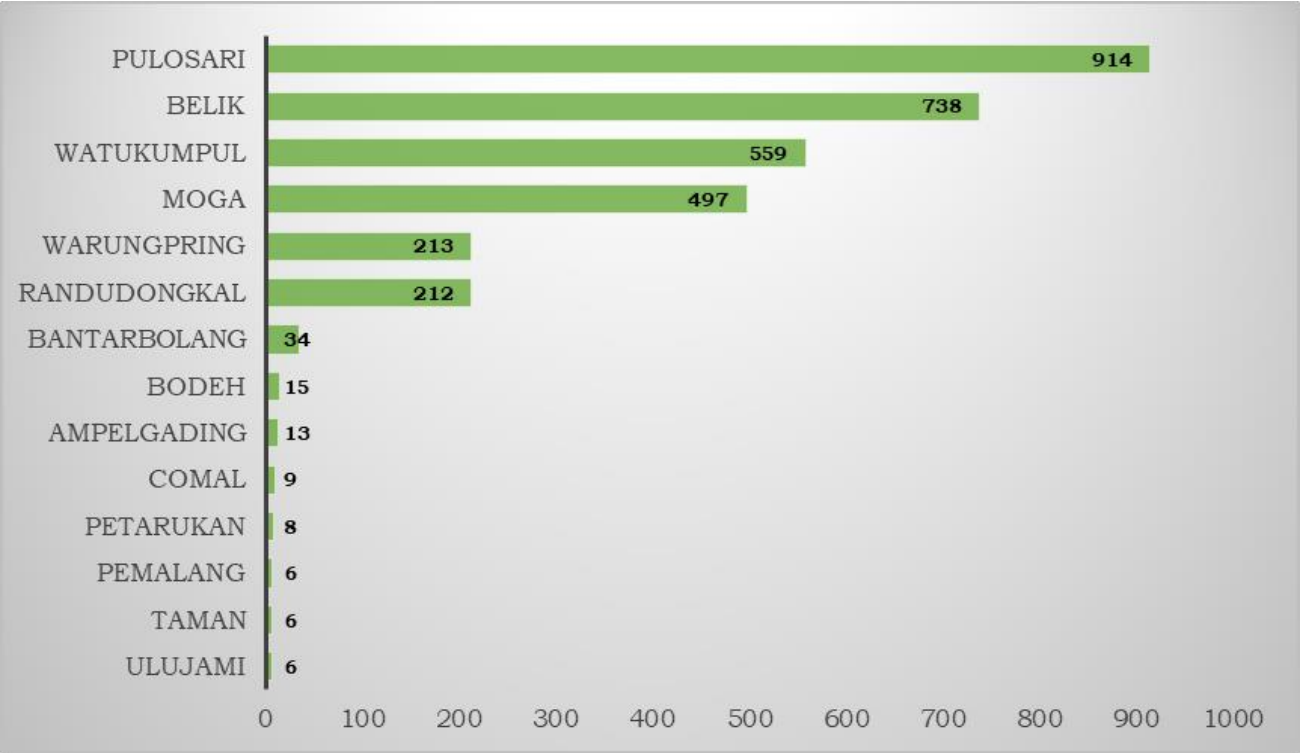
Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

b. Topografi

Secara topografis Kabupaten Pemalang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Daerah Dataran Pantai: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 1-5 meter di atas permukaan air laut (dpl); meliputi 17 desa dan 2 kelurahan yang terletak di bagian utara yang termasuk kawasan pantai.
2. Daerah Dataran Rendah: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 6-15 meter dpl yang meliputi 69 desa dan 9 kelurahan di bagian selatan dari Daerah Dataran Pantai.
3. Daerah Dataran Tinggi: daerah ini memiliki ketinggian rata-rata antara 16 – 212 meter dpl yang meliputi 77 desa, terletak di bagian tengah dan selatan.
4. Daerah Pegunungan yang terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a) Daerah dengan ketinggian antara 213 – 924 meter dpl, meliputi 39 desa yang terletak di bagian selatan.
 - b) Daerah berketinggian 925 meter dpl, meliputi 9 desa yang terletak di bagian selatan.

Secara rinci ketinggian wilayah di Kabupaten Pemalang berdasarkan letak ibu kota kecamatan adalah sebagai berikut:



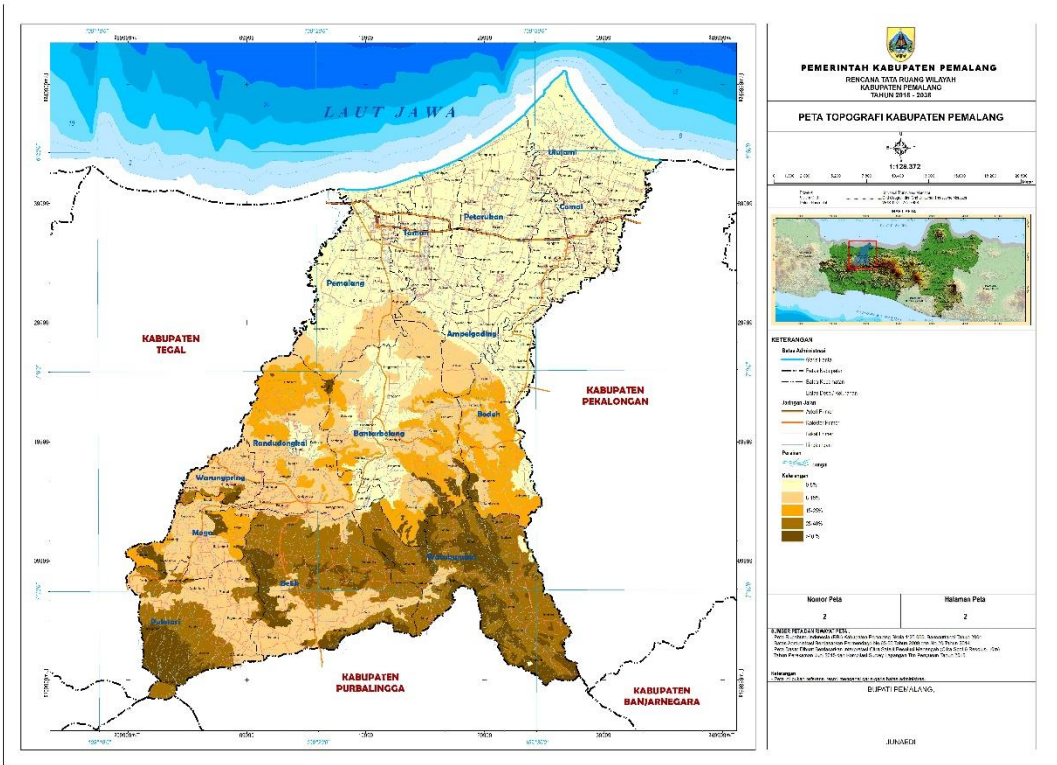
Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022
Gambar 2.2.
Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan (mdpl)

Kenampakan bentang alam wilayah Kabupaten Pemalang merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan yang memiliki kemiringan lereng beragam mulai 0% sampai lebih dari 40% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kemiringan 0 – 8%
Berpotensi untuk pengembangan tanaman lahan basah, pertanian lahan kering dan permukiman. Berada di seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Ulujami dan Comal, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman, Ampelgading dan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
2. Kemiringan 8 – 15%
Berpotensi untuk dikembangkan lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering. Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Moga, Warungpring, Randudongkal, dan Bantarbolang, sebagian di wilayah Kecamatan Pulosari dan Belik, sebagian kecil di Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Ampelgading, Taman dan Pemalang.
3. Kemiringan 15 – 25%
Berpotensi untuk pembudidayaan tanaman keras (tahunan) baik sebagai tanaman produksi maupun sebagai tanaman *buffer*. Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh dan Moga, sebagian kecil di Kecamatan Pemalang dan Ampelgading.
4. Kemiringan 25 – 40%
Berpotensi untuk pengembangan tanaman keras (tahunan) baik sebagai tanaman produksi maupun sebagai tanaman *buffer*. Tersebar di sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Warungpring.

5. Lebih dari 40%
 Berpotensi longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung. Tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Watukumpul, Kecamatan Belik dan Kecamatan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Bantarbolang, Moga dan Warungpring.

Peta kemiringan lahan Kabupaten Pemalang terlihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038
Gambar 2.3.

Peta Kemiringan Lahan Kabupaten Pemalang

c. Kondisi Geologi dan Struktur Tanah

Kondisi geologi Kabupaten Pemalang meliputi gambaran jenis tanah, struktur geologi, dan gerakan tanah yang mempengaruhi lingkungan fisik.

1. Jenis Tanah
 Jenis tanah di Kabupaten Pemalang secara garis besar terbagi menjadi endapan aluvial, kelompok litosol, latosol, regosol, andosol, dan podsolik, dengan rincian:
 - a) Jenis tanah aluvial terdapat di wilayah Kecamatan Taman Petarukan, Pemalang, Ampelgading, Bodeh, Comal, dan Ulujami.
 - b) Jenis tanah litosol dan kompleksnya terdapat di Kecamatan Pemalang, Randudongkal, Belik, Watukumpul, dan Bantarbolang.
 - c) Jenis tanah latosol dan sejenisnya terdapat di Kecamatan Bantarbolang, Pemalang, Moga, Pulosari, Randudongkal dan Belik.
2. Struktur Geologi
 Struktur geologi Kabupaten Pemalang terdiri dari struktur aluvium, formasi tapak, formasi rambatan, lava Gunung Slamet dan formasi haling dengan rincian:
 - a) Struktur aluvium terdapat di Kecamatan Ulujami, Comal, Ampelgading, Petarukan, Taman, Pemalang, bagian utara dan Bodeh.

- b) Formasi tapak terdapat di Kecamatan Pemalang bagian utara, Ampelgading, Bodeh dan bagian selatan Kecamatan Bantarbolang.
- c) Formasi rambatan terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik, Watukumpul, bagian utara Kecamatan Bodeh, dan sebagian Kecamatan Randudongkal.
- d) Struktur batuan produk gunung api – tak terpisahkan terdapat disebagian besar Kecamatan Randudongkal.
- e) Struktur batuan produk gunung api – lava terdapat di sebagian besar Kecamatan Belik dan Pulosari.
- f) Formasi halang terdapat di sebagian besar Kecamatan Watukumpul, sebagian Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal dan Pulosari.

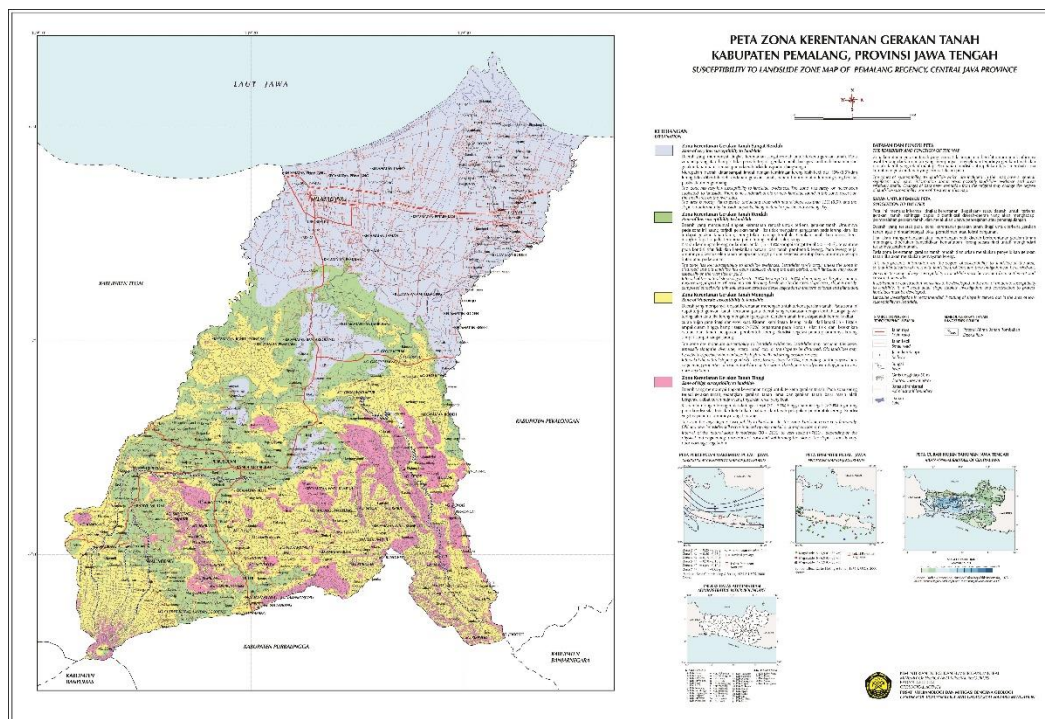
Kabupaten Pemalang mempunyai kandungan mineral cukup besar sehingga berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan kegiatan pertambangan mineral. Namun pengembangan kawasan pertambangan harus memperhatikan kelestarian lingkungan karena eksploitasi bahan tambang yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dan bencana alam.

3. Gerakan Tanah

Wilayah Kabupaten Pemalang mempunyai potensi bencana geologi gerakan tanah, yaitu:

- a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah, terdapat di:
Seluruh wilayah Kecamatan Petarukan, Comal dan Ulujami, sebagian besar wilayah Kecamatan Pemalang, Taman dan Ampelgading, sebagian wilayah Kecamatan Bantarbolang dan Bodeh dan sebagian kecil di wilayah Kecamatan Randudongkal.
- b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, terdapat di:
Sebagian besar di wilayah Kecamatan Bantarbolang, Randudongkal, Warungpring dan Moga, sebagian kecil wilayah Kecamatan Pulosari, Belik, Pemalang, Taman dan Ampelgading.
- c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah, terdapat di:
Sebagian besar wilayah Kecamatan Watukumpul, Belik, Pulosari, sebagian di wilayah Kecamatan Bodeh, Bantarbolang dan Moga, sebagian kecil di wilayah Kecamatan Pemalang, Ampelgading dan Warungpring.
- d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi, terdapat di:
Sebagian di wilayah Kecamatan Watukumpul, Bodeh, Belik dan Pulosari, sebagian kecil di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Moga.
Hal tersebut diatas disebabkan oleh struktur batuan/geologi, jenis tanah, gerakan vulkanis/aktifitas gunung berapi dan sesar. Sesar terdapat di Kecamatan Bodeh, Ampelgading, Bantarbolang dan Randudongkal. Disamping itu terdapat Sesar naik di Kecamatan Watukumpul dan sesar geser di Kecamatan Watukumpul dan Randudongkal.

Berikut adalah Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang:



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
Gambar 2.4.

Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Pemalang

d. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Pemalang terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sumber air, yaitu:

1. Air Permukaan

Wilayah Kabupaten Pemalang sebagian besar merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Comal yang memiliki anak sungai sekitar 85 buah yang mengalir dari hulu sungai di kaki Gunung Slamet sampai hilir bermuara di Laut Jawa. Sungai Comal merupakan sungai yang paling besar pengaruhnya di Kabupaten Pemalang dengan lebar lebih dari 15 meter dan panjang sekitar 91 Km. Wilayah yang dialiri Kecamatan Moga, Randudongkal, Bantarbolang, Bodeh, Ampelgading, Comal dan Ulujami.

Sedangkan sungai besar lainnya yang cukup berpengaruh adalah :

- Sungai Waluh: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 56,1 Km di Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Taman
- Sungai Layangan: lebar lebih 15 meter panjang sekitar 8,9 Km di Kecamatan Bodeh
- Sungai Polaga: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 33,3 Km di Kecamatan Belik, Watukumpul dan Bantarbolang
- Sungai Lumeneng: Lebar 10 – 15 meter panjang sekitar 20,4 Km di Kecamatan Watukumpul dan Bantarbolang
- Terdapat sekitar 85 sungai dengan lebar kurang dari 10 meter yang tersebar dari daerah hulu sampai hilir
- Disamping itu terdapat Sungai Rambut yang sebagian besar alirannya menjadi perbatasan Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Tegal.

2. Mata Air

Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber air berupa mata air yang tersebar di beberapa tempat. Beberapa sumber mata air yang selama ini telah dimanfaatkan oleh PDAM, antara lain:

- a) Mata air Telaga Gede yang terletak di Desa Sikasur/ Desa Persiapan Sodong Besari Kecamatan Belik. debit 1200 Lt/detik, dimanfaatkan 400 Lt/detik kondisi tidak terpengaruh musim.
- b) Mata Air Moga lokasi di Desa Moga Kecamatan Moga dengan debit maksimal 750 Lt/detik dimanfaatkan 200 Lt/detik.
- c) Mata Air Sumur Wadon Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal debit maksimal 200 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/ detik.
- d) Mata Air Suci di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 150 Lt/detik dimanfaatkan 10 Lt/detik.
- e) Mata Air Cipete di Desa Gendoang Kecamatan Moga debit maksimal 75 Lt/detik dimanfaatkan 35 Lt/detik
- f) Mata Air Cipanas Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 75 Lt/detik dimanfaatkan 37.50 lt/detik
- g) Mata Air Si Cipluk Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 30 Lt/detik dimanfaatkan 7.50 Lt/detik
- h) Mata Air Bulakan Desa Gambuhan Kecamatan Pulosari debit maksimal 32 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- i) Mata Air Kemiri Dukuh Sodong Desa Sikasur Kec Belik debit maksimal 30 Lt/detik dimanfaatkan 20 Lt/detik
- j) Mata Air Kebanggan di Desa Kebanggan Kecamatan Moga debit Maksimal 300 Lt/detik dimanfaatkan 150 Lt/detik

3. Air Tanah

Sumber air tanah di Kabupaten Pemalang dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a) Air Tanah Dangkal
Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang, pada daerah dekat pantai kualitas kurang baik karena bersifat payau. Ketersediaan air tanah dangkal sangat dipengaruhi air hujan.
- b) Air Tanah Dalam berupa Cekungan Air Tanah (CAT)
Terdapat 2 (dua) CAT yaitu CAT Bumiayu meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pulosari, Moga, Warungpring dan Randudongkal dan CAT Pekalongan – Pemalang meliputi daerah Pantura Pemalang sampai dengan sebagian wilayah Kecamatan Bodeh dan Bantarbolang.

e. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Pemalang mempunyai iklim tropis dengan dua musim silih berganti sepanjang tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau, dengan suhu rerata berkisar antara 24°C sampai dengan 31°C. Jumlah hari hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai rata – rata 159 yang terpantau dari 18 Stasiun pemantau hujan. Jumlah hari hujan terendah pada bulan Juli dan Agustus rata-rata hanya 4 hari, sedangkan tertinggi pada bulan Desember sejumlah 23 hari hujan. Jumlah curah hujan di Kabupaten Pemalang pada tahun 2020 mencapai 355 mm yang terpantau dari rata – rata 18 stasiun pemantau. Adapun bulan dengan curah hujan paling rendah adalah bulan Agustus sebesar 28mm. Sedangkan curah hujan paling tinggi pada bulan Februari sebesar 759 mm. Jumlah hari hujan dan curah hujan per bulan di Kabupaten Pemalang dirinci berdasarkan masing-masing stasiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.
Jumlah Hari Hujan Per Bulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 (hari)

No	Stasiun	Hari Hujan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
1	Kejene	21	25	20	16	9	8	5	0	6	13	16	20	159
2	Warungpring	22	25	23	18	12	12	6	5	8	17	18	26	192
3	Kecepit	22	25	22	21	14	7	4	4	8	14	19	23	183
4	Randudongkal	21	24	19	17	11	7	5	4	5	11	18	22	164
5	Nambo	22	19	18	17	11	6	5	4	6	13	16	22	159
6	Moga	20	16	18	15	13	7	2	1	4	12	17	13	138
7	Pulosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Belik	29	23	29	24	16	20	7	6	14	28	26	29	251
9	Banjardawa	18	20	18	11	7	0	2	4	2	5	10	16	113
10	Sungapan	21	24	20	20	10	4	3	5	7	11	18	23	166
11	Karangsuci	19	23	18	20	10	4	3	5	7	12	18	23	162
12	Klareyan	18	21	17	14	8	2	6	4	4	3	12	18	127
13	Karangtengah	15	17	18	11	7	1	4	3	5	8	12	22	123
14	Sokawati	20	23	21	18	9	3	6	3	11	12	16	20	162
15	Bantarbolang	19	23	18	15	9	7	4	0	7	14	20	24	160
16	Pedagung	21	17						0	0	14	22	24	98
17	Watukumpul	25	24	28	24	15	12	3	4	7	21	20	26	209
18	Sipedang	27	24	28	24	17	15	3	5	7	22	20	28	220
19	Bongas	26	24	29	24	18	14	5	5	9	23	20	29	226
Rata – Rata		21	22	21	18	12	8	4	4	7	14	18	23	159

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Tabel 2.3.
Curah Hujan Perbulan Berdasarkan Stasiun Pemantauan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 (mm)

No.	Stasiun	Curah Hujan (mm)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kejene	794	627	455	384	304	57	70	R	142	142	236	381
2	Warungpring	741	570	756	436	244	100	74	35	111	190	240	689
3	Kecepit	513	853	646	503	246	35	81	50	112	185	360	561
4	Randudongkal	469	874	544,5	583	245	44	50	25	131	229	409	665
5	Nambo	586	649	344	468	360	78	89	37	116	239	436	609
6	Moga	927	1339	746	428	467	199	75	30	144	494	963	345
7	Pulosari	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
8	Belik	737	830	1118	546	471	279	112	46	148	832	1134	1606
9	Banjardawa	206	323	260	41	92	R	35	18	13	58	174	354
10	Sungapan	438	515	341	215	118	62	50	32	131	149	290	523
11	Karangsuci	434	544	260	232	118	60	50	31	129	179	289	513
12	Klareyan	580	952	319	170	300	54	97	20	51	21	106	445
13	Karangtengah	534	522	370	166	190	39	41	53	85	57	156	442
14	Sokawati	572	539	373	333	77	44	57	12	179	277	227	311
15	Bantarbolang	536	794	456	242	216	113	176	R	254	355	46	533
16	Pedagung	589	754	R	R	R	R	R	R	R	284	541	635
17	Watukumpul	796	1039	888	442	273	87	27	25	42	411	573	1312
18	Sipedang	854	920	826	481	180	296	22	27	46	416	610	932
19	Bongas	947	1022	1034	519	32	152	30	28	61	481	654	1157
Rata - Rata		625	759	573	364	247	105	67	28	111	278	436	667

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Dalam kurun waktu Tahun 2016-2020, rata-rata curah hujan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 170,21 mm dan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 355 mm, hal ini menyebabkan pada Tahun 2020 banyak daerah mengalami banjir, terutama daerah pantai yaitu Kecamatan Ulujami yang membuat sebagian besar sawah dan tambak terendam air.

Tabel 2.4.

Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2020

No	Bulan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	312	503	365	265	625
2	Februari	473	369	377	426	759
3	Maret	309	263	260	318	573
4	April	306	301	343	355	364
5	Mei	231	134	175	127	247
6	Juni	299	148	78	13	105
7	Juli	157	40	5	12	67
8	Agustus	95	4	-	1	28
9	September	389	66	11	8	111
10	Oktober	325	146	58	31	278
11	November	381	322	279	149	436
12	Desember	493	395	343	338	667
Rata-rata		314,1	224,29	191,10	170,21	355

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

f. Penggunaan Lahan

Sekitar 32,58% lahan di Kabupaten Pemalang digunakan untuk sawah, dimana lebih dari 80%-nya berupa sawah irigasi teknis. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian lahan sawah menjadi salah satu aktifitas ekonomi masyarakat yang dominan dan merupakan sektor terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Pemalang Tahun 2021. Sedangkan penggunaan lahan untuk bangunan dan pekarangan sekitar 19,57%. Disamping itu, terdapat penggunaan lahan berupa tambak di kawasan pesisir yang secara ekonomi cukup berpengaruh. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Pemalang berdasarkan kecamatan.

Tabel 2.5.

Penggunaan Lahan Kabupaten Pemalang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Lahan (Km2)							Jumlah
	Sawah	Bukan Sawah						
Bangunan & Pekarangan		Tegalan/ Kebun	Hutan Rakyat	Tambak/ Kolam	Perkebunan	Lain-Lain		
Moga	12,51	11,78	7,00	0,55	2,48	1,90	5,18	41,40
Warungpring	8,86	9,02	3,85	1,81	0,88	0,65	1,25	26,31
Pulosari	2,40	10,11	41,29	12,4	0,68	0,75	31,04	87,52
Belik	24,74	23,49	28,11	3,84	0,03	1,12	43,21	124,54
Watukumpul	33,26	16,98	18,62	6,27	0,05	0	53,85	129,02
Bodeh	26,50	15,23	7,41	0	2,45	0	34,40	90,32
Bantarbolang	26,96	18,93	21,06	3,65	0	0	68,59	139,19
Randudongkal	33,63	13,79	9,83	0,94	0	1,01	31,12	90,32
Pemalang	41,23	17,08	6,82	0	2,14	0	34,67	101,93
Taman	37,62	17,39	1,45	0	3,01	0,07	7,87	67,41
Petarukan	52,52	24,78	3,1	0	0,89	0	0	81,29
Ampelgading	12,15	13,26	0,76	0,37	0	0	0	26,54
Comal	28,58	9,13	0,54	0	0	0	15,05	53,30
Ulujami	22,40	17,27	12,13	2,25	2,70	3	0	60,55
Jumlah	363,35	218,25	161,96	20,91	15,31	8,50	326,22	1.115,30

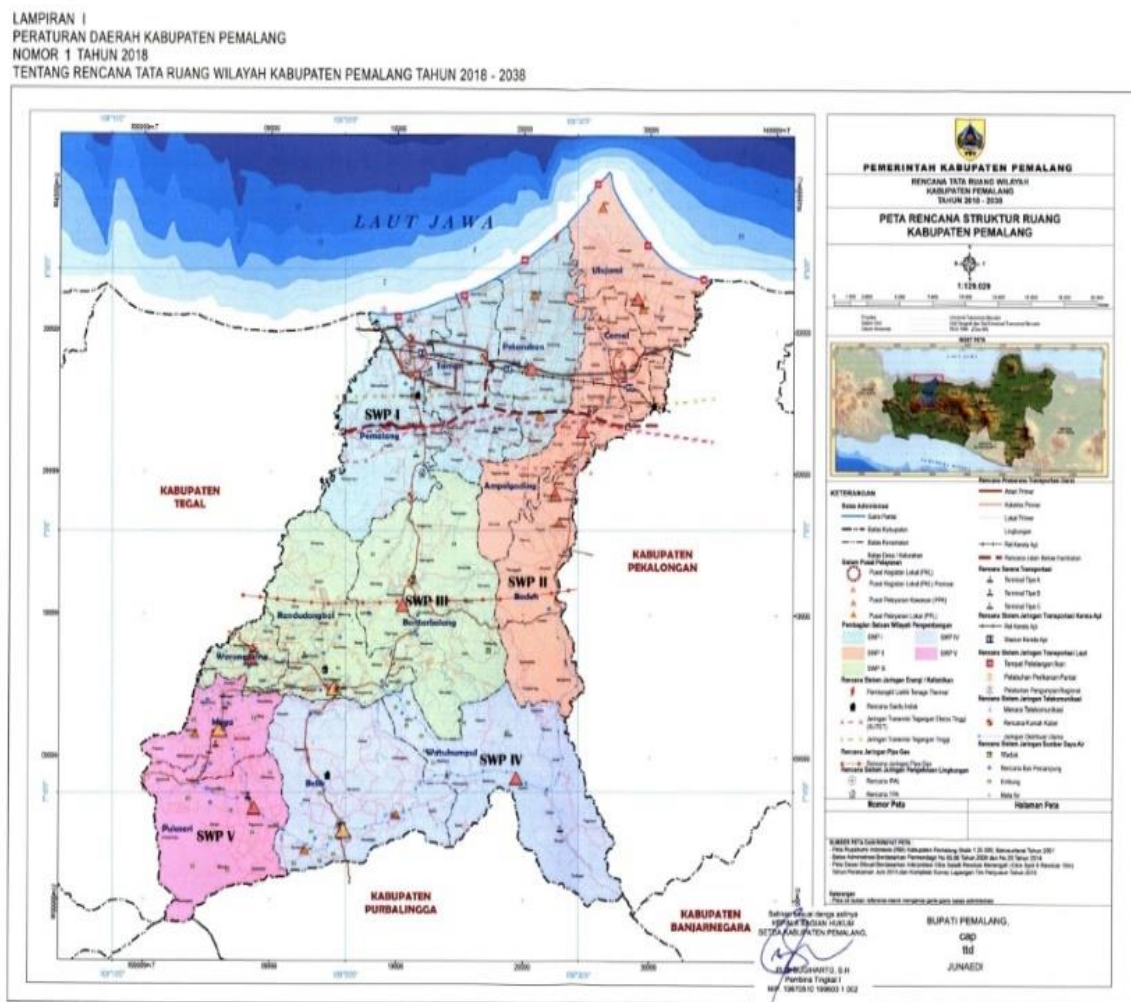
Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

g. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Pemalang dilakukan melalui beberapa kebijakan penataan ruang yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, antara lain:

1. pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah;
2. pembangunan prasarana daerah;
3. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
4. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. pengembangan kawasan perdagangan yang mampu menjadi pusat pemasaran hasil komoditas daerah;
6. pengembangan industri; pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan, dan pengembangan kawasan strategis daerah.

Berikut peta rencana struktur ruang Kabupaten Pemalang

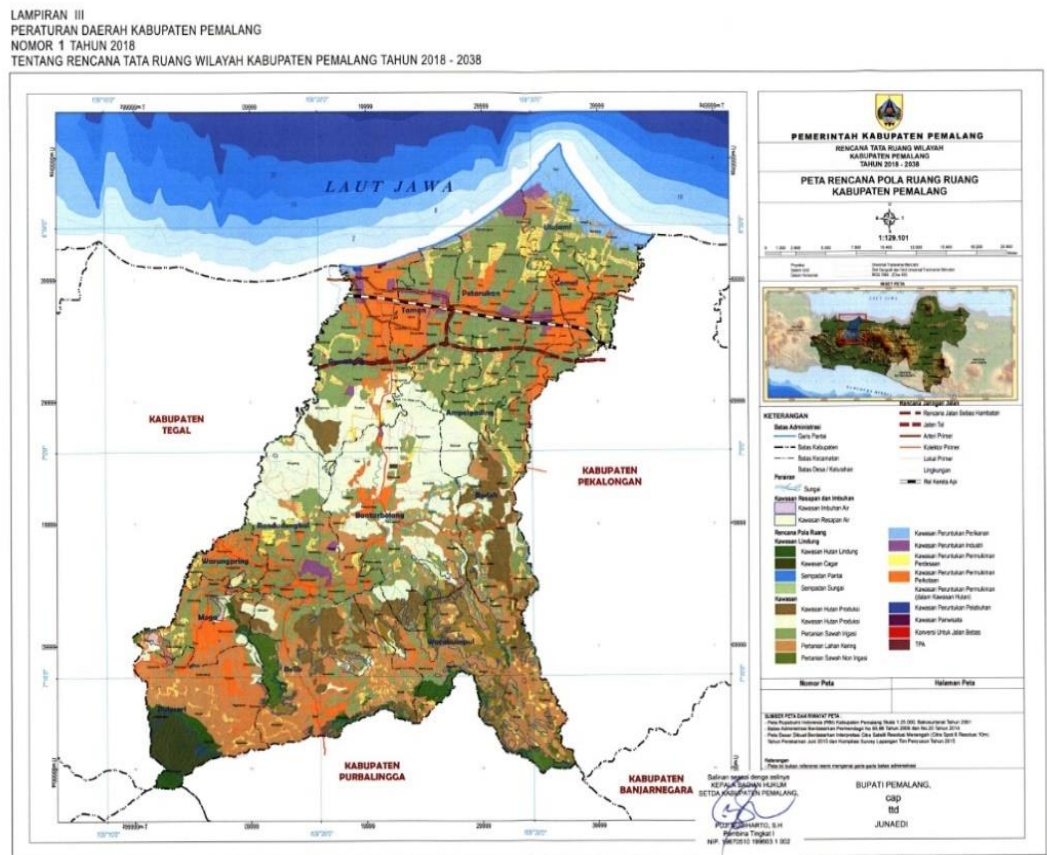


Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038

Gambar 2.5.

Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Berikut ini disampaikan peta pola ruang Kabupaten Pemalang



Sumber: RTRW Kab. Pemalang Tahun 2018 – 2038
Gambar 2.6.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038

Wilayah Kabupaten Pemalang secara umum terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung
Kawasan yang dimaksud berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung, dengan luas ± 5.395 hektar. Tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Moga, Pulosari, dan Watukumpul.
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
Kawasan ini berupa kawasan resapan air, direncanakan luas ± 7.589 hektar. Tersebar di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Bantarbolang, Belik, Bodeh, Moga, Pemalang, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, dan Watukumpul.
- c. Kawasan Perlindungan Setempat
Kawasan yang dimaksud terdiri dari sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi, dan ruang terbuka hijau perkotaan.
 - Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari garis pantai, tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

- Sempadan sungai meliputi sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan, dan sungai yang terpengaruh pasang air laut. Tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pemalang yang dilalui Sungai Waluh beserta 45 anak sungai, Sungai Rambut beserta 15 anak sungai, Sungai Comal beserta 85 anak sungai.
 - Sempadan saluran irigasi meliputi saluran irigasi bertanggul, saluran irigasi tidak bertanggul, saluran irigasi yang terletak pada lereng/tebing, saluran pembuangan irigasi, dan bangunan irigasi. Baik kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten.
 - Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan meliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu. Rencana pengembangan seluas ± 4.563 hektar di seluruh kawasan perkotaan yang berada pada 14 kecamatan.
- d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
- Kawasan ini terdiri dari cagar alam dan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Cagar alam meliputi Cagar Alam Bantarbolang di Desa Kebongede dengan luas 24,1968 hektar, Cagar Alam Moga di Desa Banyumudal dengan luas 3,8824 hektar, dan Cagar Alam Curug Bengkawah di Desa Sikasur dengan luas 2,4867 hektar. Sedangkan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi:
- Situs Plawangan di Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang;
 - Gedung Badan Kesbangpol (Gedung Landraad), gedung SMA Negeri 3 Pemalang (Gedung MULO), gedung Dinas Perikanan, bekas Gedung Badan Kepegawaian Daerah (Gedung ELS), Kompleks Makam Masjid Agung Pemalang dan Kompleks Makam Yudhanegara di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Makam Belanda di Kelurahan Widuri Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Pabrik Gula Sumberharjo di Desa Banjarmulya Kecamatan Pemalang;
 - Kompleks Dinas Kesehatan dan Kompleks Stasiun Kereta Api Pemalang di Kelurahan Pelutan Kecamatan Pemalang;
 - Gedung Pegadaian Pemalang di Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang;
 - Gedung eks Koramil Taman di Kelurahan Beji Kecamatan Taman;
 - Kompleks Stasiun Kereta Api Petarukan di Desa Serang Kecamatan Petarukan;
 - Gedung UPPU Wilayah V dan Gedung eks Koramil Petarukan (eks Pabrik Gula Petarukan) di Kelurahan Petarukan;
 - Gedung Pegadaian Comal di Kelurahan Purwoharjo Kecamatan Comal;
 - Kompleks Stasiun Kereta Api Comal di Desa Purwosari Kecamatan Comal;
 - Kolam Renang Comal Baru di Desa Banglarangan Kecamatan Ampelgading;
 - Situs Watu Tumpeng di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal;
 - Pos Penjagaan Kebun Kakao di Desa Semingkir Kecamatan Randudongkal;
 - Watu Tugu (Menhir) di Desa Pepedan Kecamatan Moga;

- Kompleks PTPN IX Kebun Semugih, Gedung Polsek, Gereja Kristen Jawa Pendopo Kecamatan Moga dan Arca Ganesha di Pemandian Moga di Desa Banyumudal Kecamatan Moga;
 - Pendopo Kemantren di Desa Warungpring Kecamatan Warungpring;
 - Kubur Batu Prasejarah (Candi Arca) di Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul;
 - Situs Gunung Jimat (Sigogok) di Desa Mendelem Kecamatan Belik;
- e. Kawasan Rawan Bencana Alam
- Kawasan yang dimaksud antara lain :
- Kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi yang tersebar di 4 (empat) kecamatan;
 - Kawasan rawan banjir dan genangan di 10 (sepuluh) kecamatan;
 - Kawasan rawan kekeringan yang terdiri dari rawan kekeringan air bersih dan rawan kekeringan pertanian;
 - Kawasan rawan angin topan tersebar di 6 (enam) kecamatan;
 - Kawasan rawan tanah longsor meliputi 5 (lima) kecamatan;
 - Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - Kawasan rawan bencana lainnya meliputi kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- f. Kawasan Lindung Geologi
- Kawasan ini mencakup kawasan rawan bencana alam geologi berupa kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi 2 (dua) kecamatan yaitu Pulosari dan Belik yang berada di kaki Gunung Slamet. Serta kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi kawasan imbuhan air tanah direncanakan dengan luas ± 2.376 hektar tersebar di 5 (lima) kecamatan antara lain Randudongkal, Warungpring, Moga, Pulosari, dan Belik. Sedangkan kawasan sempadan mata air ditetapkan sekurang-kurangnya dengan radius 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.
- g. Kawasan Lindung Lainnya
- Kawasan yang dimaksud berupa kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan dan perairan yang berpotensi di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

2. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya-guna dan berhasil-guna bagi kehidupan manusia. Kawasan budidaya terdiri atas :

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan yang dimaksud direncanakan tetap seluas ± 27.373 hektar meliputi kawasan hutan produksi terbatas direncanakan seluas 10.530 hektar yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Pemalang, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul. Serta kawasan hutan produksi tetap direncanakan dengan luas ± 16.843 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Moga, Pulosari, Randudongkal, Warungpring, Belik, dan Watukumpul.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan ini mencakup kawasan lahan basah dan kawasan lahan kering, dengan rincian:

- Kawasan lahan basah terdiri dari kawasan sawah irigasi direncanakan dengan luas ± 30.301 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kawasan sawah bukan irigasi direncanakan dengan luas ± 841 hektar meliputi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Ampelgading, Bodeh, Warungpring, Moga, Pulosari, Belik, dan Watukumpul;
- Kawasan lahan kering direncanakan dengan luas ± 22.114 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pemalang. Pemanfaatannya dapat berupa tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman hutan rakyat, peternakan, perikanan, dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Sebagai upaya untuk melindungi kawasan peruntukan pertanian, maka ditetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit seluas ± 34.299 hektar meliputi :

- 1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Paling sedikit ditetapkan seluas ± 30.299 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
- 2) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) merupakan lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang. Paling sedikit ditetapkan ± 4.000 hektar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.

c. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan yang dimaksud adalah budidaya tambak, budidaya air tawar, fasilitas perikanan tangkap, dan pengolahan perikanan, meliputi:

- Budidaya tambak direncanakan seluas ± 2.288 hektar meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami;
- Budidaya air tawar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang;
- Fasilitas perikanan tangkap berupa pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai dan TPI di Kecamatan Taman, dan peningkatan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan serta sarana dan prasarana TPI yang terdapat di 3 (tiga) kecamatan yaitu Pemalang, Petarukan, dan Ulujami;
- Pengolahan perikanan meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, dan Ulujami.

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan ini meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan pengusahaan panas bumi, meliputi:

- Pertambangan minyak dan gas bumi berupa daerah terbuka meliputi 9 (sembilan) kecamatan;
- Pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan (pasir-batu, tanah urug dan tanah liat) dan mineral bukan logam serta batuan lainnya;

- Pengusahaan panas bumi berupa Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Panas Bumi Baturaden dan WKP Panas Bumi Guci berlokasi di kawasan sekitar Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari.
- e. Kawasan Peruntukan Industri
- Kawasan ini merupakan tempat pemusatan kegiatan industri meliputi industri besar, menengah, dan kecil/mikro, direncanakan dengan luas $\pm$ 1.909 hektar yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ulujami, Ampelgading, Bantabolang, Randudongkal, Warungpring, Moga, dan Belik.
- Pengembangan industri besar dan menengah direncanakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang (Kota Industri/KOIN). Industri besar dan menengah harus berlokasi di kawasan peruntukan industri atau berupa kawasan industri, yang meliputi sebagian wilayah dari 5 (lima) kecamatan yaitu Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, dan Randudongkal.
- Sedangkan untuk industri kecil/mikro dapat dikembangkan pada kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertanian lahan kering (pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan atau pertambangan) dan kawasan peruntukan perikanan (untuk pengolahan hasil perikanan).
- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- Kawasan yang dimaksud terdiri dari pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan, dengan rincian:
- Pariwisata alam, meliputi :
 - 1) Kawasan Wisata Pantai Widuri di Kecamatan Pemalang;
 - 2) Kawasan Wisata Pantai Joko Tingkir dan Sumur Pandan di Kecamatan Petarukan;
 - 3) Kawasan Wisata Pantai Blendung di Kecamatan Ulujami;
 - 4) Kawasan Wisata Goa Gunung Wangi di Kecamatan Bantabolang;
 - 5) Kawasan Wisata Gunung Gajah dan kawasan arung jeram di Kecamatan Randudongkal;
 - 6) Kawasan Wisata Telaga Silating, kawasan Curug Bengkawah, Bukit Mendelem, Curug Barong, Curug Lawang dan Wanawisata Candi Batur di Kecamatan Belik;
 - 7) Kawasan Wisata Wanawisata Cempaka Wulung dan Curug Sibedil di Kecamatan Moga;
 - 8) Kawasan Wisata Telaga Rengganis dan Bukit Banowati di Kecamatan Watukumpul;
 - 9) Kawasan perbukitan dan jalur pendakian Gunung Slamet di Kecamatan Pulosari;
 - 10) Kawasan pesisir, estuari dan hutan mangrove di Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman, Kecamatan Petarukan, dan Kecamatan Ulujami.
 - Pariwisata budaya, meliputi :
 - 1) gelar prosesi hari jadi Kabupaten;
 - 2) upacara tradisi menjamas pusaka peninggalan Syekh Pandanjati di Desa Bantabolang Kecamatan Bantabolang;
 - 3) Makam Syekh Maulana Syamsudin di Kelurahan Sugihwaras Kecamatan Pemalang;

- 4) Makam Pangeran Benowo Di Desa Penggarit Kecamatan Taman;
 - 5) Makam Mbah Palintaran di Desa Bantarbolang;
 - 6) Makam Syekh Jambu Karang (Sigeseng) di Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan;
 - 7) Makam Syekh Maulana Magribi di Desa Pesantren Kecamatan Ulujami;
 - 8) Baritan/ sedekah laut tersebar di kawasan pesisir.
 - 9) Seni Kerangkeng, sintren, lais, jaran Kepang dan kuntulan.
- Pariwisata buatan meliputi :
 - 1) Kawasan Wisata Gardu Pandang Gunung Slamet;
 - 2) Taman Wisata Air Pantai Widuri;
 - 3) Kawasan Wisata Moga;
 - 4) Desa - desa Wisata (DEWI).
- g. Kawasan Peruntukan Permukiman
- Kawasan ini meliputi kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di ibukota kecamatan dan kawasan permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Berupa fasilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang meliputi markas Komando Distrik Militer (Kodim) di Perkotaan Pemalang, markas Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan, dan pangkalan satuan Angkatan laut di Kecamatan Pemalang.
- Juga fasilitas Kepolisian Republik Indonesia meliputi Kantor Kepolisian Resor (Polres) di Perkotaan Pemalang, Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh kecamatan, dan Kantor Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Ulujami.
- i. Kawasan Peruntukan Pelabuhan
- Kawasan ini berupa kawasan Pelabuhan pengumpan regional yang berada di Kecamatan Pemalang.

h. Wilayah Rawan Bencana

Letak geografis Kabupaten Pemalang beserta kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis yang melingkupinya menyebabkan terdapat kawasan yang berpotensi bencana. Kabupaten Pemalang merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data BNPB Tahun 2021, Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Pemalang sebesar 146 masuk pada kategori tinggi. Sedangkan berdasarkan RTRW Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pemalang dapat diidentifikasi ke dalam 7 (tujuh) kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi, yaitu kawasan pantai Kecamatan Pemalang (Desa Lawangrejo, Kelurahan Sugihwaras, Kelurahan Widuri, dan Desa Danasari), Kecamatan Taman (Desa Asemdayong), Kecamatan Petarukan (Desa Nyamplungsari, Desa Klareyan, Desa Kendalrejo, dan Kecamatan Ulujami meliputi Desa Pesantren, Mojo, Limbangan, Ketapang, Blendung, Kaliprau, Kertosari, dan Tasikrejo).
2. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan, yaitu kawasan rawan banjir yang meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, Ulujami, Bodeh, Bantarbolang, Watukumpul, dan Belik. Sedangkan kawasan

- rawan genangan meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal, dan Ulujami.
3. Kawasan Rawan Kekeringan yang dibedakan kekeringan air bersih dan kekeringan pertanian, dimana kekeringan air bersih meliputi Kecamatan Pulosari dan Belik sedangkan kekeringan pertanian meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Petarukan, Comal, Ampelgading, Ulujami, dan Bodeh.
 4. Kawasan Rawan Angin Topan, yaitu meliputi Kecamatan Pemalang, Taman, Warungpring, Ampelgading, Bodeh, Bantarbolang, Randudongkal, Belik, dan Watukumpul.
 5. Kawasan Rawan Tanah Longsor, meliputi Kecamatan Randudongkal, Moga, Pulosari, Watukumpul, Belik, serta meliputi kawasan sepanjang alur Sungai Comal, Sungai Waluh, Sungai Polaga, Sungai Lumeneng, Sungai Layangan, dan Sungai Rambut.
 6. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi yaitu kawasan rawan letusan gunung berapi yang meliputi kawasan Kecamatan Pulosari dan Kecamatan Belik.
 7. Kawasan Rawan Bencana Lainnya, meliputi kawasan rawan petir dan kawasan rawan kebakaran yang tersebar di daerah.

Berdasarkan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2023 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Kabupaten Pemalang juga terdapat kawasan rawan bencana gempa bumi, yaitu 4 (empat) kecamatan memiliki resiko sedang (Pemalang, Taman, Belik, dan Bodeh) dan 10 (sepuluh) kecamatan lainnya memiliki resiko rendah.

Kabupaten Pemalang juga memiliki risiko bencana tanah longsor, angin kencang/topan, dan kebakaran yang cukup tinggi, terlihat dari frekuensi kejadian bencana alam yang cukup tinggi setiap tahunnya yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Frekuensi Kejadian Bencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017–2021

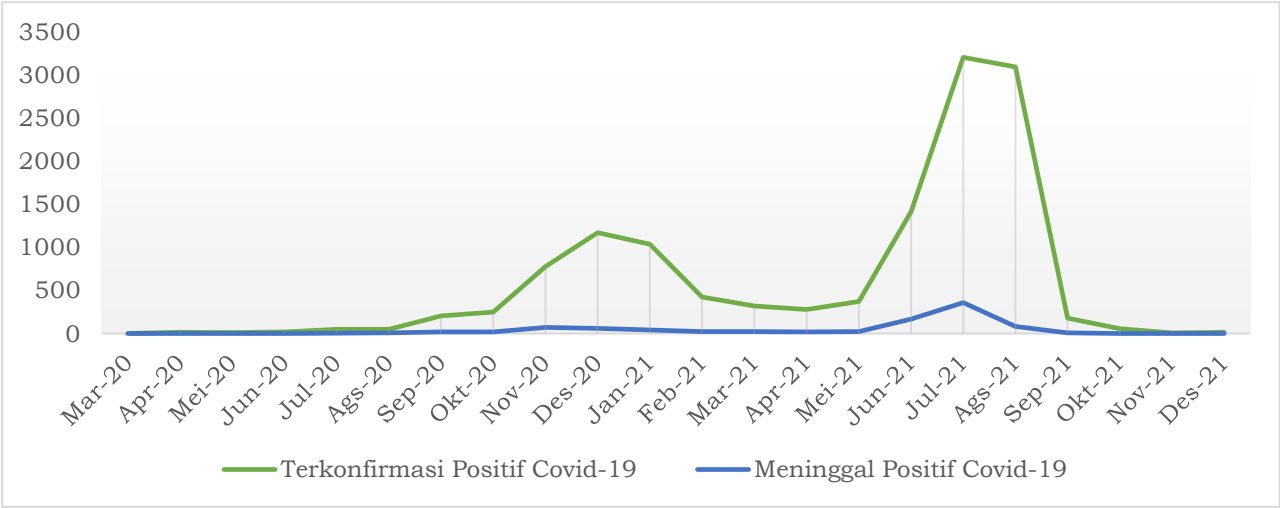
No	Jenis Kejadian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Banjir	4	10	2	57	16
2	Banjir Bandang	1	3	2	4	2
3	Tanah Longsor	41	35	25	41	46
4	Puting Beliung	9	5	18	1	3
5	Kebakaran	81	72	93	58	55
6	Kekeringan	14	15	22	14	0
7	Hujan dan Angin	28	19	33	30	22
8	Angin Kencang	19	9	33	13	12
9	Tersambar Petir	2	3	3	4	0
10	Orang Tenggelam	8	6	3	6	5
11	Gempa	4	0	0	0	0
12	Bencana Lainnya	3	2	4	12	12
Jumlah		214	179	238	240	173
Perkiraan kerugian akibat bencana (juta Rp)		8.394,04	3.479,2	6.744,3	1.414,16	7.299,2

Sumber: BPBD Kabupaten Pemalang, 2022
Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kejadian bencana di Tahun 2021 menurun dibandingkan Tahun 2020, namun nilai kerugiannya mengalami peningkatan sekitar 416,15%. Kebakaran adalah bencana yang paling sering terjadi di Tahun 2021 dibandingkan bencana lainnya, hal ini disebabkan belum tercukupinya kebutuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), dimana WMK

yang tersedia hanya sejumlah 3 WMK dari kebutuhan 6 WMK. Selain kebakaran, tanah longsor juga sering terjadi utamanya di daerah Pemalang selatan akibat kondisi curah hujan yang tinggi disertai kondisi lahan lereng yang mengalami degradasi.

Sejak Bulan Maret 2020, setelah ditemukan kejadian Covid-19, infeksi virus tersebut menyebar secara cepat di seluruh kecamatan. Hingga bulan Desember 2021, jumlah kumulatif kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Pemalang mencapai 12.928 kasus, dimana lebih dari 7,22% penderita Covid-19 meninggal dunia. Gambaran kasus konfirmasi positif Covid-19 dan meninggal positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang periode Maret 2020 hingga Desember 2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : Dinkes Kabupaten Pemalang, 2022

Gambar 2.7

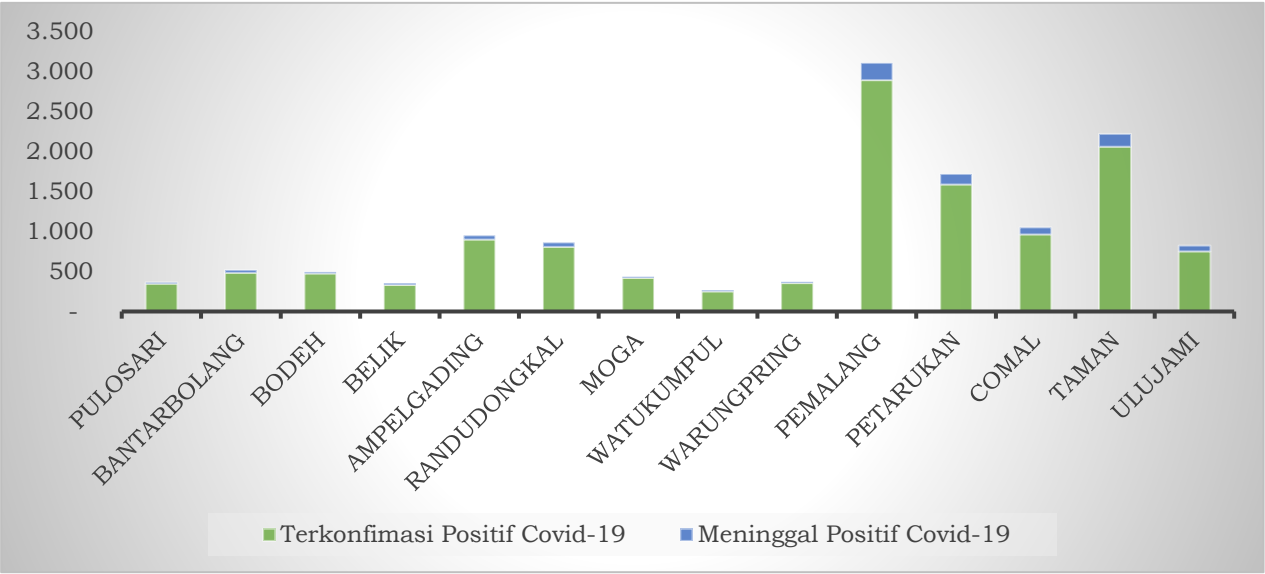
Perkembangan Jumlah Kasus Positif Covid-19 dan Kasus Meninggal Positif Covid-19 di Kabupaten Pemalang Periode Maret 2020 – Desember 2021

Jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 menunjukkan tren peningkatan dari awal periode penemuan kasus hingga bulan Juli 2021 sebagai puncak kejadian infeksi Covid-19. Kondisi ini dipicu oleh mulai melonggarnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta sebagian fasilitas publik telah beroperasi secara normal kembali. Selain itu, peningkatan kasus di bulan Juli 2021 juga dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat yang melibatkan kerumunan namun tanpa penerapan protokol kesehatan yang memadai, seperti acara hajatan. Setelah bulan Agustus 2021, jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 mulai menunjukkan penurunan. Penurunan cukup drastis terjadi mulai bulan September 2021, dimana sebagian masyarakat sudah menerima vaksinasi. Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pemalang menjadi salah satu ancaman serius dalam pembangunan manusia karena menimbulkan cukup banyak kematian.

Sebagaimana jumlah kasus infeksi Covid-19 yang mengalami puncak di bulan Juli 2021, kematian yang disebabkan oleh infeksi Covid-19 juga mengalami hal yang sama. Pada bulan Juli 2021, jumlah kasus kematian akibat infeksi Covid-19 mencapai lebih dari 358 kasus. Namun, kasus kematian akibat infeksi Covid-19 mulai menunjukkan penurunan di bulan Agustus 2021 dan mengalami penurunan cukup drastis di bulan September 2021 bersamaan dengan pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19. Rasio daya tampung rumah sakit per 1000 penduduk sebesar 1, hal ini menunjukkan belum optimalnya fungsi pelayanan kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 disebabkan keterbatasan sarana

prasarana kesehatan yang ada, sehingga beberapa lokasi dijadikan tempat perawatan pasien Covid-19, diantaranya Gedung DPRD Kabupaten Pemalang dan Gedung RS Randudongkal (sedang dalam proses finishing pembangunan).

Kasus positif dan kematian akibat Covid-19 dapat ditemukan di seluruh kecamatan dengan frekuensi yang berbeda. Persebaran infeksi Covid-19 dan kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Pemalang hingga bulan Desember 2021 ditampilkan pada gambar berikut :



Sumber : Dinkes Kabupaten Pemalang, 2022

Gambar 2.8.

Persebaran Kumulatif Kasus Positif dan Meninggal Covid-19 Per Kecamatan hingga 31 Desember 2021

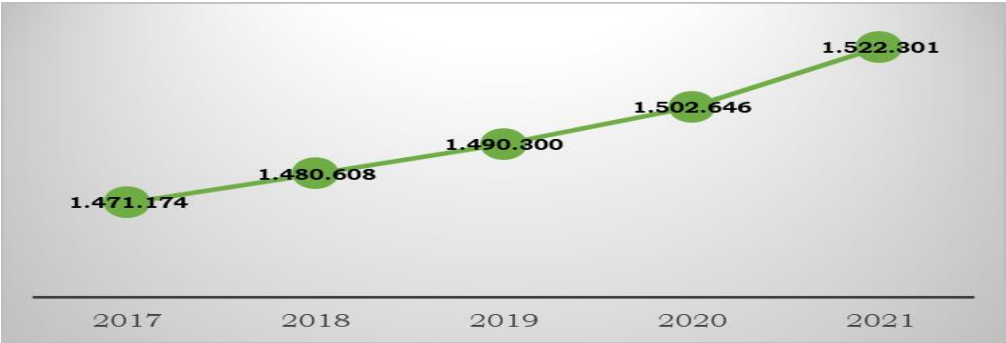
Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat adanya disparitas persebaran kasus positif dan meninggal akibat Covid-19. Kasus positif dan meninggal akibat Covid-19 tertinggi ditemukan di kecamatan yang merupakan pusat pemerintahan atau pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kecamatan Pemalang menjadi wilayah dengan jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 tertinggi di Kabupaten Pemalang. Jumlah kasus positif Covid-19 di Kecamatan Pemalang mencapai lebih dari 2.901 kasus atau mencakup sekitar 22,92% dari total kasus positif Covid-19. Sementara itu, kematian akibat Covid-19 mencapai 918 kasus atau sekitar 23,53% dari total kematian akibat Covid-19. Di sisi lain, beberapa kecamatan memiliki kasus positif dan kematian akibat Covid-19 yang cukup rendah. Kecamatan tersebut pada umumnya merupakan kecamatan yang terletak di perbatasan maupun jauh dari pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Kecamatan dengan jumlah kasus positif dan kematian akibat Covid-19 terendah adalah Kecamatan Watukumpul. Kumulatif kasus positif Covid-19 di Kecamatan Watukumpul hingga Desember 2021 adalah 253 kasus (2%) dan hanya terjadi 16 kematian akibat Covid-19 (1,74%).

Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah laju penyebaran Covid-19. Di Kabupaten Pemalang, vaksinasi Covid-19 dimulai sejak awal Tahun 2021 dengan target sasaran utama yaitu SDM kesehatan, lansia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan vaksin pada Desember 2021, Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten yang capaian vaksinnnya paling rendah diantara 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Rendahnya capaian vaksinasi ini utamanya

disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin, disebabkan sebagian masyarakat mendapatkan informasi yang salah berkaitan vaksin Covid-19. Oleh karena itu, diperlukan upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya vaksin untuk memperlambat penyebaran Covid-19.

i. Kondisi Demografis

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcatpil) Kabupaten Pemalang jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar 1.522.301 jiwa meningkat 1,31% dari jumlah penduduk di Tahun 2020. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pemalang Tahun 2017 hingga Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2022

Gambar 2.9

Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 mencapai 1.522.301 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 773.472 jiwa (50,81%) dan jumlah penduduk perempuan sebesar 748.829 jiwa (49,19%). Rasio jenis kelamin sebesar 103,29%. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk, yaitu Tahun 2021 sebesar 1.364,93 jiwa/km² lebih tinggi dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2020 sebesar 1.347,30 jiwa/km². Penduduk Kabupaten Pemalang tersebar di 14 kecamatan dengan jumlah yang bervariasi. Secara terinci, persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang di tiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.7.

Persebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk Tahun 2021				Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio	
1	Moga	41,40	38.892	37.545	76.437	103,59	1.846
2	Pulosari	87,52	32.398	31.420	63.818	103,11	729
3	Belik	124,54	62.838	60.006	122.844	104,72	986
4	Watukumpul	129,02	40.021	37.654	77.675	106,29	602
5	Bodeh	85,98	32.604	31.540	64.144	103,37	746
6	Bantarbolang	139,19	44.521	43.423	87.944	102,53	632
7	Randudongkal	90,32	58.290	56.910	115.200	102,42	1.275
8	Pemalang	101,93	105.585	102.529	208.114	102,98	2.042
9	Taman	67,41	97.904	94.866	192.770	103,20	2.860
10	Petarukan	81,29	89.493	86.778	176.271	103,13	2.168
11	Ampelgading	53,30	38.668	38.305	76.973	100,95	1.444
12	Comal	26,54	49.273	47.890	97.163	102,89	3.661
13	Ulujami	60,55	59.684	57.556	117.240	103,69	1.936
14	Warungpring	26,31	23.301	22.407	45.708	103,99	1.737
Jumlah		1,503.68	773.472	748.829	1.522.301	103,29	1.364,93

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2022

Persebaran penduduk di Kabupaten Pemalang tidak merata, yaitu terdapat 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Taman, dan Petarukan. Jumlah penduduk pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 577.155 jiwa atau sebesar 37,91% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Warungpring sebesar 3% dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang.

Untuk kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021, paling besar berada di kecamatan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, yaitu di Kecamatan Comal yang mencapai 3.661 jiwa/km2 dan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul sebesar 602 jiwa/km2. Berdasarkan rasio jenis kelamin, wilayah dengan selisih gender terbesar adalah Kecamatan Watukumpul dengan rasio 106,29% dan Kecamatan Belik dengan rasio 104,72%.

Berdasarkan usia, penduduk Kabupaten Pemalang dibedakan menjadi kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan usia nonproduktif (di bawah 15 tahun dan di 65 tahun ke atas). Rasio penduduk usia nonproduktif terhadap usia produktif menghasilkan rasio ketergantungan. Persebaran penduduk usia produktif, usia nonproduktif, dan rasio ketergantungan di setiap kecamatan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Persebaran Penduduk Usia Nonproduktif, Usia Produktif, dan Rasio Ketergantungan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Kecamatan	Usia Nonproduktif	Usia Produktif	Rasio Ketergantungan
Moga	23.663	52.774	44,84
Pulosari	19.987	43.831	45,60
Belik	39.926	82.918	48,15
Watukumpul	24.050	53.625	44,85
Bodeh	19.391	44.753	43,33
Bantarbolang	26.310	61.634	42,69
Randudongkal	34.430	80.770	42,63
Pemalang	62.541	145.573	42,96
Taman	58.508	134.262	43,58
Petarukan	53.980	122.291	44,14
Ampelgading	23.606	53.367	44,23
Comal	28.985	68.178	42,51
Ulujami	36.111	81.129	44,51
Warungpring	14.036	31.672	44,32
Kabupaten Pemalang	465.524	1.056.777	44,05

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, Tahun 2022

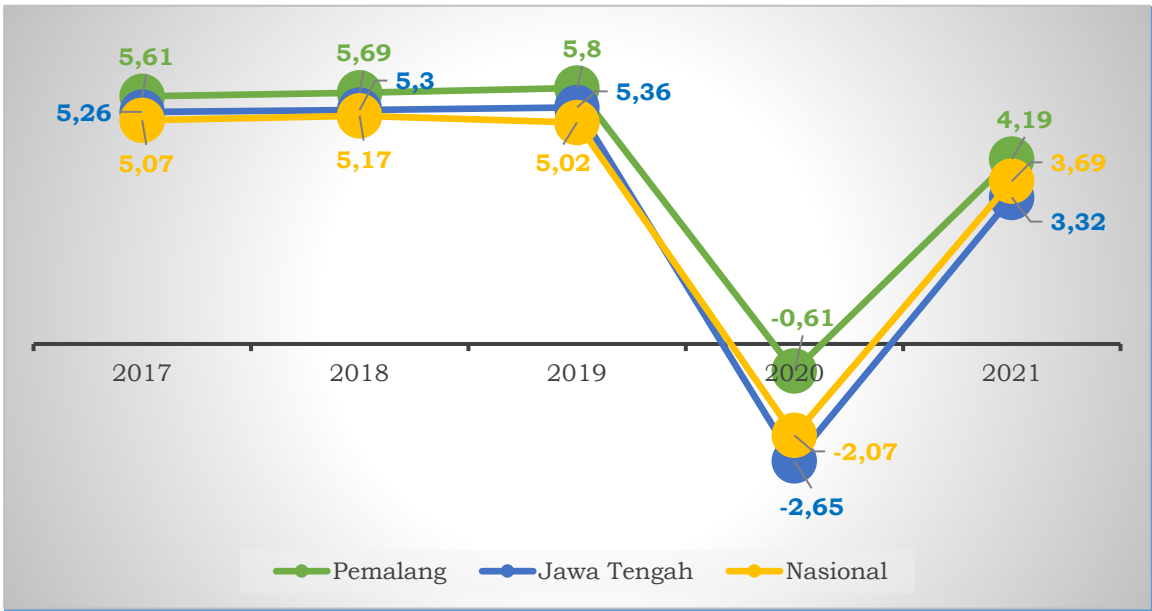
Berdasarkan tabel diatas, rasio ketergantungan Kabupaten Pemalang sebesar 44,05, artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 orang usia nonproduktif. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Pemalang sudah memasuki periode bonus demografi. Berdasarkan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang (2021), usia produktif di Kabupaten Pemalang didominasi oleh generasi milenial dengan rentang usia 24-39 tahun (24,65%) dan generasi Z dengan rentang usia 8-23 tahun (32,76%). Berdasarkan wilayah, kecamatan dengan rasio ketergantungan tertinggi adalah Kecamatan Belik dengan rasio 48,15. Selain Belik, wilayah dengan rasio ketergantungan tinggi juga ditemukan di Kecamatan Pulosari dan Watukumpul. Sementara itu, wilayah dengan rasio ketergantungan terendah

berada di Kecamatan Comal (42,51), Kecamatan Randudongkal (42,63), dan Kecamatan Bantarbolang (42,69).

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Covid-19 Tahun 2020 membawa dampak yang sangat besar baik secara sosial, ekonomi, maupun kultur masyarakat. Secara ekonomi, bencana pandemi ini menyebabkan terjadinya resesi yang ditandai dengan semakin terkontraksinya pertumbuhan ekonomi akibat menurunnya aktivitas produksi maupun konsumsi. Penurunan ini merupakan akibat adanya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat guna mencegah penularan virus Covid-19 yang semakin meluas. Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pandemi, ekonominya mampu tumbuh rata-rata diatas 5%, akibat pandemi Tahun 2020, ekonomi Kabupaten Pemalang terkontraksi menjadi -0,61% dan pertumbuhan minus ini dialami baik di level daerah (provinsi dan kabupaten/kota) maupun nasional bahkan dunia. Sebagai perbandingan, berikut gambar pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.10

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional empat tahun sebelum pandemi cenderung fluktuatif. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Kabupaten Pemalang menunjukkan tren peningkatan. Namun akibat pandemi Covid-19 terjadi kontraksi di semua level baik Nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Pemalang. Hampir semua lapangan usaha mengalami kelumpuhan (kecuali lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan) yang disebabkan oleh kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan daya beli masyarakat, peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Kontraksi yang dialami oleh Kabupaten Pemalang tidak sedalam Nasional dan Provinsi Jawa Tengah karena pertumbuhan dua lapangan usaha utama yaitu pertanian dan industri pengolahan masih positif, meskipun lebih kecil dibandingkan rata-rata sebelum pandemi. Di Tahun 2021, terjadi perbaikan

perekonomian yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang sebesar 4,19% lebih besar dibanding Provinsi Jawa Tengah (3,32%) dan Nasional (3,69%). Perbaikan perekonomian ini seiring dengan mulai dibukanya akses-akses ekonomi dan sosial. Aktivitas ekonomi dan sosial sudah mulai berjalan normal, namun ada aturan baru yang tetap harus dipatuhi dalam beraktivitas yaitu taat protokol kesehatan.

Dampak pandemi Covid-19 yang bersifat global terhadap perekonomian, dialami oleh seluruh wilayah tanah air, termasuk Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitarnya dengan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan potensi ekonomi (lapangan usaha) dalam berkontribusi kepada ekonomi daerah masing-masing. Berikut gambaran secara detail pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar sebelum pandemi dan pada masa pandemi.

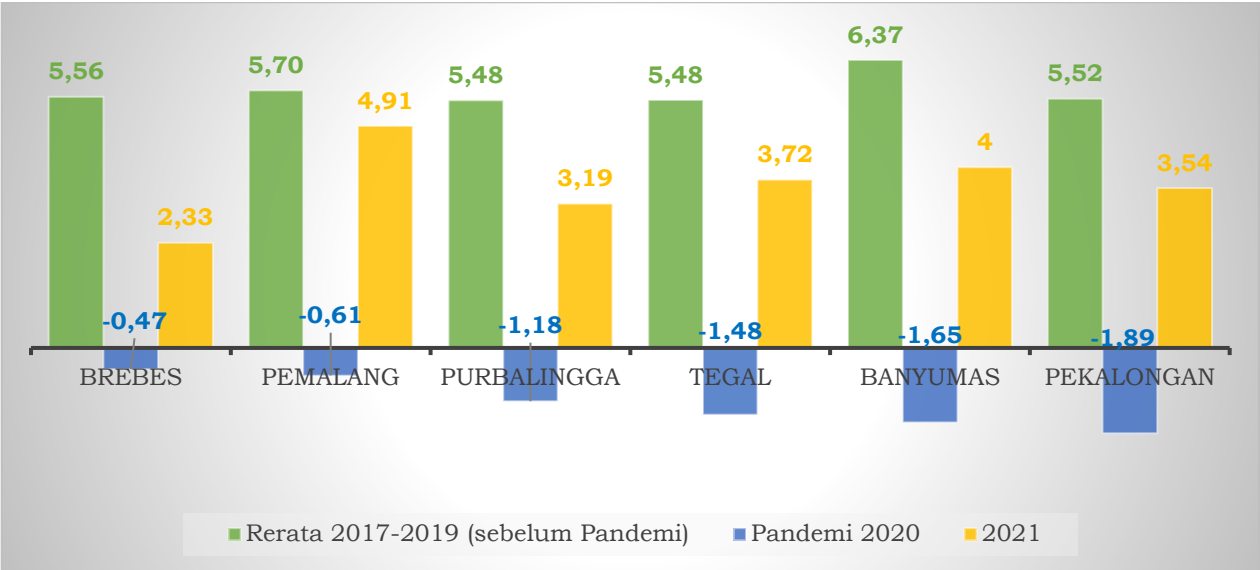
Tabel 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang dengan Kabupaten Sekitar
Tahun 2017-2021

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Brebes	Pemalang	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan
2017	5,65	5,61	5,37	5,38	6,34	5,44
2018	5,26	5,69	5,42	5,51	6,45	5,76
2019	5,76	5,80	5,64	5,56	6,32	5,35
2020	-0,47	-0,61	-1,18	-1,48	-1,65	-1,89
2021	2,33	4,91	3,19	3,72	4,00	3,54

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah tanpa terkecuali. Dari enam kabupaten yang ada, Kabupaten Pekalongan yang mengalami kontraksi paling dalam sebesar -1,89% sedangkan terendah adalah Kabupaten Brebes sebesar -0,47% dan selanjutnya Kabupaten Pemalang sebesar -0,61%. Kekuatan ekonomi Kabupaten Pemalang pada masa pandemi sehingga mengalami kontraksi lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar maupun Provinsi Jawa Tengah adalah pada lapangan usaha pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi yaitu periode Tahun 2017-2019, urutan dari yang tertinggi adalah Kabupaten Banyumas, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Purbalingga dan Tegal. Bila dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah, enam kabupaten tersebut mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata Provinsi. Dengan adanya pandemi yang secara keseluruhan mengalami kontraksi, keenam kabupaten mengalami kontraksi yang lebih ringan dibanding Provinsi Jawa Tengah yang mengalami pertumbuhan mencapai -2,65%. Di Tahun 2021, terjadi perbaikan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi baik di enam kabupaten maupun provinsi dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi enam kabupaten lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan rata-rata pertumbuhan ekonomi kewilayahan sebelum pandemi, pada masa pandemi dan Tahun 2021 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.11

Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kewilayahan Sebelum Masa Pandemi, Pada Masa Pandemi Tahun 2020 dan Tahun 2021

PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selebihnya merupakan lapangan usaha dengan kontribusi kurang dari 6% yang bergerak di bidang jasa pendidikan, penyediaan akomodasi dan makan minum, pertambangan dan penggalian, konstruksi serta sektor lainnya. Kontribusi lapangan usaha terhadap perekonomian daerah (PDRB-ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.

Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang 2017-2021

Lapangan Usaha		Distribusi PDRB ADHB (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	26,70	26,49	25,44	27,02	27,10
B	Pertambangan dan Penggalian	4,42	4,26	3,99	4,06	3,98
C	Industri Pengolahan	21,60	21,62	21,99	21,94	21,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,29	4,43	4,60	4,44	4,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,17	15,16	15,45	14,83	15,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,62	2,69	1,88	1,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,08	5,20	5,01	5,21
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,10	2,21	2,57	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,11	3,05	3,07	3,10
L	Real Estate	1,62	1,63	1,68	1,68	1,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,38	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,16	3,08	3,04	2,79
P	Jasa Pendidikan	5,81	5,92	6,07	6,09	5,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,07	1,10	1,18	1,13
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,74	2,81	2,88	2,65	2,53
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel di atas, hingga Tahun 2021 lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pemalang, yaitu sebesar 27,10%; lapangan usaha industri pengolahan sebesar 21,95%; dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,17%; serta lapangan usaha lainnya yang berkontribusi kurang dari 6%.

Adapun data nominal PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2017-2021 dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.
PDRB (ADHB) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

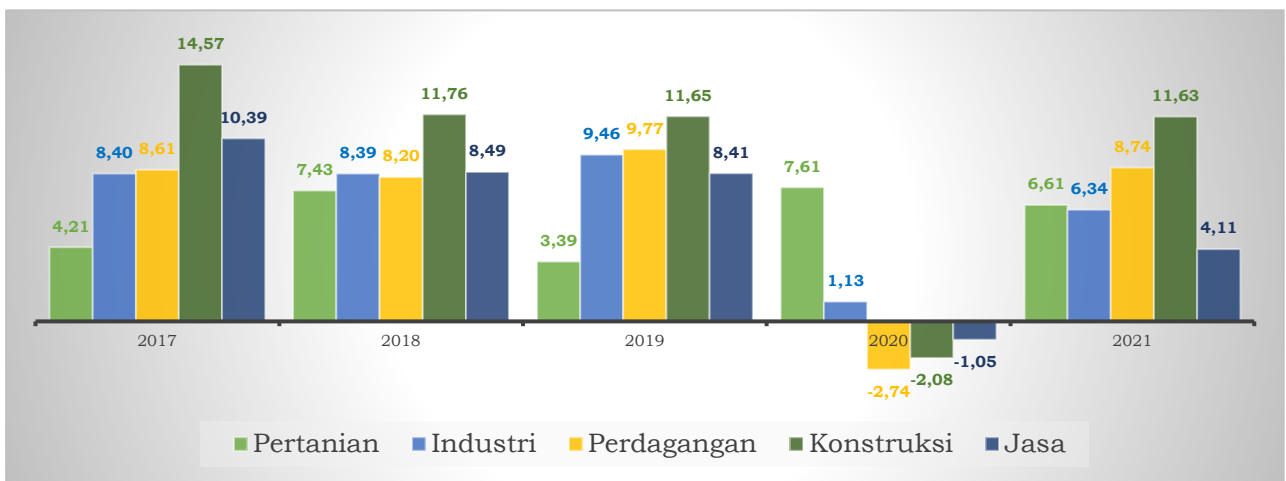
Lapangan Usaha		PDRB ADHB (Rp.Juta)				
		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian Kehutanan, dan Perikanan	5.836.489,48	6.270.308,32	6.482.922,70	6.975.981,72	7.437.436,79
B	Pertambangan dan Penggalian	966.070,90	1.008.805,95	1.017.466,77	1.047.170,81	1.091.793,34
C	Industri Pengolahan	4.722.013,91	5.118.414,59	5.602.868,49	5.666.208,16	6.025.481,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.868,69	27.114,19	28.511,93	28.891,35	30.548,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15.183,26	15.932,01	16.684,61	18.056,25	19.267,73
F	Konstruksi	938.795,86	1.049.239,02	1.171.432,23	1.147.022,59	1.280.473,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.315.846,01	3.587.584,57	3.938.037,69	3.830.256,80	4.165.041,83
H	Transportasi dan Pergudangan	573.709,40	620.816,07	685.552,33	485.597,26	506.574,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.094.350,96	1.201.929,28	1.326.140,86	1.294.098,10	1.429.398,13
J	Informasi dan Komunikasi	440.605,19	496.969,63	564.011,32	662.941,66	700.950,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	685.803,22	737.231,99	778.018,54	793.892,59	851.668,69
L	Real Estate	354.812,45	384.782,82	428.953,27	432.902,23	456.410,80
M,N	Jasa Perusahaan	76.223,03	85.110,81	96.778,95	90.783,18	95.368,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719.029,31	748.795,55	784.904,52	784.668,65	766.380,20
P	Jasa Pendidikan	1.269.111,41	1.400.237,00	1.547.358,12	1.572.178,71	1.587.455,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.891,69	253.098,49	279.191,60	305.060,53	308.990,75
R,S, T,U	Jasa Lainnya	598.719,40	664.529,97	734.767,84	685.109,45	693.665,47
PDRB ADHB		21.860.524,17	23.670.900,26	25.483.601,77	25.820.820,04	27.446.905,64

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Aspek pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha dikelompokkan menjadi 5 kelompok lapangan usaha, yaitu pertanian, industri manufaktur, perdagangan dan reparasi, konstruksi dan jasa lainnya. Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi di sektor kontruksi sebesar 9,51%; selanjutnya sektor industri sebesar 6,75%; sektor perdagangan sebesar 6,52%; sektor jasa lainnya sebesar 6,07% dan terendah di sektor pertanian sebesar 5,85%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pemalang sedang mengalami transformasi ekonomi menuju sektor tersier (jasa) yang meliputi perdagangan, jasa konstruksi dan berbagai bidang jasa lainnya, meskipun berdasarkan besaran kontribusinya, kontribusi terbesar masih berada di sektor

pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Sektor tersier dan sekunder terus menunjukkan peningkatan, sedangkan sektor primer (pertanian) memiliki tren yang menurun. Dengan demikian dalam jangka menengah dan panjang ke depan, Kabupaten Pemalang yang memiliki pola struktur *perekonomian industri* (agro-industri) menuju ke arah struktur *perekonomian jasa*. Hal ini sejalan dengan tren sektor riil menuju era digitalisasi yang merupakan bagian dari era industri 4.0.

Di Tahun 2020, perekonomian menjadi terpuruk, dimana sebagian besar lapangan usaha mengalami kontraksi (tumbuh negatif), meliputi sektor perdagangan, konstruksi dan jasa lainnya. Data pertumbuhan ekonomi menurut 5 kelompok lapangan usaha Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Data BPS, 2022 (diolah).

Gambar 2.12
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pemalang
Menurut Lima Kelompok Lapangan Usaha Utama Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar di atas, selama tiga tahun sebelum pandemi, pertumbuhan pada lapangan usaha pertanian cenderung turun, pertumbuhan pada lapangan industri cenderung naik, pertumbuhan pada lapangan perdagangan cenderung naik, pertumbuhan pada lapangan konstruksi mengalami tren turun dan pertumbuhan pada lapangan jasa cenderung turun. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang muncul pada awal Tahun 2020 hingga saat ini, perekonomian menjadi melemah dan bahkan beberapa lapangan usaha terkontraksi. Pertanian dan industri tetap tumbuh positif meskipun melemah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu masing-masing tumbuh sebesar 7,61% dan 1,13%. Sedangkan perdagangan, konstruksi dan jasa lainnya tumbuh negatif (terkontraksi) masing-masing sebesar -2,74%; -2,08% dan -1,05%.

Dilihat dari lapangan usaha, PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Pemalang selama kurun waktu lima tahun juga didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Dalam hal ini, Kabupaten Pemalang memiliki produktivitas hasil pertanian yang besar dan dijadikan lumbung pangan terbesar ke tiga di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya PDRB ADHK menurut lapangan usaha Kabupaten Pemalang tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12.
Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Lapangan Usaha	2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert (%)	Rp (Juta)	Pert (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.981.817,04	3,14	4.151.223,81	4,25	4.205.833,39	1,32	4.419.014,08	5,07	4.623.437,40	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	749.308,41	7,7	773.506,69	3,23	769.607,55	-0,5	775.453,35	0,76	798.945,99	3,03
C	Industri Pengolahan	3.375.595,13	5,26	3.555.530,68	5,33	3.834.064,34	7,83	3.785.732,87	-1,26	3.918.972,91	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.609,01	5,31	22.827,81	5,64	23.970,69	5,01	24.439,02	1,95	25.959,24	6,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.894,29	4,6	14.489,81	4,29	15.095,38	4,18	15.441,80	2,29	16.301,35	5,57
F	Konstruksi	702.870,34	7,75	751.342,57	6,9	819.722,77	7,9	790.982,34	-2,43	850.373,09	7,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.764.653,21	6,02	2.912.820,71	5,36	3.120.035,29	7,11	3.011.268,20	-3,49	3.205.117,03	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	490.632,34	6,1	525.816,58	7,17	568.337,15	8,09	389.224,54	-31,52	396.871,11	1,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	912.838,22	5,88	989.250,88	8,37	1.078.844,76	9,06	1.037.270,54	-3,85	1.107.854,84	6,8
J	Informasi dan Komunikasi	437.632,28	14,01	493.959,44	12,87	554.594,24	12,28	649.012,73	17,02	685.738,75	5,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	489.437,05	5,58	509.975,88	4,2	528.581,88	3,65	539.629,94	2,09	552.736,57	2,43
L	Real Estate	303.891,71	5,98	321.433,27	5,77	341.772,37	9,13	350.982,83	0,06	365.618,82	4,17
M,N	Jasa Perusahaan	60.164,41	7,55	65.409,82	8,72	72.306,37	10,54	65.914,59	-8,84	67.995,07	3,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	520.624,16	3,08	536.375,45	3,03	554.001,69	3,29	547.281,92	-1,21	542.683,52	-0,84
P	Jasa Pendidikan	874.593,96	8,22	942.363,82	7,75	1.015.425,91	7,75	1.014.899,25	-0,05	1.016.132,06	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.684,32	8,97	184.188,10	9,19	200.114,45	8,65	215.962,39	7,92	217.054,94	0,51
R,S,T,U	Jasa lainnya	468.738,12	8,99	515.373,50	9,95	564.891,55	9,61	523.087,03	-7,4	524.468,98	0,26
PDRB ADHK		16.336.984,00	5,61	17.265.888,82	5,69	18.267.199,78	5,8	18.155.597,42	-0,61	18.916.261,68	4,19

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa struktur perekonomian yang cocok untuk Kabupaten Pemalang adalah industri berbasis agro/agro-industri (sektor primer dan sekunder). Namun, mulai terlihat geliat pertumbuhan dari sektor jasa (sektor tersier). Sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang harus mulai fokus untuk mendorong dunia usaha (mengarah pada sektor tersier) yang berbasis teknologi informasi melalui platform bisnis *e-business*, *marketplace* maupun *e-commerce* agar dapat memiliki daya saing dan daya ungkit bagi kemajuan perekonomian daerah, khususnya bagi mereka para pelaku usaha mikro dan kecil. Para pelaku usaha mikro dan kecil di sektor primer dan sekunder pun juga harus diberikan fasilitasi agar bisa memanfaatkan teknologi informasi di era industri 4.0. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, akan memperkuat strategi bisnis, perluasan jejaring bisnis untuk menjaga suplai bahan baku, transformasi pengetahuan/teknologi dan perluasan pasar, serta menjalin hubungan dengan pelanggan. Kebijakan pemerintah daerah yang mendukung para pelaku usaha mikro dan kecil akan memacu mereka menjadi pelaku usaha mandiri yang memiliki jiwa wirausaha kuat sehingga akan mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Digitalisasi sektor riil saat ini sudah menjadi suatu keharusan di tengah persaingan global yang semakin ketat sehingga daerah harus mulai berbenah menuju kesana, melalui instrumen kebijakannya. Hal ini sesuai dengan program unggulan Bupati Pemalang yaitu Desa Digital (DEDI), dimana digitalisasi dimulai dari desa hingga seluruh sektor di Kabupaten Pemalang.

b. PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah yang merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pertumbuhan PDRB belum sepenuhnya menunjukkan kenaikan taraf hidup masyarakat, karena : (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi juga non ekonomi, dan (2) pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu merata di kalangan penerima pendapatan, karena tidak semua faktor produksi, khususnya tenaga kerja, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi. Berikut adalah perbandingan antara target dan realisasi PDRB (ADHB) perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021.

Tabel 2.13.
PDRB (ADHB) Perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Tahun	ADHB (Rp.)	
		Target RKPD	Realisasi
2	2017	12.511.736,40	16.864.000
3	2018	13.126.062,66	18.216.000
4	2019	13.770.552,34	19.560.000
5	2020	14.446.686,46	17.540.000
6	2021	15.156.018,76	18.490.000

Sumber: Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Pendapatan perkapita di daerah yang semakin meningkat, akan mendorong peningkatan pendapatan perkapita nasional. Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai PDRB ADHB perkapita Kabupaten Pemalang lebih besar dibandingkan target RKPD, walaupun di Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi hingga terkontraksi.

Selanjutnya, pengukuran kinerja peningkatan PDRB perkapita dilakukan dengan membandingkan pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.14.
Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kabupaten						Pemalang
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-Rata	
1	2017	5,25	4,35	5,06	5,44	4,68	4,96	5,26
2	2018	4,87	4,40	5,27	5,54	5,13	5,04	5,40
3	2019	5,92	5,17	5,80	5,97	5,17	5,61	6,10
4	2020	-9,26	-7,75	-11,36	-6,52	-9,28	-8,84	-12,21
5	2021	1,39	1,91	2,73	2,99	2,41	2,29	3,07
Rata-rata		1,63	1,62	1,50	2,68	1,62	1,81	1,52

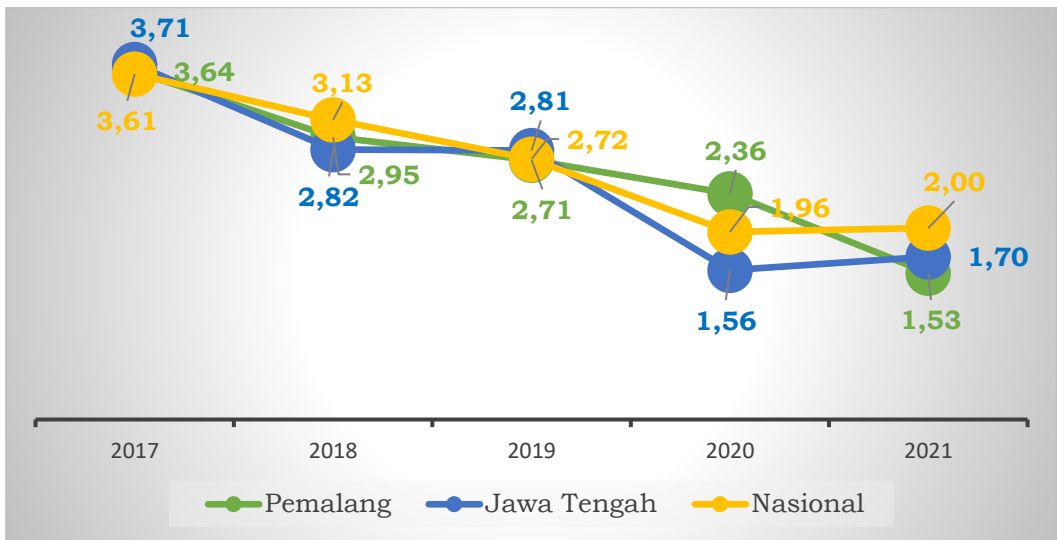
Sumber: Data BPS, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang cenderung menunjukkan tren positif. Selama kurun waktu tahun 2017-2019 pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK kabupaten sekitar. Namun, pada tahun 2020 mengalami keterpurukan sehingga pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih rendah dibanding rata-rata maupun pertumbuhan PDRB perkapita ADHK semua kabupaten sekitar. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten paling miskin nomor empat se-Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2021, terjadi perbaikan kondisi perekonomian di Kabupaten Pemalang, sehingga pertumbuhan PDRB perkapita ADHK Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita ADHK kabupaten sekitar.

c. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Tingkat inflasi Kabupaten Pemalang selama kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung menurun, khususnya sejak Tahun 2018, sejalan dengan inflasi pada level Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Terjaganya inflasi pada level ringan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu menjaga daya beli masyarakat lapisan menengah ke bawah yang sangat rentan terhadap gejolak harga utamanya peningkatan harga yang dipicu oleh harga sembako dan kebutuhan pokok lain, harga BBM, tarif dasar listrik, tarif angkutan.

Sejak Tahun 2020, pengukuran laju inflasi Kabupaten Pemalang mengindik kepada Kota Tegal karena Bank Indonesia dan BPS hanya melakukan pengukuran pada 6 kota di Jawa Tengah. Capaian inflasi Kabupaten Pemalang dari Tahun 2017-2021 selalu dibawah 10%, yang berarti bahwa harga-harga yang berlaku di Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tersebut cenderung stabil/terkendali sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat. Gambaran secara lengkap perbandingan inflasi di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tersaji pada gambar berikut :



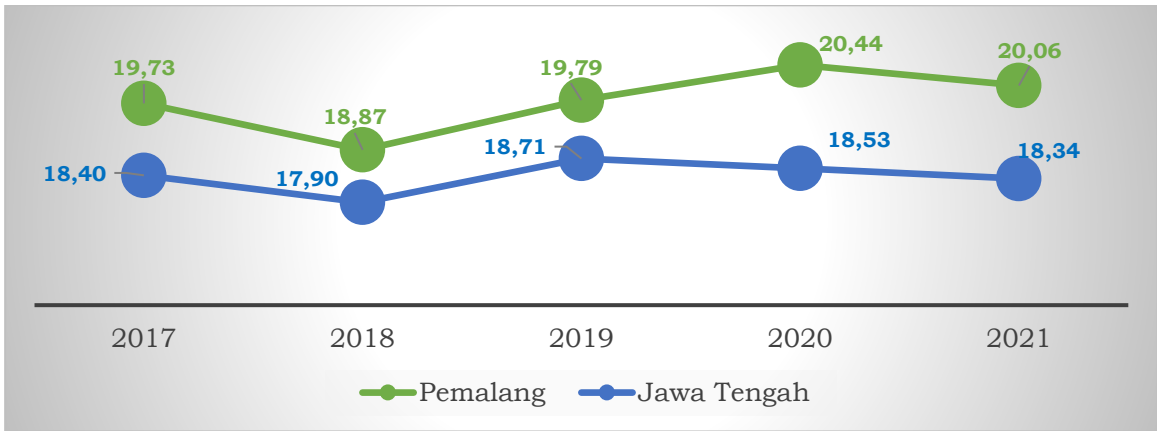
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.13
Perbandingan Tingkat Inflasi Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa angka inflasi Tahun 2021 merupakan angka terendah dalam 5 tahun terakhir. Rendahnya angka inflasi ini disebabkan melemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 karena berkurangnya dan/atau hilangnya pendapatan maupun pekerjaan sebagian besar masyarakat yang diakibatkan adanya pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial dalam skala yang luas untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

d. Kesenjangan

Menurut Bank Dunia, analisis kesenjangan diukur berdasarkan pengeluaran kelompok pendapatan. Penduduk terbagi dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu 40% bawah; 40% menengah, dan 20% atas. Analisis kesenjangan didasarkan pada persentase pengeluaran oleh kelompok pendapatan 40% terbawah dengan kategori: <12% kesenjangan tinggi, 12-17% kesenjangan menengah, dan > 17% kesenjangan rendah. Kesenjangan Kabupaten Pemalang dan Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

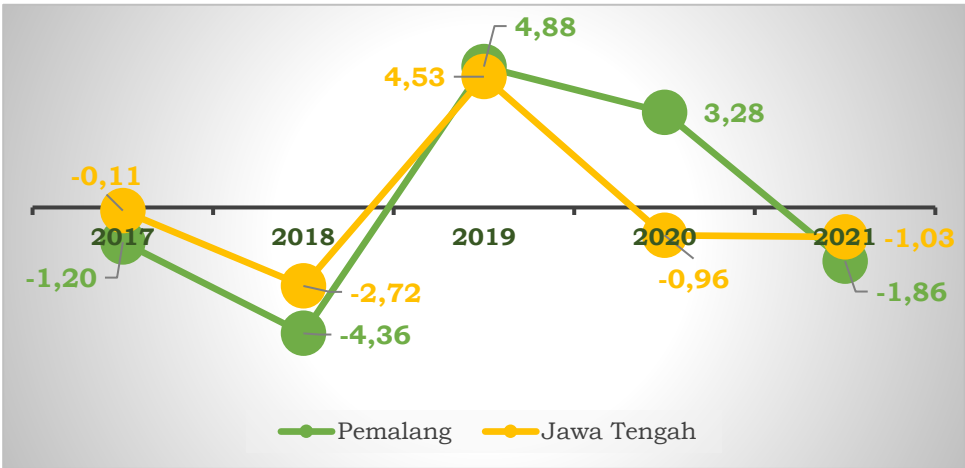


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.14
Perbandingan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Tingkat kesenjangan di Kabupaten Pemalang cenderung menurun, dengan nilai yang relatif lebih baik dibandingkan Jawa Tengah. Selama periode 2017-2021, kesenjangan di Kabupaten Pemalang berada pada kategori rendah. Kesenjangan paling rendah terjadi di Tahun 2020, dimana proporsi pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah sebesar 20,44%. Di Tahun 2020, terjadi peningkatan

proporsi pengeluaran kelompok pendapatan 40% terbawah. Peningkatan tersebut disebabkan adanya berbagai bantuan sosial yang diberikan baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten maupun Desa akibat pandemi Covid-19. Untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Pemalang dalam mengatasi kesenjangan, berikut perubahan kesenjangan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah.



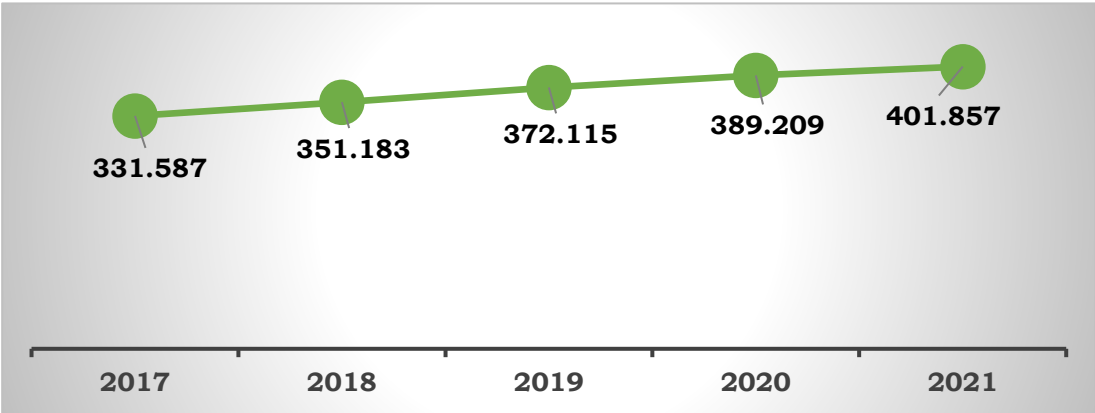
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.15
Peningkatan Pengeluaran Kelompok Pendapatan 40% Terbawah
Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang fluktuatif dalam mengurangi kesenjangan. Di tahun 2017, kinerja Kabupaten Pemalang masih di bawah kinerja Provinsi, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 kinerja Kabupaten Pemalang meningkat dan lebih baik dibandingkan Provinsi. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengatasi kesenjangan kesejahteraan antar kelompok pendapatan melalui berbagai upaya pemerataan pembangunan. Selanjutnya di tahun 2021, kinerja Kabupaten Pemalang kembali mengalami penurunan dan di bawah kinerja Provinsi, sehingga perlu akselerasi upaya pemerataan pembangunan melalui upaya pemerataan lokasi pembangunan sarana dan prasarana fisik juga pemerataan berbagai bantuan sosial.

e. Kemiskinan

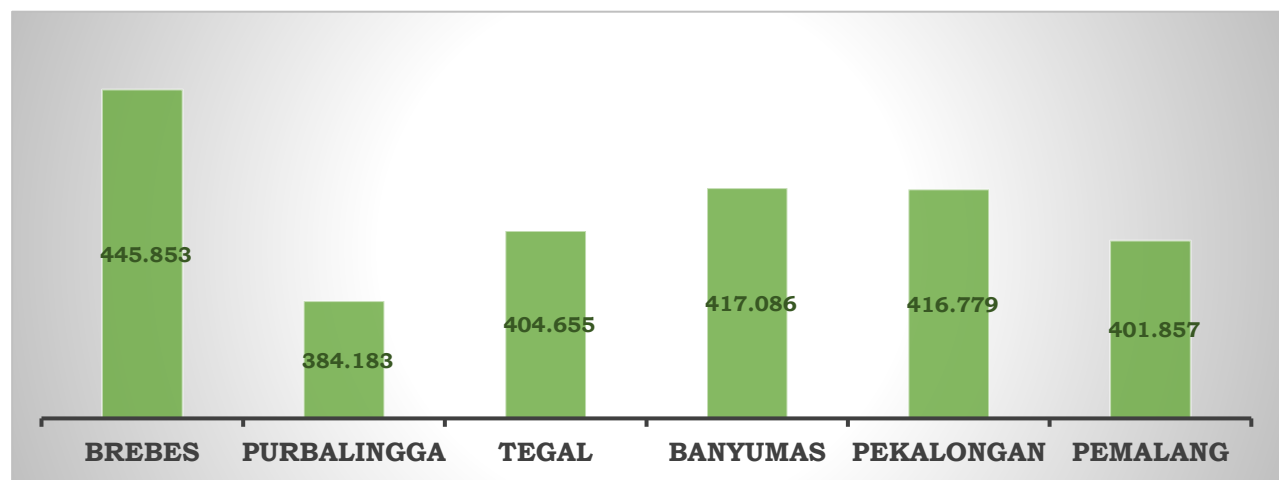
Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Selama periode 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang cenderung meningkat sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022 (diolah).

Gambar 2.16
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Garis kemiskinan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebesar Rp401.857,00 meningkat sekitar 3,25% dari Tahun 2020. Namun, peningkatan tersebut paling rendah dibandingkan dengan peningkatan yang terjadi pada 5 tahun terakhir. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, garis kemiskinan Kabupaten Pemalang merupakan yang terendah kedua sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.17

Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

Sebagaimana Tahun 2020, garis kemiskinan Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 merupakan nomor 2 paling rendah dari lima kabupaten sekitar. Hal tersebut mengindikasikan tingkat konsumsi minimal masyarakat Pemalang relatif lebih rendah dibandingkan kabupaten sekitar. Selanjutnya, garis kemiskinan digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk miskin, dimana penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Penduduk miskin di Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 berjumlah 215,08 ribu jiwa, meningkat sekitar 2,89% dibandingkan Tahun 2020. Peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Pemalang, melainkan juga Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan jumlah penduduk miskin utamanya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi. Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.15.

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		
	Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
2017	225,00	4.197,49	26.582,99
2018	208,34	3.867,42	25.674,58
2019	200,67	3.679,40	24.785,87
2020	209,03	4.119,93	27.549,69
2021	215,08	3.934,01	26.503,65

Sumber: BPS, 2022

Persebaran wabah Covid-19 mulai awal Tahun 2020, menjadikan Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan penyesuaian terhadap target tingkat kemiskinan. Data kemiskinan terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di Tahun 2021 sejumlah 215,08 ribu jiwa berkontribusi sebesar 5,23% dari total penduduk miskin di Jawa Tengah. Kemiskinan di Kabupaten Pemalang tersebar di seluruh

kecamatan dengan frekuensi yang berbeda. Data kemiskinan di setiap kecamatan disajikan melalui jumlah penduduk berkesejahteraan sosial rendah berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Agar data penduduk berkesejahteraan sosial rendah pada DTKS selalu *up to date*, harus dilaksanakan pemutakhiran data secara rutin, yaitu *update* dapat dilakukan setiap bulan dengan mengentri aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) dari Kementerian Sosial. Dari data di SIKS-NG tersebut akan ditetapkan sebagai Surat Keputusan Penetapan DTKS yang ditetapkan setahun 4 kali yaitu pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Berikut jumlah penduduk yang ditetapkan dalam DTKS di Januari 2021 (hasil *update* Desember 2020) dan Januari 2022 (hasil *update* Desember 2021) sebagai berikut.

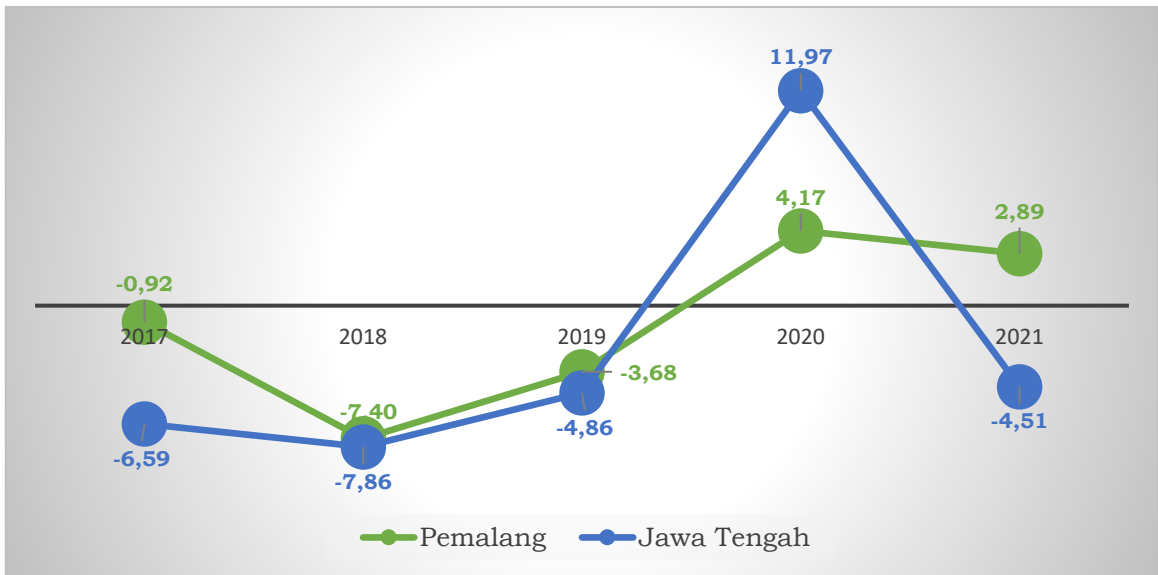
Tabel 2.16.
Perubahan Jumlah Penduduk Berkesejahteraan Sosial Rendah Tiap Kecamatan di Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Berkesejahteraan Sosial Rendah				Pertumbuhan Penduduk Berkesejahteraan Sosial Rendah (%)
		2020		2021		
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	Moga	30.942	4,17	53.013	5,25	71,33
2	Pulosari	31.019	4,18	44.920	4,45	44,81
3	Belik	75.131	10,13	99.114	9,82	31,92
4	Watukumpul	40.058	5,40	60.740	6,02	51,63
5	Bodeh	36.236	4,89	48.460	4,80	33,73
6	Bantarbolang	42.556	5,74	60.152	5,96	41,35
7	Randudongkal	42.347	5,71	59.909	5,94	41,47
8	Pemalang	64.832	8,75	102.567	10,17	58,20
9	Taman	94.312	12,72	117.808	11,68	24,91
10	Petarukan	107.058	14,44	129.193	12,81	20,68
11	Ampelgading	43.810	5,91	57.117	5,66	30,37
12	Comal	56.720	7,65	70.580	7,00	24,44
13	Ulujami	57.866	7,81	79.495	7,88	37,38
14	Warungpring	18.423	2,49	25.854	2,56	40,34
	Total	741.310	100	1.008.922	100	36,10

Sumber: DTKS Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, di Tahun 2021 kecamatan yang mempunyai penduduk berkesejahteraan sosial rendah tertinggi berada di Kecamatan Petarukan sebesar 12,81%, Kecamatan Taman sebesar 11,68%, dan Kecamatan Pemalang sebesar 10,17%. Sedangkan kecamatan yang mempunyai penduduk berkesejahteraan sosial rendah terendah adalah Kecamatan Warungpring sebesar 2,56%. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan persebaran penduduk berkesejahteraan sosial rendah di Tahun 2020. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 turut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah penduduk berkesejahteraan sosial rendah. Jumlah penduduk berkesejahteraan sosial rendah Tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,10% dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk berkesejahteraan sosial rendah terjadi di semua kecamatan dengan intensitas yang berbeda. Peningkatan jumlah penduduk berkesejahteraan sosial rendah tertinggi terjadi di Kecamatan Moga sebesar 71,33%, Kecamatan Pemalang sebesar 58,20% dan Kecamatan Watukumpul sebesar 51,63%. Sedangkan peningkatan penduduk berkesejahteraan sosial rendah terendah terjadi di Kecamatan Petarukan dengan persentase 20,68%. Wilayah dengan peningkatan penduduk berkesejahteraan sosial rendah tertinggi merupakan kecamatan yang penduduknya banyak yang bekerja di kota besar.

Pembatasan sosial dan karantina wilayah yang menjadi kebijakan selama pandemi menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan memilih untuk pulang kampung. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah penduduk berkecukupan rendah. Kinerja penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021, dapat dilihat dari perubahan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah yang dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022 (data diolah).

Gambar 2.18

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang relatif lebih rendah, kecuali di Tahun 2020. Di Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan, dimana tingkat pertumbuhan penduduk miskin Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Namun, jumlah penduduk miskin ini terus bertambah di Tahun 2021, dan tingkat pertumbuhan Kabupaten Pemalang lebih tinggi daripada Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang juga dapat dilihat dengan membandingkan jumlah penurunan penduduk miskin di kabupaten sekitar sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.17.

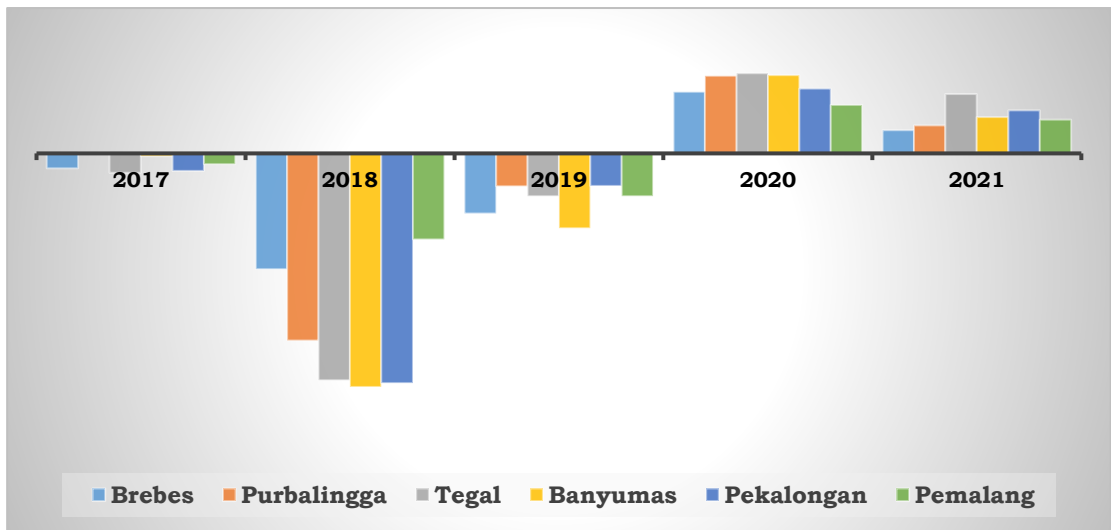
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	343,50	171,90	141,80	283,20	111,60	210,40	225,00
2	2018	309,20	144,20	114,10	226,20	89,50	176,64	208,34
3	2019	293,20	140,10	109,90	211,60	87,00	168,36	200,67
4	2020	308,78	149,48	117,50	225,84	91,86	178,69	209,03
5	2021	314,95	153,08	123,52	232,91	95,26	183,94	215,08

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama periode Tahun 2017-2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dari rata-rata jumlah penduduk miskin di kabupaten sekitar. Selama periode Tahun 2017-2019, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di

Kabupaten Pemalang begitu pula dengan rata-rata jumlah penduduk miskin di kabupaten sekitar, namun, terjadi peningkatan di Tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten sekitar, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang relatif lebih tinggi dari Kabupaten Purbalingga, Tegal, dan Pekalongan, namun lebih rendah dari Kabupaten Brebes dan Banyumas. Selama periode Tahun 2017-2021, Kabupaten Pekalongan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Perbandingan kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022 (diolah)

Gambar 2.19

Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang paling rendah dibandingkan 5 kabupaten sekitar, yaitu sebesar 0,99%. Sedangkan Kabupaten Banyumas mempunyai kinerja penurunan paling tinggi yaitu sebesar 3,39%. Rendahnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang ini mengakibatkan Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten paling miskin nomor 4 di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang sehingga perlu merumuskan berbagai kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan.

Pada Tahun 2020, seluruh kabupaten mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin akibat pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 4,15%, lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk miskin di lima kabupaten lain (6,25%) dan merupakan kabupaten yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin terendah, sementara peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Tegal (6,92%). Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan. Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 2,89% masih lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan jumlah penduduk miskin di 5 kabupaten lain (3,27%). Kabupaten yang mengalami peningkatan penduduk miskin terendah adalah Kabupaten Brebes (2%) dan yang mengalami peningkatan tertinggi adalah Kabupaten Tegal (5,12%).

1)Tingkat Kemiskinan

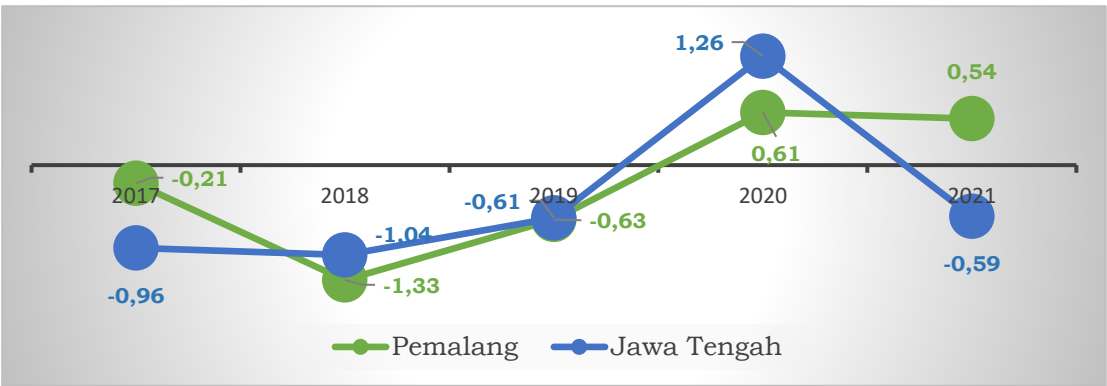
Perbandingan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan populasi penduduk di Tahun 2021 adalah 16,56%, dimana terjadi peningkatan persentase kemiskinan dibandingkan Tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Capaian persentase kemiskinan tersebut telah melampaui target RKPD 2021 sebesar 16,96%. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional, persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (11,79%) dan Nasional (9,71%). Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	17,4	17,37	12,23	10,12
2	2018	16,9	16,04	11,19	9,66
3	2019	16,4	15,41	10,58	9,22
4	2020	15,9	16,02	11,84	10,19
5	2021	16,96	16,56	11,25	9,71

Sumber: BPS, 2022

Analisis selanjutnya adalah melihat kinerja penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang dengan membandingkannya dengan penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Gambar 2.20

Perubahan Persentase Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021

Kinerja penurunan persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang cenderung lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah pada periode Tahun 2017-2021. Selama periode tersebut, penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih baik dari Provinsi Jawa Tengah terjadi pada Tahun 2018, 2019 dan 2020. Pada Tahun 2021 persentase kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,54%, sementara tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah turun sebesar 0,59%. Peningkatan di Kabupaten Pemalang tersebut, utamanya disebabkan oleh Pandemi Covid-19, dimana penduduk yang tadinya masuk dalam kelompok rentan miskin menjadi miskin akibat hilangnya pekerjaan sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan sosialnya. Perbedaan peningkatan tingkat kemiskinan antara Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah menandakan bahwa pandemi Covid-19 memberikan dampak yang lebih berat bagi Kabupaten

Pemalang. Hal ini menandakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang belum berlangsung secara efektif.

Selanjutnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	19,14	18,80	9,9	17,05	12,61	15,50	17,37
2	2018	17,17	15,62	7,94	13,50	10,06	12,86	16,04
3	2019	16,22	15,03	7,64	12,53	9,71	12,23	15,41
4	2020	17,03	15,90	8,14	13,26	10,19	12,90	16,02
5	2021	17,43	16,24	8,60	13,66	10,57	13,30	16,56
Rata-rata		17,40	16,32	8,44	14,00	10,63	13,36	16,28

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama periode Tahun 2017-2021, persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata persentase penduduk miskin di 5 kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang sebesar 16,56% sementara rata-rata persentase kemiskinan wilayah sekitar hanya sebesar 13,30%. Perbandingan persentase penduduk miskin dengan setiap kabupaten menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 hanya lebih baik dibanding Kabupaten Brebes. Perbandingan penanggulangan kemiskinan antar kabupaten dilakukan dengan membandingkan perubahan persentase kemiskinan di setiap wilayah seperti ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Perubahan Persentase Miskin di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	-0,33	-0,18	-0,20	-0,18	-0,29	-0,24	-0,21
2	2018	-1,97	-3,18	-1,96	-3,55	-2,55	-2,64	-1,33
3	2019	-0,95	-0,59	-0,30	-0,97	-0,35	-0,63	-0,63
4	2020	0,81	0,87	0,50	0,73	0,48	0,68	0,61
5	2021	0,40	0,34	0,46	0,40	0,38	0,40	0,54
Rata-rata		-0,41	-0,55	-0,30	-0,71	-0,47	-0,49	-0,20

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan persentase kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar. Kinerja Kabupaten Pemalang sedikit lebih baik di Tahun 2020, dimana peningkatan persentase kemiskinan akibat pandemi Covid-19 lebih rendah daripada rata-rata kabupaten sekitar. Selanjutnya jika dibandingkan dengan tiap kabupaten, rata-rata kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Pemalang paling rendah dibandingkan 5 kabupaten sekitar. Di Tahun 2021, seluruh kabupaten mengalami peningkatan tingkat kemiskinan dengan persentase yang berbeda. Kabupaten Pemalang meningkat 0,54% dimana peningkatan tersebut lebih tinggi dibanding peningkatan rata-rata tingkat kemiskinan kabupaten sekitar. Kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan persentase kemiskinan paling rendah dibanding kinerja 5 kabupaten sekitar.

2) Kedalaman Kemiskinan (P1)

Kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang selama periode Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan nilai terendah berada di Tahun 2019 sebesar 2,55% dan tertinggi di Tahun 2017 sebesar 3,52%. Selama periode Tahun 2017-2019 kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang menunjukkan penurunan, namun pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dan semakin meningkat di Tahun 2021. Hal ini berarti, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun capaian kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (%)		
	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	3,52	2,12	1,79
2018	2,96	1,63	1,63
2019	2,55	1,43	1,50
2020	2,86	1,84	1,75
2021	2,92	1,94	1,67
Rata-rata	2,96	1,79	1,67

Sumber : BPS, 2022

Selama periode Tahun 2017-2021, rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang (2,96%) lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah (1,79%) dan Nasional (1,67%). Kondisi ini menunjukkan kinerja Kabupaten Pemalang untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan belum berlangsung secara efektif. Secara rinci, perbandingan kinerja penurunan kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022 (diolah).

Gambar 2.21
Penurunan Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Kinerja perbaikan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif. Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah, terlihat dari rata-rata penurunan kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang sebesar 0,02% sedangkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,04%.

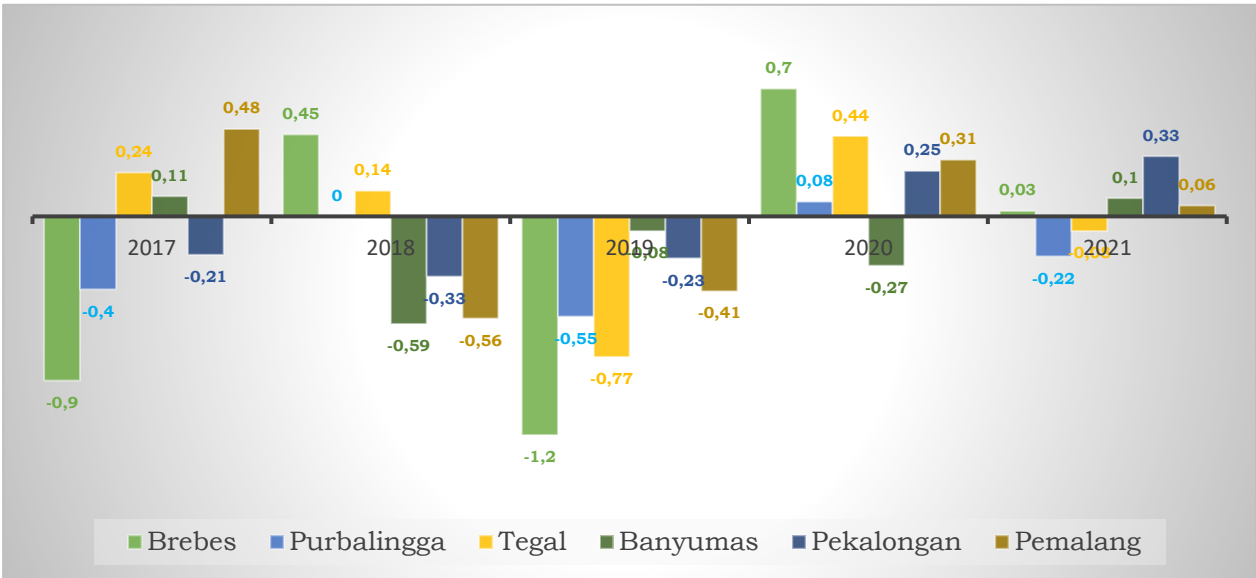
Selanjutnya, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan kabupaten sekitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kedalaman Kemiskinan (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	3,06	2,79	1,27	3,19	1,73	2,41	3,52
2	2018	3,51	2,79	1,41	2,60	1,40	2,34	2,96
3	2019	2,31	2,24	0,64	2,52	1,17	1,78	2,55
4	2020	3,01	2,32	1,08	2,25	1,42	2,02	2,86
5	2021	3,04	2,10	1,00	2,35	1,75	2,05	2,92
Rata-rata		2,99	2,45	1,08	2,58	1,49	2,12	2,96

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2019, kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan pada Tahun 2020 dan terus meningkat pada Tahun 2021. Kinerja Kabupaten Pemalang dalam mengatasi kesenjangan antar penduduk miskin belum efektif, terlihat dari kesenjangan di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding rata-rata kesenjangan di kabupaten sekitar. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang hanya lebih baik dari Kabupaten Brebes. Kinerja pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dapat dilihat juga dari penurunan indeks kedalaman kemiskinan sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.22
Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2017-2021

Secara umum, selama Tahun 2017-2019 perbaikan kedalaman kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun menurun di Tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19. Perbandingan dengan rata-rata kabupaten sekitar menunjukkan bahwa Kabupaten Pemalang menunjukkan kinerja yang lebih baik di Tahun 2018. Upaya penurunan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Pemalang belum efektif sehingga hanya lebih baik dari Kabupaten Tegal.

3)Keparahan Kemiskinan

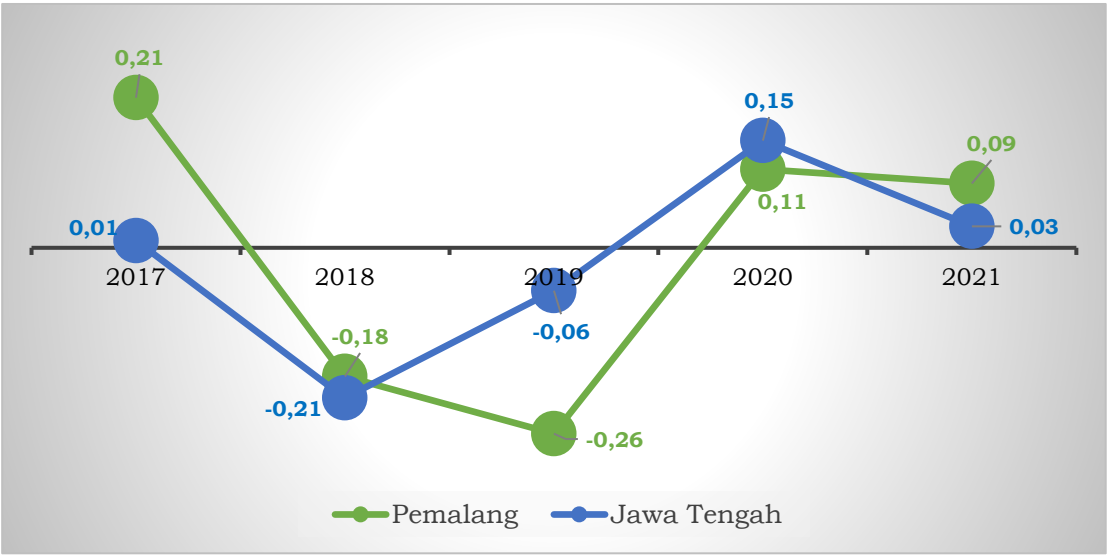
Sejalan dengan kedalaman kemiskinan, keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 menunjukkan fluktuasi dengan nilai terendah terjadi di Tahun 2019 sebesar 0,57%. Di Tahun 2021, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari Tahun 2020 yang mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Tabel 2.23
Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional
Periode 2017-2021

Tahun	Indeks Keparahan Kemiskinan (%)		
	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
2017	1,01	0,55	0,46
2018	0,83	0,34	0,41
2019	0,57	0,28	0,36
2020	0,68	0,43	0,47
2021	0,77	0,46	0,42
Rata-rata	0,77	0,41	0,42

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya kinerja perbaikan keparahan kemiskinan antara Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.23

Perubahan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

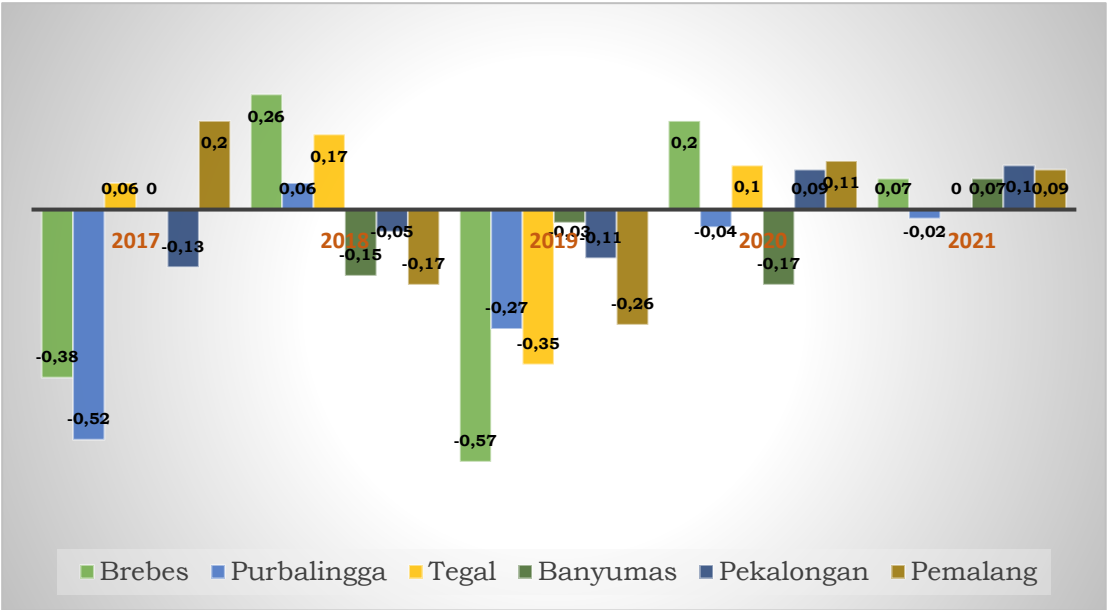
Tingkat penurunan keparahan kemiskinan di Kabupaten Pemalang cenderung menurun dengan kinerja paling baik terjadi di Tahun 2019. Namun, terjadi peningkatan di Tahun 2020, dimana peningkatan ini lebih rendah dibandingkan provinsi, artinya kinerja penurunan keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih baik dibandingkan provinsi. Selanjutnya di Tahun 2021, Kabupaten Pemalang berhasil sedikit menurunkan indeks keparahan kemiskinan dengan kinerja lebih rendah dibandingkan provinsi. Selanjutnya keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan 5 kabupaten sekitar tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten sekitar
Tahun 2017-2021

No	Indeks Keparahahan Kemiskinan (%)						
	Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
2017	0,78	0,68	0,27	0,85	0,36	0,59	1,00
2018	1,04	0,74	0,44	0,70	0,31	0,65	0,83
2019	0,47	0,47	0,09	0,67	0,20	0,38	0,57
2020	0,67	0,43	0,19	0,50	0,29	0,42	0,68
2021	0,74	0,41	0,19	0,57	0,39	0,46	0,77
Rata-rata	0,74	0,55	0,24	0,66	0,31	0,50	0,77

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Keparahan kemiskinan Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata keparahan kemiskinan kabupaten sekitar. Selanjutnya kinerja Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar untuk menurunkan keparahan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.24

Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar
Tahun 2017-2021

Kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2018, Kabupaten Pemalang memiliki kinerja penurunan keparahan kemiskinan lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, keparahan kemiskinan di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,09 sedangkan rata-rata keparahan kemiskinan kabupaten sekitar hanya meningkat sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan keparahan kemiskinan belum efektif.

4) Kemiskinan Ekstrem

Salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) adalah penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2030. Namun, Pemerintah Indonesia menargetkan kemiskinan ekstrem nihil pada tahun 2024, sehingga diperlukan akselerasi penanggulangan kemiskinan ekstrem. Penduduk dinyatakan miskin ekstrem apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perhari dibawah garis kemiskinan ekstrem. Garis kemiskinan ekstrem menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten

antar negara dan antar waktu. Garis kemiskinan ekstrem sebesar 1,99 dollar atau setara dengan Rp12.000,00 artinya, penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita perhari kurang dari Rp12.000,00 tergolong penduduk miskin ekstrem. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia tahun 2021 sebesar 4%.

Berdasarkan hasil rapat pleno tingkat Menteri Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tanggal 25 Agustus 2021 yang dipimpin oleh Wakil Presiden Indonesia selaku ketua TNP2K, Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai kabupaten miskin ekstrem bersama 34 kabupaten lainnya yang akan menjadi fokus penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 9,52% atau sebanyak 124 ribu jiwa penduduk Kabupaten Pemalang adalah penduduk yang miskin ekstrem.

Berdasar Surat Wakil Bupati Pemalang Nomor : 460/2922/Bappeda tanggal 21 September 2021, Perihal : Penentuan Kecamatan dan Desa Prioritas, kecamatan dan desa yang menjadi lokasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) tahun 2021 adalah :

- 1. Kecamatan Belik : Desa Badak, Mendelem, Kuta, Beluk, Gunungjaya
- 2. Kecamatan Watukumpul : Desa Tlagasana, Tundagan, Majakerta, Majalangu, Cawet
- 3. Kecamatan Petarukan : Desa Klareyan, Serang, Kalirandu, Pegundan, Panjunan
- 4. Kecamatan Moga : Desa Sima, Plakaran, Gendowang, Walangsanga, Mandiraja
- 5. Kecamatan Bantarbolang : Desa Pegiringan, Sumurkidang, Wanarata, Bantarbolang, Pabuaran

Berdasarkan desil 1 DTKS penetapan Oktober 2020, terdapat 4.030 Rumah Tangga Miskin (RTM) Ekstrem di 25 desa prioritas 2021. Intervensi penanganan yang akan diberikan berupa pemenuhan kebutuhan layanan dasar yang meliputi rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan akses listrik, akses air dan jambanisasi. Sebelum intervensi dilaksanakan, dilaksanakan dahulu verifikasi dan validasi data RTM ekstrem melalui aplikasi SIKS-DJ dari Provinsi Jawa Tengah agar intervensi yang akan dilaksanakan dapat tepat sasaran. Dari hasil verifikasi dan validasi yang dilaksanakan, terdapat 1.890 RTM ekstrem yang akan diberi intervensi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 460/599/Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Data Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

Adapun capaian intervensi PKE Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25
Capaian Intervensi Penanganan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Komponen	Kebutuhan	Intervensi	Belum Tertangani	Keterangan
1	Rehab RTLH	935	662	273	
			370		Disperakim Provinsi Jawa Tengah
			210		BSPS Kementrian PUPR
			8		BAZNas dan APBD Provinsi Jawa Tengah
			50		BAZNas Kabupaten Pemalang
			7		Bank Jateng
			17		TJSLP Provinsi Jawa Tengah
2	Akses Listrik	202	150	52	PLN

No	Komponen	Kebutuhan	Intervensi	Belum Tertangani	Keterangan
3	Akses Air Bersih	290	0	290	-
4	Jambanisasi	548	424	0	BAZNas Kabupaten Pemalang Berdasar verval ulang Dinkes hanya 424 RTM ekstrem yang mempunyai jamban

Sumber : TKPK Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari seluruh RTM ekstrem di desa prioritas tahun 2021 masih terdapat 273 RTM ekstrem yang rumahnya masih tidak layak huni, sebanyak 52 RTM ekstrem belum mempunyai akses listrik sendiri, dan sebanyak 290 RTM ekstrem tidak mempunyai akses air bersih. Sehingga di tahun 2022, selain melaksanakan intervensi PKE di desa prioritas tahun 2022 juga harus melaksanakan intervensi PKE di desa prioritas tahun 2021.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita.

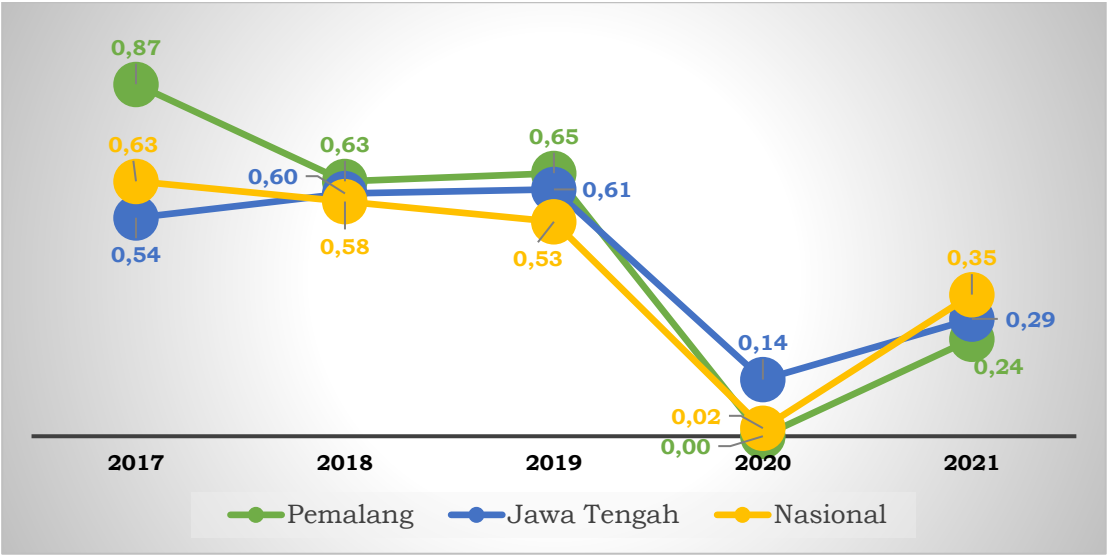
IPM Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 66,56 meningkat sebesar 0,24 dari Tahun 2020, namun nilai IPM tersebut tidak mencapai target RKPD Tahun 2021 sebesar 66,7. Apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah dan Nasional, capaian IPM Kabupaten Pemalang masih sangat rendah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	64,7	65,04	70,52	70,81
2	2018	65,2	65,67	71,12	71,39
3	2019	65,7	66,32	71,73	71,92
4	2020	66,20	66,32	71,87	71,94
5	2021	66,7	66,56	72,16	72,29

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan IPM sebagaimana Jawa Tengah dan Nasional. Capaian IPM Kabupaten Pemalang masih relatif lebih rendah dibandingkan capaian Jawa Tengah dan Nasional. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.25

Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat dan di level Nasional cenderung menurun. Peningkatan tertinggi IPM untuk Kabupaten Pemalang terjadi di Tahun 2017 (0,87). Di Tahun 2020, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional merupakan peningkatan yang paling rendah selama periode Tahun 2017-2021 yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Secara umum, Kabupaten Pemalang memiliki kinerja peningkatan IPM yang lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional. Posisi pembangunan manusia Kabupaten Pemalang dibandingkan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

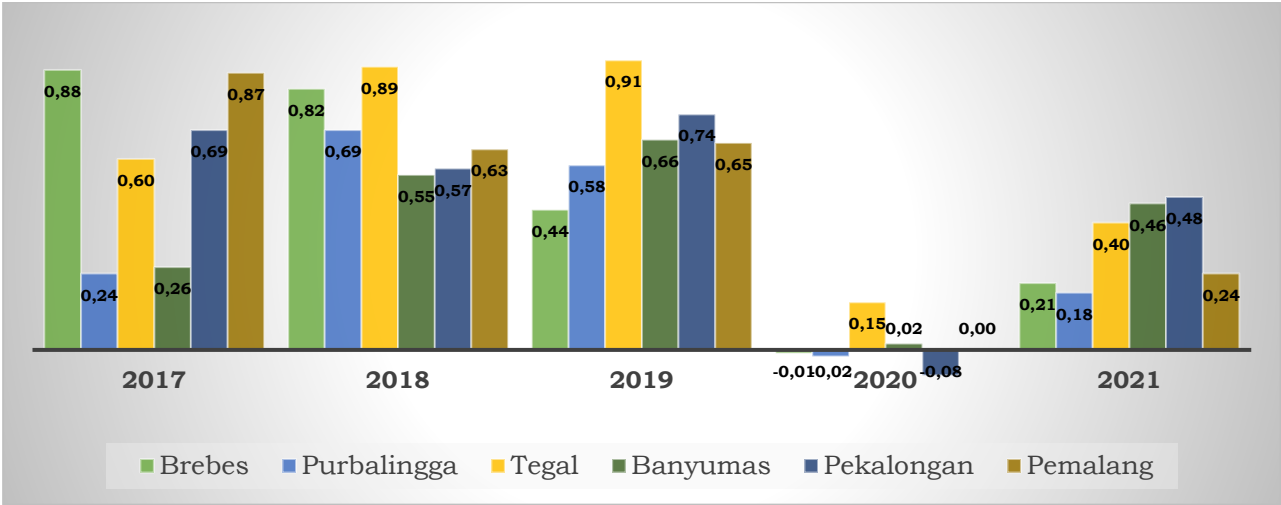
Tabel 2.27

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	64,86	67,72	66,44	70,75	68,4	67,63	65,04
2	2018	65,68	68,41	67,33	71,3	68,97	68,34	65,67
3	2019	66,12	68,99	68,24	71,96	69,71	69,00	66,32
4	2020	66,11	68,97	68,39	71,98	69,63	69,02	66,32
5	2021	66,32	69,15	68,79	72,44	70,11	69,36	66,56
Rata-rata		65,82	68,65	67,84	71,69	69,36	68,67	65,98

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021 Nilai IPM Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata IPM kabupaten sekitar dan hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes. Kinerja peningkatan IPM dapat dilihat dari tingkat perubahan IPM. Tingkat perubahan IPM Kabupaten Pemalang terhadap kabupaten sekitar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.26

Perubahan IPM Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten cenderung mengalami peningkatan IPM, namun di Tahun 2020 terdapat tiga kabupaten (Brebes, Purbalingga dan Pekalongan) yang mengalami penurunan IPM dan satu kabupaten (Pemalang) yang nilainya konstan. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 di Tahun 2020. Selanjutnya di Tahun 2021, semua kabupaten mengalami peningkatan IPM. Peningkatan IPM Kabupaten Pemalang sebesar 0,24 lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan IPM kabupaten sekitar (0,35). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan IPM Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibanding Kabupaten Brebes dan Purbalingga.

1) Angka Harapan Hidup (AHH)

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Tahun 2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 73,53 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan target RKPD 2021 sebesar 73,35 tahun. Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan provinsi dan nasional ditampilkan pada tabel berikut.

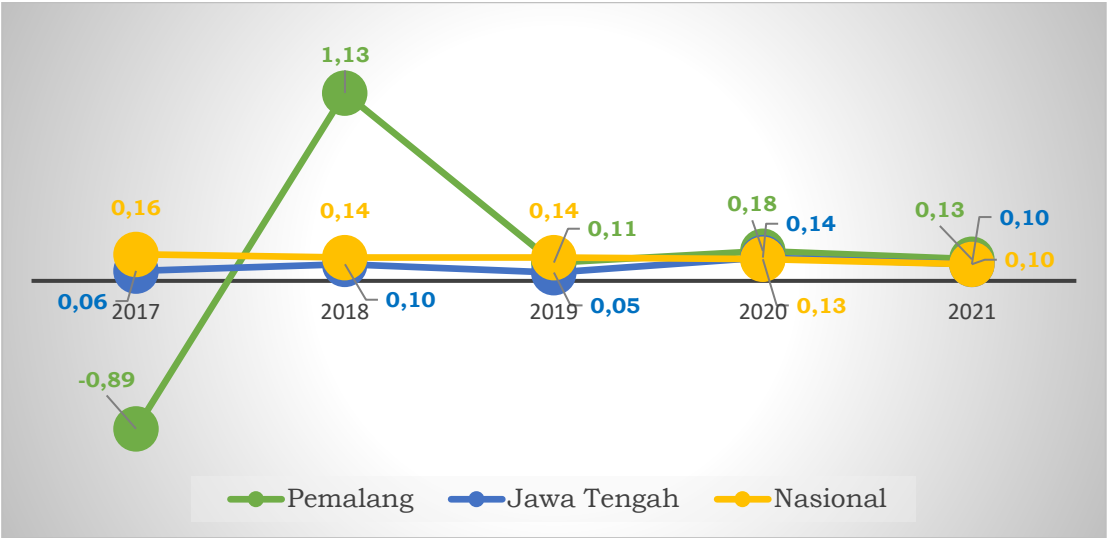
Tabel 2.28

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Usia Harapan Hidup			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	72,96	71,98	74,08	71,06
2	2018	73,06	73,11	74,18	71,2
3	2019	73,19	73,22	74,23	71,34
4	2020	73,25	73,40	74,37	71,47
5	2021	73,35	73,53	74,47	71,57

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan kualitas SDM pada dimensi kesehatan di Kabupaten Pemalang lebih baik dibandingkan Nasional, namun masih kurang dibandingkan Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan AHH menjadi tantangan bagi pembangunan di Kabupaten Pemalang, karena berpotensi meningkatkan angka ketergantungan serta pembiayaan di bidang kesehatan. Kinerja perbaikan kualitas manusia Kabupaten Pemalang, provinsi dan nasional pada dimensi kesehatan dapat dilihat dari tingkat perubahan AHH berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.27

Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata AHH Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,13 tahun sama dengan peningkatan di tingkat Nasional dan lebih tinggi dari peningkatan di Provinsi Jawa Tengah (0,09 tahun). Di Tahun 2021, peningkatan AHH Kabupaten Pemalang (0,13 tahun) lebih tinggi dibandingkan peningkatan AHH Nasional (0,10 tahun) dan Provinsi Jawa Tengah (0,10). Perbandingan AHH Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel berikut.

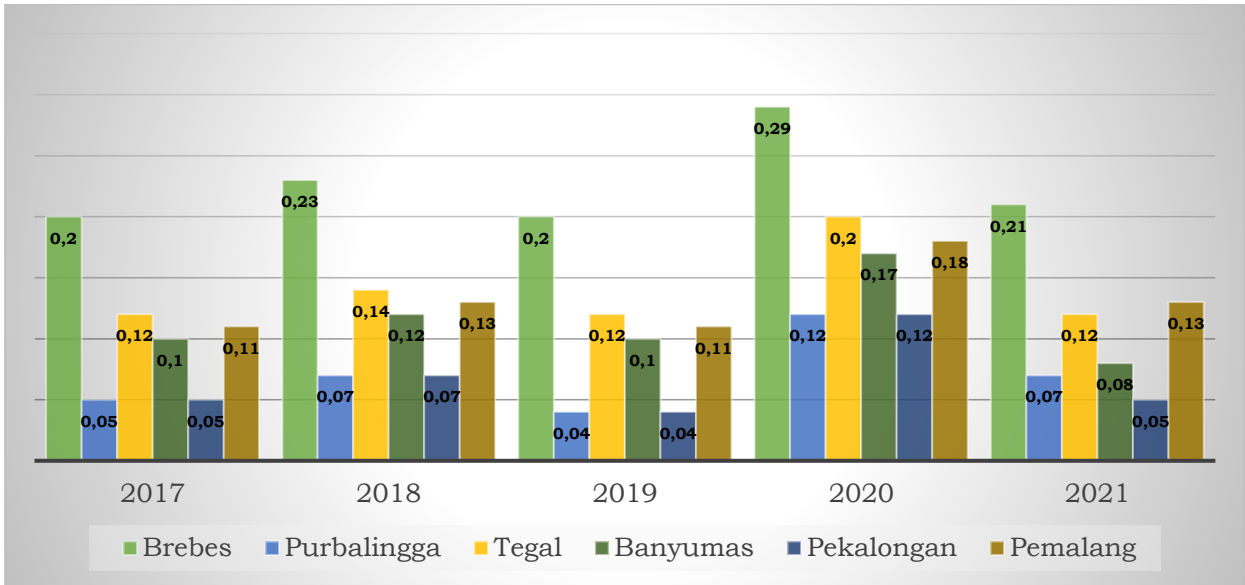
Tabel 2.29

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Angka Harapan Hidup (Tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	68,61	72,91	71,14	73,33	73,46	71,89	72,98
2	2018	68,84	72,98	71,28	73,45	73,53	72,02	73,11
3	2019	69,04	73,02	71,4	73,55	73,57	72,12	73,22
4	2020	69,33	73,14	71,6	73,72	73,69	72,30	73,4
5	2021	69,54	73,21	71,72	73,8	73,74	72,40	73,53
Rata-rata		69,07	73,05	71,43	73,57	73,60	72,14	73,25

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata AHH kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, AHH Kabupaten Pemalang sebesar 73,53 tahun lebih tinggi dengan rata-rata AHH kabupaten sekitar sebesar 72,40 tahun. Apabila dibandingkan dengan setiap kabupaten, rata-rata AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Brebes, Purbalingga, dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. Perbandingan kinerja peningkatan AHH antara Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.28

Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan AHH. Pada Tahun 2021, Peningkatan AHH Kabupaten Pemalang sebesar 0,13 lebih tinggi dibandingkan rata-rata peningkatan AHH kabupaten sekitar (0,11). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan AHH Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Pekalongan, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Brebes dan Tegal.

2)Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 11,96 tahun meningkat dari HLS Tahun 2020 sebesar 11,95 tahun. Angka tersebut tidak mencapai target RKPD 2021 sebesar 12,16 tahun. HLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perkembangan HLS Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional digambarkan sebagai berikut.

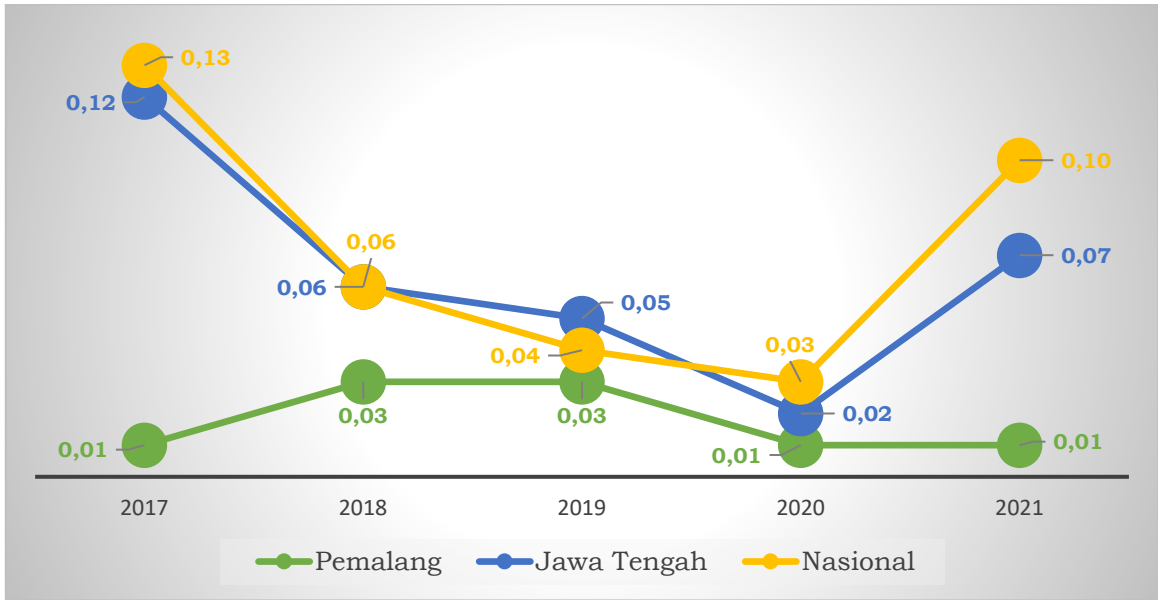
Tabel 2.30

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	11,56	11,88	12,57	12,85
2	2018	11,71	11,91	12,63	12,91
3	2019	11,86	11,94	12,68	12,95
4	2020	12,01	11,95	12,70	12,98
5	2021	12,16	11,96	12,77	13,08

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Peningkatan HLS di Kabupaten Pemalang mengindikasikan semakin meningkatnya akses terhadap pendidikan. Perbandingan kinerja peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.29

Peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, rata-rata peningkatan HLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,02 tahun, dimana peningkatan tersebut lebih rendah dari provinsi (0,06 tahun) dan nasional (0,07 tahun). Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2018 menunjukkan peningkatan, konstan di Tahun 2019, turun di Tahun 2020 dan konstan di Tahun 2021. Sementara itu, HLS provinsi dan nasional menunjukkan tren penurunan selama Tahun 2017-2020 dan mulai meningkat di Tahun 2021. Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun, lebih rendah dibandingkan peningkatan HLS provinsi (0,07 tahun) dan Nasional (0,10 tahun). Hal ini menunjukkan belum efektifnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan HLS. Untuk melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi pendidikan, HLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan HLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut.

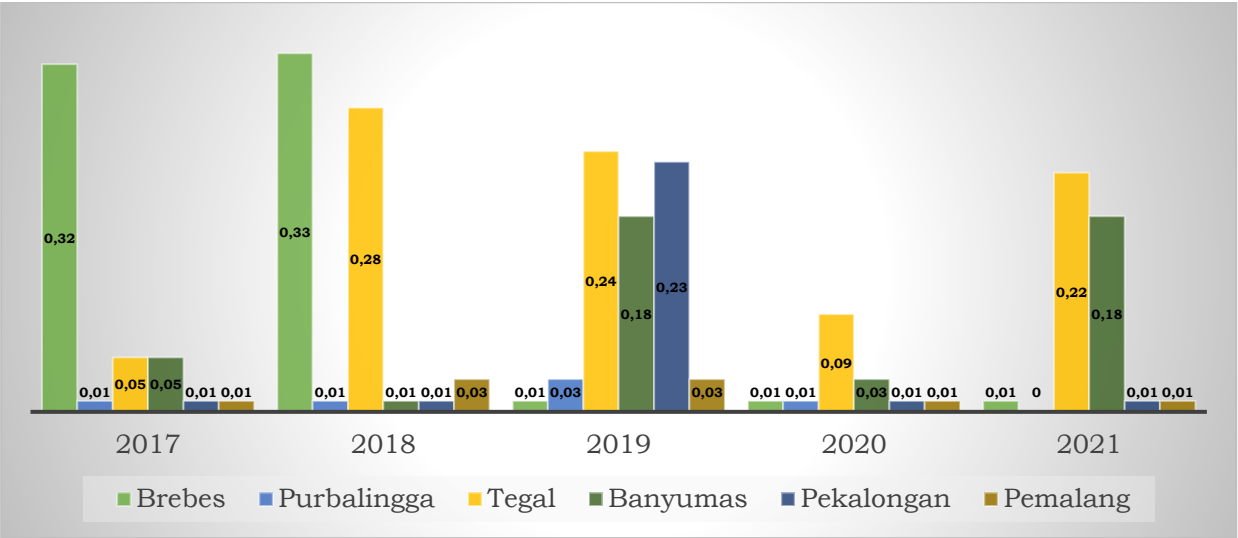
Tabel 2.31

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	11,69	11,94	12,06	12,63	12,16	12,10	11,88
2	2018	12,02	11,95	12,34	12,64	12,17	12,22	11,91
3	2019	12,03	11,98	12,58	12,82	12,4	12,36	11,94
4	2020	12,04	11,99	12,67	12,85	12,41	12,39	11,95
5	2021	12,05	11,99	12,89	13,03	12,42	12,48	11,96
Rata-rata		11,97	11,97	12,51	12,79	12,31	12,31	11,93

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2020, HLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata HLS kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, HLS Kabupaten Pemalang paling rendah dibandingkan kabupaten sekitar. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah dengan HLS tertinggi, hal ini disebabkan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai hingga jenjang pendidikan tinggi. Tingkat perubahan HLS Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.30

Peningkatan HLS Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan HLS. Pada Tahun 2021, peningkatan HLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,01 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan HLS kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan HLS Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, sama dengan Kabupaten Brebes dan Pekalongan, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal dan Banyumas. Rendahnya peningkatan HLS Kabupaten Pemalang disebabkan kurangnya ketersediaan dan persebaran fasilitas pendidikan termasuk perguruan tinggi.

3)Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang di Tahun 2020 adalah 7,44 tahun. Capaian RLS tersebut melampaui target RKPD 2020 (7,03 tahun). Namun demikian, Angka RLS Kabupaten Pemalang Tahun 2020 relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan RLS Jawa Tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun). Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	5,88	6,31	7,27	8,1
2	2018	5,89	6,32	7,35	8,17
3	2019	5,90	6,41	7,53	8,34
4	2020	5,91	6,42	7,69	8,48
5	2021	5,92	6,45	7,75	8,54

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Rendahnya RLS Kabupaten Pemalang disebabkan banyaknya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DWS). Dewasa Tidak Sekolah (usia di atas 25 tahun) didominasi oleh usia tua sehingga upaya peningkatan peserta pendidikan kesetaraan menjadi tidak optimal. Tingkat pendidikan penduduk usia di atas 25 tahun mayoritas tamat SD (lama sekolah 6 tahun). Gambaran tingkat pendidikan penduduk berdasar kecamatan tersaji pada tabel berikut.

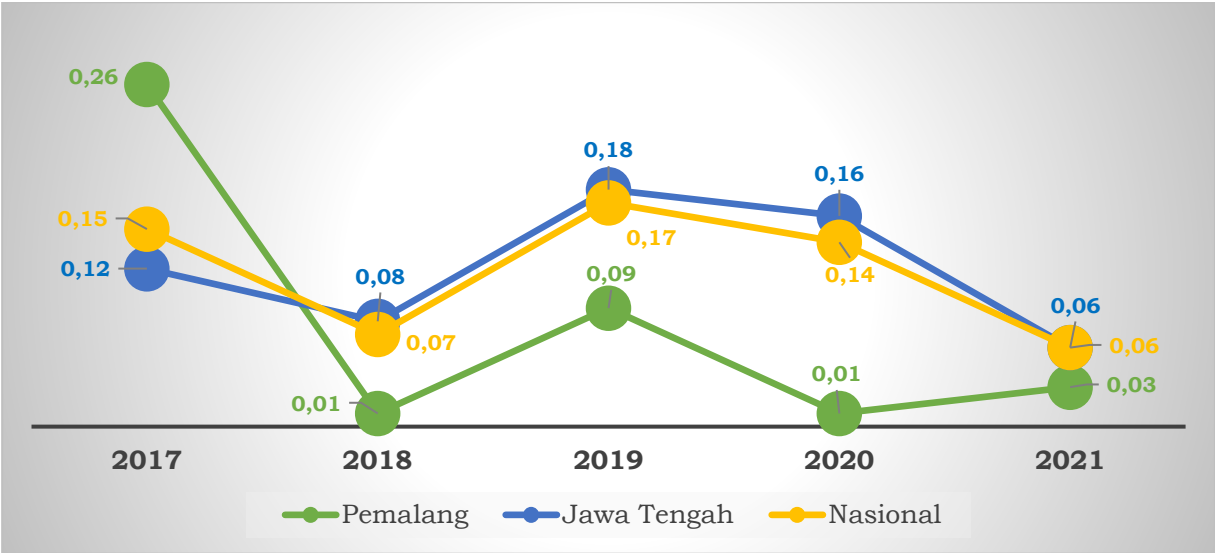
Tabel 2.33
Tingkat Pendidikan Penduduk Tiap Kecamatan Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Kecamatan	Penduduk Menurut Pendidikan				
		<SD	SD	SMP	SMA	>/=Diploma
1	Moga	9.445	33.178	9.686	5.797	538
2	Pulosari	5.899	30.237	7.346	3.060	281
3	Belik	18.870	51.221	10.091	6.159	535
4	Watukumpul	6.686	37.148	8.827	3.462	379
5	Bodeh	8.800	25.735	10.312	5.778	483
6	Bantarbolang	8.409	36.091	12.112	6.645	576
7	Randudongkal	10.471	42.365	17.293	12.100	1.183
8	Pemalang	26.170	55.647	27.940	30.322	3.140
9	Taman	25.193	56.379	28.332	25.013	2.351
10	Petarukan	19.792	56.898	29.116	21.290	1.743
11	Ampelgading	9.395	23.610	13.718	10.181	713
12	Comal	11.557	29.149	17.641	14.884	1.242
13	Ulujami	15.950	42.107	18.303	13.147	907
14	Warungpring	3.985	18.143	6.067	3.525	260
Total		180.622	537.908	216.784	161.363	14.331

Sumber: Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2022

Penduduk dengan tingkat pendidikan tamat SD sebesar 48,42%; tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD sebesar 16,26%; dan tamat SMP sebesar 19,51% yang selanjutnya diharapkan dapat mengikuti pendidikan nonformal kejar paket A/B/C untuk dapat meningkatkan RLS Kabupaten Pemalang. Dilihat dari persebarannya, penduduk tidak tamat SD paling banyak berada di Kecamatan Pemalang sebesar 14,49%; Kecamatan Taman sebesar 13,95% dan Kecamatan Petarukan sebesar 10,96%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SD paling banyak berada di Kecamatan Petarukan sebesar 10,58%; Kecamatan Taman sebesar 10,48%; dan Kecamatan Pemalang sebesar 10,35%. Penduduk dengan tingkat pendidikan SMP paling banyak berada di Kecamatan Petarukan sebesar 13,43%; Kecamatan Taman sebesar 13,07%; dan Kecamatan Pemalang sebesar 12,89%.

Kecamatan yang memiliki penduduk dengan tingkat pendidikan di bawah 9 tahun tertinggi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu Kecamatan Petarukan, Taman dan Pemalang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah memiliki keterbatasan untuk mengakses lapangan pekerjaan, sehingga memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya, dengan pendapatan yang rendah tersebut mereka memiliki keterbatasan untuk mengakses pelayanan dasar, termasuk pendidikan. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan absolut dan membutuhkan penanganan yang holistik dan integratif. Perbandingan kinerja Kabupaten Pemalang dalam peningkatan RLS dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022 (diolah)
Gambar 2.31

Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

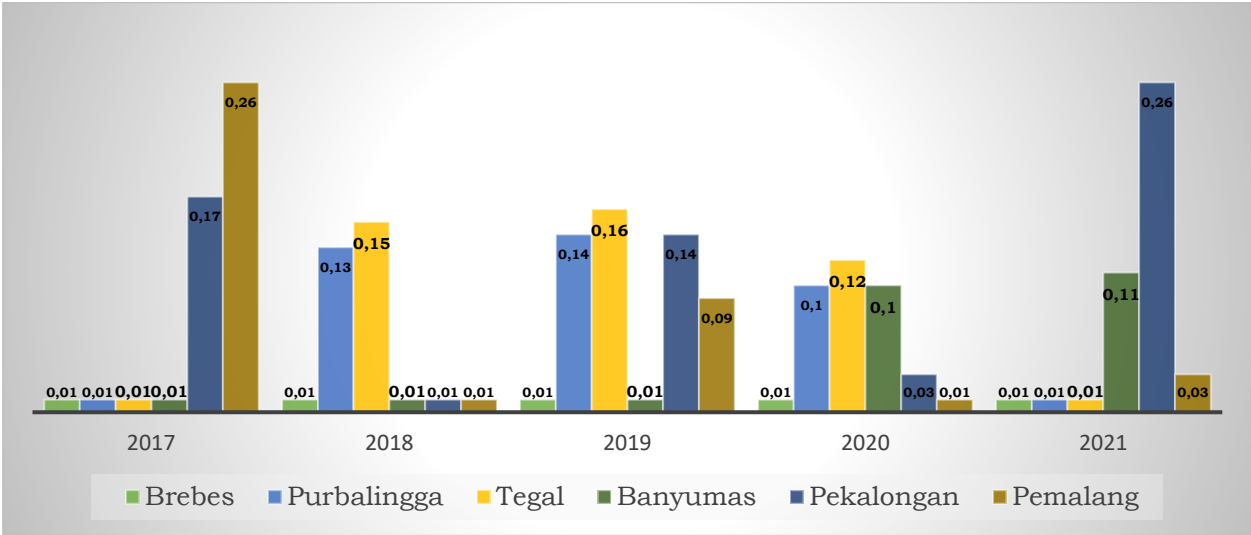
Peningkatan RLS Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2017, Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan RLS tertinggi sebesar 0,26 tahun lebih tinggi dibandingkan peningkatan RLS Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,16 tahun). Selama tahun 2017-2021 kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS sebesar 0,08 tahun lebih rendah dibandingkan kinerja Provinsi Jawa Tengah (0,12 tahun) dan Nasional (0,12 tahun). Hal ini menunjukkan belum efektifnya kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan RLS. Untuk melihat kinerja peningkatan kualitas manusia pada dimensi pendidikan, RLS Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan RLS kabupaten sekitar seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	6,18	6,87	6,55	7,4	6,73	6,75	6,31
2	2018	6,19	7,00	6,70	7,41	6,74	6,81	6,32
3	2019	6,20	7,14	6,86	7,42	6,88	6,90	6,41
4	2020	6,21	7,24	6,98	7,52	6,91	6,97	6,42
5	2021	6,22	7,25	6,99	7,63	7,17	7,05	6,45
Rata-rata		6,20	7,10	6,82	7,48	6,89	6,90	6,38

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, RLS Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata RLS kabupaten sekitar. Pada Tahun 2021, Kabupaten Banyumas memiliki RLS paling tinggi, hal ini disebabkan tersedianya fasilitas pendidikan yang memadai. Sedangkan RLS Kabupaten Pemalang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Brebes. Tingkat perubahan RLS Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.32

Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021 semua kabupaten mengalami peningkatan RLS. Pada Tahun 2021, peningkatan RLS Kabupaten Pemalang sebesar 0,03 tahun lebih rendah dibandingkan rata-rata peningkatan RLS kabupaten sekitar (0,08 tahun). Selanjutnya, jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, peningkatan RLS Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes, Purbalingga dan Tegal, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. Rendahnya peningkatan RLS Kabupaten Pemalang disebabkan masih kurang optimalnya pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan akibat masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi mengikuti pendidikan kesetaraan.

4) Pengeluaran Perkapita

Pada Tahun 2017-2019, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan, artinya terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk. Namun di Tahun 2020, pengeluaran perkapita mengalami penurunan dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi penduduk. Selanjutnya di Tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 8.573 ribu rupiah lebih rendah dibandingkan target RKPD 2021 sebesar 9.003 ribu rupiah. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional tersaji pada tabel berikut.

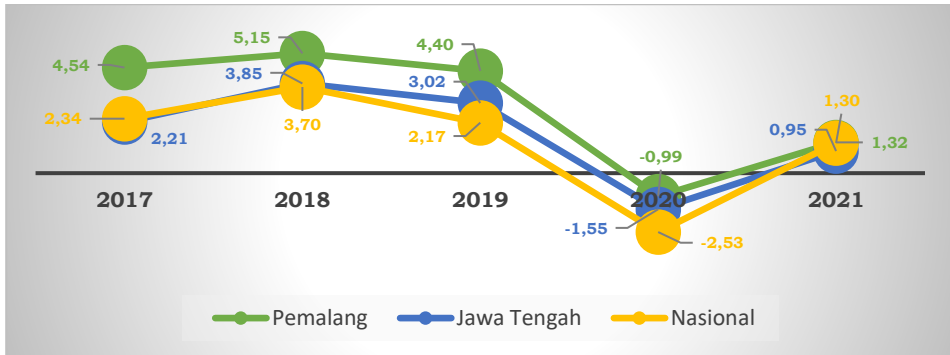
Tabel 2.35

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pengeluaran perkapita (ribu rupiah)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	7.740	7.785	10.377	10.664
2	2018	8.038	8.186	10.777	11.059
3	2019	8.348	8.546	11.102	11.299
4	2020	8.669	8.461	10.930	11.013
5	2021	9.003	8.573	11.034	11.156

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Pada Tahun 2020, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan, namun berangsur meningkat di Tahun 2021. Pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.33

Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Di Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang terkontraksi sebesar 0,99%, lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang terkontraksi sebesar 1,55% dan Nasional sebesar 2,53%. Pada Tahun 2021, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (0,95%) dan Nasional (1,30%).

Pengeluaran perkapita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengeluaran makanan dan non makanan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari persentase pengeluaran non makanan, dimana semakin tinggi tingkat pendapatan penduduk, maka pola konsumsi penduduk akan bergeser ke konsumsi non makanan. Pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2020 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.36

Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang Per Komoditas Tahun 2018-2020

No	Kelompok Komoditas	Rata-rata Pengeluaran (Rp.)					
		2018	%	2019	%	2020	%
	Kelompok Makanan	508.614	57,05	490.368	55,51	521.620	56,46
1	Padi-padian	60.448	6,78	54.185	6,13	54.936	5,95
2	Umbi-Umbian	2.818	0,32	3.042	0,34	3.340	0,36
3	Ikan	22.640	2,54	22.437	2,54	22.201	2,40
4	Daging	15.056	1,69	15.531	1,76	15.696	1,70
5	Telur dan Susu	24.407	2,74	23.616	2,67	25.044	2,71
6	Sayur-sayuran	30.168	3,38	30.697	3,48	36.822	3,99
7	Kacang-kacangan	14.361	1,61	14.210	1,61	14.787	1,60
8	Buah-buahan	30.086	3,37	24.338	2,76	23.157	2,51
9	Minyak dan lemak	10.542	1,18	10.963	1,24	11.267	1,22
10	Bahan Minuman	15.850	1,78	15.720	1,78	19.909	2,15
11	Bumbu-bumbuan	11.417	1,28	11.447	1,30	11.975	1,30
12	Konsumsi lainnya	10.007	1,12	8.917	1,01	9.534	1,03
13	Makanan dan minuman jadi	196.919	22,09	195.380	22,12	206.910	22,40
14	Tembakau dan sirih	63.895	7,17	59.885	6,78	66.042	7,15
	Kelompok Bukan Makanan	382.957	42,95	392.987	44,49	402.257	43,54
15	Perumahan dan Fasilitas Rumah	152.540	17,11	177.936	20,14	187.142	20,26
16	Barang dan Jasa	98.095	11,00	100.484	11,38	105.849	11,46
17	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	23.826	2,67	24.201	2,74	26.024	2,82
18	Barang tahan lama	71.616	8,03	42.594	4,82	47.781	5,17
19	Pajak, pungutan dan asuransi	16.979	1,90	23.906	2,71	25.640	2,78
20	Keperluan pesta dan kenduri	19.901	2,23	23.866	2,70	9.821	1,06
	Jumlah	891.571	100	883.355	100	923.877	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021

Selama Tahun 2018-2020, pola konsumsi perkapita Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok makanan. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pemalang masih rendah, yaitu konsumsi yang dilakukan masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan. Pada konsumsi makanan, didominasi oleh komoditas makanan dan minuman jadi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini patut mendapatkan perhatian karena konsumsi makanan dan minuman jadi yang tinggi berpotensi meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Konsumsi karbohidrat serta protein hewani mengalami penurunan, terutama pada konsumsi padi-padian dan ikan, sementara konsumsi protein nabati mengalami peningkatan, utamanya untuk konsumsi sayur-sayuran. Konsumsi tembakau dan sirih cenderung fluktuatif dengan peningkatan di Tahun 2020 yang ditunjang oleh kenaikan cukai rokok. Tingginya nilai pengeluaran untuk tembakau perlu mendapatkan perhatian karena berpotensi menurunkan kualitas kesehatan keluarga.

Proporsi pengeluaran untuk konsumsi non makanan selama Tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif. Proporsi tertinggi untuk pengeluaran perkapita nonmakanan adalah perumahan dan fasilitas rumah yang meningkat tiap tahunnya. Selama masa pandemi Covid-19, pengeluaran untuk alat komunikasi elektronik, seperti laptop dan telepon seluler/*handphone* meningkat tajam karena penerapan bekerja dari rumah maupun pembelajaran daring.

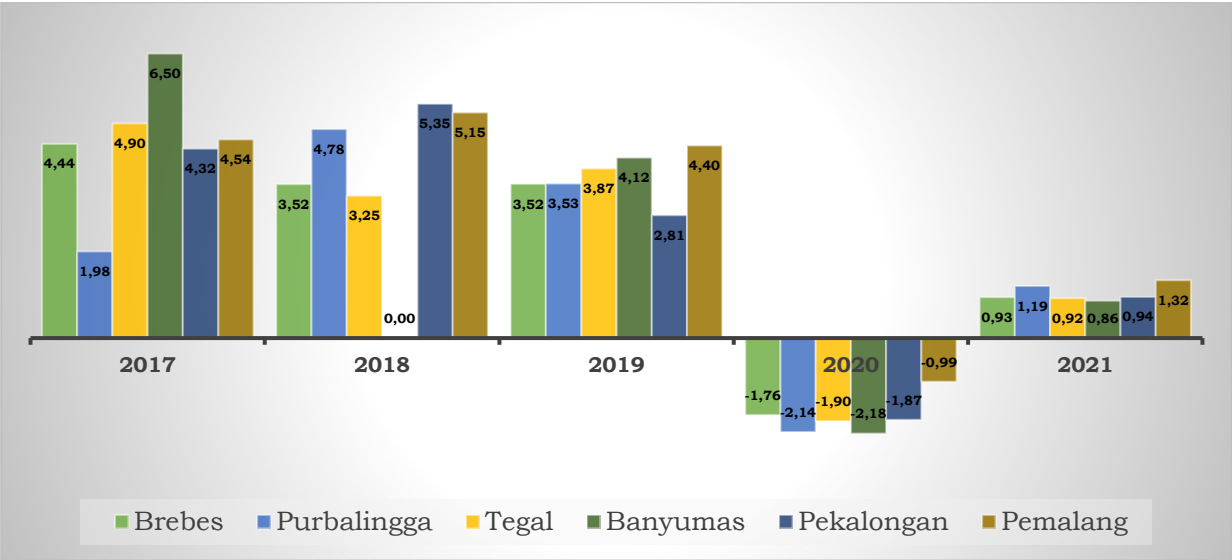
Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya kualitas manusia pada dimensi ekonomi. Perbandingan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar tersaji sebagai berikut.

Tabel 2.37
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	9.148	9.159	8.709	10.554	9.300	9.374	7.447
2	2018	9.554	9.340	9.136	11.240	9.702	9.794	7.785
3	2019	9.890	9.786	9.433	11.240	10.221	10.114	8.186
4	2020	10.238	10.131	9.798	11.703	10.508	10.476	8.546
5	2021	10.058	9.914	9.612	11.448	10.312	10.269	8.461

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu Tahun 2017-2021, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten sekitar dan lebih rendah juga diantara 5 kabupaten sekitar. Hal ini berarti bahwa masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai status kesejahteraan paling rendah dibandingkan masyarakat kabupaten sekitar. Tingkat perubahan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)
Gambar 2.34

Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan perkapita kabupaten sekitar. Di Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang terkontraksi sebesar 0,99%, lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar yang terkontraksi sebesar 1,97%. Pada Tahun 2021, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 1,32% lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar sebesar 0,96% dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengeluaran perkapita kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pertumbuhan pengeluaran perkapita lebih baik dibandingkan dengan kabupaten sekitar.

g. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencerminkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang telah menyajikan data gender yang terpilah meliputi pilah jenis kelamin, usia, wilayah serta insiden khusus.

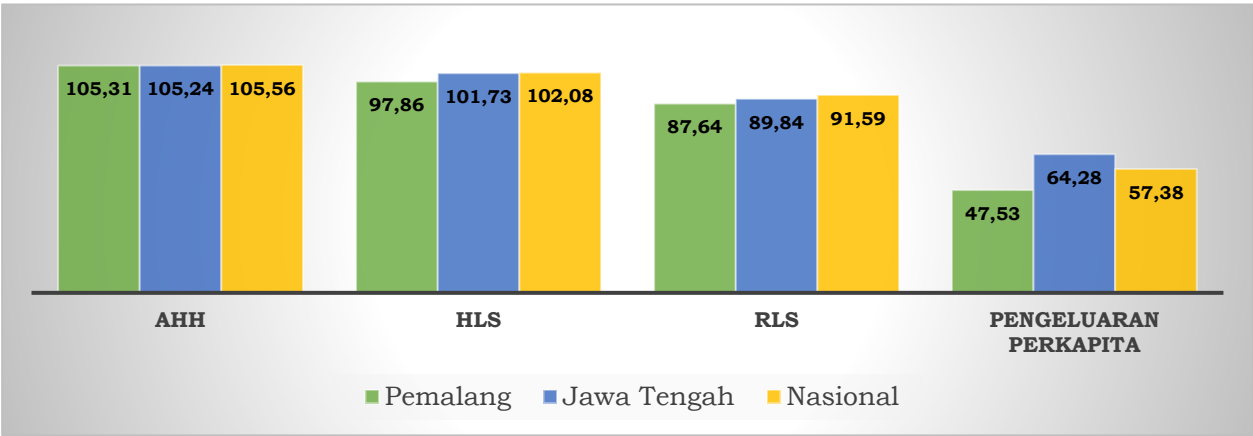
Komponen IPG sama dengan komponen IPM namun dipilah antara laki-laki dan perempuan. Pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020 diprediksi memberikan dampak yang lebih berat bagi perempuan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut selanjutnya berkontribusi terhadap penurunan kualitas perempuan dan semakin memperbesar kesenjangan berdasarkan gender. Tahun 2021, IPG Kabupaten Pemalang sebesar 86,49 dimana nilai IPG tersebut lebih rendah dibandingkan capaian IPG provinsi (92,48) dan nasional (91,27). Jika dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2021, capaian IPG Kabupaten Pemalang sudah mencapai target. Selain dibandingkan dengan target RKPD tahun terkait, capaian IPG Kabupaten Pemalang juga dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	84,87	85,47	91,94	90,96
2	2018	85,21	85,49	91,95	90,99
3	2019	85,55	85,81	91,89	91,07
4	2020	84,53	85,83	92,18	91,06
5	2021	85,89	86,49	92,48	91,27

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, IPG Kabupaten Pemalang meningkat setiap tahunnya. Di Tahun 2021, IPG Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun, di Tahun 2021, kinerja Kabupaten Pemalang berhasil meningkatkan IPG sebesar 0,66; IPG Provinsi Jawa Tengah juga meningkat sebesar 0,3; dan IPG Nasional naik sebesar 0,21. Perbandingan Komponen IPG Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional pada Tahun 2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.35
Rasio Komponen IPG Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, dimensi ekonomi merupakan komponen IPG yang memiliki kontribusi paling lemah terhadap pembangunan gender di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional. Perempuan memiliki pengeluaran perkapita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Apabila dibandingkan, kesenjangan gender dalam pengeluaran perkapita di Kabupaten Pemalang (47,53) lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (64,28) dan Nasional (57,38). Dimensi pendidikan baik Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berkontribusi terhadap kesenjangan kualitas manusia berbasis gender, dimana HLS dan RLS laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan HLS dan RLS perempuan, artinya perempuan belum mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk menempuh pendidikan. Hal ini disebabkan masih kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai serta masih adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah yang tinggi. Pada dimensi kesehatan, kualitas kesehatan perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki, namun kesenjangannya tidak terlalu lebar. Kesenjangan kualitas manusia pada dimensi kesehatan di Kabupaten Pemalang lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah (105,24) dan

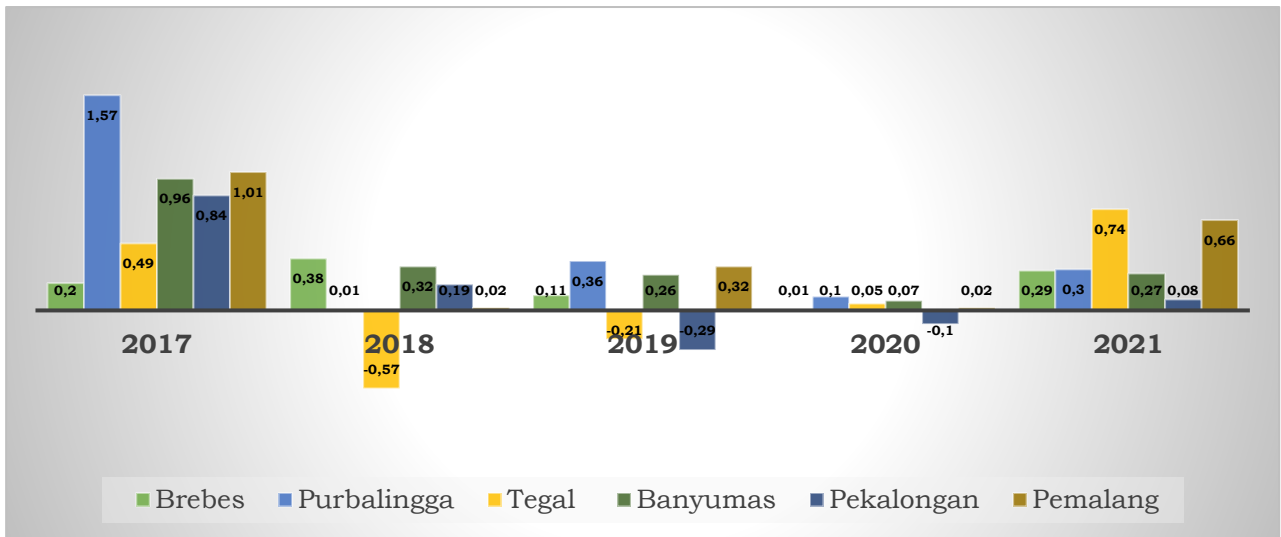
sedikit lebih tinggi dibandingkan Nasional (105,56). Perbandingan capaian IPG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	85,86	92,31	87,52	87,62	92,68	89,20	85,47
2	2018	86,24	92,32	86,95	87,94	92,87	89,26	85,49
3	2019	86,35	92,68	86,74	88,2	92,58	89,31	85,81
4	2020	86,36	92,78	86,79	88,27	92,48	89,34	85,83
5	2021	86,65	93,08	87,53	88,54	92,56	89,67	86,49
Rata-rata		86,29	92,63	87,11	88,11	92,63	89,36	85,82

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, IPG Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan rata-rata IPG kabupaten sekitar dan juga lebih rendah dari IPG semua kabupaten sekitar. Perubahan IPG Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



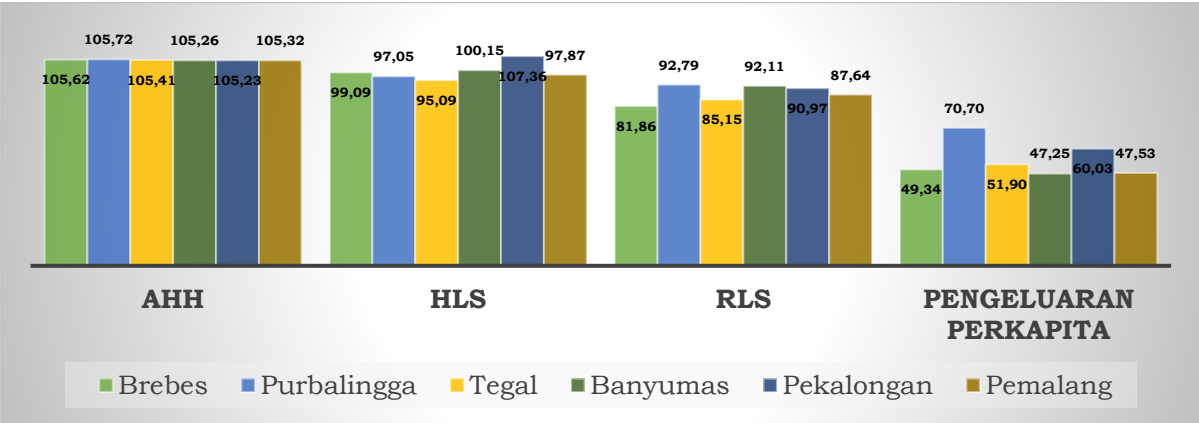
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.36

Perubahan IPG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021, perubahan IPG Kabupaten Pemalang (0,406) lebih tinggi dibandingkan rata-rata perubahan IPG kabupaten sekitar (0,144). Pada Tahun 2021, perubahan IPG Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 0,66 lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar sebesar 0,08, namun lebih rendah dibandingkan perubahan IPG Kabupaten Tegal (0,74). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pertumbuhan IPG lebih baik dibandingkan dengan Brebes, Purbalingga, Banyumas dan Pekalongan.

Kabupaten Pemalang beserta 5 kabupaten sekitar tetap menunjukkan kinerja positif dalam pembangunan gender, dimana peningkatan IPG tertinggi dimiliki Kabupaten Purbalingga sebesar 0,468. Perbandingan nilai setiap komponen IPG Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar di Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.37

Rasio Komponen IPG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

Rata-rata rasio AHH Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar relatif sama sebesar 105 artinya kualitas kesehatan perempuan di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya lebih baik dibandingkan kualitas hidup laki-laki. Pada dimensi pendidikan, tingkat pendidikan penduduk perempuan di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya lebih rendah dibandingkan tingkat pendidikan penduduk laki-laki. Kabupaten Brebes, Purbalingga, Tegal, dan Pemalang memiliki rasio HLS kurang dari 1, artinya HLS penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan HLS laki-laki. HLS penduduk perempuan lebih baik dibandingkan HLS laki-laki ada di Kabupaten Banyumas dan Pekalongan. Kesenjangan RLS Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Pekalongan. Nilai RLS Kabupaten Pemalang lebih baik hanya dari Kabupaten Brebes (81,86) dan Tegal (85,15). Dimensi ekonomi dengan indikator pengeluaran perkapita merupakan komponen dengan kesenjangan paling lebar dibandingkan komponen lainnya. Kabupaten Pemalang dan seluruh kabupaten sekitar menunjukkan rasio pengeluaran perkapita di bawah 1, artinya pengeluaran perkapita perempuan lebih rendah dibandingkan pengeluaran perkapita laki-laki. Kesenjangan gender pada pengeluaran perkapita di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan kabupaten sekitar dan hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Banyumas (47,25).

h. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan alat ukur keberhasilan pembangunan gender, yang secara spesifik menitikberatkan kepada peran serta perempuan dalam bidang ekonomi dan politik. Komponen IDG terdiri dari persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional, dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Data IDG selama tahun 2017-2021 tersaji pada tabel berikut.

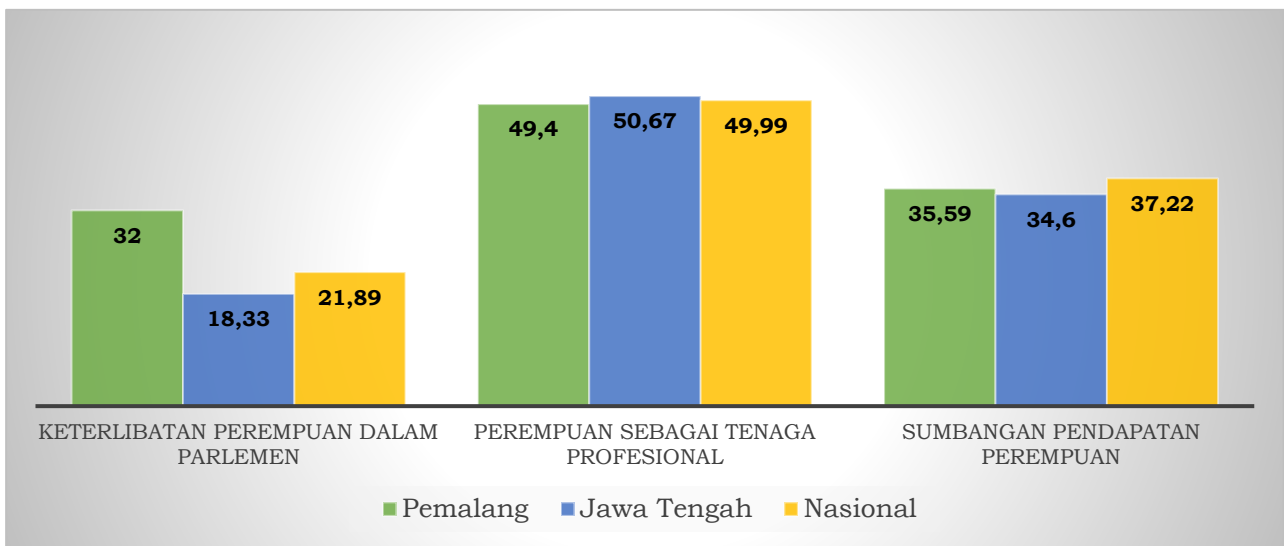
Tabel 2.40

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah & Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	69,33	70,52	75,1	71,74
2	2018	69,79	68,95	74,03	72,1
3	2019	70,25	80,08	72,18	75,24
4	2020	70,71	80,95	71,73	75,57
5	2021	71,17	81,27	71,64	76,26

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama kurun waktu tahun 2017-2021, kinerja pemberdayaan gender di Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, namun terjadi penurunan kinerja di Tahun 2018. Pada Tahun 2019-2021, kinerja pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang meningkat melebihi target RKPD dan lebih tinggi dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Analisis perbandingan komponen IDG Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional di Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.38
Nilai Komponen IDG Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, pemberdayaan perempuan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional relatif masih lemah. Dari ketiga komponen IDG, aspek politik dengan indikator keterlibatan perempuan dalam parlemen menjadi aspek yang paling lemah. Hal tersebut terlihat dari capaian yang cukup rendah di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan Nasional. Kabupaten Pemalang memiliki persentase keterlibatan perempuan dalam parlemen paling tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional.

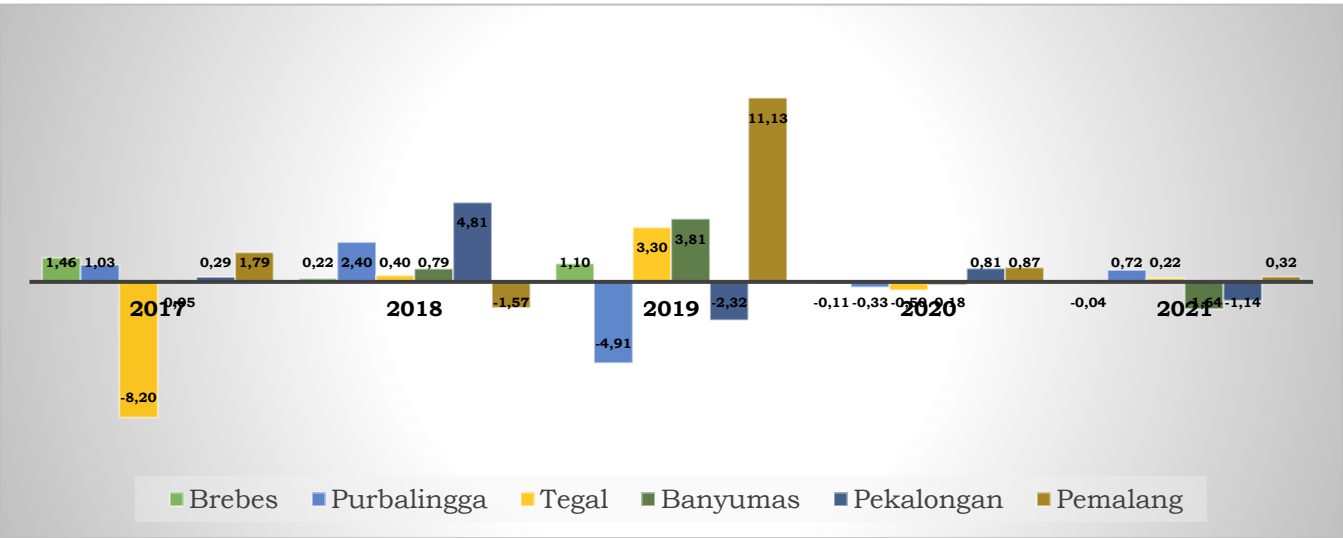
Aspek ekonomi dengan indikator sumbangan pendapatan perempuan juga menjadi komponen yang masih lemah. Persentase sumbangan pendapatan perempuan Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 35,59% lebih tinggi dari capaian Jawa Tengah (34,6%), namun lebih rendah dari capaian Nasional (37,22%). Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2020, dikarenakan bertambahnya kesempatan kerja yang ada akibat meningkatnya investasi di Kabupaten Pemalang. Peran perempuan sebagai tenaga profesional menjadi komponen IDG dengan kontribusi tertinggi. Peran perempuan sebagai tenaga professional di Kabupaten Pemalang sebesar 49,4% lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (50,67%) dan Nasional (49,99%). Perbandingan IDG Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.41
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata-rata	Pemalang
1	2017	60,72	73,11	68,90	67,32	68,38	67,69	70,52
2	2018	60,94	75,51	69,30	68,11	73,19	69,41	68,95
3	2019	62,04	70,60	72,60	71,92	70,87	69,61	80,08
4	2020	61,93	70,27	72,10	71,74	71,68	69,54	80,95
5	2021	61,89	70,99	72,32	70,10	70,54	69,17	81,27
Rata-rata		61,50	72,10	71,04	69,84	70,93	69,08	76,35

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, IDG Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan rata-rata IDG kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik dari Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan pembangunan kesetaraan gender. Perubahan IDG Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



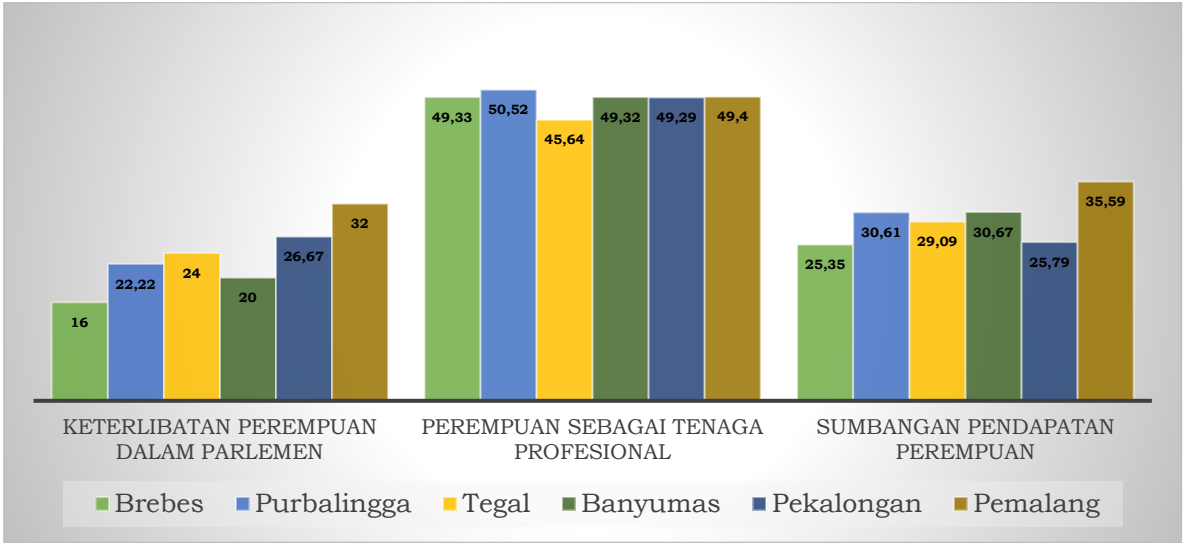
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)

Gambar 2.39

Perubahan IDG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2020, perubahan IDG Kabupaten Pemalang (2,51) lebih tinggi dibandingkan rata-rata perubahan IDG kabupaten sekitar (0,08). Pada Tahun 2021, perubahan IDG Kabupaten Pemalang meningkat sebesar 0,32 lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten sekitar yang turun sebesar 0,38 dan lebih tinggi dibandingkan perubahan IDG semua kabupaten sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan pertumbuhan IDG lebih baik dibandingkan 5 kabupaten sekitar.

Dampak Pandemi Covid-19 terbesar terjadi di Kabupaten Tegal yang mengalami penurunan IDG sebesar 0,46 point di Tahun 2020, namun, dapat diperbaiki di Tahun 2021 sehingga meningkat sebesar 0,22 point. Kabupaten yang masih mengalami penurunan IDG di Tahun 2021 yaitu Kabupaten Brebes (-0,04), Banyumas (-1,64) dan Pekalongan (-1,14). Perbandingan nilai setiap komponen IDG Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar di Tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)
Gambar 2.40

Komponen IDG Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2021

Aspek perempuan sebagai tenaga profesional mempunyai kinerja paling baik dalam pemberdayaan gender di Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitarnya. Persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Kabupaten Pemalang sebesar 49,4% lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Brebes, Tegal, Banyumas dan Pekalongan. Aspek sumbangan pendapatan perempuan merupakan aspek dengan kinerja terbaik kedua. Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Pemalang (35,59%) paling tinggi dibandingkan kabupaten sekitar. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan aspek dengan kinerja paling rendah di Kabupaten Pemalang dan juga kabupaten sekitar. Hal ini disebabkan rendahnya persentase perempuan sebagai anggota dewan legislatif. Persentase perempuan yang duduk dalam parlemen di Kabupaten Pemalang merupakan yang tertinggi dibandingkan kabupaten sekitar dengan persentase sebesar 32%.

i. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Selama Tahun 2017-2020, TPT di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan. Namun di Tahun 2021, tingkat pengangguran menunjukkan penurunan. TPT di Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
		Target RKPD	Realisasi Kab. Pemalang	Jawa Tengah	Nasional
1	2017	7,03	5,59	4,57	5,50
2	2018	7,00	6,17	4,47	5,30
3	2019	6,93	6,45	4,44	5,23
4	2020	6,87	7,64	6,48	7,07
5	2021	8,04	6,71	5,95	6,49

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

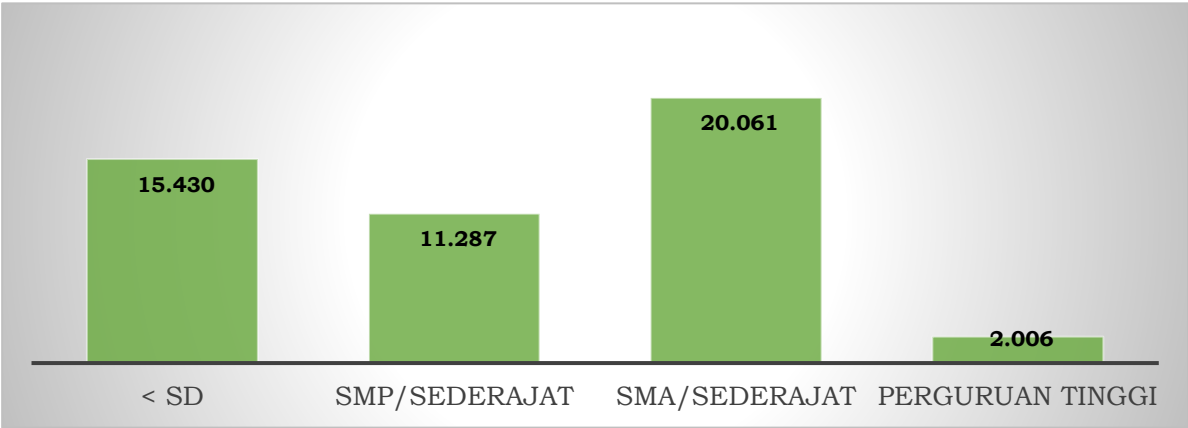
Sejak Tahun 2018-2020, TPT di Kabupaten Pemalang menunjukkan peningkatan, sedangkan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan setiap tahunnya dari Tahun 2018-2019. Hal ini menunjukkan kurang efektifnya kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan tingkat pengangguran. Selanjutnya, di Tahun 2020, adanya pandemi Covid-19 membuat jumlah pengangguran bertambah karena peningkatan jumlah penduduk usia kerja tidak

seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, disebabkan meningkatnya kepulauan penduduk yang bekerja di luar daerah karena tidak lagi bekerja. Walaupun meningkat, TPT di Tahun 2021 masih dibawah target RKPD 2021. Kinerja Kabupaten Pemalang dalam menurunkan pengangguran dibandingkan dengan provinsi dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022 (diolah)
 Gambar 2.41
 Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2021

Secara garis besar, selama Tahun 2017-2021 kinerja penurunan TPT Kabupaten Pemalang lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Di Tahun 2018 dan 2019, Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan TPT, sedangkan di tingkat provinsi dan nasional TPT mengalami penurunan. Namun, di Tahun 2021, penurunan TPT Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penganggur memiliki tingkat pendidikan SMA/ sederajat (41,12%). Gambaran penganggur di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan tersaji gambar berikut.



Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2021
 Gambar 2.42
 Jumlah Penganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Di Tahun 2020, penganggur dengan tingkat pendidikan SMA/ sederajat sebesar 41,12%; tingkat pendidikan SMP/ sederajat sebesar 23,14%; tingkat

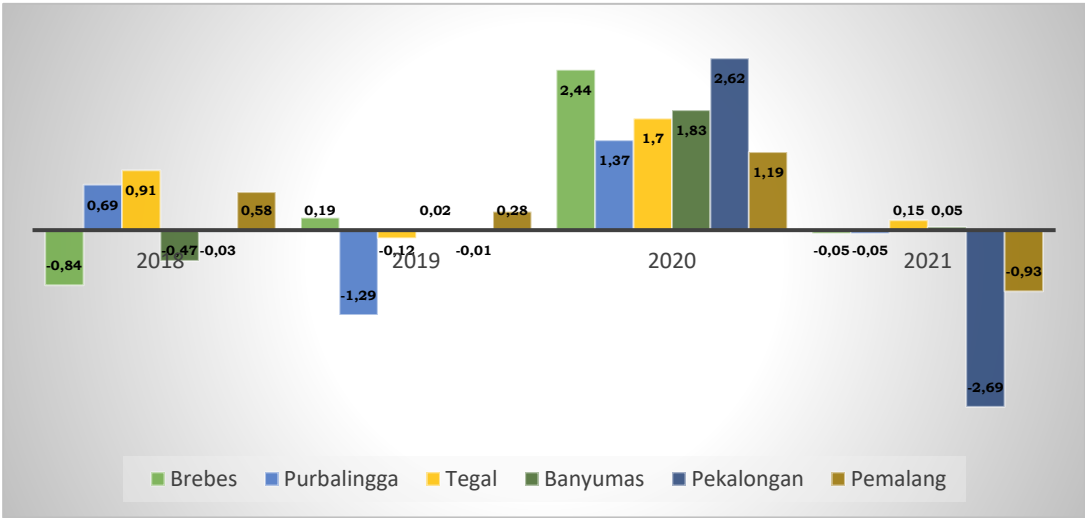
pendidikan SD/dibawah SD sebesar 31,63% dan tingkat pendidikan perguruan tinggi sebesar 4,11%. Rendahnya tingkat pendidikan para penganggur menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyediakan fasilitas peningkatan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan pasar. Perbandingan TPT Kabupaten Pemalang dengan kabupaten sekitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)						
		Brebes	Purbalingga	Tegal	Banyumas	Pekalongan	Rata2	Pemalang
1	2017	8,04	5,33	7,33	4,62	4,39	5,94	5,59
2	2018	7,2	6,02	8,24	4,15	4,36	5,99	6,17
3	2019	7,39	4,73	8,12	4,17	4,35	5,75	6,45
4	2020	9,83	6,1	9,82	6	6,97	7,74	7,64
5	2021	9,78	6,05	9,97	6,05	4,28	7,23	6,71
	Rata-rata	8,45	5,65	8,70	5,00	4,87	6,53	6,51

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Selama Tahun 2017-2021, TPT Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif dibandingkan rata-rata TPT kabupaten sekitar. Jika dibandingkan dengan setiap kabupaten, TPT Kabupaten Pemalang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Pekalongan. TPT Kabupaten Pemalang lebih rendah dari Kabupaten Brebes dan Tegal. Di Tahun 2020, Kabupaten Pemalang bersama lima kabupaten sekitar mengalami kenaikan TPT sebagai dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, di Tahun 2021 TPT dapat diturunkan di 4 kabupaten, namun Kabupaten Tegal dan Banyumas mengalami kenaikan TPT. Kinerja pengurangan TPT Kabupaten Pemalang dan kabupaten sekitar selama tahun 2018-2021 tersaji pada gambar berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022(diolah)

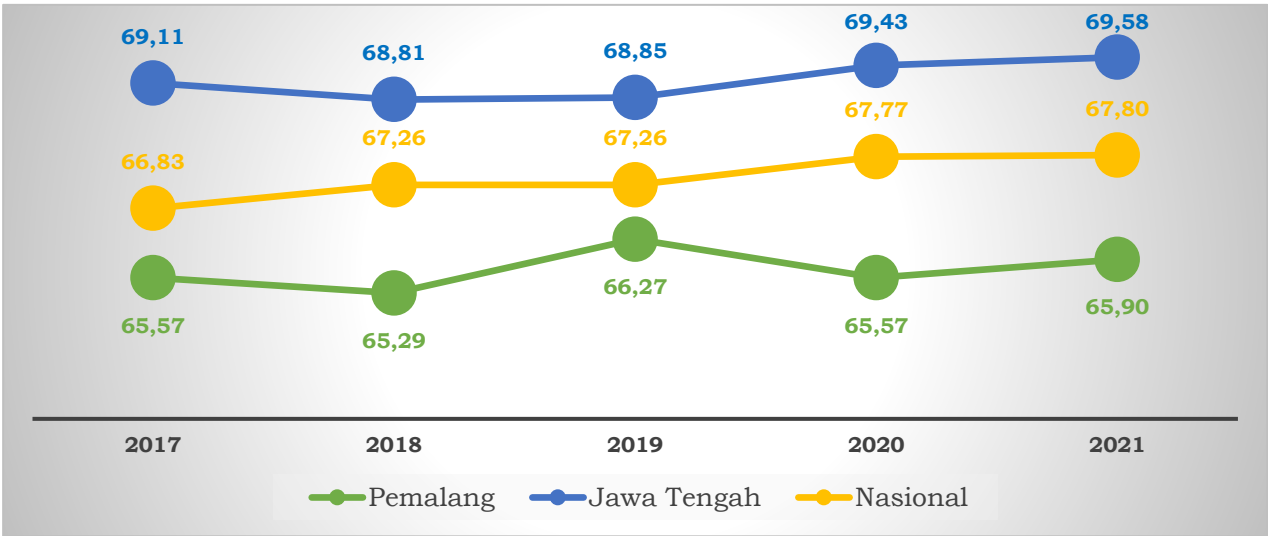
Gambar 2.43

Pengurangan TPT Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sekitar Tahun 2018-2021

Kinerja terbaik pengurangan TPT selama Tahun 2018-2021 adalah Kabupaten Pekalongan yaitu berhasil mengurangi TPT sebesar 0,03%, sedangkan untuk 5 kabupaten yang lain termasuk Kabupaten Pemalang mengalami kenaikan TPT. Di Tahun 2020 terjadi peningkatan TPT di semua kabupaten akibat adanya pandemi Covid-19. Di Tahun 2021, TPT Kabupaten Pemalang mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menurunkan TPT telah membuahkan hasil.

j. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Rasio Penduduk Bekerja**

Selama Tahun 2017-2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Di Tahun 2020, TPAK sebesar 65,57% menurun dibandingkan Tahun 2019, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional. Namun di Tahun 2021 terjadi peningkatan TPAK di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah maupun Nasional. TPAK Kabupaten Pemalang masih merupakan yang paling rendah. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

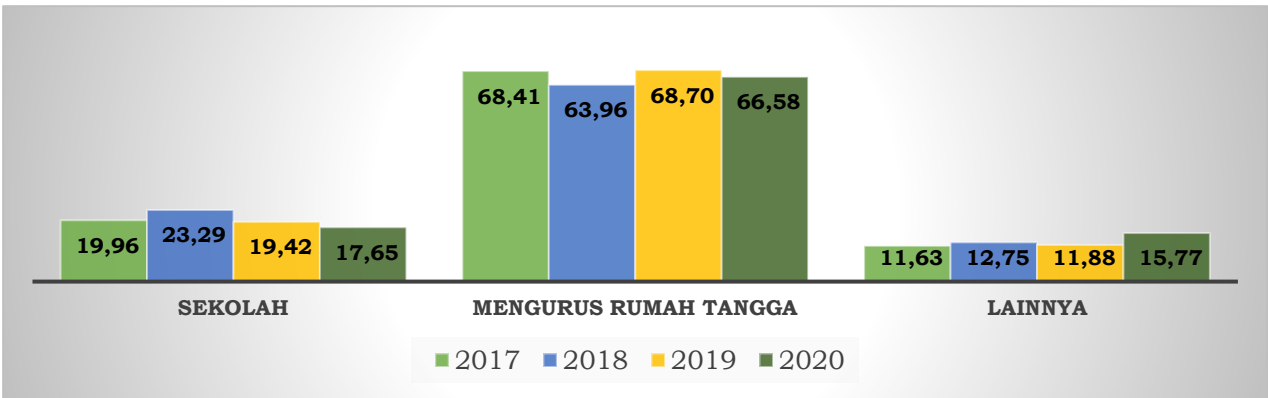


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.44

TPAK Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Tahun 2017-2021

Penurunan TPAK Kabupaten Pemalang di Tahun 2020 disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, juga karena meningkatnya jumlah pengangguran. Jumlah penduduk usia kerja yang tidak termasuk dalam angkatan kerja di Tahun 2020 sebanyak 335.272 jiwa, meningkat 2,93% dibandingkan Tahun 2019. Selanjutnya menjadi sebanyak 333.805 jiwa atau menurun sebesar 0,44%. Berdasarkan tingkat jenis kegiatan, di Tahun 2020 penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja didominasi mengurus rumah tangga sebesar 66,58% turun 2,11% dari Tahun 2019 (68,69%). Gambaran penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja berdasarkan jenis kegiatan Tahun 2017-2020 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Gambar 2.45

Penduduk Usia Kerja Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kegiatan
Tahun 2017-2020

Berdasarkan jenis kegiatan, penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja didominasi oleh mengurus rumah tangga sebesar 66,58% di Tahun 2020, lebih rendah dibandingkan Tahun 2019 (68,70%), penurunan tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 membuat penduduk yang semula berkegiatan mengurus rumah tangga menjadi bekerja untuk menambah pendapatan keluarga. Senada dengan penduduk usia kerja yang bukan angkatan kerja yang berkegiatan sekolah, di Tahun 2020 sebesar 17,65% lebih rendah dibandingkan Tahun 2019 (19,42%). Penurunan tersebut disebabkan berkurangnya kemampuan untuk membiayai sekolah akibat pandemi Covid-19, sehingga penduduk yang berkegiatan sekolah tersebut berhenti sekolah dan menjadi bekerja.

Selama Tahun 2017-2021, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Pemalang meningkat tiap tahunnya. Gambaran jumlah penduduk usia kerja, penduduk bekerja, dan rasio penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

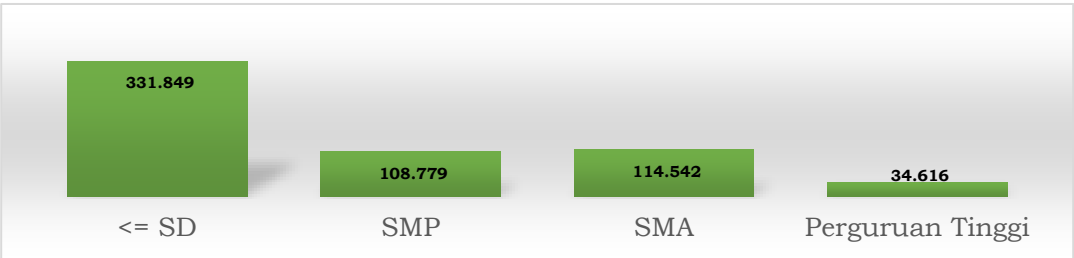
Tabel 2.44
Rasio Penduduk Yang Bekerja di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Usia Kerja (jiwa)	949.481	955.988	962.100	973.842	978.908
Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	587.819	582.895	595.019	589.786	601.815
Rasio Penduduk Bekerja	0,619	0,609	0,618	0,605	0,614

Sumber: BPS Kab. Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021, rasio penduduk bekerja cenderung fluktuatif. Di Tahun 2020 terjadi penurunan akibat adanya pandemi Covid-19, namun meningkat kembali di Tahun 2021, hal ini menandakan adanya peningkatan kesempatan kerja sehingga penduduk yang tidak bekerja sudah dapat bekerja kembali di Tahun 2021. Hal ini disebabkan di Tahun 2021 banyak investor yang masuk dan mendirikan pabrik di Kabupaten Pemalang. Di Tahun 2020, berdasarkan jenis kelamin, penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 60,01% turun sebesar 1,17% dari Tahun 2019 (61,18%). Artinya, jumlah perempuan yang bekerja semakin meningkat sehingga meningkatkan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang memiliki tingkat pendidikan SD atau lebih rendah. Gambaran penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pemalang tahun 2020 ditampilkan pada grafik berikut.



Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Gambar 2.46

Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 (jiwa)

Di Tahun 2020, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SD atau lebih rendah sebesar 56,27% dan tingkat pendidikan SMP/ sederajat sebesar 18,44%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja memiliki tingkat pendidikan dasar, artinya kualitas penduduk bekerja di Kabupaten Pemalang

relatif rendah, sehingga sebagian besar penduduk bekerja melakukan pekerjaan di sektor informal. Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama di Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut berikut.

Tabel 2.45
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian (primer)	158.238	26,83
2	Industri Pengolahan (sekunder)	159.303	27,01
3	Jasa (tersier)	272.245	46,16
	Jumlah	589.786	100

Sumber : Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022

Persentase penduduk bekerja di sektor pertanian (primer) sebesar 26,83%; sektor industri pengolahan (sekunder) sebesar 27,01%; dan sektor jasa (tersier) sebesar 46,16%. Dominansi penduduk bekerja di sektor tersier menandakan bahwa pola struktur perekonomian Kabupaten Pemalang mulai bergeser dari perekonomian agro-industri menjadi perekonomian jasa.

k. Reformasi Birokrasi

Aspek Reformasi Birokrasi diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Pada Tahun 2021, IRB Kabupaten Pemalang sebesar 62,91 masuk dalam kategori B. Aspek reformasi birokrasi dapat dilihat dari kinerja pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Kinerja pengelolaan pemerintahan diukur melalui evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (AKIP). Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

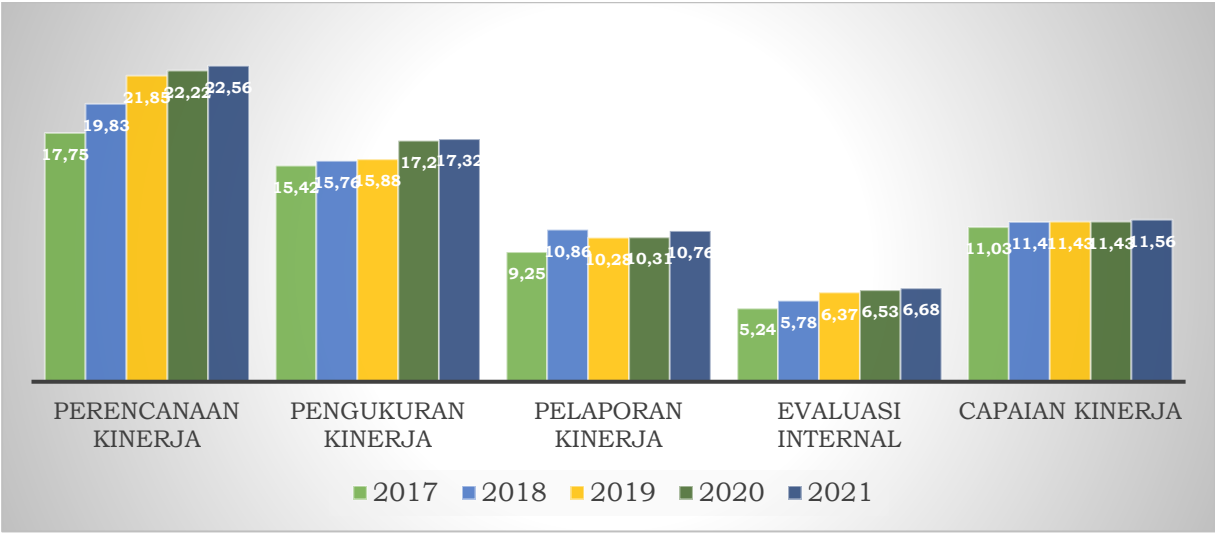
Tabel 2.46
Hasil Penilaian Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Komponen	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Perencanaan Kinerja	17,75	19,83	21,85	22,22	22,56
Pengukuran Kinerja	15,42	15,76	15,88	17,20	17,32
Pelaporan Kinerja	9,25	10,86	10,28	10,31	10,76
Evaluasi Internal	5,24	5,78	6,37	6,53	6,68
Capaian Kinerja	11,03	11,40	11,43	11,43	11,56
Nilai hasil Evaluasi	58,69	63,63	65,81	67,70	68,88
Total	CC	B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021, evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, dimana pada tahun 2017 Nilai AKIP sebesar 58,69 predikat CC meningkat hingga di Tahun 2021 sebesar 68,88 (B). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah menunjukkan hasil yang lebih baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Penilaian evaluasi AKIP memiliki lima komponen dengan bobot yang berbeda. Komponen Perencanaan Kinerja memiliki bobot 30%, Pengukuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Internal 10%, dan Capaian Kinerja 10%. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan daerah, Pemerintah Kabupaten Pemalang berupaya meningkatkan capaian komponen-komponen AKIP. Peningkatan nilai setiap komponen AKIP selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

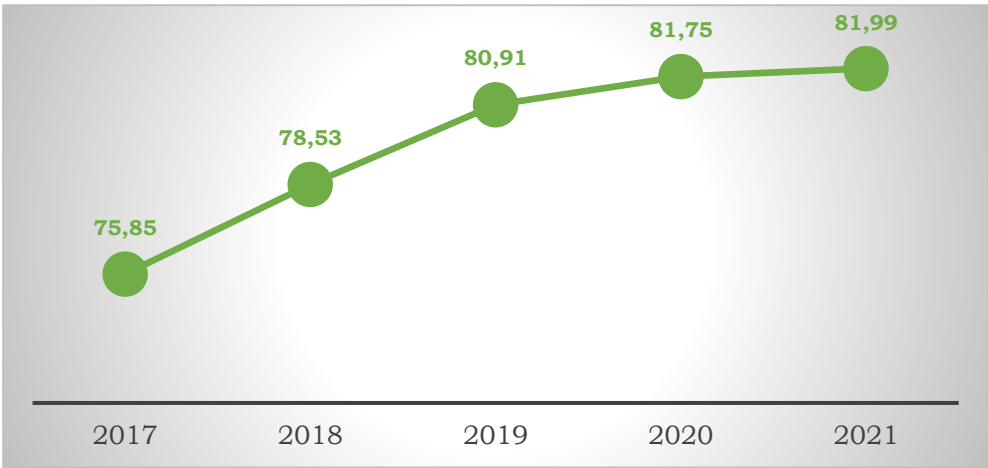


Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2022
Gambar 2.47

Nilai Komponen Evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Selama Tahun 2017-2021 sebagian besar komponen menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Komponen evaluasi AKIP yang menunjukkan peningkatan tertinggi adalah Perencanaan Kinerja, dimana rata-rata peningkatan selama tahun 2017-2021 sebesar 1,2 point. Sedangkan komponen Capaian Kinerja menunjukkan kinerja paling rendah, dimana rata-rata peningkatan selama tahun 2017-2021 sebesar 0,13 point. Untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu upaya untuk meningkatkan capaian masing-masing komponen pembangunan AKIP.

Penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah juga dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM terhadap pelayanan publik Tahun 2021 sebesar 81,99 naik 0,24 point dari Tahun 2020 (81,75). Perkembangan IKM Pemerintah Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang, 2021
Gambar 2.48

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017-2021

IKM Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Artinya, kinerja Pemerintah Kabupaten Pemalang juga meningkat setiap tahunnya ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi juga mencakup kinerja pelaporan keuangan. Capaian kinerja pelaporan keuangan Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

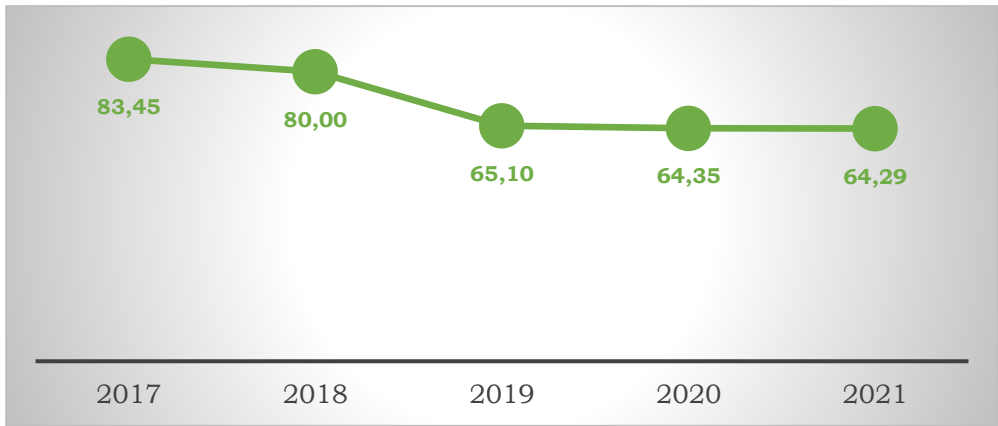
Tabel 2.47
 Status Pelaporan Keuangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Status Laporan Keuangan				
2017	2018	2019	2020	2021
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Pemalang mampu menunjukkan kinerja pelaporan keuangan yang cukup memuaskan selama Tahun 2017-2021 terlihat dari status Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, walaupun masih terdapat beberapa proses yang masih memiliki kelemahan dan memerlukan perbaikan.

Reformasi birokrasi tidak dapat terwujud tanpa dukungan ASN yang berkualitas. Kualitas ASN dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN, yang memiliki empat dimensi, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Peningkatan profesionalitas ASN selama Tahun 2017-2021 tersaji pada gambar berikut.



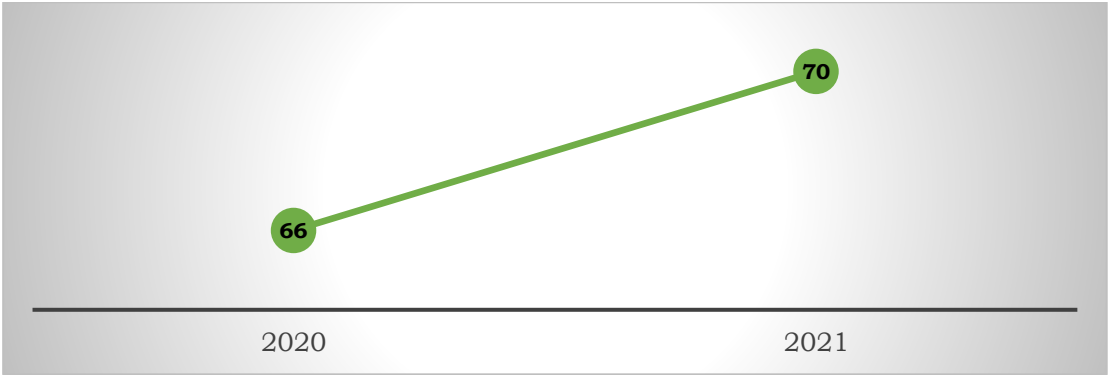
Sumber : BKD Kabupaten Pemalang, 2022

Gambar 2.49

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Berdasarkan gambar di atas, selama Tahun 2017-2021 Kabupaten Pemalang mengalami penurunan profesionalitas, yaitu dari nilai 83,45 di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 64,29 di Tahun 2021, masuk pada kategori rendah. Dari empat komponen pembentuk indeks profesionalisme ASN, kompetensi merupakan dimensi dengan capaian kinerja terendah dibandingkan ketiga dimensi lainnya. Hal tersebut disebabkan sebagian ASN belum memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dimiliki. Oleh karenanya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengintensifkan keikutsertaan pelatihan dan diklat sesuai dengan kebutuhan, baik yang dilaksanakan oleh internal maupun eksternal. Namun, hal ini terkendala dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung.

Parameter reformasi birokrasi selanjutnya adalah transparansi dan akuntabilitas yang diukur melalui persentase ketersediaan informasi publik. Perkembangan ketersediaan informasi publik selama Tahun 2020-2021 ditampilkan pada gambar berikut.



Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

Gambar 2.50

Persentase Ketersediaan Informasi Publik Tahun 2020-2021

Berdasarkan gambar di atas, terjadi peningkatan ketersediaan informasi publik. Hal ini menjadi tanda bahwa Pemerintah Kabupaten Pemalang semakin transparan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) yaitu pada tujuan keempat, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Indikator untuk mengukur cakupan layanan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Capaian APS dan APM untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD)/sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.48
APS dan APK Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	49,2	58,06	61,47	70,00	68,57
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/PAKET A	%	100,4	108	95	95,8	95,19
Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/PAKET B	%	81,76	83,01	74,81	74,81	88,06
Angka Partisipasi Murni PAUD	%	59,5	57,11	59,23	60,15	62,36
Angka Partisipasi Murni SD/MI/PAKET A	%	100,4	108	95	95,8	89,72
Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/PAKET B	%	81,76	83,01	74,81	83,60	75,05

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan APS PAUD yang cukup besar di Tahun 2018, dengan peningkatan sebesar 8,86%. Peningkatan tersebut dikarenakan pengefektifan pemberlakuan usia masuk SD minimal 7 tahun, sehingga anak yang berusia kurang dari 7 tahun mengikuti Pendidikan di PAUD. Selain meningkatkan APS PAUD, pemberlakuan usia masuk SD minimal 7 tahun juga efektif untuk menyeimbangkan antara APS dan APM di jenjang SD/sederajat maupun SMP/sederajat. Hanya di Tahun 2020 terjadi kesenjangan antara APS dan APM SMP/sederajat yang disebabkan banyak murid yang bersekolah di luar Kabupaten Pemalang.

Walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, APS PAUD di Kabupaten Pemalang masih tergolong rendah yaitu sebesar 70% di Tahun 2020 dan turun di Tahun 2021 menjadi sebesar 68,57%. Penurunan APS PAUD pada tahun 2021 disebabkan karena terjadinya pandemi Covid-19, dimana orang tua cenderung tidak mendaftarkan anak balitanya ke PAUD. Disamping itu, masih kurangnya kesadaran orangtua, ketidakmampuan ekonomi orangtua, belum meratanya ketersediaan dan sebaran prasarana PAUD, tidak terhitungnya peserta didik PAUD di Dapodik karena belum memiliki identitas kependudukan serta belum adanya peraturan yang mendorong agar orang tua secara sadar memahami pentingnya pendidikan pra SD. Hal tersebut merupakan penyebab masih rendahnya APS PAUD, yaitu masih ada 31,43% anak usia PAUD yang belum mengikuti Pendidikan PAUD.

Sedangkan untuk APS SD/ sederajat cenderung mengalami penurunan, yaitu di Tahun 2021 sebesar 95,19% turun dari Tahun 2020 sebesar 95,8% artinya masih ada sebanyak 4,81% anak usia SD di Kabupaten Pemalang yang belum mengikuti Pendidikan SD/ sederajat. Penurunan APS SD/ sederajat antara lain disebabkan anak tidak bersekolah (ATS) dan anak bersekolah namun pada jenjang yang tidak sesuai (misal : anak usia 7 tahun masih sekolah di TK).

Untuk APS SMP/ sederajat di Tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 88,06% dari capaian Tahun 2020 sebesar 74,81%. Peningkatan ini disebabkan banyak ATS yang bersedia untuk melanjutkan sekolahnya kembali. Hal ini menandakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengembalikan ATS ke sekolah telah membuahkan hasil. Namun upaya tersebut harus lebih ditingkatkan, mengingat masih ada sebanyak 11,94% anak usia SMP yang belum mengikuti pendidikan SMP/ sederajat.

Salah satu penyebab rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Pemalang adalah banyaknya anak tidak sekolah (ATS). Masih ditemukannya ATS merupakan tanda belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan. Menurut data Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, terdapat 35 ribu ATS di Kabupaten Pemalang dengan berbagai penyebab, diantaranya tidak terlayani PAUD, belum pernah sekolah, putus sekolah dan lulus tidak lanjut. Penanganan ATS di Kabupaten Pemalang dilakukan dengan Gerakan “NJUH SEKOLAH MANING” yang berfokus untuk mengembalikan ATS ke sekolah bagi ATS yang bersedia sekolah dan melakukan pendampingan pendidikan bagi ATS yang tidak bersedia kembali ke sekolah. Disamping itu, koordinasi dengan 15 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam menangani ATS juga ditingkatkan dengan mengembalikan ATS untuk bersekolah di PKBM. Kerjasama dengan unsur non-pemerintah seperti bank, BAZNas dan *stakeholder* swasta lainnya ditingkatkan untuk ikut menangani ATS. Untuk ATS yang kembali ke sekolah diberikan fasilitas belajar dan beasiswa. Adapun lokasi prioritas penanganan ATS di Tahun 2021 adalah Desa Sikayu, Karangasem, Randudongkal, Sitemu dan Jojogan. Sedangkan untuk lokus ke depan akan disinkronkan dengan lokus penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

Agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik, perlu didukung oleh fasilitas ruang kelas yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan bangunan sekolah kondisi baik. Capaian ketersediaan ruang kelas yang sudah sesuai SNP dan bangunan sekolah kondisi baik selama Tahun 2017-2021 dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Persentase Ruang Kelas Sesuai SNP Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ruang kelas jenjang PAUD dan Kesetaraan yang sesuai SNP	%	3,77	3,85	4,13	5,36	Belum rilis
Persentase jumlah ruang kelas jenjang SD yang sesuai SNP	%	29,44	28,7	27,29	29,54	35,16
Persentase jumlah ruang kelas jenjang SMP yang sesuai SNP	%	36,8	36,17	31,55	34,08	55,06
Persentase bangunan TK kondisi baik	%	88,75	89,95	95,45	38,51	57,03
Persentase bangunan SD kondisi baik	%	60	85,97	85,82	44,12	59,97
Persentase bangunan SMP kondisi baik	%	84,56	92,20	95,71	50,15	66,99

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa di Tahun 2021 ketersediaan ruang kelas yang sesuai SNP masih tergolong rendah, yaitu sebesar 35,16% untuk jenjang SD/ sederajat dan sebesar 55,06% untuk jenjang SMP/ sederajat. Masih rendahnya ketersediaan fasilitas ruang kelas yang representatif (sesuai SNP) menjadi catatan penting bagi Dindikbud Kabupaten Pemalang agar melaksanakan upaya perbaikan sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan optimal.

Ruang kelas dapat dinyatakan sesuai SNP apabila bangunannya dalam kondisi baik. Di Tahun 2020, dilaksanakan pendataan ulang kondisi bangunan sekolah untuk semua sekolah se Kabupaten Pemalang, sehingga terjadi penurunan capaian bangunan sekolah kondisi baik. Di Tahun 2020, persentase bangunan TK dalam kondisi baik sebesar 38,51% meningkat menjadi sebesar 57,03% di Tahun 2021. Untuk kondisi bangunan SD dalam kondisi baik di Tahun 2020 sebesar 44,12% dan meningkat menjadi sebesar 59,97% di Tahun 2021. Selanjutnya untuk bangunan SMP dalam kondisi baik di Tahun 2020 sebesar 50,15% dan meningkat menjadi 66,99% di Tahun 2021. Peningkatan kondisi bangunan sekolah menjadi fokus Dindikbud Kabupaten Pemalang sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan Kabupaten Pemalang.

Akreditasi merupakan salah satu indikator penilaian dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan memadai apabila mempunyai akreditasi minimal B. Selama Tahun 2017-2021, sekolah yang mempunyai akreditasi minimal B mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Persentase SD/MI dan SMP/MTs terakreditasi B Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase SD/MI Yang Terakreditasi Minimal B	%	92,95	93,59	87,9	95,50	96,06
2.	Persentase SMP/MTS Yang Terakreditasi Minimal B	%	81,71	82,42	81,82	90,96	83,23
3.	Persentase sekolah yang memenuhi SNP (%)	%	66,24	64,87	58,84	61,54	95,62

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Persentase SD/MI yang terakreditasi minimal B di Tahun 2017 sebanyak 92,95% berfluktuasi dan di Tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 96,06%. Demikian juga dengan persentase SMP/MTs yang terakreditasi minimal B, di Tahun 2017 sebanyak 81,71% berfluktuasi dan di Tahun 2020 meningkat menjadi

sebanyak 83,23%. Selanjutnya untuk persentase sekolah yang memenuhi SNP juga menunjukkan hasil yang cenderung meningkat, yaitu sebesar 66,24% di Tahun 2017 menjadi sebesar 95,62% di Tahun 2021. Capaian tersebut menandakan bahwa kinerja Dindikbud Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pemalang membuahkan hasil.

Selain penyediaan fasilitas sarana fisik, agar kegiatan belajar mengajar dapat terlaksana dengan optimal, perlu dicukupi pula ketersediaan tenaga kependidikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Gambaran ketersediaan tenaga pendidik secara kuantitas dan kualitas selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Rasio Siswa Dengan Tenaga Pendidik dan Persentase Tenaga Pendidik
Berkompeten Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Rasio siswa dengan tenaga pendidik						
TK	rasio	1:21	1:18	1:20	1:18	1:12
SD	rasio	1:19	1:17	1:21	1:21	1:21
SMP	rasio	1:15	1:14	1:27	1:19	1:17
Persentase tenaga pendidik bersertifikasi						
TK	%	40,73	38,79	44,05	19,77	12,51
SD	%	88,31	49,45	48,45	73,90	44,17
SMP	%	84,62	42,43	41,63	41,58	49,59
Persentase pendidik dan tenaga kependidikan minimal DIV/Sarjana	%	63,43	65,23	64,64	36,21	97,23
Persentase Kepala Satuan Pendidikan yang telah lulus Pelatihan Calon Kepala Satuan Pendidikan jenjang SD, SMP, PAUD, dan Pendidikan Kesetaraan	%	0	0	58,66	60,75	71,55

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara jumlah, tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Pemalang sudah mencukupi kebutuhan yang ada, yaitu di Tahun 2021 satu orang pendidik TK mengampu 12 siswa, satu pendidik SD mengampu 21 siswa dan satu orang pendidik SMP mengampu 17 siswa. Namun, kendala yang ada adalah belum terdistribusinya tenaga pendidik tersebut secara merata. Untuk sekolah-sekolah di daerah selatan masih banyak yang kekurangan tenaga pendidik, sebaliknya sekolah-sekolah di kota mengalami kelebihan tenaga pendidik. Kendala lainnya yaitu dari segi kompetensi, di Tahun 2021, tenaga pendidik yang sudah bersertifikasi untuk TK, SD dan SMP masih sangat rendah yaitu masing-masing sebesar 12,51%; 44,17% dan 49,59%.

Sesuai amanat UU Nomor 14 Tahun 2005, syarat kualifikasi guru harus berpendidikan DIV atau S1. Di Tahun 2021, tenaga pendidik yang mempunyai pendidikan minimal DIV/S1 sebanyak 97,23% meningkat tajam dari Tahun 2020 yang hanya sebanyak 36,21%. Demikian pula dengan kepala satuan pendidikan yang telah lulus pelatihan calon kepala satuan pendidikan, di Tahun 2021 sebanyak 71,55% meningkat dari Tahun 2020 sebanyak 60,75%. Hal ini dikarenakan ketatnya aturan yang diterapkan Dindikbud Kabupaten Pemalang sehingga tenaga pendidik termotivasi untuk melanjutkan pendidikan DIV atau S1 dan kepala satuan pendidikan yang belum mengikuti pelatihan calon kepala satuan pendidikan termotivasi untuk mengikuti. Sejalan dengan meningkatnya kualifikasi tenaga pendidik diharapkan akan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualifikasi bagi tenaga pendidik diharapkan juga menjadi pertimbangan dalam pemetaan pemerataan penempatan tenaga pendidik sehingga kualitas penyelenggaraan pendidikan dapat dirasakan merata dan menyeluruh diseluruh wilayah di Kabupaten.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.52
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Capaian	Target SPM (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian SPM (%)
1	Pendidikan Anak Usia dini	Jumlah Warga negara usia 4-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	35.551	51.598	68,9
2	Pendidikan Dasar (SD/MI)	Jumlah Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar / SD / MI	100	145.359	152.689	95,2
3	Pendidikan Dasar (SMP/MTs)	Jumlah Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang terpenuhi kebutuhan dasar dalam pendidikan dasar / SMP / MTs	100	63.705	72.310	88,1
4	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam pendidikan kesetaraan	100	3.796	33.304	11,4

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa belum ada indikator SPM Pendidikan yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan belum representatifnya fasilitas pendidikan yaitu masih ada bangunan sekolah yang kondisinya tidak baik sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Untuk memperbaiki kondisi ruang kelas yang rusak, selama ini Pemerintah Kabupaten Pemalang masih tergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan. Selain itu adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan sebaran guru yang belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil juga turut mempengaruhi capaian SPM.

2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDG's) yaitu pada tujuan ketiga, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang kesehatan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan balita stunting. Gambaran kondisi AKI, AKB, AKBa dan balita stunting Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan Balita Stunting Kabupaten Pemalang 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	AKI	Per 100.000 KH	100	67	50	58,85	129,34
2	AKB	Per 1.000 KH	5,57	5,83	5,58	5,14	4,4
3	AKBa	Per 1.000 KH	6,22	6,3	6,16	5,77	4,85
4	Persentase balita stunting	%	22,94	17,6	16,95	12,68	10,35

Sumber: Dinkes Kabupaten Pemalang, 2022

Selama tahun 2017-2021, AKI di Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif, sebesar 100 atau sejumlah 25 kasus kematian ibu di tahun 2017 turun hingga menjadi 50 atau sejumlah 13 kasus di tahun 2019, namun meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 58,85 atau sejumlah 15 kasus dan naik tajam di tahun 2021 menjadi sebesar 129,34 atau sejumlah 32 kasus. Peningkatan AKI tersebut disebabkan banyak ibu melahirkan dalam kondisi positif Covid-19 sehingga imunitas tubuhnya melemah. Sedangkan untuk AKB, AKBa dan persentase balita stunting cenderung menurun selama Tahun 2017-2021. Di Tahun 2017, AKB sebesar 5,57 turun menjadi sebesar 4,4 di Tahun 2021. Sedangkan AKBa sebesar 6,22 di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 4,85 di Tahun 2021. Selanjutnya persentase balita stunting sebesar 22,94% di Tahun 2017 turun menjadi sebesar 10,35% di Tahun 2021. Sampai dengan tahun 2021, cakupan pengukuran dan pelaporan melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sudah mencapai 100%. Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang untuk pelaksanaan penimbangan Balita serentak setiap bulan Februari dan Agustus telah meningkatkan cakupan pelaporan e-PPGBM. Aksi konvergensi lintas sektor telah dilaksanakan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terbentuk dari tingkat kabupaten sampai desa. Penurunan AKB, AKBa dan persentase balita stunting menandakan bahwa upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Pemalang membuahkan hasil.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam percepatan penurunan stunting, antara lain : pelaksanaan aksi konvergensi hingga tingkat desa/kelurahan; pemberian makanan tambahan (PMT); pendampingan dan pendataan status gizi, perubahan perilaku, pemberdayaan masyarakat; penguatan peran PKK dalam perubahan perilaku; serta pembinaan dan pemantauan aksi konvergensi penurunan stunting hingga tingkat desa/kelurahan dengan sasaran remaja, calon pengantin/pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, balita dan keluarga berisiko. Yang dimaksud dengan aksi konvergensi stunting adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas. Tidak hanya dari sisi makanan dan gizi saja yang diintervensi, tapi juga pemberian bantuan sosial baik tunai maupun pangan non tunai, rehab RTLH, jambanisasi, kampanye pola hidup bersih dan sehat (PHBS), promosi gemar makan ikan (Gemari) serta penyediaan akses air minum layak dan sanitasi layak. Berdasarkan penilaian kinerja aksi konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di Jawa Tengah Tahun 2021, Kabupaten Pemalang dinyatakan sebagai kabupaten yang mempunyai kinerja terbaik di Jawa Tengah yaitu dengan nilai 17,89. Namun,

masih terdapat tantangan yang harus diatasi, yaitu : (1) efektivitas konvergensi penurunan stunting hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan terutama melalui keterpaduan data sasaran, peningkatan kualitas layanan melalui dukungan lintas sektor, serta konsolidasi pelaku; (2) peningkatan dukungan anggaran desa dan daerah; (3) pendokumentasian inovasi/praktik baik sebagai bahan pembelajaran bersama.

Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Pemalang adalah Indeks Keluarga Sehat (IKS), kecukupan gizi, perilaku hidup bersih sehat, serta desa siaga yang aktif yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 2.54

Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	-	-	0,14	0,17	0,17
2.	Persentase balita gizi buruk	%	0,014	0,021	0,013	0,022	0,030
3.	Persentase desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	%	26,13	44,59	68,92	68,92	68,92
4.	Persentase desa/kelurahan STBM	%	0,45	1,35	11,26	11,26	13,51
5.	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	80,51	67,98	73,63	81,48	88,70
7.	Persentase desa siaga aktif	%	2,7	4,5	7,66	4,95	4,95

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021 pelaksanaan SPM di bidang kesehatan belum optimal ditandai oleh capaian IKS Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 0,17 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat (0,600), masih ditemukan adanya balita gizi buruk dan rendahnya desa siaga aktif. Persentase balita gizi buruk mengalami kenaikan di Tahun 2020 yaitu sebesar 0,022% di Tahun 2021, naik sebesar 0,009 point dari Tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak mampu untuk menyediakan makanan yang bergizi. Balita gizi buruk terus mengalami peningkatan di Tahun 2021 menjadi sebesar 0,030%. Perlu upaya penanganan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang dengan pemberian makanan tambahan (PMT). Persentase Desa Siaga aktif juga masih sangat rendah, yaitu sebesar 4,95% atau sebanyak 11 desa. Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang harus melakukan pembinaan dan pendampingan pada Pemerintah Desa agar mengaktifkan Desa Siaga sehingga apabila ada kasus kesehatan yang membutuhkan tindakan cepat dapat tertangani.

Indikator yang menggambarkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain persentase Desa ODF, persentase desa/kelurahan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM), cakupan Desa UCI dan persentase rumah tangga berPHBS.

Selama Tahun 2017-2021, keempat indikator tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu persentase Desa ODF sebesar 26,13% di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 68,92% di Tahun 2021. Persentase desa/kelurahan STBM sebesar 0,45% naik menjadi sebesar 13,51%. Cakupan Desa UCI sudah mencapai 100%. Persentase rumah tangga berPHBS sebesar 80,51% di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 88,70%. Walaupun kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang harus tetap meningkatkan kinerjanya untuk semakin meningkatkan kualitas kesehatan Kabupaten Pemalang.

Pelayanan kesehatan yang optimal harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Penyediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.55
Fasilitas Kesehatan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	angka	0,00619	0,00617	0,00537	0,00543	0,692
2	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	angka	0,017	0,019	0,017	0,017	0,017
3	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	-	-	92	100	100
4	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	75,24	84,36	83,05	84,83	83,53
5	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) terakreditasi	%	27,27	72,73	92	92	92
6	Persentase rumah sakit terakreditasi	%	87,5	87,5	87,5	87,5	77,78
7	Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar	%	97	97	98	98	98
8	Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan	%	50	60	70	75	80

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa di Tahun 2021 terjadi peningkatan rasio penduduk yang dirawat di rumah sakit sebesar 0,692 dari 0,00543 di Tahun 2020. Hal ini disebabkan meningkatnya pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas mencapai 100% sejak Tahun 2020.

Selama Tahun 2017-2021, terjadi peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, meliputi Puskesmas yang terakreditasi sebesar 27,27% di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 92%. Sarana farmasi dan alat kesehatan yang sesuai standart di Tahun 2017 sebesar 97% naik menjadi sebesar 98% di Tahun 2021. Persentase PIRT yang memenuhi syarat keamanan pangan sebesar 50% di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 80% di Tahun 2021. Sedangkan untuk rumah sakit yang terakreditasi mengalami penurunan yaitu sebesar 87,5% di Tahun 2020 turun menjadi sebesar 77,78% di Tahun 2021 yang disebabkan bertambahnya rumah sakit baru.

Tabel 2.56
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Layanan kesehatan untuk Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	24.686	22.058	111,9
2	Layanan kesehatan untuk Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	23.878	21.056	113,4
3	Layanan kesehatan untuk Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	26.189	20.053	130,6
4	Layanan kesehatan untuk Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	82.301	79.518	103,5
5	Layanan kesehatan untuk Warga Negara usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	48.255	204.308	23,6
6	Layanan kesehatan untuk Warga Negara usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	380.340	808.854	47,0
7	Layanan kesehatan untuk warga negara usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	51.005	169.326	30,1
8	Layanan kesehatan untuk Warga Negara penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	53.140	136.554	38,9
9	Layanan kesehatan untuk Warga Negara penderita diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	9.987	18.390	54,3
10	Layanan kesehatan untuk Warga Negara dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	1.146	1.156	99,1
11	Layanan kesehatan untuk Warga Negara terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	4.542	15.408	29,5
12	Layanan kesehatan untuk Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100	16.918	28.827	58,7

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Terdapat empat indikator yang mencapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, satu indikator yang mendekati target dan tujuh indikator dengan capaian yang rendah. Indikator yang mempunyai capaian rendah meliputi layanan kesehatan untuk warganegara usia pendidikan dasar, layanan kesehatan untuk warganegara usia produktif, layanan kesehatan untuk warganegara usia lanjut, layanan kesehatan untuk warganegara penderita hipertensi, layanan kesehatan untuk warganegara diabetes mellitus, layanan kesehatan untuk warganegara terduga TBC dan layanan kesehatan untuk warganegara terinfeksi HIV. Hal ini

disebabkan pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pemalang masih berorientasi pada paradigma sakit sehingga kegiatan kuratif masih menjadi prioritas yang harus dicukupi dan kegiatan preventif masih kurang mendapatkan perhatian.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	68,17	69,00	70,05	73,04	70,26
2.	Persentase tingkat kondisi jalan mantap (baik dan sedang)	%	69,15	68,85	75,60	68,66	68,28
3.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	49,83	57,12	59,80	56,47	57,62
4.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi sedang	%	19,32	11,73	15,80	12,18	10,66
5.	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum	%	90,4	93,43	96,2	86,20	90,66
6.	Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	75,48	83,61	90,38	92,82	94,61
7.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	66	67	69	71,12	75,20
8.	Persentase Ketaatan terhadap RTR	%	70	100	100	100	100
9.	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW	%	Na	100	100	100	100

Sumber : DPU Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara umum cukup baik, namun terdapat beberapa capaian indikator kinerja di Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di Tahun 2020, meliputi: 1) jaringan irigasi kondisi baik, 2) jalan kondisi mantap, dan 3) panjang jaringan jalan kondisi sedang.

Di Kabupaten Pemalang terdapat 91 Daerah Irigasi dengan luas lahan teraliri sekitar 7.343 hektar. Persentase jaringan irigasi kondisi baik menunjukkan penurunan dari 73,04% menjadi 70,26% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan anggaran yang ada untuk rehabilitasi jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi menurun dibandingkan tahun 2020. Persentase tingkat kondisi jalan mantap (baik dan sedang) menunjukkan penurunan dari 68,66% di tahun 2020 menjadi 68,28% di tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi pada panjang jaringan jalan kondisi sedang, di tahun 2020 sebesar 12,18% turun menjadi sebesar 10,66% di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2021, kondisi jalan rusak ringan sebesar 10,41% dan jalan rusak berat sebesar 21,31%. Penurunan tersebut dikarenakan kerusakan jalan di tahun berjalan cukup signifikan ditambah dengan kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap ketahanan kualitas jalan.

Persentase penduduk yang memiliki akses air minum menunjukkan peningkatan dari 90,4% di Tahun 2017 menjadi 90,66% di Tahun 2021. Hal ini dikarenakan intervensi program Pamsimas di 36 desa/kelurahan pada Tahun 2021 serta jaringan PDAM yang semakin berkembang. Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik juga menunjukkan peningkatan dari

75,48% di Tahun 2017 menjadi 94,61% di Tahun 2021. Selanjutnya, persentase drainase dalam kondisi baik juga menunjukkan peningkatan dari 66% di Tahun 2017 menjadi 75,20% di Tahun 2021. Peningkatan ketersediaan akses air minum, pengelolaan limbah domestik dan drainase selama Tahun 2017-2021 merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyediakan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum. Selanjutnya untuk ke depan agar kinerja tersebut terus ditingkatkan sehingga SPM bidang pekerjaan umum dapat tercapai 100%.

Capaian kinerja penataan ruang di Tahun 2021 menunjukkan hasil yang baik, yaitu ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR) dan pemanfaatan ruang sesuai RTRW sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang ada.

Tabel 2.58
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	100	266.818	294.298	90,7
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	329.063	347.810	94,6

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa belum ada indikator SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih minimnya anggaran yang tersedia. Untuk meningkatkan ketersediaan akses air minum, selama ini Pemerintah Kabupaten Pemalang masih tergantung pada Program Pamsimas dari Kementerian PUPR karena sebagian besar wilayah Kabupaten Pemalang berada pada wilayah yang tidak terjangkau layanan PDAM. Selanjutnya untuk akses layanan pengolahan air limbah domestik, selain pemenuhan infrastruktur, juga diperlukan edukasi kepada masyarakat tentang PHBS sehingga sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan dengan optimal.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pemalang No. 188.4/308/2021 telah ditetapkan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Pemalang seluas 313,71 Ha yang tersebar di 4 Kecamatan dan 25 desa/kelurahan. Pemerintah Kabupaten Pemalang selama 5 tahun terakhir telah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan kawasan dan permukiman kumuh, salah satunya adalah bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan DAK Integrasi. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh, dimana di Tahun 2017 seluas 2,43% wilayah Kabupaten Pemalang merupakan kawasan permukiman kumuh dan di Tahun 2021 hanya tinggal seluas 0,97% wilayah Kabupaten Pemalang yang masih merupakan kawasan permukiman kumuh.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani di Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 25,51% meningkat dari Tahun 2020 yang sebesar 21,67%. Dimana jumlah RTLH yang ditangani di Tahun 2021 sebanyak 2.686 rumah (3,84%). Di Tahun 2021, SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman telah tercapai 100%. Selengkapnya capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	%	NA	100	100	100	100
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	NA	NA	NA	100	100
3.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	NA	NA	NA	100	100
4.	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh	%	2,43	2,35	2,01	1,63	0,97
5.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	NA	NA	NA	36,88	25,68
6.	Persentase RTLH yang tertangani	%	11,18	12,36	17,17	21,67	25,51
7.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	NA	NA	NA	78,33	17,25
8.	Persentase Kelengkapan PSU pada Kawasan Permukiman/ Perumahan	%	NA	NA	NA	NA	0,032

Sumber : Disperkim Kabupaten Pemalang, 2022

Untuk penanganan kawasan permukiman kumuh terdapat pembagian kewenangan, yaitu luasan kurang dari 10 hektar ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, 10-15 hektar ditangani Pemerintah Provinsi dan lebih dari 15 hektar ditangani Pemerintah Pusat. Dari 313,72 hektar luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar, di Tahun 2021 telah tertangani seluas 80,57 hektar atau sebesar 25,68%.

Dari total rumah di Kabupaten Pemalang sebanyak 317.947 unit yang merupakan RTLH sebanyak 54.833 unit atau sebanyak 17,25%. Masih banyaknya RTLH di Kabupaten Pemalang memerlukan kolaborasi dan peran serta dari berbagai sektor yaitu pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa), masyarakat, dan swasta (CSR) mengingat rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya dari 317.947 unit rumah di Kabupaten Pemalang tersebut yang sudah terfasilitasi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) hanya sejumlah 101 unit atau sebesar 0,032%. Adapun yang dimaksud fasilitas PSU berupa akses air minum, jalan lingkungan, akses sanitasi, RTNH (Rencana Tata Ruang Non Hijau) dan akses PJU (penerangan jalan umum).

Tabel 2.60
Data Jumlah Backlog Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Backlog
1	Moga	64.026	16.007	2.604
2	Warungpring	39.311	9.828	2.434
3	Pulosari	56.504	14.126	1.744
4	Belik	105.503	26.376	2.286
5	Watukumpul	65.349	16.337	3.083
6	Bodeh	55.155	13.789	3.203
7	Bantarbolang	72.860	18.215	3.237
8	Randudongkal	98.780	24.695	5.501
9	Pemalang	179.088	44.772	13.236
10	Taman	163.152	40.788	10.408
11	Petarukan	148.268	37.067	8.860
12	Ampelgading	67.132	16.783	4.354
13	Comal	89.610	22.403	4.549
14	Ulujami	100.928	25.232	7.895
	Jumlah	1.305.666	326.417	73.394

Sumber : Disperkim Kabupaten Pemalang, 2022

Backlog juga menjadi permasalahan yang harus mendapatkan perhatian. Sampai Tahun 2021, Kabupaten Pemalang masih menyisakan 73.394 backlog rumah, sehingga diperlukan peningkatan fasilitasi kepemilikan rumah dan penyediaan tanah untuk pembangunan rumah.

Tabel 2.61
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	12	12	100
2	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/Kota	Presentase jumlah unit rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/Kota	100	215	215	100

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua indikator SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut harus dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusivitas wilayah dapat diukur melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	0	0	0	0	0
3.	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	60	66	70	75	100
4.	Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan	%	31	39	48	56	100
5.	Indeks Resiko Bencana	skor	206	185,7	185,7	165,97	146
6.	Indeks Ketahanan Daerah	skor	0,27	0,27	0,48	0,55	0,66
7.	Cakupan desa/ kelurahan tangguh bencana	%	0	1,35	2,25	3,15	4,95
8.	Rasio kejadian kebakaran	%	98	96	94	90	58
9.	Cakupan pelayanan kebakaran	%	13	16	18	20	50
10.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	48,05	69,86	63,44	65,52	64,41
11.	Persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran	%	0	0	0	0	0

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2022
BPBD Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021 semua Perda dan Perbup yang mengandung sanksi masih dilanggar dan pelanggaran tersebut terjadi di semua kecamatan. Artinya, di Tahun 2021 gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 100% dan kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 0%. Masih dilanggarnya semua Perda dan Perbup yang mengandung sanksi di semua kecamatan disebabkan belum optimalnya upaya pencegahan dari Satpol PP dikarenakan luasnya jangkauan wilayah patroli yang tidak seimbang dengan jumlah SDM dan sarana prasarana yang ada.

Di Tahun 2021, terdapat 110 pengaduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang masuk dan semuanya atau sebesar 100% dapat diselesaikan. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi : (1) pencegahan melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan; (2) penindakan berdasarkan Perda dan Perbup melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusakan massa; (3) koordinasi dan kerjasama dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Dan didukung oleh adanya sarana dan prasarana, meliputi : petugas patroli Satpol PP sebanyak 7 regu dimana masing-masing regu terdiri dari 10 orang dan petugas perlindungan masyarakat sebanyak 11.618 orang yang berada di 222 desa/kelurahan;

Penegakkan Perda dan Perbup selama kurun waktu tahun 2017-2021 terus meningkat, yaitu sebesar 31% pada tahun 2017 hingga sebesar 100% pada tahun 2021. Jumlah keseluruhan Perda dan Perbup yang memuat sanksi sejumlah 14 dan semuanya atau sebesar 100% di Tahun 2021 dilaksanakan penegakkannya. Masih adanya pelanggaran Perda dan Perbup yang memuat sanksi tersebut disebabkan : (1) masih banyak masyarakat yang belum mengetahui muatan Perda dan Perbup yang berlaku; serta (2) kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup. Sehingga diperlukan upaya dari seluruh

stakeholder untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup yang berlaku.

Kabupaten Pemalang secara tipologi wilayah terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Di wilayah dataran tinggi risiko bencana yang dihadapi berupa tanah longsor. Sedangkan di dataran rendah ancaman bencana yang ada berupa banjir, dan juga abrasi di daerah pesisir pantai. Selain itu ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Pemalang adalah bencana letusan gunung berapi. Hal ini karena letak Kabupaten Pemalang yang berada di kaki Gunung Slamet, gunung berapi yang masih dalam kategori aktif. Di Tahun 2021, indeks risiko bencana (IRBI) sebesar 146 (resiko tinggi) dari target sebesar 160 dan indeks ketahanan daerah (IKD) sebesar 0,66 dari target sebesar 0,63 artinya target tahun 2021 dapat tercapai.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait cakupan desa/kelurahan tangguh bencana yang pada tahun 2021 sebesar 4,95% atau sebanyak 11 desa, naik dari Tahun 2020 sebesar 3,15% atau sebanyak 7 desa. Adapun Desa Tangguh Bencana yang dibentuk di Tahun 2021, yaitu Desa Tasikrejo, Desa Clekatakan, Desa Kaliprau, dan Desa Batursari. Untuk mendukung kesiapsiagaan bencana, sarana dan prasarana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang masih sangat minim, mengingat luasnya cakupan bencana dan Kabupaten Pemalang termasuk daerah resiko tinggi bencana. Adapun sistem peringatan dini yang dimiliki, meliputi : 19 sistem peringatan dini banjir (1 elektronik, 18 tradisional), 12 sistem peringatan dini gunung meletus tradisional, 15 sistem peringatan dini longsor (12 elektronik, 3 tradisional), dan 1 sistem peringatan dini gempa elektronik.

Untuk kinerja sub urusan kebakaran selama Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, yaitu : 1) menurunnya rasio kejadian kebakaran, di Tahun 2017 sebesar 98% dan di Tahun 2021 menjadi sebesar 58%, 2) meningkatnya cakupan layanan kebakaran, di Tahun 2017 sebesar 13% menjadi sebesar 50% di Tahun 2021; 3) meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, di Tahun 2017 sebesar 48,05% menjadi sebesar 64,41% di Tahun 2021, dimana dari 59 kejadian kebakaran di Kabupaten Pemalang yang dapat ditangani dalam *response time* hanya sebanyak 38 kejadian. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu (1) belum terpenuhinya kebutuhan WMK di Kabupaten Pemalang, dimana WMK yang tersedia hanya sejumlah 3 WMK dari kebutuhan 6 WMK; (2) banyaknya kejadian kebakaran yang tidak imbang dengan fasilitas pemadam kebakaran, meliputi personil, mobil pemadam kebakaran beserta perlengkapannya; (3) belum tercukupinya sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan APD yang sesuai standart; (4) masih kurangnya kemampuan petugas pemadam kebakaran; (5) belum optimalnya kerjasama antar *stakeholder* yang terkait dengan kebakaran; (6) belum optimalnya inspeksi peralatan proteksi kebakaran sehingga tidak maksimal ketika digunakan; (6) masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara pencegahan dan penanggulangan kebakaran; (7) belum terbentuknya desa/kelurahan tanggap kebakaran.

Tabel 2.63
Capaian Standar Pelayanan Minimal Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100	21.950	21.950	100
2	Layanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	1.443.141	1.522.301	94,8
3	Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	1.443.141	1.522.301	94,8
4	Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	903.062	908.514	99,4
5	Layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100	1.160	1.160	100

Sumber : SPM E-Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 indikator SPM Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, sehingga capaian tersebut harus dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Namun, masih terdapat 3 indikator SPM Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, hal ini disebabkan masih minimnya sarana, prasarana dan personil yang tersedia.

6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan salah satu permasalahan utama dalam urusan sosial. Gambaran penanganan PPKS di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase PPKS yang tertangani	%	64,00	75,14	87,84	80,82	38,11
2.	Persentase PPKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	15,95	17,71	19,66	38,28	37,81
3.	Persentase PPKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	0,09	0,14	0,002	1,07	68,18
4.	Persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	23,16	34,56	46	54,73	83,83
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	3,99	10,37	0,07	24,18	26,48

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Persentase panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang telah terbina	%	27,63	35,92	44,22	16,04	5,5
8.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	%	15,32	30,18	43,69	47,30	Belum rilis

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar tabel di atas, di Tahun 2020 terjadi penurunan PPKS yang tertangani dan semakin menurun tajam di Tahun 2021 hingga menjadi sebesar 38,11%. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya jumlah PPKS sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19, masyarakat yang rentan miskin kembali menjadi miskin, di mana persentase PPKS tertinggi di Kabupaten Pemalang didominasi oleh kelompok fakir miskin. Peningkatan ini tidak diimbangi oleh peningkatan kapasitas fiskal sehingga PPKS yang dapat diintervensi hanya sebagian kecil saja.

Anggaran yang ada difokuskan untuk pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian bantuan modal KUBE, sehingga terjadi peningkatan capaian persentase PPKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 15,95% di Tahun 2017 naik menjadi sebesar 37,81% di Tahun 2021. Selanjutnya, persentase PPKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar 0,09% di tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 68,18% di Tahun 2021. Pemberian bantuan modal diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak Covid-19 agar usahanya tetap berjalan dan ikut berkontribusi dalam memperbaiki ekonomi daerah pasca pandemic Covid-19.

Selanjutnya untuk capaian persentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga masing-masing menjadi sebesar 83,83% dan 26,48% di Tahun 2021. Peningkatan cakupan layanan bidang Sosial yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Di Tahun 2020, terjadi penurunan pembinaan kepada Eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) sebesar 16,04% turun 28,18 point dari Tahun 2019 dan semakin turun di Tahun 2021 hingga menjadi sebesar 5,5%. Hal tersebut disebabkan adanya pembatasan sosial selama masa pandemic Covid-19 sehingga tidak dapat dilakukan pembinaan karena berpotensi menimbulkan kerumunan.

Selanjutnya untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.65
Capaian Standar Pelayanan Minimal Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Pembilang	Penyebut	Capaian Kinerja (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	228	228	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	415	415	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	449	449	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna social diluar panti	100	317	317	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	311	311	100

Sumber : SPM E-Jateng 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua indikator SPM Sosial telah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut harus dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Agar intervensi SPM Sosial dapat tepat sasaran, diperlukan data PPKS yang terbaru sesuai kondisi riil di lapangan sehingga tidak ada lagi *inclusion error* dan *exclusion error* di data DTKS. Oleh karena itu perlu pemutakhiran data PPKS secara obyektif dimulai dari tingkat desa.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.66
Gambaran Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,57	65,29	66,27	65,57	65,90
2.	Persentase LPKS yang terakreditasi	%	0,00	0,00	0,03	0,03	7,8
3.	Persentase besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (penyesuaian data)	%	50,10	64,52	61,77	34,19	66,99
4.	Persentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	%	72,82	73,73	76,19	73,39	62,13
5.	Persentase perusahaan yang mematuhi aturan ketenagakerjaan	%	16,88	16,75	18,43	19,04	19,76
6.	Persentase perselisihan Ketenagakerjaan yang tertangani	%	100	87,5	100	100	100

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
7.	Persentase jumlah perusahaan yang mengikuti Jamsostek	%	60,81	57,89	68	92,95	Belum rilis

Sumber : Disnaker Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif. Di Tahun 2020, TPAK sebesar 65,57% menurun dibandingkan Tahun 2019. Penurunan ini disebabkan meningkatnya jumlah penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja, juga karena meningkatnya jumlah pengangguran. Namun di Tahun 2021 terjadi peningkatan TPAK yang disebabkan banyak penduduk yang semula Bukan Angkatan Kerja (BAK) menjadi Angkatan Kerja, yang semula kegiatannya mengurus rumah tangga dan sekolah sekarang harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Akibat pandemi Covid-19, banyak perusahaan yang tutup sehingga mempersempit kesempatan kerja yang ada. Hal ini berpengaruh kepada persentase pencari kerja yang ditempatkan, di Tahun 2020 turun tajam menjadi sebesar 34,19% dari sebesar 61,77% di Tahun 2019. Di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pemalang aktif dalam mencari investor dan mempermudah proses investasi yang masuk, sehingga terbuka banyak kesempatan kerja baru. Hal ini menyebabkan meningkatnya persentase pencari kerja yang ditempatkan menjadi sebesar 66,99%.

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Pemalang saat ini masih menjadi kendala untuk mendukung peningkatan daya saing daerah. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mengadakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi. Adanya refocusing anggaran di Tahun 2020 dan keterbatasan fiskal di Tahun 2021 menyebabkan menurunnya pencari kerja yang bisa diberi pelatihan masing-masing sebesar 73,39% dan 62,13%. Selain mengikuti pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja, pencari kerja dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan dari Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) terakreditasi. Sampai dengan Tahun 2021, baru sebanyak 7,8% LPKS yang sudah terakreditasi.

Dinas Tenaga Kerja juga harus memastikan bahwa perusahaan patuh terhadap aturan ketenagakerjaan, menjembatani apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan dan memastikan perusahaan sudah mengikuti Jamsostek sebagai proteksi keselamatan tenaga kerja. Urusan tenaga kerja perlu ditangani lebih intensif dengan pendekatan kemitraan berbasis komunitas. Kemitraan dengan kelompok asosiasi pengusaha dan profesional lain di Kabupaten Pemalang berpeluang meningkatkan kesempatan penyerapan tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.67

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase kelembagaan PUG yang aktif	%	27,34	32,58	37,83	48,15	49,50
2.	Persentase partisipasi perempuan di	%	1,166	1,160	1,154	1,149	2,35

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	lembaga pemerintah						
3.	Rasio KDRT	angka	0,008	0,007	0,006	0,005	0,007
4.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
6.	Kasus kekerasan perempuan	org	(0,04)18	(0,06)29	(0,08)35	(0,08)37	(0,10)45
7.	Kasus kekerasan anak	org	(0,12)49	(0,08)31	(0,08)34	(0,08)52	(0,15)62
8.	Nilai Kabupaten layak anak	Nilai	-	Pratama	Madya	Madya	Madya
9.	Persentase Desa layak anak	%	(22,07)49	(29,28)65	(42,79)95	(0,08)18	(59,01)131
10.	Persentase Kecamatan layak anak	%	(22,07)4	(42,86)6	(7,14)1	78,57)11	(92,86)13
11.	Kasus perceraian	Jumlah	3638	3971	4120	4752	Belum rilis
12.	Persentase pernikahan dini	%	0,07	0,04	0,01	4,92	5,32
13.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022

Implementasi kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pemalang masih cenderung rendah terlihat dari lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif hanya sebesar 49,50% di Tahun 2021. Begitu juga dengan perempuan yang berpartisipasi di lembaga pemerintah masih sangat rendah yaitu hanya sebanyak 2,35%. Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian di Tahun 2021 adalah meningkatnya kasus KDRT (naik 0,002%), kasus kekerasan perempuan (naik 0,02%) dan kasus kekerasan anak (naik 0,07%). Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang harus melakukan pendampingan kepada korban kekerasan tersebut dan meningkatkan upaya preventif agar tidak terjadi kasus kekerasan lagi.

Anak adalah masa depan, untuk memenuhi hak anak dan mengembangkan partisipasi anak dalam pembangunan perlu diwujudkan lingkungan yang layak anak mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 131 atau sebesar 59,01% desa/kelurahan di Kabupaten Pemalang dinyatakan layak anak, sebanyak 13 atau sebesar 92,86% kecamatan di Kabupaten Pemalang dinyatakan layak anak dan Kabupaten Pemalang mendapatkan kategori Kabupaten Layak Anak tingkat Madya. Kabupaten Pemalang hanya mendapatkan *grade* kedua kriteria Kota Layak Anak (Madya) disebabkan banyak desa/kelurahan (91 desa/kelurahan) di Kabupaten Pemalang yang belum memenuhi syarat sebagai desa layak anak,

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan strategis mendukung pencapaian pembangunan berkeadilan menuju masyarakat sejahtera. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender menyasar pada semua aspek kehidupan, untuk mendukung capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.

3. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan menjadi fokus kinerja urusan pangan. Kondisi pangan di Kabupaten Pemalang relatif aman tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masuk dalam kategori baik. Gambaran kinerja urusan pangan Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017– 2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Skor PPH	skor	92,6	95,1	95,6	92,6	93,5
2.	Angka ketersediaan energi	kcal/orang/hari	2.693	2.701	2.701	2.824	2.861
3.	Angka ketersediaan protein	gr/orang/hari	64,3	66,1	66,1	58,85	64,15
4.	Jumlah ketersediaan cadangan pangan	ton	15	30	40	50	60
5.	Persentase ketersediaan pangan	%	NA	NA	NA	62,5	433,62
6.	Persentase lumbung pangan aktif	%	9	13,5	14,86	16,20	16,05
7.	Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	NA	NA	NA	16,21	16,05
8.	Persentase penurunan Desa Rawan Pangan	%	17,1	16,6	15,7	15,7	14,86
9.	Persentase pangan segar yang aman	%	100	100	100	100	100
10.	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	NA	NA	NA	40	Belum rilis

Sumber : Dispertan Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2021, skor PPH Kabupaten Pemalang sebesar 92,6 di Tahun 2017 dan menjadi 93,5 di Tahun 2021 masuk dalam kategori baik.

Ketersediaan energi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebesar 2.693 kkal/orang/hari di Tahun 2017 dan menjadi sebesar 2.861 kkal/kapita/hari (kecukupan energi = 2.100 kkal/orang/hari) di Tahun 2021. Ketersediaan protein cenderung fluktuatif, sebesar 64,3 gr/orang/hari di Tahun 2017 dan menjadi 64,15 di Tahun 2021 (kecukupan protein = 57 gr/orang/hari). Dapat disimpulkan bahwa ketersediaan pangan, energi dan protein cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Bahkan tersedia pangan sebanyak 433,62% dan cadangan pangan sebesar 60 ton di Tahun 2021. Lumbung pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Di Tahun 2021, terdapat 81 unit lumbung pangan, namun yang aktif hanya sebesar 16,05% atau sebanyak 13 unit.

Di Tahun 2021, masih terdapat 33 desa yang merupakan desa rawan pangan. Adapun intervensi yang dilakukan untuk menurunkan desa rawan pangan adalah membangun lumbung pangan, pemberian bantuan sarpras pertanian dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Kabupaten Pemalang juga melakukan uji komoditas pangan segar untuk menjamin keamanan dan ketersediaan pangan dan hasilnya 100% pangan yang tersedia segar dan aman.

Upaya peningkatan ketahanan pangan daerah harus terus diupayakan melalui peningkatan ketersediaan, aksesibilitas, mutu dan keamanannya sehingga kebutuhan masyarakat akan pangan dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkesinambungan. Disamping itu promosi konsumsi pangan beragam dan bergizi kepada masyarakat juga harus terus ditingkatkan untuk menggugah kesadaran mereka akan konsumsi pangan yang sehat, bergizi dan seimbang. Penguatan kelembagaan pangan daerah harus terus diperkuat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan dan resilien terhadap kemungkinan bencana yang terjadi.

4. Pertanian

Perkembangan kinerja indikator urusan pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penanganan sengketa pertanian yang dilakukan melalui mediasi	%	60	70	90	60	100
2.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	NA	NA	NA	80	100
3.	Tersedianya Tanah <i>Obyek Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah <i>Absentee</i>	%	NA	NA	NA	60	0
4.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	NA	NA	NA	80	100
5.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	NA	NA	NA	80	100

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
6.	Bidang tanah yang bersertifikat	%	39,43	44,21	52,22	58,08	61,07

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2022
 BPN Kabupaten Pemalang, 2022

Di Tahun 2021 masih terjadi sengketa pertanahan sebanyak 2 kasus dan dari semua kasus yang ada sudah 100% yang telah dimediasi penyelesaiannya. Pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukannya di Tahun 2021 sudah sebesar 100% sehingga pelayanan pertanahan yang ada perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kualitasnya.

Program sertifikasi lahan yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam pemberian bantuan keuangan untuk Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL). Di Tahun 2021, bantuan yang diberikan sebesar Rp 6.000.000.000,-. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk mengurus pendaftaran tanah yang dimiliki, dimana bantuan yang diberikan sebesar Rp 150.000,- untuk tiap bidang tanah.

Tabel 2.70
 Rekap bantuan keuangan PTSL Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2021

No	Tahun	Jumlah Desa	Target		Realisasi	
			Bidang	Bantuan Keuangan	Bidang	Bantuan Keuangan
1	2018	36 Desa	46.000	6.900.000.000	32.037	4.805.550.000
2	2019	32 Desa	53.906	8.085.900.000	53.551	8.032.650.000
3	2020	26 Desa	58.000	8.700.000.000	39.250	5.887.500.000
4	2021	29 Desa	60.000	9.000.000.000	Belum rilis	6.000.000.000

Sumber : Disperkim Kabupaten Pemalang, 2022

5. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kualitas lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan komponen pembentuk terdiri atas : Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan. Gambaran kondisi lingkungan hidup Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.71
 Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	NA	NA	NA	100	100
2.	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	NA	NA	NA	100	100
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	65,71	68,51	68,88	68,58	69,65
4.	Indeks Kualitas Air	nilai	48,33	45,83	47,06	47,33	50,00
5.	Indeks Kualitas Udara	nilai	89,53	86,24	89,27	85,62	86,26
6.	Indeks Tutupan Lahan	nilai	69,74	73,52	69,95	73,56	72,66
7.	Persentase pengelolaan Kehati	%	NA	NA	NA	0	100
8.	Persentase pengendalian B3 & LB3	%	NA	NA	NA	100	100
9.	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	NA	NA	NA	100	100
10.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	%	NA	NA	NA	27	26,58

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota						
11.	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	NA	NA	NA	100	100
12.	Persentase penghargaan yang diberikan	%	NA	NA	NA	100	100
13.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	NA	NA	NA	100	100
14.	Persentase sampah yang terangkut	%	65	67	67,5	80	81
15.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	NA	NA	NA	74,97	56,30

Sumber : DLH Kabupaten Pemalang, 2022

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di Tahun 2021 sebesar 69,65 (cukup) dengan capaian masing-masing komponen : indeks kualitas air sebesar 50 (sangat kurang), indeks kualitas udara sebesar 86,26 (sangat baik) dan indeks tutupan lahan sebesar 72,66% (cukup). Komponen IKLH yang capaiannya rendah dan harus ditingkatkan kualitasnya adalah indeks kualitas air. Rendahnya kualitas air disebabkan pencemaran sungai dari sampah, air limbah domestik, dan peternakan. Peningkatan buangan sampah di sungai merupakan akibat dari masih minimnya pengurangan dan daur ulang sampah. Perlu peningkatan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan melalui berbagai penyuluhan atau sosialisasi.

Untuk mengurangi dan mengatasi pencemaran, diperlukan koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Diskoperindag, DPMPSTP, dan Dinas Pertanian sebagai upaya untuk meminimalisir pencemaran melalui pengendalian kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

Terdapat peningkatan ketaatan terhadap izin lingkungan di Tahun 2021, dimana dari 237 usaha/kegiatan yang diperiksa sebanyak 63 atau sebesar 26,58% yang melakukan pelanggaran, turun dari Tahun 2020 dimana sebanyak 27% pelanggaran yang dilakukan.

Untuk pengelolaan sampah, terjadi penurunan yaitu di Tahun 2020 sebesar 74,97% turun menjadi sebesar 56,30% di Tahun 2021. Hal tersebut disebabkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 1 unit dan kapasitasnya sudah penuh sehingga sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada. DLH Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya pengelolaan sampah yang lain, misalnya dengan mengadakan pelatihan pembuatan pupuk dari sampah organik, pelatihan ecobrik, pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi berbagai kerajinan tangan, aspal dan sebagainya.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada Tahun 2021 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, namun terjadi penurunan pada kepemilikan KTP dan data kependudukan yang mutakhir.

Penurunan kepemilikan KTP tersebut disebabkan adanya penambahan penduduk wajib KTP, terdapat wajib KTP pemula yang belum rekaman dan keterbatasan blangko KTP, sehingga Kabupaten Pemalang perlu meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.72
 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	74	75	76	77,02	80,49
2.	Cakupan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	%	18,83	20,28	21,56	67,80	75,55
3.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	60,65	65,09	66,92	73,11	78,72
4.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%	33,52	36,32	40,90	88,98	99,81
5.	Persentase Kepemilikan KTP	%	85,50	98,55	99,79	99,87	99,45
6.	Kepemilikan Kartu Keluarga	%	96,44	96,68	97,71	98,44	99,18
7.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0	0,05	3,27	21,01	37,52
8.	Persentase anak memiliki akta kelahiran	%	83,15	87,29	90,8	94,21	99,23
9.	Kepemilikan akta nikah	%	9,1	12,06	14,2	15,6	100
10.	Kepemilikan akta kematian	%	41,84	45,91	59,33	61,72	100
11.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	0	0	0	10,26	25,64
12.	Persentase data kependudukan yang mutakhir	%	NA	NA	NA	98,85	98,02
13.	Persentase informasi kependudukan yang tersedia	%	NA	NA	NA	31,47	38,11
14.	Persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register) yang tersedia	%	58,39	61,69	69,44	71,64	90,89

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu tahun 2017-2021, indeks kepuasan masyarakat terus meningkat, yaitu sebesar 74% di Tahun 2017 menjadi sebesar 80,49% di Tahun 2021 (kategori baik). Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus terus ditingkatkan agar kepuasan masyarakat juga akan terus meningkat. Layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang disediakan berupa layanan dokumen kependudukan, dokumen pencatatan sipil, pemanfaatan data kependudukan, data serta informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang capaiannya terus meningkat, yaitu sebesar 18,83% di Tahun 2017 menjadi sebesar 75,55% di Tahun 2021.

Capaian kepemilikan dokumen kependudukan terus meningkat, yaitu sebesar 60,65% di Tahun 2017 menjadi sebesar 78,72% di Tahun 2021, dengan rincian : 1) kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 85,50% di Tahun 2017 dan menjadi sebesar 99,45% di Tahun 2021; 2) Kartu Keluarga (KK) sebesar 96,44% di Tahun 2017 dan menjadi sebesar 99,18% di Tahun 2021; dan 3) Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 0,05% di Tahun 2018 dan menjadi sebesar 37,52% di Tahun 2021. Pencapaian tersebut karena adanya upaya dari Disdukcatpil Kabupaten Pemalang yang melakukan terobosan dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelayanan secara jemput bola, *home visit* bagi lansia dan difabel,

meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil juga terus meningkat, yaitu sebesar 33,52% di Tahun 2017 menjadi sebesar 99,81% di Tahun 2021, dengan rincian : 1) kepemilikan akta kelahiran sebesar 83,15% di Tahun 2017 menjadi sebesar 99,23% di Tahun 2021; 2) akta nikah untuk penduduk non muslim sebesar 9,1% di tahun 2017 dan menjadi sebesar 100% di Tahun 2021; dan 3) akta kematian sebesar 41,84% di tahun 2017 menjadi sebesar 100% di Tahun 2021. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target berupa : sosialisasi, pelayanan akte kelahiran bayi secara jemput bola, pelaksanaan isbat nikah bagi masyarakat di desa dan keluarga yang kurang mampu, serta kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, PKK dan jalur pendidikan. Namun, masih ada penduduk yang kurang memahami arti pentingnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil sehingga baru mengurus jika ada kepentingan.

Di Tahun 2021, terdapat 10 atau sebesar 25,64% perangkat daerah yang sudah melakukan kerjasama dengan Disdukcatpil Kabupaten Pemalang untuk pemanfaatan data kependudukan melalui *web portal*, yaitu Diskominfo, BKD, Bapenda, Dindikbud, Dinkes, Dinsos KBPP, DLH, Disperkim, Bappeda dan Kecamatan Pemalang.

Mengingat perkembangan jaman yang semakin maju, diperlukan tata kelola data yang ringkas, aman dan valid. Di Tahun 2021, ketersediaan data kependudukan yang mutakhir mencapai 98,02% yang mengindikasikan bahwa kualitas data kependudukan yang dilayani oleh Disdukcatpil Kabupaten Pemalang sudah tinggi. Namun, di Tahun 2021, kegiatan entry data manual akte-akte pencatatan sipil yang telah diterbitkan sebelum terbangunnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) baru tercapai 38,11% sehingga perlu ditingkatkan upaya percepatannya.

Indikator persentase data registrasi terkait kelahiran dan kematian (*Vital Statistics Register*) merupakan indikator SDG's. Registrasi tersebut didukung oleh kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil dan kegiatan peningkatan pelayanan akta kematian dengan capaian meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 capaiannya sebesar 58,39% dan menjadi sebesar 90,89% pada tahun 2021.

Permasalahan kependudukan yang ada di Kabupaten Pemalang antara lain : (1) laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, yaitu sebesar 0,64% di tahun 2018 hingga sebesar 1,31% di tahun 2021; (2) rendahnya peningkatan IPM yaitu sebesar 0,87 point di tahun 2017, stagnan di tahun 2020 dan sebesar 0,24 point di tahun 2021; (3) sebanyak 19,90% keluarga merupakan keluarga pra sejahtera; (4) turunnya cakupan peserta KB aktif, yaitu sebanyak 81,53% di tahun 2017 menjadi sebanyak 70,93% di tahun 2021; dan (5) masih terjadi pernikahan dini yaitu sebanyak 5,32% di tahun 2021. Permasalahan tersebut harus direncanakan dan diimplementasikan dengan baik guna mencegah adanya permasalahan yang lebih kompleks, yaitu dengan disusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2045. GDPK terdiri dari 5 pilar, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, indikator pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan. GDPK Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2045 berisi kecenderungan parameter

pembangunan kependudukan, isu penting pembangunan kependudukan dan program pembangunan kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 0,7364 yang artinya rata-rata desa di Kabupaten Pemalang berada pada kategori maju. Telah ada sembilan desa (4,265%) dengan status desa mandiri dan sudah tidak ada desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Gambaran kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Angka	0,6699	0,6835	0,6962	0,7167	0,7364
2.	Persentase desa mandiri	%	2,370	2,844	2,844	4,265	4,265
3.	Persentase desa berdaya	%	0	0	0	0	0,95
4.	Persentase desa tertata	%	NA	NA	NA	0,47	1,90
5.	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	%	NA	NA	NA	36,49	37,44
6.	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	%	NA	NA	NA	0	1,42
7.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya	%	5,63	10,97	13,11	15,61	16,09

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2022

Desa berdaya adalah desa yang mampu mengelola potensi dan masalah untuk meningkatkan PADes melalui penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan lembaga desa serta masyarakat desa sesuai kewenangan secara partisipatif maupun kerjasama desa. Suatu desa dinyatakan Desa Berdaya apabila desa tersebut merupakan desa tertata, telah melakukan kerjasama desa dan telah mendapatkan keuntungan yang dimasukkan ke dalam PADesa, telah mendigitalisasikan data pemerintahan desa dan telah melaksanakan pelayanan secara digitalisasi, serta LKD dan LEM desa tersebut merupakan lembaga yang aktif. Di Tahun 2021, sebanyak 0,95% atau 2 desa dinyatakan sebagai desa berdaya, yaitu Desa Penggarit dan Nyalembeng.

Suatu desa dinyatakan tertata apabila memenuhi salah satu unsur dari : (1) merupakan hasil pemekaran desa, (2) mempunyai batas desa, (3) mempunyai rencana tata ruang wilayah desa, dan (4) mempunyai sarana dan prasarana desa dalam kondisi baik. Di Tahun 2021, terdapat 4 desa tertata atau sebesar 1,90%, yaitu Desa Penggarit, Siremeng, Warungpring dan Randudongkal. Rendahnya capaian indikator ini disebabkan masih banyak desa yang belum mempunyai batas desa, belum ada desa yang mempunyai rencata tata ruang wilayah desa dan masih banyak sarana prasarana desa dalam kondisi tidak baik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah dengan melakukan kerjasama desa. Kerjasama desa yang dapat dilakukan berupa :(1) kerjasama antar desa, (2) kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, dan (3) kerjasama dalam kawasan perdesaan. Di Tahun 2021, sebesar 37,44% atau

sebanyak 79 desa yang PADes-nya bertambah dari hasil kerjasama desa. Belum semua kerjasama desa yang dilaksanakan mencapai hasil seperti yang diharapkan, sehingga dibutuhkan dukungan dari *stakeholders* terkait untuk meningkatkan hasil capaian kerjasama desa. Selain itu juga disebabkan masih kurangnya pemahaman akan pentingnya kerjasama desa, masih banyak desa yang memilih memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada hanya untuk lingkup desanya saja.

Suatu desa dinyatakan beradministrasi pemerintahan baik apabila buku administrasi pemerintahan desa-nya terisi lengkap, dokumen-dokumen pemerintahan desa-nya tersusun tepat waktu, layanan pemerintahan desa-nya dilaksanakan secara digital dan data desa tersaji secara digital. Di Tahun 2021, terdapat 1,42% atau sebanyak 3 desa beradministrasi pemerintahan baik, yaitu Desa Penggarit, Bojongnangka dan Kelangdepok. Kendala yang ada yaitu tidak adanya perangkat desa atau personil yang menguasai IT sehingga kesulitan untuk mendigitalisasi data serta melaksanakan pelayanan secara digital. Perlu upaya lebih lanjut dari Dinpermasdes Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan fasilitasi kepada desa dan meningkatkan kompetensi perangkat desa.

Pembangunan desa akan terlaksana secara optimal apabila didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Di tingkat desa terdapat TP PKK yang diketuai oleh Ibu Kepala Desa. TP PKK sangat besar peranannya dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, seperti percepatan penurunan stunting; kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan angka kesehatan dan penurunan AKB, AKI, AKBa; penguatan dan pengetahuan ketahanan keluarga.

Badan Usaha Milik Desa (BUMdesa) dan pasar desa adalah contoh dari LEM. Semua desa di Kabupaten Pemalang mempunyai BUMDesa, namun dari 211 BUMDesa tersebut ada yang aktif dan tidak aktif. Berdasar stratanya, BUMDesa dibagi menjadi 4 status, yaitu BUMDesa dasar sebanyak 106 unit, BUMDesa tumbuh sebanyak 93 unit, BUMDesa berkembang sebanyak 9 unit dan BUMDesa maju sebanyak 3 unit. Sedangkan untuk pasar desa, terdapat 35 unit yang tersebar di 10 kecamatan. Di Kecamatan Belik, terdapat 4 unit pasar desa yang semuanya sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Comal, terdapat 3 unit pasar desa yang belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Ampelgading, terdapat 2 unit pasar desa yang semuanya sudah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Petarukan, terdapat 6 unit pasar desa dan baru 1 desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yaitu Desa Kalirandu. Di Kecamatan Ulujami, terdapat 4 unit pasar desa yang belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Watukumpul, terdapat 5 unit pasar desa yang belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Taman, terdapat 1 unit pasar desa di Desa Gondang yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Bodeh, terdapat 5 unit pasar desa dan semuanya belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Randudongkal, terdapat 3 unit pasar desa dan semuanya belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Di Kecamatan Pulosari, terdapat 2 Pasar Desa dan semuanya belum ditetapkan

dengan Peraturan Desa. Sampai dengan 2021, LKD dan LEM yang berdaya masih sangat rendah yaitu sebesar 16,09% sehingga perlu pembinaan dan pendampingan lebih lanjut dari instansi terkait.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.74
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan peserta KB aktif	%	81,53	81,55	81,57	70,84	70,93
2.	Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i> dan DO)	%	8,42	8,37	8,32	10,12	12,21
3.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	51,8	51,75	51,73	77,63	50,70
4.	Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB)	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja aktif	%	100	100	100	100	100
6.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	%	88,48	88,66	88,83	89,19	86,30
7.	Persentase kecamatan yang memiliki PIK KRR	%	100	100	100	100	100
8.	Angka <i>drop out</i> KB	%	12,03	11,55	11,07	10,59	15,94
9.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	84,98	85,048	85,115	85,18	81,98
10.	TFR	%	2,54	2,53	2,52	2,51	Belum rilis

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022

Selama Tahun 2017-2019, cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebaliknya dengan cakupan *unmeet need* dan *drop out* KB mengalami penurunan tiap tahunnya. Namun, di Tahun 2020 terjadi penurunan cakupan peserta aktif yaitu sebesar 81,57% di Tahun 2019 turun menjadi 70,84% di Tahun 2020 dan peningkatan cakupan *unmeet need* dan *drop out* KB yaitu sebesar 8,32% di Tahun 2019 naik menjadi 10,12% di Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membuat berkurangnya kemampuan penduduk untuk membeli alat kontrasepsi dan adanya pembatasan sosial sehingga penduduk tidak dapat ke bidan atau fasilitas kesehatan untuk konsultasi maupun membeli/memasang alat kontrasepsi. Dampak yang terjadi adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk sebesar 0,88% di Tahun 2020 lebih besar dibanding pertumbuhan di Tahun 2019 yang tumbuh hanya sebesar 0,65%. Di Tahun 2021, seiring dengan membaiknya perekonomian daerah, meningkat pula kemampuan masyarakat untuk ber-KB sehingga cakupan peserta KB aktif sedikit meningkat menjadi 70,93%.

Pandemi Covid-19 juga menyebabkan peningkatan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I, karena keluarga yang semula rentan miskin kembali menjadi miskin karena kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan. Di Tahun 2020, persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I sebanyak 77,63% meningkat tajam dari Tahun 2019 sebesar 51,73%. Untuk membantu keluarga pra

sejahtera dan sejahtera I tersebut Pemerintah Kabupaten Pemalang memberikan berbagai bantuan, baik bantuan sosial (pangan atau tunai) untuk mengurangi beban pengeluaran maupun bantuan modal untuk meningkatkan pendapatan. Dan hasilnya adalah di Tahun 2021 terjadi penurunan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I menjadi sebanyak 50,70%.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan difokuskan untuk menurunkan angka kinerja lalu lintas kabupaten (V/C ratio) dan meningkatkan rasio konektivitas kabupaten. Capaian kinerja lalu lintas Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 0,32 turun dari capaian Tahun 2020 sebesar 0,44. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja lalu lintas di Kabupaten Pemalang sehingga tingkat kepadatan lalu lintas dapat diurai dan menurun. Namun, capaian ini dipengaruhi juga oleh kondisi pandemi Covid-19 dimana pergerakan masyarakat dibatasi, dimungkinkan akan terjadi peningkatan bila kondisi sudah kembali normal. Sedangkan untuk rasio konektivitas, sampai dengan Tahun 2021 baru sebesar 77,86% wilayah di Kabupaten Pemalang yang terlayani sarana prasarana perhubungan, sehingga diperlukan upaya peningkatan dari Dishub Kabupaten Pemalang untuk memperluas layanannya. Gambaran kinerja urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.75

Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase penyelenggaraan lalu lintas	%	NA	NA	NA	50	100
2.	Persentase penyelenggaraan angkutan jalan	%	NA	NA	NA	80	100
3.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	V/C ratio	NA	NA	NA	0,44	0,32
4.	Rasio konektivitas	Indeks	NA	NA	NA	Na	77,86
5.	Persentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	%	NA	NA	NA	70	70

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2022

Tabel 2.76

Data V/C ratio di ruas jalan kewenangan kabupaten

No	Nama Jalan	Seksi	Arah	Volume Lalin (V)	Kapasitas Jalan (C)	Derajat Kejenuhan	Level Of Service
1	JL. Ahmad Yani			885,5 smp/jam	2757,865 smp/jam	0,31	B
2	JL. Dr. Wahidin			973 smp/jam	2104,68 smp/jam	0,4	B
3	JL. Kolonel Sugiono			985,5 smp/jam	3141,442 smp/jam	0,31	B
4	JL. Jendral Sudirman	Seksi 1	Barat	503,15 smp/jam	1383,6 smp /jam	0,36	B
			Timur	508,65 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,37	B
		Seksi 2	Barat	772,5 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,56	C
			Timur	678,9 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,49	C
		Seksi 3	Barat	710,4 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,51	C
			Timur	617,35 smp/jam	1383,6 smp/jam	0,45	C

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jalan yang mempunyai kepadatan tinggi dan berpotensi menjadi lokasi kemacetan adalah Jalan Jenderal Sudirman seksi 2 dan seksi 3. Agar kemacetan yang terjadi tidak membawa dampak negatif, Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya preventif, misalnya dengan menetapkan jalur alternatif sehingga tidak semua kendaraan melewati jalur rawan macet tersebut.

Di Tahun 2021, masih terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 461 kasus. Beberapa penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian manusia, kondisi jalan rusak, kondisi kendaraan tidak baik, minimnya sarana perlengkapan jalan, faktor alam dan lingkungan. Berikut rincian data kecelakaan lalu lintas Tahun 2021:

Tabel 2.77
Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugiannya Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERUGIAN MATERIIL (Rp)	KET
			MD	LB	LR		
1	JANUARI	36	5	0	41	Rp 8.000.000	
2	PEBRUARI	41	8	0	50	Rp 14.500.000	
3	MARET	42	8	0	47	Rp 20.600.000	
4	APRIL	25	6	0	21	Rp 5.000.000	
5	MEI	39	8	0	42	Rp 11.400.000	
6	JUNI	40	14	0	51	Rp 25.300.000	
7	JULI	34	11	0	33	Rp 19.700.000	
8	AGUSTUS	36	8	1	41	Rp 37.500.000	
9	SEPTEMBER	53	11	0	50	Rp 26.300.000	
10	OKTOBER	35	9	0	38	Rp 37.900.000	
11	NOVEMBER	41	2	0	51	Rp 22.750.000	
12	DESEMBER	39	10	0	42	Rp 19.600.000	
	TOTAL	461	100	1	507	Rp 248.550.000	

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2022

Sesuai SK Bupati Nomor 188.4/108/Tahun 2021 tentang Penetapan tipe dan lokasi terminal penumpang di Kabupaten Pemalang, terdapat 8 terminal penumpang tipe C yaitu terminal Randudongkal, terminal Belik, terminal Moga, terminal Angkutan Kota, terminal Petarukan, terminal Warungpring, terminal Grosir Comal dan terminal Pasar Comal. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 24 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa penyediaan fasilitas terminal meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Kondisi fasilitas utama pada terminal tipe C di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Kondisi Fasilitas Utama Pada Terminal Tipe C

No	Fasilitas	Terminal							
		Randu dongkal	Belik	Moga	Warung pring	Angkot PML	Grosir Comal	Peta rukan	Pasar Comal
1	Jalur Keberangkatan	√	√	√	X	√	√	√	√
2	Jalur Kedatangan	√	√	√	X	√	√	√	√
3	Ruang Tunggu Penumpang / Pengantar dan / atau penjemput	√	√	√	X	√	√	√	√
4	Tempat naik turun penumpang	√	√	X	X	√	√	√	√
5	Tempat Parkir Kendaraan	√	√	√	X	√	√	√	√
6	Fasilitas Pengelolaan lingkungan hidup	√	√	√	X	√	√	√	√

No	Fasilitas	Terminal							
		Randu dongkal	Belik	Moga	Warung pring	Angkot PML	Grosir Comal	Peta rukan	Pasar Comal
7	Perlengkapan Jalan	√	√	√	X	√	√	√	√
8	Media informasi	√	√	X	X	√	X	X	√
9	Kantor penyelenggara terminal	√	√	√	√	√	√	√	√
10	loket penjualan tiket	√	√	X	X	X	√	X	X

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan :

√ Ada

X Tidak ada

Data kondisi terminal tersebut menunjukkan bahwa secara umum 8 terminal telah memiliki fasilitas utama dengan kondisi layak. Namun kondisi “layak” tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe C di Kabupaten Pemalang menyebabkan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan pemenuhan fasilitas utama dan penunjang terminal.

10. Komunikasi dan Informatika

Ketersediaan informasi publik menjadi fokus kinerja urusan komunikasi dan informatika untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan. Kinerja urusan komunikasi dan informatika selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.79
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase ketersediaan informasi publik	Indeks	Na	Na	Na	66,00	70
2.	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	%	Na	Na	Na	1	5,00
3.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	Na	Na	Na	66,00	41,18
4.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	Na	Na	Na	27,00	51,30
5.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	Na	Na	Na	40,00	50
6.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	Na	Na	Na	30,00	40
7.	Persentase <i>Network</i> terintegrasi	%	20	25	30	70,73	70,73
8.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	Na	Na	Na	70,73	70,73

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar tabel di atas, terlihat capaian indikator urusan komunikasi dan informatika cenderung masih rendah, namun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Di Tahun 2021, baru sebanyak 70% informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat, penduduk yang mengakses informasi publik hanya sebanyak 5%, layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegasi baru sebanyak

7 layanan dari total 17 layanan atau sebesar 41,18%, *network* yang terintegrasi baru sebesar 70,73% dan perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet Diskominfo sebesar 70,73% atau sebanyak 29 perangkat daerah. Capaian kinerja yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menerapkan *e-government* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase KSP/USP sehat	%	11,81	13,38	10,23	27,56	30,25
2.	Persentase koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	%	275	100	114,28	100	100
3.	Persentase koperasi aktif dan patuh	%	72,99	73,28	73,62	25,68	29,04
4.	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih	%	34,17	26,85	29,29	0,4	18,7
5.	Persentase koperasi yang dibina	%	37	38	39	6,42	32,18
6.	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	%	NA	NA	NA	23,79	28,89
7.	Persentase usaha mikro yang berijin	%	23	24	25	34,16	33,60
8.	Persentase pertumbuhan usaha mikro	%	6,85	7,05	7,15	17,5	7,75
9.	Persentase usaha mikro dan kecil	%	99,86	99,86	99,87	99,29	99,52
10.	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	0,053	0,04	0,053	-7,66	0,053
11.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	23	24	25	34,16	25,79
12.	Persentase UMKM yg dibina	%	0,7	0,73	1,35	1,18	1,49

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022

Kinerja koperasi yang ditunjukkan selama Tahun 2017-2021 relatif rendah. Di Tahun 2021, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sehat hanya sebesar 30,25%, koperasi aktif dan patuh hanya sebesar 29,04% dan dari 637 unit koperasi yang ada, yang dinyatakan sebagai koperasi yang berkualitas hanya sebanyak 184 unit atau sebesar 28,89%. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang paling ideal, harus terus didorong menuju koperasi yang mandiri dan memiliki daya saing usaha, diantaranya melalui penguatan kelembagaan koperasi berbasis kewirausahaan dan teknologi serta inovasi. Diskoperindag Kabupaten Pemalang harus meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi yang ada sehingga koperasi dapat menjadi lembaga ekonomi yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pendampingan dan pembinaan terhadap UMKM juga harus dilakukan, mengingat masih rendahnya kinerja UMKM, yaitu di Tahun 2021 hanya sebanyak 33,60% usaha mikro yang berijin, pertumbuhan usaha mikro hanya sebesar 7,75% dan UMKM yang dibina hanya sebanyak 1,49%. Bahkan terjadi penurunan tingkat usaha mikro yang menjadi wirausaha, dari 34,16% di Tahun 2020 menjadi 25,79% di Tahun 2021 dimana dari 15.715 usaha mikro yang ada di Kabupaten Pemalang

hanya sebanyak 4.053 usaha yang meningkat menjadi wirausaha. Yang harus dilakukan Diskoperindag Kabupaten Pemalang adalah melakukan pendataan pelaku UMKM. Hal ini penting untuk membantu efektivitas intervensi, baik melalui fasilitasi, pendampingan, pelatihan ketrampilan maupun pemberian bantuan (teknis maupun permodalan) serta pemetaan kondisi UMKM (termasuk stratifikasi UMKM) di Kabupaten Pemalang.

12. Penanaman Modal Daerah

Perkembangan penanaman modal daerah selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.81
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase peningkatan investasi (PMA dan PMDN)	%	-	-	-	-90,50	3,127
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,06	82,97	79,76	83,6	87,36
3.	Persentase peningkatan jumlah investor	%	85,71	-38,48	562,5	-35,87	-40
4.	Persentase terlaksananya promosi penanaman modal	%	100	100	100	100	0
5.	Persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal	%	99,73	98,95	97,44	98,02	98,71
6.	Persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	%	38,64	59,57	43,84	27,61	85,71
7.	Persentase realisasi perizinan	%	93,48	152,78	119,92	157,3	160,28
8.	Jumlah investor yang berskala nasional	Jumlah	13	10	53	34	21
9.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp	28.890.50 0.000	93.634.6 91.900	1.753.35 3.206.63 7	166.492.40 8.001	171.698.9 00.267

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2022

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya penanaman modal daerah. Di Tahun 2020, peningkatan investasi berkontraksi hingga sebesar -90,50%, peningkatan jumlah investor juga berkontraksi hingga sebesar -35,87% dan jumlah nilai investasi berskala nasional turun tajam menjadi Rp166,49 milyar dari Rp1,75 trilyun. Pemerintah Kabupaten Pemalang melakukan berbagai upaya untuk menarik investor, antara lain dengan melakukan promosi (*roadshow*) dan keikutsertaan dalam *event-event* pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor dan mempermudah perijinan dengan memberikan jaminan kepastian hukum, penyederhanaan

birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan kondusivitas sosial kemasyarakatan. Di Tahun 2021, upaya tersebut membuahkan hasil berupa peningkatan investasi sebesar 3,13%, terdapat 21 investor berskala nasional yang masuk dan peningkatan jumlah investasi berskala nasional menjadi sebesar Rp171,69 milyar. Dimana peningkatan investasi tersebut telah melampaui dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD yaitu sebesar 1%.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja urusan kepemudaan khususnya di bidang ekonomi justru mengalami peningkatan di masa pandemi (Tahun 2020) ditandai dengan meningkatnya wirausaha pemula sebesar 0,05% dan stagnan di Tahun 2021. Peningkatan juga terjadi pada partisipasi pemuda dalam organisasi dan ekonomi mandiri masing-masing sebesar 28,08% dan 0,05%. Hal ini menjadi gambaran bahwa ditengah situasi yang serba sulit, justru memunculkan ide-ide kreatif dari para pemuda untuk bisa eksis dan bertahan secara ekonomi melalui kegiatan wirausaha.

Sebaliknya, untuk kinerja urusan olahraga di Tahun 2020 mengalami penurunan yang tajam yaitu 0 atlet yang berprestasi. Hal ini disebabkan tidak adanya *event* olahraga yang diselenggarakan akibat adanya pembatasan sosial untuk pencegahan penularan Covid-19. Di Tahun 2021, pembatasan sosial sudah mulai dikurangi dan sudah mulai diselenggarakan *event-event* olahraga sehingga kinerja olahraga pun mengalami peningkatan yaitu sebanyak 24,26% atau 33 atlet yang mengukir prestasi di tingkat regional. Gambaran selengkapnya dikemukakan sebagai berikut :

Tabel 2.82
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase atlet yang berprestasi	%	0,0	7,0	16,7	0	24,26
2.	Persentase pemuda menjadi wirausaha pemula	%	NA	NA	NA	0,05	0,05
3.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Angka	NA	NA	NA	28,08	19,89
4.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	Angka	NA	NA	NA	0,05	0,05
5.	Persentase gugus depan/SAKA PRAMUKA yang dibina	%	NA	NA	NA	0	100
6.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat regional	atlet	0	21	50	0	33
7.	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	%	70	70	70	70	91,30
8.	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat regional	Atlet	0	21	50	0	33
9.	Persentase anggota pramuka yang berprestasi	%	10,71	28,57	3,57	0	0
10.	Jumlah klub olahraga	Kelompok	15	15	15	15	15
11.	Persentase prestasi Olahraga	%	NA	NA	NA	47,83	47,83

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang, 2022

14. Statistik

Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Pemalang (*Single Data System* dan *Open Data*) belum terlaksana secara optimal disebabkan belum adanya sistem data dan statistik yang terintegrasi dan belum lengkapnya data sektoral yang tersedia. Kebijakan Satu Data Indonesia yang didalamnya mengatur tentang penyelenggaran Statistik Sektoral dan Jaringan Informasi Geospasial (Kebijakan

Satu Peta) mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan koordinasi maupun pengelolaan satu data. Regulasi pemanfaatan satu data di level kabupaten sudah ada yaitu Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan kinerja urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	%	0	0	0	2	22
2.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	Na	Na	Na	100	100
3.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	Na	Na	Na	100	100

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua perangkat daerah di Kabupaten Pemalang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Sedangkan untuk ketersediaan statistik sektoral yang sesuai standar di Tahun 2021 masih sebesar 22%. Dinas Kominfo Kabupaten Pemalang agar meningkatkan ketersediaan statistik sektoral yang sesuai standar untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia.

15. Persandian

Urusan persandian dapat dilihat dari indikator persentase konten informasi yang telah diamankan dan tingkat keamanan informasi pemerintah. Persentase konten informasi yang telah diamankan di Tahun 2021 sebesar 41% meningkat dari capaian Tahun 2020 sebesar 20%. Selanjutnya, tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 sebesar 20% dimana dari 5 area keamanan informasi, baru 1 area yang dinilai sudah terjamin keamanannya.

Tabel 2.84
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	%	Na	Na	0,85	20	41
2.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	Na	Na	Na	20	20

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

16. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan yang perlu ditingkatkan adalah indeks kebudayaan yang merupakan komposit dari dimensi ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya dan budaya literasi. Realisasi indeks kebudayaan di Tahun 2021 sebesar 39,05 dari target 42,8. Rendahnya capaian ini disebabkan belum optimalnya capaian dari beberapa indikator komposit, antara lain indikator budaya literasi yang terbatas hanya dari kunjungan perpustakaan umum daerah saja, penghitungan kunjungan ke obyek wisata budaya belum optimal karena ada

pembatasan sosial akibat adanya Pandemi Covid, masih terbatas SDM yang memenuhi sebagai kualifikasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk melakukan kajian penetapan warisan budaya dan keterbatasan anggaran. Berikut disajikan gambaran perkembangan urusan kebudayaan di Kabupaten Pemalang selama Tahun 2017-2021.

Tabel 2.85
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kebudayaan	Indeks	0	0	0	0	39,05
2.	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	NA	1,805	3,57	3,57	5,395
3.	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	37	56,36	57,77	54,35	54,88
4.	Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi	%	NA	100	100	100	100
5.	Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi	%	NA	100	100	100	100
6.	Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa warisan budaya yang ditetapkan selama Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 1,805% di Tahun 2018 menjadi sebesar 5,395% di Tahun 2021. Terdapat 9 warisan budaya yang sudah ditetapkan, yaitu 8 warisan budaya benda/cagar budaya (Rumah Bupati Notonegoro, Watu Tumpeng, Stasiun Kereta Api, Rumah Keluarga Damri Aziz/Ki Tondo, Pabrik Gula Sumberharjo, SMAN 3 Pemalang, Makam Mengoneng dan Rumah Dinas Camat Moga) dan 1 warisan budaya tak benda (sego grombyang). Pelestarian warisan budaya juga menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar 37% pada tahun 2017 menjadi sebesar 54,88% pada tahun 2021. Agar warisan budaya dapat ditetapkan dan dilestarikan, setiap tahunnya dilaksanakan inventarisasi dan registrasi warisan budaya. Sampai dengan Tahun 2021, warisan budaya tak benda yang telah diregistrasi sebanyak 67 obyek, sejarah Pemalang yang telah diregistrasi sebanyak 7 obyek dan warisan budaya benda yang telah diregistrasi sebanyak 96 obyek.

17. Perpustakaan

Kinerja perpustakaan pada Tahun 2021 dapat dikatakan kurang baik, terlihat dari rendahnya angka kunjungan perpustakaan sebesar 2,24%. Hal ini disebabkan untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, perpustakaan daerah, perpustakaan keliling dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menerapkan aturan protokol kesehatan secara ketat dan membatasai jumlah pengunjung yang mendapat pelayanan. Sedangkan untuk layanan perpustakaan digital (iPemalang) belum optimal pelaksanaannya, ditandai dengan pengunjung iPemalang hanya sebesar 1,7%. Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu adanya layanan iPemalang dan masih banyak masyarakat yang gagap teknologi sehingga tidak bisa memanfaatkan layanan yang ada. Gambaran kinerja urusan perpustakaan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai budaya literasi	%	2,17	2,75	3,68	1,24	22,38
2.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Angka	NA	NA	NA	7,033	9,96
3.	Persentase perpustakaan terstandarisasi	%	NA	NA	NA	0,59	1,69
4.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	NA	NA	NA	55,25	54,32
5.	Peningkatan angka kunjungan perpustakaan	%	3,78	4,07	4,82	1,53	2,24
6.	Persentase koleksi perpustakaan yang tersedia	%	53,54	56,51	59,62	77,89	69,11
7.	Peningkatan pengunjung aplikasi perpustakaan digital iPemalang	%	NA	0	100	1,5	1,7
8.	Persentase naskah kuno dan budaya etnis nusantara yang dilestarikan	%	55,50	55,50	55,50	55,50	0

Sumber : *Dinpusarda Kabupaten Pemalang, 2022*

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya budaya baca di masyarakat terlihat dari rendahnya capaian tiga indikator yang mengukur budaya baca di Tahun 2021, yaitu : 1) nilai budaya literasi sebesar 22,38 (rendah); 2) indeks pembangunan literasi sebesar 9,96 (rendah); dan 3) tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 54,32 (rendah). Upaya yang dilakukan oleh Dinpusarda Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan budaya baca masyarakat, antara lain : 1) pengoptimalan pelayanan perpustakaan keliling, baik ke sekolah, desa, kecamatan maupun ruang publik lainnya; 2) dibangunnya pojok baca di Ruang Terbuka Publik (RTP), 3) diadakannya berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca, seperti sosialisasi budaya baca dan literasi, penghargaan gerakan budaya gemar membaca, pelatihan literasi berbasis inklusi sosial dan pemilihan duta baca. Namun, upaya tersebut tidak dapat optimal karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.

Faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kegemaran membaca masyarakat adalah kondisi perpustakaan. Perpustakaan yang telah memenuhi SNP baru sebesar 1,69% atau sebanyak 20 unit perpustakaan (1 perpustakaan umum dan 19 perpustakaan sekolah). Hal ini disebabkan karena sarana prasarana perpustakaan masih terbatas sehingga untuk ke depan perlu dipikirkan pemenuhan sarana prasarana perpustakaan yang sesuai standar. Selain kondisi perpustakaan, kelengkapan koleksi bacaan juga berpengaruh terhadap minat baca masyarakat. Di Tahun 2021 sebanyak 69,11% koleksi perpustakaan yang dapat disediakan oleh Dinpusarda Kabupaten Pemalang.

Sedangkan untuk kegiatan pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara di Tahun 2021 tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran, dimana anggaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

18. Kearsipan

Sampai dengan Tahun 2021, capaian indeks kearsipan hanya sebesar 38,88% (kurang). Hal ini disebabkan masih rendahnya kemampuan perangkat daerah dalam mengelola arsip, yaitu baru sebesar 60,98% atau sebanyak 25 perangkat daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik. Kinerja ini perlu ditingkatkan mengingat indeks kearsipan merupakan salah satu indikator sasaran reformasi

birokrasi. Gambaran urusan kearsipan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kearsipan	%	NA	NA	NA	42	38,88
2.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	NA	NA	NA	7,12	74
3.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	NA	NA	NA	5,45	4,16
4.	Persentase OPD yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	4,81	6,41	6,41	9,75	60,98
5.	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	%	0	0	0	0	0

Sumber : *Dinpusarda Kabupaten Pemalang, 2022*

Berdasar tabel di atas, di Tahun 2021 tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebesar 74%. Hasil yang masih rendah ini disebabkan masih rendahnya arsip aktif dan in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip dan belum ada arsip yang dimasukkan ke dalam JIKD karena belum mempunyai aplikasi SIKD. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebesar 4,16%. Capaian yang rendah ini disebabkan pada tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban serta tidak ada penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Selama kurun waktu tahun 2017-2021 belum ada pengajuan ijin penggunaan arsip tertutup sehingga capaian persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup sebesar 0%.

C. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja perikanan tangkap selama tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan yaitu sebesar 26.511.707 kg di tahun 2017 menjadi 18.396.293 kg di tahun 2021, hal ini disebabkan adanya larangan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan (cantrang). Namun, bila dilihat dari rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan peningkatan, yaitu sebesar Rp1.155.845,- di tahun 2017 menjadi Rp1.331.039,- di tahun 2021. Selanjutnya, untuk kinerja perikanan budidaya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 14.642.375 kg di tahun 2017 menjadi 18.729.495 kg di tahun 2021. Begitu pula dengan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar Rp1.185.080,- di tahun 2017 menjadi Rp1.393.594,- di tahun 2021. Peningkatan kinerja perikanan ini merupakan hasil dari upaya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Disperik Kabupaten Pemalang yang berkontribusi pada peningkatan PDRB Kabupaten Pemalang sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan komponen penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten Pemalang.

Capaian Angka Konsumsi Ikan di Tahun 2021 sebesar 30,27 kg/kap/th turun 12,16 poin dari capaian Tahun 2020. Hal ini disebabkan kurangnya kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemari) yang dilakukan akibat adanya refocusing anggaran. Kedepan perlu dilakukan upaya pembudayaan gemar makan ikan pada masyarakat sejak usia dini. Untuk mendukung peningkatan konsumsi ikan, perlu dikembangkan unit pengolahan dan pemasaran ikan yang memenuhi aspek

keamanan pangan. Namun, sampai dengan tahun 2021 capaiannya masih rendah yaitu sebesar 53,87% sehingga perlu upaya pembinaan dan pendampingan lebih lanjut.

Selengkapnya capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.88
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi perikanan tangkap	Kg	26.511.707	21.890.350	16.973.640	18.096.881	18.396.293
2.	Produksi perikanan budidaya	Kg	14.642.375	15.714.500	16.918.064	17.800.168	18.729.495
3.	Angka Konsumsi Ikan	kg/kap/th	29,60	30,60	31,01	34,46	30,27
4.	Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	%	5,86	3,37	1,33	11,12	-12,16
5.	Rata-rata pendapatan nelayan	Rp	1.155.845	1.205.845	1.227.182	1.267.639	1.331.039
6.	persentase TPI yang memenuhi standar	%	55	59	63	64	67
7.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	5,18	7,32	7,66	5,21	5,22
8.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	-2,14	-17,43	-22,46	6,62	1,65
9.	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan	Rp	1.185.080	1.197.615	1.295.094	1.369.911	1.393.594
10.	Persentase pembinaan untuk kelestarian sumberdaya ikan	%	10	10	20	30	40
11.	Persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan	%	43,40	45,28	47,17	48,87	53,87

Sumber : Disperik Kabupaten Pemalang, 2022

2. Pariwisata

Secara geografis, Kabupaten Pemalang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang cukup banyak dan beraneka ragam, sehingga menjadi modal bagi pengembangan kepariwisataan daerah. Sebelum pandemi, kondisi industri kepariwisataan khususnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi retribusi pariwisata pada PAD selalu meningkat, namun dengan adanya pandemi di Tahun 2020, ke dua indikator tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu kunjungan wisata turun sebesar 28,84% dan kontribusi retribusi pariwisata pada PAD turun menjadi sebesar 0,4%. Hal ini mempertegas bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19 karena mobilitas dan aktivitas sektor ini sangat dibatasi bahkan dihentikan.

Desa Wisata (Dewi) merupakan salah satu program unggulan Bupati Pemalang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk pengembangan desa wisata, diantaranya promosi dan publikasi, pemanfaatan sarana dan prasarana ekonomi

kreatif, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata. Sampai dengan Tahun 2021, baru sebanyak 3 desa wisata atau sebesar 11,11% yang masuk dalam kategori maju, sehingga perlu upaya lebih lanjut dari Disparpora Kabupaten Pemalang untuk membina dan mendampingi pengembangan desa wisata di Kabupaten Pemalang.

Secara rinci perkembangan pariwisata di Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
 Perkembangan Pariwisata Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah kunjungan wisata	orang	1.066.539	1.118.657	1.217.205	866.223	793.330
2.	Persentase peningkatan kunjungan wisata	%	5,46	4,89	8,81	-28,84	-8,42
3.	Jumlah kontribusi retribusi pariwisata pada PAD	Rp	3.293.021.500	3.214.657.000	2.799.187.100	1.256.533.000	812.055.000
4.	Jumlah obyek wisata unggulan	obyek	1	1	1	1	1
5.	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,79	1,07	0,80	0,40	0,22
6.	Persentase usaha pariwisata (biro perjalanan) yang memiliki sertifikasi/ memenuhi standar usaha pariwisata	%	0	0	0	0	0
7.	Persentase obyek wisata yang dipromosikan	%	100	100	100	100	100
8.	persentase sarana prasarana Ekraf yang dimanfaatkan	%	0	0	0	20	40
9.	Persentase Pengembangan ekonomi kreatif	%	0	0	16,67	40	50
10.	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	%	0	0	19	0	25
11.	Tingkat Hunian Akomodasi (Hunian)	Angka	NA	NA	NA	24,17	21,19
12.	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang teregistrasi	%	NA	NA	NA	45,60	21,19
13.	Persentase desa wisata maju	%	NA	NA	NA	11,11	11,11
14.	Rata Rata Lama tinggal	Malam	1	1	1	1	Belum rilis
15.	Persentase kunjungan wisata	%	155	159	169	118	49,60
16.	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	NA	NA	NA	0	0

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang, 2022

3. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian daerah yaitu sebesar 27,10% di Tahun 2021 dan menjadi tumpuan mata pencaharian bagi masyarakat pedesaan. Capaian kinerja pertanian yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya produktivitas padi, jagung dan kedelai di Tahun 2021 masing-masing sebesar 4,05%; 0,54% dan 5,69%. Hal ini disebabkan berkurangnya ketersediaan lahan dan juga ancaman bencana alam.

Penurunan juga terjadi pada populasi komoditas peternakan utama (sapi potong, kambing domba) sebesar 0,48% dan produksi peternakan utama (daging sapi, kambing, domba, ayam pedaging, ayam telur, ayam buras, itik, telur ayam, petelur, telur ayam buras, telur itik) sebesar 6,09%. Penurunan ini disebabkan banyak ternak yang sakit dan mati ditandai dengan meningkatnya angka kesakitan ternak sebesar 5,16 ekor dan meningkatnya kejadian/kasus penyakit hewan menular di Tahun 2021 yaitu meningkat 0,05% dari Tahun 2020. Secara rinci capaian indikator kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produktivitas padi (kw/ha)	kw/ha	62,21	62,51	61,54	63,20	60,64
2.	Produktivitas jagung	kw/ha	60,38	62,54	59,51	57,31	57,00
3.	Produktivitas kedelai	kw/ha	11	13,6	14,05	14,95	14,10
4.	Produksi pertanian tanaman pangan utama	ton	612.515	689.069	644.655	671.918	654.000
5.	Produksi pertanian tanaman hortikultura utama	ton	303.062,14	75.793,25	57.157,02	50.113,70	90.973,98
6.	Produksi komoditas perkebunan utama	ton	10.429,21	10.935,16	10.286,12	10.830,52	11.707
7.	Populasi komoditas peternakan utama	ekor	12.869.094	12.925.655	12.994.703	13.057.280	12.994.801
8.	Angka kesakitan ternak	ekor	5,18	5,16	5,16	5,15	5,16
9.	Kelompok tani tanaman pangan/perkebunan	kelompok	1.321	1.276	1.449	1.175	1.126
10.	Kelompok tani peternakan	kelompok	138	154	192	131	88
11.	Persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan	%	55	55	58	60	80
12.	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	60	65	65	65	20
13.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	8,21	9,03	10,21	10,30	10,35
14.	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	%	21,4	12,4	8,0	7,6	20
15.	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	%	100	100	100	100	100
16.	Persentase kelompok tani aktif	%	38,6	34	29	30	5
17.	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	kg	3.159.540	7.688.920	8.068.995	8.531.069	16.140.418
18.	Produksi peternakan utama (daging sapi,kambing,domba, ayam pedaging, ayam telur, ayam buras, itik, telur ayam, petelur,telur ayam buras, telur itik)	Kg	19.883.743	20.051.883	20.464.499	20.887.259	19.615.029
19.	Produksi Kopi	Kg	522	529	539	499	548
20.	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	26,70	26,49	25,44	27,02	27,10

Sumber : Dispertan Kabupaten Pemalang, 2022

Meskipun beberapa komoditas mengalami penurunan, terdapat pula beberapa komoditas yang mengalami peningkatan yaitu tanaman hortikultura (bawang merah, cabe merah besar, nanas, mangga, durian) dan komoditas perkebunan (cengkeh, teh, tebu, kopi arabika, kopi robusta, tembakau rakyat, kelapa dalam). Mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang PDRB terbesar, diperlukan upaya untuk meningkatkan produktivitasnya antara lain dengan penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Di Tahun 2021, prasarana pertanian dalam kondisi baik hanya sebesar 20%, hal tersebut disebabkan minimnya anggaran peningkatan dan pemeliharaan prasarana pertanian diakibatkan adanya refocusing anggaran, dimana anggaran difokuskan untuk pelayanan kesehatan dan pemberian bantuan penduduk terdampak Covid-19.

Mencermati kondisi saat ini, di Kabupaten Pemalang sudah ditemukan *suspect* Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di 13 kecamatan dari 14 kecamatan, dimana sebagian besar yang terinfeksi adalah sapi. Faktor-faktor yang menyebabkan merebaknya virus PMK, antara lain :

- a. Perdagangan di pasar hewan Randudongkal yang masih buka pada saat beberapa pasar hewan di kabupaten lain sudah ditutup
- b. Masuknya ternak dari daerah lain yang sudah tertular ke wilayah Kabupaten Pemalang. Kasus *suspect* PMK pada sapi mayoritas adalah sapi yang masuk dari luar Kabupaten Pemalang yang dibawa pedagang untuk persiapan Hari Raya Kurban
- c. Pergerakan pedagang yang membawa atau mengambil ternak tertular/sakit ke dan dari kandang-kandang milik peternak
- d. Pergerakan petugas peternakan mandiri (non ASN) yang memberikan pelayanan pengobatan dari kandang ke kandang dan tidak menerapkan biosekuriti
- e. Peternak yang tidak menerapkan biosekuriti

Pemeliharaan kerbau yang digembalakan dalam kelompok besar sangat rentan penularan. Satu kelompok akan menuliri kelompok lainnya ketika bertemu di penggembalaan. Upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus PMK, antara lain :

- a. Menerima dan merespon laporan kasus PMK yaitu dengan :
 - Melaksanakan kunjungan lapangan untuk memeriksa kebenaran laporan
 - Memberikan pengobatan pada sapi dan kerbau yang menunjukkan gejala sakit
 - Menyampaikan laporan kepada jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Veteriner Wates
 - Tanggal 12 Mei 2022 mendampingi Balai Besar Veteriner Wates dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pengambilan *sample* di Desa Gapura-Kecamatan Watukumpul dan Desa Pedurungan-Kecamatan Taman, sebanyak 3 ekor sapi yang diambil 5 sampel darah
 - Tanggal 14 Mei 2022 Balai Besar Veteriner Wates mengirimkan hasil uji laboratorium positif antigen virus PMK
- b. Membentuk Posko PMK, sebagai pusat data dan menerima pelaporan kasus PMK dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut

- c. Membentuk Tim URC Penanganan PMK dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- d. Mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang tentang Kewaspadaan PMK di Kabupaten Pemalang
- e. Melaporkan kepada Bupati Pemalang tentang Perkembangan kasus PMK di Kabupaten Pemalang melalui Nota Dinas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang
- f. Melaksanakan rapat koordinasi lintas Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang pada tanggal 13 Mei 2022 di Aula Dinas Pertanian, membahas Koordinasi Kewaspadaan Wabah PMK
- g. Melaksanakan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada peternak tentang Kewaspadaan PMK. Dilakukan kepada kelompok ternak maupun di pasar hewan Randudongkal, sambil melakukan desinfektanisasi pasar hewan
- h. Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) di Pasar Hewan Randudongkal, pada Hari Pasaran Minggu, 22 Mei 2022 disepakati oleh perwakilan pedagang di Pasar Hewan, bahwa mereka sepakat untuk libur berjualan dan pasar ditutup sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 11 Juni 2022
- i. Memberikan pelayanan pengobatan dan pembagian desinfektan kepada para peternak yang melaporkan kejadian PMK pada ternaknya. Pada saat awal kasus dimana masih tersedia obat, pelayanan diberikan secara gratis. Kemudian pelayanan dilanjutkan dengan menerapkan pembayaran retribusi pelayanan oleh Puskesmas
- j. Pada tanggal 17 Juni 2022 disepakati bahwa kasus PMK yang telah mencapai 626 ekor dari sekitar 18.000 ekor ternak sehingga ketersediaan hewan kurban harus ekstra diperhatikan.
- k. Di samping itu hal ini telah termasuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB) Bencana Non Fisik, sehingga memungkinkan penggunaan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pengobatan hewan ternak yang sakit dan vaksinasi hewan ternak yang sehat.

4. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar ketiga penyumbang PDRB Kabupaten Pemalang sebesar 15,17% di Tahun 2021 dengan laju pertumbuhan sebesar 6,44% bahkan memiliki kecenderungan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dalam pemasaran produk yang menandai era industri 4.0. Dalam konteks perdagangan, Pemerintah Kabupaten Pemalang selaku pemilik pasar daerah menghadapi persaingan dalam pengelolaan pasar yang mulai bergeser pada pasar virtual. Harus mulai diterapkan pasar berbasis konvensional-modern-digital, yaitu pengelolaan pasar (pasar daerah dan pasar desa) yang mengacu pada penyediaan layanan pasar (fisik) yang lebih baik dan berkualitas (hyginitas, keamanan dan ketertiban) sehingga dapat bersaing dengan pasar modern yang semakin merebak. Namun, sampai dengan Tahun 2021 lokasi PKL yang berhasil ditata baru sebesar 5,26%.

Selain pasar daerah, Diskoperindag Kabupaten Pemalang juga mengawasi perkembangan pasar modern/pasar swalayan/pusat perbelanjaan, salah satunya adalah terkait pemberian dan pengawasan ijin usaha. Dari 4 pusat perbelanjaan/toko swalayan yang ada, sebanyak 100% telah mempunyai ijin sesuai ketentuan.

Pemerintah Daerah juga dituntut untuk beradaptasi terhadap digitalisasi. Perlu dilakukan fasilitasi /pendampingan bagi pelaku usaha (perdagangan) agar bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transaksi dan omset perdagangannya. Hal ini selaras dengan salah satu program unggulan Bupati Pemalang yaitu Desa Digital (Dedi). Perkembangan urusan perdagangan Tahun 2017-2021 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (PDRB ADHK)	%	6,33	7,08	7,11	-3,49	6,44
2.	Persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya	%	NA	NA	NA	0,5	0,5
3.	Persentase retribusi pasar dalam PAD	%	1,5	2,35	2,58	2,67	2,9
4.	Persentase lokasi PKL yang tertata	%	5,26	5,26	5,26	5,26	5,26
5.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	43	40	40	38	38
6.	Persentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase realisasi kinerja pupuk	%	NA	NA	NA	99	85,94
8.	Ekspor Bersih Perdagangan	%	27,682	36,324	39,839	26,359	52,73
9.	Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	35	31	10	-34	100
10.	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang di tera ulang	%	NA	NA	22,74	3,16	19,84
11.	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	%	34	30	30	30	30
12.	Jumlah Pasar Rakyat yang Memenuhi Kriteria Pasar Sehat	Unit	NA	NA	NA	1	1
13.	Persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat	%	NA	NA	NA	0	0
14.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP, pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	NA	NA	NA	43,75	100
15.	Persentase pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam daerah	%	NA	NA	NA	NA	Belum Rilis

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa di Tahun 2021 terjadi peningkatan kontribusi retribusi pasar dalam PAD yaitu sebesar 2,9% dan peningkatan ekspor sebesar 52,73%. Diharapkan peningkatan nilai ekspor ini juga melibatkan produk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) daerah sehingga dapat membantu mendorong minat pelaku UMK yang lain untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk yang berorientasi ekspor.

5. Perindustrian

Kontribusi sektor industri pengolahan dalam PDRB Kabupaten Pemalang menempati urutan kedua yaitu sebesar 21,95% di Tahun 2021. Industri skala rumah tangga (IKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun akibat adanya pandemi di Tahun 2020 menyebabkan banyak industri yang gulung tikar dan jumlahnya menurun tajam yaitu menjadi sebesar 0,25% dari 6,92% di Tahun 2019. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kembali IKM tersebut adalah dengan memberikan bantuan modal kepada IKM yang terkena dampak Covid-19 dan hasilnya terjadi peningkatan pertumbuhan IKM di Tahun 2021 menjadi sebesar 4,2%.

Di Tahun 2021, dari 8 sasaran pembangunan industri yang ditetapkan dalam RIPK, telah tercapai 6 sasaran atau sebesar 62,5%. Perlu upaya lanjutan dari Diskoperindag Kabupaten Pemalang agar semua sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai di tahun-tahun berikutnya. Pengajuan ijin usaha industri dilayani secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) dari Kementerian Investasi/BKPM. Di Tahun 2021 tidak dilaksanakan pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase pertumbuhan IKM	%	6,13	6,68	6,92	0,25	4,2
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	21,60	21,62	21,99	21,94	21,95
3.	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK	%	NA	NA	NA	0	0
4.	Persentase Industri yang mendapat fasilitas Izin Usaha Industri	%	NA	NA	NA	100	100
5.	Persentase kelengkapan data industri yang masuk dalam SIINAS	%	NA	NA	NA	23,8	17,5
6.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	NA	NA	NA	0	62,5
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	NA	NA	NA	0	0

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022
DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2022

6. Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi dilihat dari persentase transmigran yang ditempatkan. Selama Tahun 2017-2021, transmigran yang ditempatkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 0,23% di Tahun 2017 menjadi sebesar 100% di Tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang berhasil memfasilitasi transmigran asal Kabupaten Pemalang memperoleh tempat di lokasi transmigrasi.

Tabel 2.93

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	0,23	0,55	0,87	0	100

Sumber : Disnaker Kabupaten Pemalang, 2022

D. Unsur Pendukung Pemerintahan Daerah

1. Sekretariat Daerah

Gambaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.94

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kecamatan dan kelurahan tertib administrasi	%	100	100	100	100	100
2	Persentase kesesuaian materi dokumen LPPD (desentralisasi, tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, kelengkapan laporan)	%	100	100	100	100	100
3	Persentase kerja sama dan sinergi yang ditindaklanjuti	%	17	30	23	28	20
4	Persentase rancangan produk hukum menjadi produk hukum	%	79,71	100	100	100	125
5	Persentase perkara hukum yang diselesaikan	%	NA	NA	NA	100	0 (tidak ada perkara yang diadukan dan diselesaikan)
6	Persentase jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku	%	NA	NA	NA	NA	100
7	Persentase lembaga keagamaan yang aktif	%	NA	NA	NA	100	100
8	Persentase lembaga sosial yang aktif	%	NA	NA	NA	100	100
9	Persentase kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi	%	NA	NA	NA	100	100
10	Pertumbuhan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	%	NA	NA	NA	NA	5,025
11	Persentase lembaga keuangan mikro yang sehat	%	Na	Na	Na	Na	100
12	Nilai RB Setda	Nilai	NA	NA	NA	44,02	53,72

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
13	Nilai SAKIP Setda	NILAI	NA	NA	NA	61,02	61,79
14	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja pengendalian pembangunan	Nilai	NA	NA	NA	86,23	94,33
15	Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan komponen kinerja layanan pengadaan	Nilai	NA	NA	NA	94,54	67,4
16	Level maturitas PBJ	LEVEL	NA	NA	NA	0/9	0/9
17	Nilai penguatan dan penataan organisasi	Nilai	NA	1,49	1,96	2,18	Tersedia triwulan II
18	Nilai peningkatan kualitas pelayanan publik	Nilai	NA	2,3	2,91	1,3	Tersedia triwulan II
19	Nilai penataan tata laksana	Nilai	NA	2,17	2,88	0,25	Tersedia triwulan II
20	Nilai penguatan akuntabilitas	Nilai	NA	3,07	3,3	1,88	Tersedia triwulan II
21	Nilai manajemen perubahan	Nilai	NA	1,45	2,02	1,53	Tersedia triwulan II
22	Persentase kualitas layanan umum, pengelolaan keuangan, dan BMD lingkup sekretariat	%	NA	NA	NA	82,33	85,34

Sumber : Setda Kabupaten Pemalang, 2022

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat delapan indikator yang capaiannya sudah sebesar 100%, yaitu kecamatan dan kelurahan tertib administrasi, kesesuaian materi dokumen LPPD, rancangan produk hukum menjadi produk hukum, persentase perkara hukum yang diselesaikan, jumlah produk hukum yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lembaga sosial yang aktif, kegiatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan lembaga keuangan mikro yang sehat. Terdapat penurunan capaian kerjasama dan sinergi yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 20% di Tahun 2021, turun dari capaian Tahun 2020 sebesar 28%. Selama Tahun 2021 tidak terdapat perkara hukum yang dimintakan bantuan hukum ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai fungsi dan peran melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha dan memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Terdapat 6 BUMD di Kabupaten Pemalang, yaitu PT Bank Jateng Cabang Pemalang, PERUMDA Air Minum Tirta Mulia, PT BPR BKK Taman, PT BPR Bank Pemalang, PDAU Aneka Usaha dan LKM BKD. Di Tahun 2021 laba keenam BUMD tersebut berkontribusi sebesar 5,025% terhadap PAD.

Untuk nilai RB, SAKIP, indeks kinerja pengendalian pembangunan serta kualitas layanan umum, pengelolaan keuangan dan BMD mengalami peningkatan di Tahun 2021 masing-masing sebesar 9,7 point; 0,77 point; 8,1 point dan 3,01%. Sedangkan untuk indeks kinerja layanan pengadaan mengalami penurunan sebesar 27,14 point dan maturitas PBJ berada pada 0. Perlu upaya lebih dari Bagian PBJ Setda Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerja pelayanannya.

Selanjutnya, masih terdapat 5 indikator yang belum tersedia datanya. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang harus selalu ditingkatkan.

2. Sekretariat DPRD

Gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.95
Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	78	80	83	81,25	91,66
2.	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	79,23	84,22	84,08	75,01	71,84
3.	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia	%	100	100	100	100	89,68
4.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	%	79,27	88,4	91,99	82,33	82,83
5.	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	%	58,42	64,26	60,26	56,93	43,00
6.	Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	65,71	85,71	95,16	55,55	84,27
7.	Persentase kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu	%	67,97	64,36	84,21	75,57	68,72
8.	Persentase hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti	%	66,55	94,82	82,43	81,4	87,25
9.	Persentase anggota DPRD yang meningkat kapasitasnya	%	91,41	96,56	98,69	91,63	91,73
10.	Persentase jenis aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti	%	83,85	96,22	82,09	79,15	86,00
11.	Persentase kode etik DPRD yang diimplementasikan	%	100	100	100	100	78,59
12.	Persentase fasilitasi tugas DPRD yang tersedia	%	96,14	97,11	98,18	99,12	95,34
13.	Persentase kerjasama daerah yang disetujui	%	0	0	0	0	0

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, 2022

Keberhasilan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang dinilai dari dua sisi, yaitu kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dan cakupan layanan Sekretariat DPRD. Di Tahun 2021, indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD sebesar 91,66% (baik) dan cakupan layanan Sekretariat DPRD sebesar 71,84%. Layanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD terdiri dari : layanan terhadap tugas fungsi pokok sebesar 82,83%; layanan terhadap tugas fungsi lain sebesar 43%; dan layanan pendukung sebesar 89,68%.

Layanan terhadap tugas dan fungsi pokok DPRD adalah layanan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan DPRD, pembahasan

kebijakan anggaran, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD dan fasilitasi tugas DPRD. Layanan terhadap tugas dan fungsi lain DPRD adalah layanan dalam peningkatan kapasitas DPRD, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta pembahasan kerjasama daerah. Layanan pendukung DPRD berupa layanan terhadap keuangan, kesejahteraan dan administrasi.

Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang yang mengalami penurunan di Tahun 2021, antara lain : 1) layanan pendukung DPRD disebabkan tidak semua anggota DPRD melakukan medical check up; 2) layanan terhadap tugas dan fungsi lain DPRD disebabkan belum dilaksanakannya tugas pembahasan kerjasama daerah; 3) kebijakan anggaran yang dibahas tepat waktu disebabkan adanya keterlambatan pembahasan kebijakan anggaran; 4) kode etik DPRD yang diimplementasikan disebabkan belum semua butir yang diatur dalam kode etik DPRD dilaksanakan dan dipatuhi; 5) fasilitasi tugas DPRD disebabkan keterbatasan anggaran; dan 6) belum dilaksanakannya pembahasan rencana kerjasama daerah.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Kinerja utama urusan perencanaan pembangunan adalah nilai SAKIP komponen perencanaan dan persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik. Di Tahun 2021, nilai SAKIP komponen perencanaan sebesar 22,56% (nilai maksimal 30%) dan di Tahun 2021 sebanyak 24,39% atau 10 perangkat daerah sudah mempunyai dokumen perencanaan yang baik (Dinkes, Disperkim, Dinpermasdes, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, Disparpora, Dispartan, BPKAD dan Kecamatan Bantarbolang). Perkembangan kinerja urusan perencanaan pembangunan selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.96
Capaian Kinerja Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai sakip komponen perencanaan	%	17,75	19,83	21,85	22,22	22,56
2.	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang baik	%	0	0	0	12,19	24,39
3.	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	%	100	100	99,49	99,49	100
4.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	71,43	75	78,57	82,14	100
5.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	71,43	71,43	85,71	85,71	100
6.	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat	%	66,67	66,67	83,33	83,33	100

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
	daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah						
7.	Persentase Prioritas Usulan Hasil Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang, 2022

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Seluruh program yang ada dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 ada dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, sehingga tingkat keselarasan antara program RKPD dan RPJMD di Tahun 2021 sebesar 100%. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Seluruh program yang ada di Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ada dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Begitu pula semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 ada dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021, sehingga tingkat keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% untuk semua rumpun.

Salah satu pendekatan dalam penyusunan RKPD adalah dari bawah ke atas atau bottom-up, yang artinya program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan di dalam RKPD ada yang berasal dari masyarakat melalui forum musrenbang. Musrenbang dimulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Usulan hasil musrenbang kabupaten akan menjadi salah satu masukan dalam RPKD. Selama tahun 2017-2021 semua prioritas usulan hasil musrenbang diakomodir di dalam RKPD atau artinya capaian indikator ini sebesar 100%.

2. Keuangan

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan, dimana terjadi penurunan dari sebesar 17,86% di tahun 2017 menjadi sebesar 13,88% di tahun 2021. Jika dibandingkan dengan target APBD, persentase realisasi PAD terhadap target cenderung meningkat yaitu sebesar 103,4% di tahun 2017 menjadi sebesar 106,07% di tahun 2021. Secara umum upaya pemerintah daerah dalam peningkatan PAD menunjukkan kinerja yang baik ditandai dengan tercapainya target realisasi PAD tiap tahunnya. Rasio pajak daerah terhadap PAD juga menunjukkan peningkatan dari sebesar 15,33% di tahun 2017 menjadi 24,28 % di tahun 2021. Secara rinci kinerja unsur keuangan daerah terkait pendapatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.97

Capaian Kinerja Keuangan (Bapenda) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Rasio PAD terhadap total pendapatan	Angka	17,86	12,36	13,30	12,72	13,88
2.	Persentase wajib pajak tertagih (persentase data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	%	76,29	73,92	77,16	68,33	80,69

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
3.	Persentase Realisasi PAD terhadap target	%	103,4	108,97	117,98	106,42	106,07
4.	Rasio pajak daerah terhadap PAD	Angka	15,33	25,31	25,00	25,87	24,28
5.	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	%	Na	100	100	100	116,67

Sumber : Bapenda Kabupaten Pemalang, 2022

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari Hasil Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Kabupaten Pemalang yang menunjukkan kinerja WTP di tahun 2017-2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan menunjukkan kewajaran dalam sisi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pencapaian WTP didukung oleh pencapaian beberapa indikator seperti persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sebesar 75%; persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebesar 100%; persentase ketepatan waktu penyampaian LKD ke BPK RI sebesar 100%; persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D sebesar 100%. Selanjutnya, perlu peningkatan pemanfaatan aset daerah agar dapat memberikan kontribusi terhadap PAD secara optimal. Secara rinci indikator kinerja unsur keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.98
Capaian Kinerja Keuangan (BPKAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Hasil Opini BPK RI atas LKD Kab Pemalang	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	%	100	100	100	100	75
3.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LKD ke BPK RI	%	100	100	100	100	100
5.	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	%	100	100	100	100	100
6.	Persentase Pemanfaatan Aset Daerah	%	90	90	90	90	94,34
7.	Hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	%	NA	NA	NA	NA	65,0394
8.	Hasil Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran	%	NA	NA	NA	NA	8,175
9.	Hasil Pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran	%	NA	NA	NA	NA	20
10.	Hasil Pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah	%	NA	NA	NA	NA	1,1433
11.	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki	%	NA	NA	NA	50	34,8

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022

3. Kepegawaian

Permasalahan yang masih harus ditingkatkan dari unsur penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan antara lain indeks profesionalitas ASN yang cenderung menurun sejalan dengan masih rendahnya indeks ASN yang memenuhi kompetensi. Oleh karena itu perlu upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN baik lewat peningkatan pendidikan maupun pelatihan. Gambaran urusan kepegawaian Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.99
Kinerja Kepegawaian Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	83,45	80,00	65,10	64,35	64,29
2.	Persentase kompetensi ASN	%	Na	Na	5,75	22,88	9,7
3.	Persentase kinerja ASN	%	Na	Na	25,01	24,09	21,59
4.	Persentase tingkat pendidikan ASN	%	Na	Na	12,09	12,4	11,92
5.	Persentase tingkat disiplin ASN	%	Na	Na	4,99	4,99	5

Sumber : BKD Kabupaten Pemalang, 2022

Di Tahun 2021, indeks profesionalitas ASN Kabupaten Pemalang sebesar 64,29 (rendah). Rendahnya capaian tersebut disebabkan masih rendahnya capaian komponen pembentuk, terdiri dari kompetensi ASN sebesar 9,7% (nilai maksimal 40%), kinerja ASN sebesar 21,59% (nilai maksimal 30%), tingkat pendidikan ASN sebesar 11,92% (nilai maksimal 25%) dan tingkat disiplin ASN sebesar 5% (nilai maksimal 5%). Komponen pembentuk indeks profesionalitas ASN yang capaiannya rendah dan perlu upaya peningkatan adalah kompetensi dan tingkat pendidikan ASN. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang harus melakukan upaya peningkatan dengan mengadakan berbagai pendidikan dan pelatihan serta mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan/sekolah yang lebih tinggi lagi. Salah satu kendala yang ada yaitu minimnya anggaran diklat yang tersedia akibat adanya refocusing anggaran sehingga anggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

4. Penelitian dan Pengembangan

Kualitas pelayanan kinerja yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Pemalang pada unsur penelitian dan pengembangan dapat dinilai dari dua sisi, yaitu dari penilaian pengguna layanan dan penilaian berdasarkan cakupan pelayanan. Di Tahun 2021, indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan kelitbangan sebesar 82,91% masuk dalam kategori Baik dan baru sebanyak 81% hasil kelitbangan dapat dimanfaatkan. Urusan penelitian dan pengembangan juga ditujukan untuk mendorong pengembangan inovasi daerah. Inovasi dalam hal ini merujuk kepada inovasi di masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan tujuan peningkatan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Di tahun 2021, indeks inovasi daerah sebesar 30,32 tetap masuk dalam kategori inovatif. Secara lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Capaian Kinerja Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan layanan kelitbangan	Indeks	NA	75	80	85	82,91
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	%	NA	80	80	80	81
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	%	NA	80	80	80	81
4	Indeks Inovasi daerah	Indeks	NA	NA	170	796	30,32

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang, 2022

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

Kinerja Inspektorat Kabupaten Pemalang sampai dengan Tahun 2021 cukup baik. Hal ini terlihat dari peningkatan Manajemen Resiko Indeks (MRI) yang dicapai, yaitu sebesar 1,53 (level 1) di Tahun 2020 menjadi sebesar 2,081 (level 2) di Tahun 2021. Hal ini didukung oleh maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pemalang yang berada pada level 3 dengan skor 3,0375 (telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai) dan kapabilitas APIP yang juga berada pada level 3 (APIP telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal). Meskipun cukup baik, perlu upaya dari Inspektorat Kabupaten Pemalang agar pencapaian MRI dapat meningkat di tahun-tahun mendatang.

Inspektorat Kabupaten Pemalang melaksanakan pengawasan dan pendampingan/asistensi sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun. Pengawasan yang dilaksanakan meliputi pengawasan internal dan pengawasan dengan tujuan tertentu dengan capaian sebesar 85% di tahun 2021. Selanjutnya pendampingan/asistensi yang dilakukan, antara lain evaluasi SAKIP, RB, review dokumen perencanaan, review LKPJ, LPPD dengan capaian sebesar 80% di tahun 2021.

Capaian kinerja lainnya adalah telah ditindaklanjutinya semua temuan hasil pengawasan baik dari pemeriksa internal (Inspektorat Kabupaten) maupun dari pemeriksa eksternal (Inspektorat Provinsi, BPK, BPKP). Survei Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dengan menggunakan IPAK. IPAK merupakan salah satu indikator SDG’s yang diperoleh dari hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Capaian IPAK Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 sebesar 79,78 masuk pada kategori baik (pada Tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran IPAK yaitu menggunakan metode pengukuran dari KPK). Kinerja fungsi pengawasan Kabupaten Pemalang dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.101
Capaian Kinerja Pengawasan Kabupaten Pemalang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Manajemen Resiko Indeks	Angka	NA	NA	NA	1,53	2,081
2.	Maturitas SPIP	Level	2	3	3	3	3,0375
3.	Kapabilitas APIP	Level	2	2	3	3	3
4.	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	%	100	96,5	96,25	80,54	85
5.	Persentase tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan	%	100	86	85	93	100
6.	Cakupan pendampingan dan asistensi	%	20	45,85	39,27	70	80
7.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Skor	0	0	3,55	3,5	79,78

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pemalang, 2022

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kinerja kecamatan di Kabupaten Pemalang secara umum ditunjukkan oleh 8 (delapan) indikator. Namun untuk 4 (empat) kecamatan yang memiliki kelurahan, yaitu Pemalang, Taman, Petarukan dan Comal ditunjukkan oleh 9 (sembilan) indikator, dengan sebagai berikut :

a. Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani

Pengaduan masyarakat bertujuan untuk evaluasi dan perbaikan kekurangan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Rata-rata capaian indikator ini selama tahun 2017-2021 adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada pengaduan masyarakat di kecamatan dapat ditangani dengan baik dan tepat waktu.

Tabel 2.102
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani (%) Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	100	100	100	100	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	100	100	100	100	100
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	100	100	100	100	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	100	100	100	100	100
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	100	100	100	100	100
	Rata-rata	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan, 2022

b. Persentase pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian indikator ini di tahun 2021 masih relatif rendah, yaitu sebesar 57,97% atau baru sebanyak 17 kewenangan yang dilaksanakan oleh kecamatan. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya kendala yang terjadi di kecamatan, mulai dari kurang siapnya sumber daya

manusia, kurangnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas serta kurangnya dukungan dari perangkat daerah terkait.

Tabel 2.103
Persentase Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan (%) Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
2	Warungpring	23,33	23,33	23,33	23,33	23,33
3	Pulosari	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
4	Belik	76,67	76,67	80,00	80,00	80,00
5	Watukumpul	80	80	80	80	80
6	Bodeh	63,33	70	70	70	70
7	Bantarbolang	73,33	73,33	76,66	76,67	76,67
8	Randudongkal	76,67	80	83,33	80	70
9	Pemalang	36,67	40	40	43,33	43,33
10	Taman	56,67	56,67	56,67	56,67	68,33
11	Petarukan	50	76,67	76,67	73,33	73,33
12	Ampelgading	43,33	53,33	66,67	66,67	63,33
13	Comal	63,33	53,33	53,33	23,33	50
14	Ulujami	46,67	53,33	66,67	86,67	66,67
	Rata-rata	56,90	60,24	62,86	61,90	57,97

Sumber : Kecamatan, 2022

c. Persentase pelayanan publik yang tersedia

Pelayanan publik yang tersedia di Kecamatan adalah penyediaan data dan informasi pemerintahan, pelayanan terhadap pengaduan masyarakat dan pelayanan yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati terhadap Camat. Adapun capaian indikator ini selama tahun 2017-2021 adalah sebesar 53,3% pada tahun 2017, meningkat menjadi sebesar 53,41% pada tahun 2018, meningkat menjadi sebesar 87,62% pada tahun 2019, turun pada tahun 2020 menjadi sebesar 87,30% dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 90,56%. Rendahnya capaian pada tahun 2017 sampai 2018 disebabkan belum adanya data pemerintahan yang dipublikasi.

d. Tingkat partisipasi musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

Musrenbang merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam musrenbang, agar aspirasinya dapat terserap dan pembangunan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Capaian indikator ini di tahun 2021 sebesar 95,69%. Hal ini menunjukkan bahwa ada kepedulian tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musrenbang yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

Tabel 2.104
Tingkat Partisipasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (%) Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	82	85	89	91,2	68,18
2	Warungpring	93	93	94	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	95
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	65	70	75	85	90
7	Bantarbolang	99,01	98,52	99,10	90	100
8	Randudongkal	100	100	100	100	98
9	Pemalang	99.43	100	100	100	100

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
10	Taman	80	80	80	80	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	95	97	97	97	96
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	85	90	90	82,5	92,5
	Rata-rata	85,94	93,82	94,58	94,69	95,69

Sumber : Kecamatan, 2022

e. Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang difasilitasi

Agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan perlu mendapat fasilitas. Lembaga tersebut meliputi RT, RW, PKK, karang taruna, Posyandu, LPMD/K. Capaian indikator ini di tahun 2021 sebesar 75,47%. Semua kecamatan pada dasarnya sudah memfasilitasi lembaga kemasyarakatan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan karena masih ada tiga kecamatan yang capaiannya dibawah 70%.

Tabel 2.105
 Persentase Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Yang Difasilitasi Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	66,67	66,67	83,33	83,33	100
2	Warungpring	100	100	100	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
5	Watukumpul	66,67	66,67	66,67	66,67	80
6	Bodeh	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
7	Bantarbolang	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
8	Randudongkal	100	83,33	83,33	66,67	66,67
9	Pemalang	83,33	83,33	100	100	100
10	Taman	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33
13	Comal	100	100	100	100	100
14	Ulujami	50	50	50	50	50
	Rata-rata	79,76	78,57	80,95	79,76	75,47

Sumber : Kecamatan, 2022

f. Persentase jalan kewenangan kelurahan kondisi baik

Dengan adanya alokasi dana kelurahan sangat membantu dalam pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan di kelurahan. Kondisi jalan lingkungan di kelurahan masih banyak yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas. Capaian indikator jalan kewenangan kelurahan kondisi baik turun dari tahun 2020 yaitu menjadi sebesar 54,13% pada tahun 2021. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2021 dana kelurahan yang dialokasikan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak Covid-19 dan masih kurangnya dukungan dari perangkat daerah terkait.

Tabel 2.106
 Persentase Jalan Kewenangan Kelurahan Kondisi Baik (%) Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pemalang	54,98	56,73	59,84	65,22	38,52
2	Taman	52	56	60	64	68
3	Petarukan	15	30	25	25	25
4	Comal	65	70	75	90	85
	Rata-rata	46,74	53,18	54,96	61,06	54,13

Sumber : Kecamatan 2022

g. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang tertangani

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya ketenteraman umum. Di tahun 2021, semua gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat kecamatan dapat tertangani. Hal ini didukung adanya kerjasama yang baik antara Camat dengan Polsek, Koramil, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Satpol PP.

Tabel 2.107
Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	90	96	96	98	100
2	Warungpring	80	90	90	100	100
3	Pulosari	100	100	100	100	100
4	Belik	100	100	100	100	100
5	Watukumpul	100	100	100	100	100
6	Bodeh	85	92	97	97	100
7	Bantarbolang	100	100	100	100	100
8	Randudongkal	96	98	98	98	100
9	Pemalang	100	100	100	100	100
10	Taman	100	100	100	100	100
11	Petarukan	100	100	100	100	100
12	Ampelgading	90	90	90	95	100
13	Comal	75	100	95	100	100
14	Ulujami	90	90	90	100	100
	Rata-rata	93,29	96,86	96,86	99,14	100

Sumber : Kecamatan 2022

h. Jumlah potensi konflik

Konflik adalah pertikaian antar warga (antar etnis, antar wilayah desa, antar simpatisan parpol, antar pelajar, antar umat beragama) dan unjuk rasa (politik, ekonomi, agama) yang terjadi akibat perbedaan cara pandang yang meluas dan mengakibatkan konflik di masyarakat skala kecamatan. Di Tahun 2021 terjadi 6 potensi konflik, namun dapat terselesaikan, hal ini disebabkan adanya koordinasi yang baik antara Camat dengan Bakesbangpol dan Forkompimcam (Kapolsek dan Danramil).

Tabel 2.108
Jumlah Potensi Konflik (kasus) Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	0	0	0	0	0
2	Warungpring	0	0	0	0	0
3	Pulosari	2	2	2	3	0
4	Belik	0	0	0	6	2
5	Watukumpul	0	0	0	0	0
6	Bodeh	0	0	0	0	0
7	Bantarbolang	0	0	0	0	0
8	Randudongkal	2	2	2	2	0
9	Pemalang	0	1	2	0	0
10	Taman	0	0	0	0	0
11	Petarukan	2	2	3	3	2
12	Ampelgading	0	0	0	0	0
13	Comal	1	0	0	0	0
14	Ulujami	0	0	0	0	2
	Jumlah	7	7	9	14	6

Sumber : Kecamatan, 2022

i. Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik

Suatu desa dikategorikan bertata kelola pemerintahan baik apabila : (1) penetapan dokumen perencanaan desa tepat waktu, (2) ketersediaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, (3) keterisian buku administrasi pemerintahan desa, (4) laporan keuangan desa yang tepat waktu, (5) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan tugas sesuai ketentuan, (6) terjaganya ketenteraman dan ketertiban. Capaian indikator ini di tahun 2021 sebesar 72,63% atau sebanyak 153 desa.

Tabel 2.109
Persentase desa yang mempunyai tata kelola pemerintahan baik (%)
Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Moga	50	60	60	70	100
2	Warungpring	50	66,67	66,67	66,67	66,67
3	Pulosari	58,33	58,33	66,67	75	75
4	Belik	75	75	75	75	75
5	Watukumpul	60	66,67	66,67	73,33	73,33
6	Bodeh	57,89	63,16	63,16	63,16	63,16
7	Bantarbolang	64,71	64,71	70,59	88,24	99,64
8	Randudongkal	50	75	75	88	88
9	Pemalang	46,15	53,84	53,84	53,84	53,84
10	Taman	10,52	10,52	10,52	10,52	47,36
11	Petarukan	63,16	68,42	73,68	80	80
12	Ampelgading	62,5	68,75	75	75	75
13	Comal	76,47	82,35	88,23	52,94	58,82
14	Ulujami	55,56	61,11	61,11	61,11	61,11
	Rata-rata	55,74	62,47	64,72	66,63	72,63

Sumber : Kecamatan 2022

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Daya saing suatu daerah dapat meningkat jika ditunjang dengan lingkungan yang kondusif. Kondusivitas wilayah dapat diukur melalui jumlah konflik yang terjadi, baik konflik sosial maupun agama. Di Tahun 2021, tidak terjadi konflik di Kabupaten Pemalang, hal ini disebabkan potensi konflik yang terjadi dapat tertangani 100% . Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.110
Capaian Indikator Kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	0
2.	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	NA	NA	NA	75	80,85
4.	Persentase masyarakat yang paham politik	%	NA	NA	NA	40	50
5.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	%	NA	NA	NA	50	65
6.	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	%	NA	NA	NA	50	64,94
7.	Jumlah konflik agama	kasus	0	0	0	0	0

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
8.	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	NA	NA	NA	45	65

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Pemalang, 2022

Untuk mencegah terjadinya konflik, Bakesbangpol Kabupaten Pemalang memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi kebangsaan, politik, kewaspadaan dini, toleransi beragama, dan penyalahgunaan narkoba.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pembahasan daya saing daerah pada bagian ini sangat terkait dengan bagian sebelumnya yang telah menjelaskan indikator dan capaian pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada aspek pelayanan umum serta terkait dengan daya saing Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, bagian ini akan fokus pada 4 (empat) aspek daya saing daerah, yaitu: (1) kemampuan ekonomi daerah; (2) fasilitas wilayah/infrastruktur; (3) iklim berinvestasi; dan (4) sumber daya manusia.

Jika merujuk pada Laporan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Aspek Daya Saing Daerah berisi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pemalang yang meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: (1) Penguat/*Enabling Environment* yang didalamnya memuat unsur kelembagaan, infrastruktur, dan perekonomian; (2) Sumber Daya Manusia yang dipengaruhi unsur kesehatan, pendidikan dan ketrampilan; (3) Pasar/*market* yang memuat unsur efisiensi pasar, ketenagakerjaan, akses keuangan dan ukuran pasar; serta (4) Ekosistem inovasi yang memuat unsur dinamika bisnis, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi.

Aspek penguat/*enabling environment* dalam daya saing Kabupaten Pemalang mempunyai skor tertinggi sebesar 3,054 disusul aspek sumber daya manusia/*human capital* (3,00), aspek ekosistem inovasi (2,77) dan terendah aspek pasar/*market* (2,56). Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa aspek penguat merupakan kekuatan internal yang harus menguatkan aspek pasar yang merupakan kelemahan. Selain itu juga harus menguatkan aspek sumber daya manusia dan mengembangkan ekosistem inovasi untuk memajukan Kabupaten Pemalang.

Pilar daya saing daerah yang terkuat (sangat tinggi) adalah kesiapan kelembagaan (3,80) yang merupakan salah satu pilar dari aspek penguat. Hal ini mendasarkan bahwa kelembagaan yang ada di Kabupaten Pemalang sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya pilar yang masuk kategori tinggi adalah pilar kesehatan (3,75), infrastruktur (3,42), dinamika bisnis (3,25), ketenagakerjaan (2,83), kesiapan teknologi (2,75) dan efisiensi pasar produk (2,75). Sedangkan yang masuk dalam kategori skor sedang adalah pilar ukuran pasar (2,50), kapasitas inovasi (2,32), pendidikan dan keterampilan (2,25), akses keuangan (2,17) dan perekonomian daerah (1,95). Hal ini menunjukkan bahwa pilar yang masih memiliki skor sedang dan rendah ini harus didorong potensinya melalui berbagai program kerja pembangunan untuk peningkatan daya saing daerah Kabupaten Pemalang.

Sektor andalan atau potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Pemalang terdiri dari sektor pertanian, perikanan, peternakan dan sektor pariwisata. Dengan keunggulan dua aspek yaitu penguat dan sumber daya manusia diharapkan pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Pemalang dapat ditingkatkan. Sedangkan dua aspek lainnya, yaitu aspek ekosistem inovasi dan pasar harus mendapatkan perhatian untuk mendukung peningkatan sektor andalan.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Di Tahun 2021, terjadi perbaikan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang sebesar 4,19% lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah (3,32%), Nasional (3,69%) dan wilayah sekitarnya (Kabupaten Brebes, Purbalingga, Tegal, Banyumas dan Pekalongan).

Jika dilihat dari lapangan usaha yang paling besar memberikan kontribusi pada PDRB, dimana lapangan usaha pertanian (dalam arti luas) memberikan kontribusi sebesar 27,10%; industri pengolahan (manufaktur) sebesar 21,95%; perdagangan dan reparasi sebesar 15,17%; konstruksi sebesar 4,67% serta berbagai macam jasa dan lainnya yang berkontribusi kurang dari 6%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Pemalang masih didominasi oleh sektor primer. Selanjutnya jika dilihat dari PDRB (ADHB), terus mengalami peningkatan dari Rp21,86 juta di Tahun 2017 menjadi Rp27,446 juta di Tahun 2021. Lebih jauh lagi, jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK) Kabupaten Pemalang tahun 2016-2020 mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 4,10%. Profil makro ekonomi Kabupaten Pemalang tersebut masih didukung dengan tingkat inflasi selama kurun waktu 2017-2021 yang cenderung menurun dan berada di level ringan.

Dari sisi kemiskinan, selama periode 2017-2021, Garis Kemiskinan Kabupaten Pemalang cenderung meningkat, termasuk setelah terjadinya pandemi Covid 19 pada Tahun 2020, garis kemiskinan tetap meningkat dan menjadi Rp 401.857,- di Tahun 2021 merupakan nomor 2 paling rendah dari lima kabupaten sekitar.

Data kemiskinan terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin di tahun 2021 sekitar 215,08 ribu jiwa yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar. Secara proporsi, perbandingan jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan populasi penduduk di tahun 2021 adalah 16,56%, lebih buruk jika dibandingkan di tingkat provinsi dan nasional serta rata-rata di kabupaten sekitarnya.

Tahun 2021, IPM Kabupaten Pemalang adalah 66,56 lebih rendah dari rata-rata wilayah dan hanya lebih baik dari Kabupaten Brebes. Demikian pula pengeluaran perkapita Kabupaten Pemalang relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata pengeluaran perkapita kabupaten sekitar. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah 6,71% dimana nilai ini lebih tinggi dari kabupaten sekitarnya.

Dari semua indikator yang terkait dengan kemampuan ekonomi, dapat dikatakan bahwa sebagian besar indikator menunjukkan bahwa capaian pembangunan Kabupaten Pemalang pada aspek ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya sehingga perlu untuk ditingkatkan.

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dalam pembangunan daerah dijabarkan dalam urusan pekerjaan umum (dan penataan ruang) dan perhubungan. Infrastruktur wilayah terkait dengan komponen: ketersediaan air minum, kondisi daerah irigasi (DI), kondisi jalan, dan V/C rasio. Data menunjukkan bahwa secara umum komponen pembentuk kondisinya meningkat di Tahun 2021 sehingga secara keseluruhan infrastruktur wilayah dalam kondisi baik di tahun 2021 sebesar 76,39% meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 (75,97%).

Sementara itu, jika dilihat lebih dalam lagi terdapat beberapa fasilitas yang mengalami penurunan, yaitu : persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dikarenakan terbatasnya anggaran rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi dan persentase tingkat kondisi jalan mantap dikarenakan kerusakan jalan di tahun 2021 berjalan cukup signifikan ditambah dengan kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap ketahanan kualitas jalan.

Terkait dengan fasilitas wilayah yang mendukung transportasi orang maupun barang, kinerja urusan perhubungan difokuskan untuk menurunkan angka V/C ratio dengan capaian indikator sebesar 0,44 di tahun 2020 dan turun di tahun 2021 menjadi sebesar 0,32. Dalam hal kondisi terminal menunjukkan bahwa secara umum seluruh terminal telah memiliki fasilitas utama dan sebagian besar dengan kondisi layak meskipun kondisi “layak” tersebut belum bisa dikatakan sebagai fasilitas publik yang “baik” yang dapat menjamin kenyamanan calon penumpang, pengunjung, petugas maupun operator kendaraan. Pada aspek ini peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah masih perlu terus dijaga dan ditingkatkan.

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Guna mengoptimalkan kinerja investasi daerah, perlu dukungan kelembagaan yang kuat seperti jaminan kepastian hukum, penyederhanaan birokrasi perijinan, ketersediaan lahan, insentif pajak dan dukungan sosial kemasyarakatan serta promosi (*roadshow*) dan keikutsertaan dalam *event-event* pameran untuk lebih memperkenalkan keunggulan-keunggulan investasi kepada calon investor baik calon investor domestik maupun internasional.

Dalam hal kondusivitas wilayah yang dapat mencerminkan kepastian hukum, dilihat dari penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan jumlah konflik. Di Tahun 2021, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100% meningkat dari tahun 2020 (75%) dan tidak terjadi konflik baik konflik sosial maupun agama dikarenakan potensi konflik yang ada dapat terselesaikan 100%.

Dalam hal reformasi birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sebesar (62,91) meningkat dari Tahun 2020 (61,09). Selama periode 2017-2021, evaluasi SAKIP Kabupaten Pemalang terus mengalami peningkatan yang menunjukkan peningkatan pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Pemalang. Tahun 2021, Kabupaten Pemalang mendapatkan nilai 68,88 untuk evaluasi SAKIP, meningkat dari evaluasi SAKIP tahun 2020 sebesar 67,70. Sementara itu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap perangkat daerah yang menyediakan pelayanan pada Tahun 2020, sebesar 81,75% meningkat dari capaian Tahun 2019 sebesar 80,91%.

Jika dilihat dari kinerja investasi, di Tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 90,50% dan mulai bangkit di tahun 2021 dengan adanya peningkatan investasi sebesar 3,13%. Hal tersebut menunjukkan bahwa minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pemalang masih rendah sehingga upaya untuk membangun iklim investasi yang baik harus terus dilakukan.

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Aspek ini terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Dalam hal Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan capaian yang tergolong masih rendah, yaitu masih ada 31,43% anak usia PAUD belum mengikuti pendidikan PAUD, masih ada 4,81% anak usia SD belum mengikuti pendidikan SD/ sederajat dan masih ada 11,94% anak usia SMP belum mengikuti pendidikan SMP/ sederajat. Dalam hal anak tidak sekolah (ATS) menunjukkan angka yang besar, yaitu sebanyak 35 ribu anak.

Indikator aspek kesehatan yang digunakan adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBa) dan stunting. Di tahun 2021, terjadi peningkatan AKI disebabkan banyak ibu melahirkan dalam kondisi positif Covid-19 sehingga imunitas tubuhnya melemah. Sedangkan untuk AKB, AKBa dan persentase balita stunting cenderung menurun selama Tahun 2017-2021. Di Tahun 2021, Kabupaten Pemalang ditetapkan sebagai kabupaten dengan kinerja penurunan stunting terbaik di Jawa Tengah. Indikator lain untuk melihat tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pemalang dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat (IKS) dimana pada tahun 2021 adalah 0,17 masih jauh dari nilai minimum IKS level sehat sebesar 0,600.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

A. Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah

Tabel 2.111
Capaian IKU Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
1	Angka Kriminalitas			Angka	180	200	175	175	102,78	★	Bakesbangpol
		1	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	0	0	100	★	Bakesbangpol
		2	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	★	Bakesbangpol
		3	Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	90	100	100	100	88,89	➡	Satpol PP
		4	Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	14,29	7,14	0	0	0	↔	Satpol PP
2	Indeks Resiko Bencana			Indeks	130	160	146	146	87,69	➡	BPBD
		1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,85	0,63	0,66	0,66	77,65	➡	BPBD
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	94,75	94,75	94,75	↔	BPBD
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	100	94,82	94,82	94,82	↔	BPBD
		4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan evakuasi dan tanggap darurat	%	100	100	99,36	99,36	99,36	↔	BPBD
		5	Persentase layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	%	25	15	15	15	60	↔	BPBD

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
		6	Rasio kejadian kebakaran	%	78	88	58	58	125,64	★	Satpol PP
		7	Cakupan pelayanan kebakaran	%	50	25	50	50	100	★	Satpol PP
3	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	70	62,72	62,91	62,91	89,87	➡	Setda
		1	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan kesejahteraan perekonomian	%	75,4	NA	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Setda
		2	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra	%	94,40	90,27	98,48	98,48	104,32	★	Setda
		3	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan	%	72,13	NA	100	100	138,64	★	Setda
		4	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang administrasi umum	%	59,59	57,37	98,12	98,12	164,66	★	Setda
		5	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) komponen perencanaan	Indeks	22,34	22,24	22,56	22,56	100,98	★	Bappeda
		6	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik	%	56,09	19,51	24,39	24,39	43,48	➡	Bappeda

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
		7	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	80	80	65,0394	65,0394	81,3	↔	BPKAD
		8	Hasil pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran (Bobot Nilai 15)	Bobot nilai	15	15	8,175	8,175	54,5	↔	BPKAD
		9	Hasil pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran (BN 20)	Bobot nilai	20	20	20	20	100	★	BPKAD
		10	Hasil pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah (BN 15)	Bobot nilai	20	20	1,1433	1,1433	5,7	↔	BPKAD
		11	Persentase pemanfaatan BMD (93%)	%	93	93	100	100	107,5	★	BPKAD
		12	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki (50%)	%	75	50	34,8	34,8	46,4	↔	BPKAD
		13	Rasio peningkatan PAD	%	13,50	13,50	11,28	11,28	83,56	↔	Bapenda
		14	Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah	%	6,2	6,1	14,03	14,03	226,29	★	Bapenda
		15	Maturitas SPIP	Angka	3,0405	3,0380	3,0375	3,0375	99,90	↔	Inspektorat
		16	Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	100	★	Inspektorat
		17	Indeks Kearsipan	Indeks	59,12	55,12	38,88	38,88	65,76	↔	Dinpusarda
		18	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	100	10,00	12,4	12,4	12,4	➡	Dinpusarda
		19	Indeks Profesional ASN (IPA)	Indeks	65,59	64,48	64,29	64,29	98,02	↔	BKD
		20	Persentase Kompetensi ASN	%	58,40	57,20	24,25	24,25	41,52	↔	BKD
		21	Persentase Kinerja ASN	%	80,30	80,30	71,97	71,97	89,63	↔	BKD
		22	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	%	52,60	50,10	47,68	47,68	90,65	↔	BKD
		23	Persentase Tingkat Disiplin ASN	%	99,7	99,7	100	100	100,3	★	BKD
		24	Indeks SPBE	Indeks	3,4	3,34	2,49	2,49	73,24	↔	Diskominfo

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
		25	Persentase <i>network</i> terintegrasi	%	76	71	70,73	70,73	93,07	↔	Diskominfo
		26	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	3	2,2	2	2	66,67	↔	Diskominfo
		27	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	82	76	70	70	85,37	↔	Diskominfo
		28	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%	8	1	2	2	25	➡	Diskominfo
		29	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik	%	65	25	40	40	61,54	➡	Diskominfo
		30	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	Indeks	83	78	80,49	80,49	96,98	➡	Disdukcatpil
		31	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	94,66	72,55	75,55	75,55	79,81	➡	Disdukcatpil
		32	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Indeks	92,25	82,25	91,66	91,66	99,36	➡	Sekretariat DPRD
		33	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	83,82	76,72	71,84	71,84	85,71	↔	Sekretariat DPRD
		34	Indeks kepuasan layanan kelitbangan	Indeks	83,6	82,6	82,91	82,91	99,17	➡	Bappeda
		35	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	%	86	81	81	81	94,19	➡	Bappeda
		36	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	78	81,56	81,56	94,84	➡	Kecamatan Bantarbolang
		37	Cakupan layanan kecamatan	%	96,47	94,29	96,32	96,32	99,84	➡	Kecamatan Bantarbolang

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
		38	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85,6	85,4	82,76	82,76	96,68	↔	Kecamatan Petarukan
		39	Cakupan layanan kecamatan	%	96,22	94,22	100	100	103,93	★	Kecamatan Petarukan
		40	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	88	83	82,36	82,36	93,59	↔	Kecamatan Moga
		41	Cakupan layanan kecamatan	%	92,29	87,29	99,93	99,93	108,28	★	Kecamatan Moga
		42	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,65	83,4	83,25	83,25	99,52	↔	Kecamatan Pemalang
		43	Cakupan layanan kecamatan	%	91,61	86,99	86,99	86,99	94,96	➡	Kecamatan Pemalang
		44	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	78	96	96	120	★	Kecamatan Randudongkal
		45	Cakupan layanan kecamatan	%	97,55	96,44	99,64	99,64	102,14	★	Kecamatan Randudongkal
		46	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	92	82	82	82	89,13	➡	Kecamatan Watukumpul
		47	Cakupan layanan kecamatan	%	97,33	93,33	93,33	93,33	95,89	➡	Kecamatan Watukumpul
		48	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	78	84	84	97,67	➡	Kecamatan Ampelgading
		49	Cakupan layanan kecamatan	%	94,68	92,18	91,33	91,33	96,46	↔	Kecamatan Ampelgading
		50	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	88,31	83,31	84,78	84,78	96,00	➡	Kecamatan Belik

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
		51	Cakupan layanan kecamatan	%	98,67	93,67	97,95	97,95	99,27		Kecamatan Belik
		52	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	80	78	78,79	78,79	98,48		Kecamatan Pulosari
		53	Cakupan layanan kecamatan	%	93,89	93,89	92,23	92,23	98,23		Kecamatan Pulosari
		54	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	79,25	77,85	79,96	79,96	100,90		Kecamatan Bodeh
		55	Cakupan layanan kecamatan	%	94,09	88,88	89	89	94,59		Kecamatan Bodeh
		56	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	95	80,7	81	81	85,26		Kecamatan Comal
		57	Cakupan layanan kecamatan	%	92,67	87,11	87,11	87,11	94,00		Kecamatan Comal
		58	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86,35	86,12	86,12	86,12	99,73		Kecamatan Ulujami
		59	Cakupan layanan kecamatan	%	92,07	87,93	87,47	87,47	95,00		Kecamatan Ulujami
		60	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	92	82	83,72	83,72	91,00		Kecamatan Warungpring
		61	Cakupan layanan kecamatan	%	91,55	88,22	88,88	88,88	97,08		Kecamatan Warungpring
		62	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	87,5	77,5	77,5	77,5	88,57		Kecamatan Taman
		63	Cakupan layanan kecamatan	%	82,73	76,47	76,47	76,47	92,43		Kecamatan Taman

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
4	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			Indeks	70,00	66,62	66,56	66,56	95,09	↔	Setda
		1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,50	6,50	6,45	6,45	86	↔	Dindikbud
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,50	12,16	11,96	11,96	95,68	↔	Dindikbud
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	68,9	68,9	68,9	↔	Dindikbud
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	95,2	95,2	95,2	↔	Dindikbud
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	88,1	88,1	88,1	↔	Dindikbud
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/ menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	11,4	11,4	11,4	↔	Dindikbud
		7	Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai	B	B	B	100	100	★	Dindikbud
		8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,0	73,5	73,53	73,53	99,36	➡	Dinkes
		9	Angka Kematian Ibu	%	55	58,5	129,34	129,34	35,16	↔	Dinkes
		10	Angka Kematian Bayi	%	4,8	5	4,4	4,4	108,33	★	Dinkes
		11	Persentase balita stunting	%	9	14	10,35	10,35	85	➡	Dinkes
		12	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,20	0,17	0,17	0,17	85	➡	Dinkes
		13	TFR	Angka	2,45	2,5	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP
		14	ASFR (15-49 tahun)	Angka	33	35	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
		15	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern contraceptive prevalence (mCP)</i>	%	24,30	22,50	70,26	70,26	289,14	★	Dinsos KBPP
		16	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi <i>(unmet need)</i>	%	10,05	10,1	12,21	12,21	78,51	↔	Dinsos KBPP
		17	Persentase persediaan pangan	%	25	25	433,62	433,62	1.734	★	Dispertan
		18	Persentase infrastuktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	29,72	18,46	16,05	16,05	54	↔	Dispertan
		19	Skor PPH	Angka	95,2	93,1	93,5	93,5	98,21	➡	Dispertan
		20	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	20,00	34,28	34,28	34,28	28,6	➡	Dispertan
		21	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	20	47,83	47,83	47,83	239,15	★	Disparpora
		22	Jumlah perolehan medali pada <i>event</i> olahraga regional	Medali	30	7	0	0	0	↔	Disparpora
		23	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,02	0,05	0,05	45,45	➡	Disparpora
		24	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	33,88	29,04	19,895	19,895	58,72	↔	Disparpora
		25	Persentase wirausaha pemula	%	93,33	38,89	0,05	0,05	0,054	↔	Disparpora
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	88	85,93	86,49	86,49	98,28	➡	Dinsos KBPP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
		1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	84,25	81,50	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP
		2	Indeks PUG/Penghargaan APE	Indeks	Utama	Utama	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP
		3	Indeks PA/Penghargaan KLA	Indeks	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Madya	🔴➡️	Dinsos KBPP
6	Indeks Kebudayaan			Indeks	59,06	42,80	39,05	39,05	66,12	🔴➡️	Dindikbud
		1	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	9,8	5,39	5,395	5,395	55,05	🔵➡️	Dindikbud
		2	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	65,09	56,51	54,88	54,88	84,31	🔴➡️	Dindikbud
		3	Nilai budaya literasi	Indeks	27,23	23,46	22,38	22,38	82,19	🔴➡️	Dinpusarda
		4	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	8,500	7,150	9,96	9,96	117,18	★	Dinpusarda
7	Indeks kerukunan umat beragama			Indeks	71,87	67,00	71,55	71,55	99,55	🔵➡️	Bakesbangpol
		1	Jumlah konflik agama	Kasus	0	0	0	0	100	★	Bakesbangpol
		2	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	100	100	100	★	Bakesbangpol
8	Angka Kemiskinan			%	14,30	15,81	16,56	16,56	84,20	🔴➡️	Setda
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	6,75	7,5	6,71	6,71	100,59	★	Disnaker
		1	Persentase pengangguran yang ditangani	%	13,93	12,28	12,17	12,17	87,37	🔴➡️	Disnaker
		2	Indeks ketenagakerjaan	Indeks	33,16	21,91	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Disnaker
		3	Persentase PMKS yang ditangani	%	25,53	12,76	38,11	38,11	149,27	★	Dinsos KBPP
		4	Persentase penduduk tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat	%	82,12	41,06	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
			pemberdayaan, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial								
		5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	17	100	100	100	★	Dinsos KBPP
		6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	85	83,83	83,83	83,83	↔	Dinsos KBPP
		7	Persentase koperasi yang berkualitas	%	43	31	28,89	28,89	67,17	↔	Diskoperindag
		8	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	0,074	0,049	0,053	0,053	71,62	➡	Diskoperindag
		9	Persentase usaha mikro yang berijin	%	38,66	33,6	33,60	33,60	86,91	➡	Diskoperindag
		10	Persentase perempuan yang diberdayakan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	%	0,075	0,043	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP
		11	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	67	40	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis		Dinsos KBPP

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
10	Indeks Desa Membangun			Indeks	0,8289	0,7289	0,7364	0,7364	88,84		Dinpermasdes
		1	Persentase Desa Berdaya	%	14,62	0,95	0,95	0,95	6,49		Dinpermasdes
		2	Jumlah Desa Berdaya	Desa	31	2	2	2	6,45		Dinpermasdes
11	Indeks ketimpangan antar wilayah			Indeks	0,368	0,38024	0,38008	0,38008	96,72		DPU TR
		1	Persentase Kecamatan yang memiliki infrastruktur lengkap	%	14,29	7,14	21,43	21,43	149,96		DPU TR
		2	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	5,76	1,76	1,76	1,76	30,56		DPU TR
12	Pertumbuhan ekonomi			%	4,5	2,15	4,19	4,19	93,11		Setda
13	Laju Inflasi			%	2,36	2,36	1,53	1,53	135,17		Setda
		1	Persentase pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	1,5	-0,50	3,52	3,52	234,67		Diskoperindag
		2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	6	2	4,2	4,2	70		Diskoperindag
		3	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor dalam PDRB	%	1,4	-2,0	6,44	6,44	460		Diskoperindag
		4	Pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam Daerah	%	4	0,8	6,44	6,44	161		Diskoperindag
		5	Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	2,75	25	100	100	3.636		Diskoperindag
		6	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	2,61	2,56	4,63	4,63	177,39		Dispertan

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
		7	Produktivitas pertanian (padi)	Kw/Ha	57,81	57,71	60,64	60,64	104,89	★	Dispertan
		8	Produksi kopi	kg	973,5	848	548	548	56,29	↔	Dispertan
		9	Produksi daging dan telur	kg	15.964.119	15.390.367	19.615.029	19.615.029	122,87	★	Dispertan
		10	Persentase produksi sektor perikanan dalam PDRB	%	3,62	3,55	1,54	1,54	42,5	➡	Disperik
		11	Produksi perikanan tangkap	kg	19.980.419	18.096.881	18.396.293	18.396.293	92,07	➡	Disperik
		12	Produksi perikanan budidaya	Kg	21.060.694	18.167.140	18.729.495	18.729.495	88,93	➡	Disperik
		13	Produksi hasil olahan perikanan	Kg	12.793.750	11.587.694	9.539.045	9.539.045	74,5	➡	Disperik
		14	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	%	1,4	-2,0	6,44	6,44	460	★	Diskoperindag
		15	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	9	8.2	100	100	1.111	★	Diskoperindag
		16	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	-8,42	-8,42	-84,2	↔	Disparpora
		17	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	50	0	0	0	0	➡	Disparpora
		18	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan	%	10	10	-8,42	-8,42	-84,2	↔	Disparpora

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
			nusantara yang datang ke kabupaten								
		19	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	39,02	25,38	21,19	21,19	54,31	↔	Disparpora
		20	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,73	0,48	0,22	0,22	30,14	↔	Disparpora
		21	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	100	50	50	50	50	➡	Disparpora
		22	Pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN	%	6	1	3,127	3,127	52,12	➡	DPMPTSP
		23	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	6	1	3,127	3,127	52,12	➡	DPMPTSP
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Indeks	71,33	71,08	74,87	74,87	104,96	★	Bappeda
		1	Capaian universal akses air minum	%	92	87	90,7	90,7	98,54	➡	DPU TR
		2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	92	87	90,7	90,7	98,54	➡	DPU TR
		3	Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)	%	78	61,33	83,60	83,60	107,18	★	DPU TR
		4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	97	91,70	94,6	94,6	97,54	➡	DPU TR

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
		5	Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	55	19,58	19,58	19,58	35,6		DLH
		6	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	82	72	75,20	75,20	91,71		DPU TR
		7	Persentase luasan kawasan kumuh	%	0,1	1,0	0,97	0,97	-770		Disperkim
		8	Persentase RTLH tertangani	%	45	25	25,51	25,51	56,69		Disperkim
		9	Rasio konektivitas	Rasio	87,85	86,6	77,86	77,86	88,63		Dishub
		10	Persentase pelayanan angkutan jalan	%	64,86	10,81	10	10	15,41		Dishub
		11	Level of Service	Rasio	0.42	0.44	0,32	0,32	123,81		Dishub
		12	Indeks konektivitas	%	100	93,7	76,11	76,11	76,11		DPU TR
		13	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	78,40	63,65	68,28	68,28	87,09		DPU TR
		14	Indeks kinerja sistem irigasi	%	55	48	48	48	87,27		DPU TR
		15	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	100	100	100	100		DPU TR
		16	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	%	100	30	60	60	60		Disperkim
		17	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	100	60	61,07	61,07	61,07		Disperkim
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)			Indeks	69,82	68,92	69,65	69,65	99,76		DLH
		1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	81	77,75	77,75	77,75	95,99		DLH
		2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks	89,58	89,37	86,26	86,26	96,29		DLH
		3	Skor indeks pencemaran air	Indeks	47,83	46,24	50,00	50,00	104,54		DLH

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD	Realisasi Capaian RPJMD s/d	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status	OPD
							2021	2021			
		4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100	100	100	100	100	★	DLH
		5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100	★	DLH
		6	Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100	★	DLH
		7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	100	15	15	15	15	➡	DLH
		8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	43,096	43,074	43,074	43,074	99,95	➡	DLH
		9	Persentase penanganan lahan kritis	%	0.0863	0.0363	0,0363	0,0363	42,06	➡	DLH
		10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pemalang	%	100	97,93	100	100	100	★	DLH
		11	Persentase Penanganan sampah	%	70,00	73,99	81	81	115,71	★	DLH
		12	Persentase pengurangan sampah	%	30,00	23,94	23,94	23,94	79,8	➡	DLH

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026

OPD Kabupaten Pemalang, 2022

LPPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah diukur melalui capaian 15 indikator kinerja. Terhadap target akhir RPJMD posisi kelima belas indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 indikator kinerja dengan status **telah tercapai**, yaitu angka kriminalitas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), laju inflasi dan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI);
2. Terdapat 7 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**, yaitu Indeks Resiko Bencana (IRBI), Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Desa Membangun (IDM), pertumbuhan ekonomi, Indeks Ketimpangan Wilayah dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD);
3. Terdapat 4 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kebudayaan dan angka kemiskinan. Di Tahun 2021 IPM Kabupaten Pemalang sebesar 66,56 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 66,62, hal tersebut dikarenakan masih tingginya Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Dewasa Tidak Sekolah (DTS) serta masih rendahnya angka partisipasi perguruan tinggi di Kabupaten Pemalang sehingga capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator pembentuk IDM masih rendah. Selanjutnya penyebab lain adalah adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat sehingga rendah pula pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pemalang.

Indeks Kebudayaan sebesar 39,05 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 42,80, hal tersebut dikarenakan belum optimalnya capaian dari beberapa indikator komposit, antara lain indikator budaya literasi yang terbatas hanya dari kunjungan perpustakaan umum daerah saja, penghitungan kunjungan ke obyek wisata budaya belum optimal karena ada pembatasan sosial akibat adanya Pandemi Covid sehingga menyebabkan rendahnya pengunjung wisata dan minimnya kegiatan seni, belum semua obyek wisata yang dikategorikan sebagai obyek wisata dihitung jumlah pengunjungnya, masih terbatas SDM yang memenuhi sebagai kualifikasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk melakukan kajian penetapan warisan budaya dan keterbatasan anggaran. Angka kemiskinan sebesar 16,56 tidak mencapai target yang telah ditentukan sebesar 15,81, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang membuat banyak penduduk kehilangan pekerjaan sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan penduduk dan rendah pula pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pemalang.

Selanjutnya untuk IKU Perangkat Daerah diukur melalui capaian 175 indikator kinerja. Terhadap target akhir RPJMD posisi ke-175 indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 47 indikator kinerja dengan status **telah tercapai**.
2. Terdapat 65 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**.
3. Terdapat 54 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**.
4. Terdapat 9 indikator kinerja yang belum tersedia datanya untuk capaian tahun 2021.

B. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2.112
Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2021

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	68,9	68,9	68,9	↔
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	95,2	95,2	95,2	↔
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	88,1	88,1	88,1	↔
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	11,4	11,4	11,4	↔
5	Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai	B	B	B	B	B	★
	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 Penduduk	0,78	0,75	0,088	0,088	11,28	↔
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	50	40	77, 778	77, 778	155,56	★
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	111,9	111,9	111,9	★
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	113,4	113,4	113,4	★
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	130,6	130,6	130,6	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	bayi baru lahir							
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	103,5	103,5	103,5	★
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	23,6	23,6	23,6	↔
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	47,0	47,0	47,0	↔
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	30,1	30,1	30,1	↔
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	38,9	38,9	38,9	↔
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	54,3	54,3	54,3	↔
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	99,1	99,1	99,1	↔
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	29,5	29,5	29,5	↔
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	58,7	58,7	58,7	↔
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	%	11	6	6,513	6,513	59,21	➡

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota							
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	%	1	0,1	0	0	0	↔
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	72	67	70,257	70,257	97,58	➡
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	92	87	90,7	90,7	98,55	➡
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97	91,70	94,6	94,6	97,54	➡
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	0,32	0,23	1	1	312,5	★
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	78,40	63,65	68,277	68,277	87,09	➡
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	2,11	0,64	0	0	0	↔
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	★
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100	★
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Ha	98	45	25,682	25,682	26,21	↔
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	55	75,00	17,246	17,246	168,64	★
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	45	30	0,032	0,032	0,07	↔
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	★
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	85	60	100	100	117,65	★
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	99	94	94,8	94,8	95,76	➡
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	95	95	94,8	94,8	99,79	↔
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	99,4	99,4	99,4	↔
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	90	67,5	64,41	64,41	71,57	↔
	SOSIAL							
1	Persentase penyandang disabilitas	%	100	17	100	100	100	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti							
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	83,827	83,827	83,827	↔
	TENAGA KERJA							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	80	0	0	0	↔
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,61	1,73	63,018	63,018	953,37	★
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	48,36	35,65	3143,20	3143,20	6.499,59	★
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	23,86	20	19,762	19,762	82,82	↔
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	69	44	66,995	66,995	97,09	➡
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	5,60	5,00	1,582	1,582	28,25	↔
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,08	0,13	0,015	0,015	181,25	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	100	100	9,679	9,679	9,68	↔
	PANGAN							
1	Skor PPH	nilai	95,2	93,1	93,5	93,5	98,21	➡
2	Persentase ketersediaan pangan	%	25,0	25,0	433,619	433,619	1.734,48	★
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	69,67	68,92	69,65	69,65	99,97	➡
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	77	75	56,304	56,304	73,12	↔
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	30	27	26,582	26,582	88,61	↔
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL							
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,93	99,88	99,45	99,45	99,52	↔
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	50	25	37,52	37,52	75,04	➡
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	95	92,5	99,23	99,23	104,45	★
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	25,64	25,64	25,64	25,64	➡
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	15,38	22,22	100	100	-450,19	↔

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	ASFR (15-49) tahun	35	35	35,00	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	24,00	22,48	70,25	70,25	292,71	★
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	10,05	10,10	12,214	12,214	78,47	↔
	PERHUBUNGAN							
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	%	87,85	86,6	77,86	77,86	88,63	↔
2	V/C ratio	rasio	0,42	0,44	0,32	0,32	123,81	★
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	70,732	70,732	70,73	↔
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90	70	41,176	41,176	45,75	↔
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	65	40	51,302	51,302	78,93	➡
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	60	50	50	50	83,33	➡
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	40	40	40	40	100	★
	KOPERASI DAN UKM							
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	43	31	28,885	28,885	67,17	↔
2	Meningkatnya usaha mikro yang	%	38,66	33,66	25,791	25,791	66,71	↔

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	menjadi wirasausaha							
	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan PMA & PMDN	%	6	1	3,127	3,127	52,12	➡
	PEMUDA DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,02	0,05	0,05	45,45	➡
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	33,88	29,04	19,895	19,895	58,72	↔
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	30	7	0	0	0	↔
	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	★
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	★
	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	20	20	20	20	➡
	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	100	100	90,526	90,526	90,53	↔
	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	55,55	55,33	54,32	54,32	97,79	↔
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,500	7,150	9,96	9,96	117,18	★
	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	%	17,70	10,00	74	74	418,08	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)							
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	8,37	6,45	4,16	4,16	49,70	↔
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	1000 ton	41	36	37,13	37,13	90,56	➡
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kap/ thn	36	34,5	30,27	30,27	84,08	↔
PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	50	0	0	0	0	↔
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	10	10	-8,415	-8,415	-85,15	↔
3	Tingkat hunian akomodasi	%	39,02	25,38	21,187	21,187	54,29	↔
PERTANIAN								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	63,26	63,21	602,912	602,912	953,06	★
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10,36	10,31	10,352	10,352	99,92	➡
3	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	ton	8.590	8.540	16.140	16.140	187,89	★
PERDAGANGAN								
1	Persentase pelaku usaha yang	%	9	8,2	100	100	1.111,11	★

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)							
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	99	95	85,943	85,943	86,81	↔
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	25	7	19,842	19,842	79,37	➡
	PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	6	2	-95,645	-95,645	-1.594,08	↔
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	60	30	62,5	62,5	104,17	★
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	0	0	0	↔
	TRANSMIGRASI							
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	40	20	20	20	50	➡
	SEKRETARIAT DAERAH							
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	10,9	9,90	8,29	8,29	76,06	↔
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	57,5	56,34	25,23	25,23	43,88	↔
	KEUANGAN							
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,20	13,14	10,35	10,35	78,41	↔

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
2	Rasio PAD	%	13,5	13,5	13,881	13,881	102,82	★
3	Rasio belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	60	69,51	69,51	115,85	★
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	-4,86	-4,91	-11,01	-11,01	-26,54	↔
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5	5	-18,9532	-18,9532	-379,06	↔
6	Manajemen Aset	%	100	100	100	100	100	★
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,25	4,25	5,67	5,67	133,41	★
KEPEGAWAIAN								
1	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	135	110,81	70,36	70,36	52,12	↔
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,00	5,27	13,91	13,91	139,1	★
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	6,00	1,00	3,82	3,82	63,67	➡
PENGAWASAN								
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,0405	3,0380	3,0375	3,0375	99,90	↔
2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	3	100	★

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ↔ :perlu upaya keras

Sumber : LPPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu sekolah berakreditasi minimal B sebesar 100%;
2. Terdapat 4 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat partisipasi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan belum representatifnya fasilitas pendidikan yaitu masih ada bangunan sekolah yang kondisinya tidak baik sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan sebaran guru yang belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 14 IKK **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi; persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil; persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; dan cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 121,99%.
2. Terdapat 9 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase anak usia pendidikan dasar, orang usia 15-29 tahun, warganegara usia 60 tahun keatas, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ berat, orang terduga TBC dan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pemalang masih berorientasi pada paradigma sakit sehingga kegiatan kuratif masih menjadi prioritas yang harus dicukupi dan kegiatan preventif masih kurang mendapatkan perhatian.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 9 IKK **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota dan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 206,25%.
2. Terdapat 5 indikator dengan status akan tercapai, yaitu rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota; rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi; persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota; persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik; dan tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota.
3. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kabupaten/Kota dan rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 IKK **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota; dan berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 122,88%.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani; dan jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Hal ini disebabkan luasnya kawasan kumuh yang harus ditangani namun anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 IKK **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan dan persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 108,83%.
2. Terdapat 1 indikator akan tercapai, yaitu jumlah warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
3. Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Hal ini disebabkan masih minimnya sarana, prasarana dan SDM bencana/kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengingat luasnya cakupan bencana/kebakaran dan Kabupaten Pemalang termasuk daerah resiko tinggi bencana.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Sosial** adalah satu indikator dengan status telah mencapai target yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan tingkat capaian sebesar 172,60%. Dan satu indikator dengan status perlu upaya keras yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota. Hal ini disebabkan kurangnya SDM yang mempunyai kompetensi memberikan pendampingan dan rehabilitasi mental kepada korban bencana alam dan sosial.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 IKK **Urusan Tenaga Kerja** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan tingkat produktivitas tenaga kerja.
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota.
3. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS

bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan). Hal ini disebabkan masih rendahnya kepatuhan perusahaan kepada aturan ketenagakerjaan yang ada, sehingga diperlukan monitoring secara rutin oleh Disnaker.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten dengan tingkat capaian sebesar 181,25%.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase ARG pada belanja langsung APBD dan rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan). Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman kegiatan seperti apa yang masuk dalam kategori responsif gender sehingga hanya sebagian kecil kegiatan yang dianggap sudah responsif gender.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Pangan** adalah satu indikator dengan status telah tercapai yaitu persentase ketersediaan pangan dan satu indikator dengan status akan tercapai yaitu skor PPH.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota yang disebabkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 1 unit dan kapasitasnya sudah penuh sehingga sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada; dan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebabkan masih ringannya sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 IKK **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu kepemilikan akta kelahiran dengan tingkat capaian sebesar 104,45%.
2. Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dan jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.
3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu perekaman KTP elektronik yang disebabkan adanya penambahan penduduk wajib KTP, terdapat wajib KTP pemula yang belum rekaman dan keterbatasan blangko KTP.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** berupa persentase peningkatan status desa mandiri adalah perlu upaya keras. Hal ini disebabkan Dana Desa yang sedianya digunakan untuk pembangunan desa baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan sehingga terwujud kemandirian desa, sejak tahun 2020 difokuskan

untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga yang terdampak Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR*).
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang membuat berkurangnya kemampuan penduduk untuk membeli alat kontrasepsi dan adanya pembatasan sosial sehingga penduduk tidak dapat ke bidan atau fasilitas kesehatan untuk konsultasi maupun membeli/memasang alat kontrasepsi.
3. Terdapat 1 indikator belum tersedia datanya, yaitu ASFR (15-49) tahun.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Perhubungan** adalah indikator V/C ratio berstatus telah tercapai dan rasio konektivitas kabupaten/kota berstatus perlu upaya keras, hal ini disebabkan konektivitas transportasi antarmoda belum optimal dimana kinerja pelayanan angkutan umum masih dalam kategori kurang baik.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 IKK **Urusan Komunikasi dan Informasi** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu akses publik terhadap informasi keuangan daerah dengan tingkat capaian sebesar 100%.
2. Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta indikator informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.
3. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo yang disebabkan terdapat OPD yang letaknya jauh atau berada di lokasi susah sinyal/*blankspot* sehingga membutuhkan sarana pendukung lainnya dan persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Banyak instansi yang sudah menyelenggarakan pelayanan publik secara online, namun belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Proses integrasi layanan publik online yang berjumlah banyak tersebut membutuhkan waktu dan SDM yang kompeten.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 IKK **Urusan Koperasi dan UKM** yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah perlu upaya keras. Hal ini disebabkan lesunya perekonomian akibat pandem Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Penanaman Modal** yaitu persentase peningkatan PMA dan PMDN adalah akan tercapai.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pemuda dan Olahraga** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.

2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang disebabkan masih rendahnya kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi serta indikator peningkatan prestasi olahraga disebabkan tidak adanya even olahraga yang diselenggarakan akibat pandemi Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 IKK **Urusan Statistik** yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah adalah telah tercapai dengan rata-rata 100%.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Persandian** yaitu tingkat keamanan informasi pemerintah adalah akan tercapai.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Kebudayaan** yaitu terlestariannya cagar budaya adalah perlu upaya keras. Hal ini disebabkan kurangnya SDM yang berkompeten dan keterbatasan anggaran yang ada, dimana anggaran tahun 2021 difokuskan untuk penanganan Covid-19.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Perpustakaan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat disebabkan adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, masih terbatasnya sarana prasarana perpustakaan dan kelengkapan koleksi bacaan.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Kearsipan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung jawaban disebabkan pada tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban serta tidak ada penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Kelautan dan Perikanan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota.
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu angka konsumsi ikan disebabkan kurangnya kampanye Gerakan Makan Ikan (Gemari) yang dilakukan akibat adanya refocusing anggaran.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 3 IKK **Urusan Pariwisata** yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota dan tingkat hunian akomodasi adalah perlu upaya keras disebabkan adanya pandemi Covid-19 membuat mobilitas dan aktivitas sektor pariwisata sangat dibatasi bahkan dihentikan.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Pertanian** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu produktivitas pertanian per hektar per tahun dan produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam).
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Perdagangan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan).
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku.
3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu Persentase kinerja realisasi pupuk.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Perindustrian** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK.
2. Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu pertambahan jumlah industri kecil dan menengah yang disebabkan adanya pandemi di Tahun 2020 membuat banyak industri yang gulung tikar sehingga jumlahnya menurun tajam serta indikator persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait yang disebabkan di Tahun 2021 tidak dilaksanakan pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian IKK **Urusan Transmigrasi** yaitu persentase transmigran yang ditempatkan adalah akan tercapai.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 IKK **Urusan Penunjang Sekretariat Daerah** yaitu persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dan rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan adalah perlu upaya keras.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 7 IKK **Urusan Penunjang Keuangan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai, yaitu rasio PAD, rasio belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*), manajemen aset dan rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya.
2. Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 IKK **Urusan Penunjang Kepegawaian** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
2. Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).
3. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Hal ini disebabkan PNS Kabupaten Pemalang (tenaga administrasi) banyak yang berasal dari honorer daerah yang diangkat menjadi PNS sehingga mempunyai tingkat pendidikan yang rendah.

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 2 IKK **Urusan Penunjang Pengawasan** adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebabkan evaluasi atas pengendalian intern belum dilakukan dengan dokumentasi yang memadai.

C. Capaian Program Unggulan

Tabel 2.113
Capaian Program Unggulan Tahun 2021

No.	Program Unggulan/Indikator	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	DESA DIGITAL							
1	Jumlah data desa yang terintegrasi	Data	6	2	2	2	33,33	➡
2	Jumlah layanan desa yang terintegrasi	Layanan	4	3	3	3	75	➡
	DESA SINERGI							
1	Jumlah desa yang meningkat PADesa-nya dari hasil kerjasama desa	Desa	164	79	79	79	48,17	➡
	DESA WISATA							
1	Persentase desa wisata maju	%	22,22%	11,11	11,11	11,11	50%	➡
	KOTA INDUSTRI							
1	Jumlah Dokumen pendukung Kawasan Indutri	Dokumen	3	-	-	-	-	➡
2	Jumlah Sistem Informasi Industri	Aplikasi	1	1	1	100	100	★

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026
Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2022
Disparpora Kabupaten Pemalang, 2022
Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang diukur melalui capaian 6 indikator kinerja. Terhadap target akhir RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 posisi keenam indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 1 indikator kinerja dengan status **telah tercapai**, yaitu indikator pada Program Kota Industri berupa jumlah Sistem Informasi Industri;
2. Terdapat 4 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**, yaitu indikator pada Program Desa Digital berupa jumlah data desa yang terintegrasi dan jumlah layanan desa yang terintegrasi; indikator pada Program Desa Sinergi berupa jumlah desa yang meningkat PADesa-nya dari hasil kerjasama desa; serta indikator pada Program Desa Wisata berupa persentase desa wisata maju;
3. Terdapat 1 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**, yaitu indikator pada Program Kota Industri berupa jumlah dokumen pendukung Kawasan Industri.

D. Capaian Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 2.114
Capaian Penanggulangan Kemiskinan Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Bidang/Indikator	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
	BIDANG PENDIDIKAN							
1	Rata – Rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	6,50	6,45	6,45	86	↔
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,50	12,00	11,96	11,96	95,68	↔
	BIDANG KESEHATAN							
1	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	%	87	85	83,53	83,53	96,01	↔
2	Indeks keluarga sehat	Indeks	0,20	0,17	0,17	0,17	85	➡
	BIDANG INFRASTRUKTUR							
1	Capaian universal akses air minum	%	92	87	90,66	90,66	98,54	➡
2	Indeks kualitas air	Indeks	46,56	46,24	50,00	50,00	107,39	★
3	Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)	%	78	61,33	83,60	83,60	107,18	★
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	%	45	25	25,51	25,51	56,69	➡
5	Persentase luasan kawasan kumuh	%	0,1	1,0	0,97	0,97	-770	➡
6	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	78,40	63,65	68,28	68,28	87,09	➡
	BIDANG PEMBANGUNAN DESA							
1	Persentase peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri	%	15,38	22,22	100	100	-450,19	↔
	BIDANG KETENAGAKERJAAN							
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	6,61	1,73	63,018	63,018	953,37	★
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	69	44	66,995	66,995	97,09	➡

No.	Bidang/Indikator	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Target 2021	Realisasi Capaian RKPD 2021	Realisasi Capaian RPJMD s/d 2021	Tingkat Capaian RPJMD s/d 2021	Status
3	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	0,074	0,049	0,053	0,053	71,62	➡
4	Persentase wirausaha pemula	%	93,33	38,89	0,05	0,05	0,054	⚡
5	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	8,500	7,150	9,96	9,96	117,18	★
	BIDANG KETAHANAN PANGAN							
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	1000 ton	41	36	37,13	37,13	90,56	➡
2	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	20,00	34,28	34,28	34,28	28,6	➡
	BIDANG SOSIAL							
1	Persentase PMKS yang ditangani	%	25,53	12,76	38,11	38,11	149,27	★

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ⚡ :perlu upaya keras

Sumber : RPKD Kabupaten Pemalang 2021-2026

LP2KD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diukur melalui capaian 19 indikator kinerja. Terhadap target akhir Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 posisi kesembilan belas indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 5 indikator kinerja dengan status **telah tercapai**, yaitu indeks kualitas air, capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik), persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan persentase PMKS yang ditangani;
2. Terdapat 9 indikator kinerja dengan status **akan tercapai**, yaitu Indeks Keluarga Sehat, capaian universal akses air minum, persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani, persentase luasan kawasan kumuh, persentase panjang jalan dalam kondisi mantap, persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota, persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil, jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dan persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan;
3. Terdapat 5 indikator kinerja dengan status **perlu upaya keras**, yaitu Rata – Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan, persentase peningkatan status desa menjadi Desa Mandiri dan persentase wirausaha pemula.

E. **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
1. **Pendidikan**

Kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 9 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.115
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		2.718.300		6.303.337		209.891		209.891		100		209.891		7,72	
1	Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Nonformal/ Kesetaraan (%)	100	1.359.150	100		100		100		100		100		100		★
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100	154.700	68,9		100		68,9		68,9		68,9		68,9		🔴
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	725.450	95,2		100		95,2		95,2		95,2		95,2		🔴
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100	400.050	88,1		100		88,1		88,1		88,1		88,1		🔴
5	Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	100	78.950	11,4		100		11,4		11,4		11,4		11,4		🔴

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	dalam pendidikan kesetaraan (%)															
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		400		3.077		170		170		100		170		42,57	
6	Persentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan (%)	100	400	99,92		100		99,92		99,92		99,92		99,92		🔴
7	Persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan local (%)	100	-	0		100		0		0		0		0		🔴
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		8.003		4.692		239		239		100		239		2,99	
8	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (%)	100	8.003	93,74		100		93,74		93,74		93,74		93,74		🔴
9	Persentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat (%)	100		99,94		100		99,94		99,94		99,94		99,94		🔴

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: 🟢:telah tercapai, 🔵 :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 9 indikator kinerja **Urusan Pendidikan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Nonformal/Kesetaraan.
- 2) Terdapat 8 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu :
 - a. Tingkat partisipasi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan pendidikan kesetaraan. Hal ini disebabkan belum representatifnya fasilitas pendidikan yaitu masih ada bangunan sekolah yang kondisinya tidak baik sehingga berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu adanya tenaga pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan sebaran guru yang belum merata terutama untuk daerah-daerah terpencil.
 - b. Persentase pengembangan kurikulum yang dilaksanakan dan persentase sekolah yang memiliki kurikulum muatan lokal.
 - c. Persentase pendidik dan tenaga pendidik yang terfasilitasi dan bersertifikat.

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 17 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN		1.562.500		265.470		245.787,9		245.787,9		100		245.787,9		15,73	
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (rasio)	0,78		0,088		0,76		0,088		11,58		0,088		11,28		🔴
2	Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama) (%)	50		77,778		40		77,778		194,4		77,778		155,56		🟢

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
3	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan ibu	100		111,9		100		111,9		111,9		111,9		111,9		★
4	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan ibu bersalin (%)	100		113,4		100		113,4		113,4		113,4		113,4		★
5	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	100		130,6		100		130,6		130,6		130,6		130,6		★
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100		103,5		100		103,5		103,5		103,5		103,5		★
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		23,6		100		23,6		23,6		23,6		23,6		🚦
8	Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		47,0		100		47,0		47,0		47,0		47,0		🚦
9	Persentase warga negara usia > 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		30,1		100		30,1		30,1		30,1		30,1		🚦
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		38,9		100		38,9		38,9		38,9		38,9		🚦
11	Persentase penderita diabetes militus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		54,3		100		54,3		54,3		54,3		54,3		🚦
12	Persentase penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		99,1		100		99,1		99,1		99,1		99,1		🚦
13	Persentase penderita TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100		29,5		100		29,5		29,5		29,5		29,5		🚦
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelynan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100		58,7		100		58,7		58,7		58,7		58,7		🚦
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1.958,9		32.739,4		10.037,5		10.037,5		100		10.037,5		512,4	
15	Rasio kesehatan tenaga per seratus ribu penduduk (rasio)	200		195		197		197		100		197		98,5		➡️
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		2.410,3		299		156,3		156,3		100		156,3		6,49	
16	Persentase sarana kefarmasian alkes dan PIRT yang	80		89		76		89		117,1		89		111,25		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	memenuhi standar (%)															
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		5.779,9		371,8		345,2		345,2		100		345,2		5,97	
17	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100		4,95		100		4,95		4,95		4,95		4,95		🔴

Sumber : Dinkes Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: 🟢 :telah tercapai, 🔵 :akan tercapai, 🔴 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 17 indikator kinerja **Urusan Kesehatan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 6 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama), persentase ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart, serta persentase sarana kefarmasian alkes dan PIRT yang memenuhi standar.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu rasio tenaga kesehatan per seratus ribu penduduk.
- 3) Terdapat 10 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu :
 - a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, persentase anak usia pendidikan dasar, orang usia 15-29 tahun, warganegara usia 60 tahun keatas, penderita hipertensi, penderita DM, ODGJ berat, orang terduga TBC dan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart. Hal ini disebabkan pembiayaan kesehatan di Kabupaten Pemalang masih berorientasi pada paradigma sakit sehingga kegiatan kuratif masih menjadi prioritas yang harus dicukupi dan kegiatan preventif masih kurang mendapatkan perhatian.
 - b. Cakupan desa siaga aktif yang disebabkan masih kurang pemahannya Pemerintah Desa akan pentingnya Desa Siaga.

3. Pekerjaan Umum

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ditunjukkan melalui capaian 10 program dengan 19 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		116.682,9		14.854,3		3.702		3.702		100		3.702		3,17	
1	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	68		70,26		68		70,26		103,3		70,26		103,32		🟢
2	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	11		6,513		7		7		100		7		59,21		🔵
3	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi	1		0		0,01		0		0		0		0		🔴

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)															
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	72		70,257		68		70,257		103,3		70,257		97,58		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		82.030		13.167,9		3.299,7		3.299,7		100		3.299,7			
5	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum (%)	92		90,7		88		90,7		103,1		90,7		98,55		
6	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota (%)	92		90,7		88		90,7		103,1		90,7		98,55		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		45.030		664,6		200		200		100		200			
7	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	55		19,58		20,62		20,62		100		20,62		35,6		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		10.030		6.439,7		5.374,6		5.374,6		100		5.374,6			
8	Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestic (%)	97		94,6		93		94,6		101,7		94,6		97,54		
9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic (%)	97		94,6		93		94,6		101,7		94,6		97,54		
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		54.995		3.512,8		410		410		100		410			
10	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	82		75,20		74		75,20		101,6		75,20		91,71		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		313.533		14.527,4		6.355		6.355		100		6.355			
11	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan (%)	50		60		50		60		120		60		120		
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		36.030		162,6		225		225		100		225			
12	Persentase kesesuaian	20		1		20		1		5		1		5		

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	Bangunan dan Lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan Tata Bangunan (%)															
13	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	0,32		1		0,25		1		400		1		312,5		★
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		1.034.000		85.471,5		65.887,2		65.887,2		100		65.887,2			
14	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap (%)	88,69		68,28		66,64		68,28		102,46		68,28		87,09		➡
15	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota (km)	679,15		522,86		582,15		582,15		100		582,15				➡
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		5.615		178,2		80		80		100		80			
16	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi (%)	10		9		10		9		90		9		90		🚧
17	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	2,11		0		0,94		0		0		0		0		🚧
18	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		6.425		422,4		200		200		100		200			
19	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (%)	100		100		100		100		100		100		100		★

Sumber : DPU TR Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🚧 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 19 indikator kinerja **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik, persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik sesuai tertib administrasi tata bangunan, rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota, rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi, dan persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- 2) Terdapat 10 indikator dengan status akan tercapai, yaitu rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi, persentase penduduk yang memiliki akses air minum, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota, persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar, persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik, persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, persentase jaringan drainase dalam kondisi

baik, persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap, dan tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota.

3) Terdapat 4 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota; persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan; persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi; dan rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		5.050		529,6		2.165		2.165		100		2.165		42,8 7	
1	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	100		100		100		100		100		100		100		★
2	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	100		100		100		100		100		100		100		★
3	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		111.660		31.679,9		210		210		100		210		0,19	
4	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh	0,36		0,97		1,34		0,97		127,61		0,97		69,44		➡
5	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	98		25,682		55		25,682		46,69		25,682		26,21		⚡
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		22.550		416,3		50		50		100		50		0,22	
6	Persentase RTLH yang tertangani	45		25,51		29		29		100		29		64,44		➡
7	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	55		17,246		71		17,246		175,7		17,246		168,64		★
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		24.476,5		5.160,6		2.894		2.894				2.894		11,82	
8	Persentase Kelengkapan PSU pada Kawasan Permukiman/ Perumahan	45		0,032		33		0,032		0,09		0,032		0,07		⚡

Sumber : Disperkim Kabupaten Pemalang, 2022
Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ⚡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase rumah layak huni bagi korban bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, dan berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase luas kawasan permukiman kumuh dan persentase RTLH yang tertangani.
- 3) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani dan persentase kelengkapan PSU pada kawasan permukiman/perumahan.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 9 indikator yang dilaksanakan oleh 2 perangkat daerah yaitu Satpol PP dan BPBD sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		13.875		1.688,6		1.060		1.060		100		1.060		7,64	
1	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	100		100		100		100		100		100		100		★
2	Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan	85		100		65		100		153,85		100		117,65		★
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		2.850		370,6		172,5		172,5		100		172,5		6,05	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	90		64,41		70		64,41		92,01		64,41		71,56		🔴
4	Persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran	40,55		0		13,51		0		0		0		0		🔴
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		25.100		3.837,2		700		700		100		700		2,79	
5	Indeks Ketahanan Daerah	0,85		0,66		0,7		0,7		100		0,7		82,35		🔵
6	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	99		93,53		95		93,53		98,45		93,53		94,47		🔴
7	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	95		93,61		95		93,61		98,54		93,61		98,54		🔴
8	Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	100		99,36		100		99,36		99,36		99,36		99,36		🔴

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	evakuasi korban bencana															
9	Cakupan desa/ kelurahan tangguh bencana	11,26		4,95		5,86		5,86		100		5,86		52,04		➡

Sumber : Satpol PP Kabupaten Pemalang, 2022
 BPBD Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan dan persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Indeks Ketahanan Daerah dan cakupan desa/kelurahan tangguh bencana.
- 3) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran, cakupan warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, cakupan warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan cakupan warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Hal ini disebabkan masih minimnya sarana, prasarana dan SDM bencana/kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pemalang mengingat luasnya cakupan bencana/kebakaran dan Kabupaten Pemalang termasuk daerah resiko tinggi bencana.

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan sosial ditunjukkan melalui capaian 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.120
 Capaian Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		3.650		430,7		309		309		100		309		8,47	
1	Persentase PMKS yang diberdayakan	40,13		100		24,09		100		415,11		100		249,19		★
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		86		0,3		0,5		0,5		100		0,5		0,58	
2	Persentase penanganan warga negara migran korban kekerasan yang tertangani	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		5.782,5		649,8		414,4		414,4		100		414,4		7,17	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100		172,604		100		100		100		100		100		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	dasarnya di luar panti															
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		66.550		10.458,7		1.465,9		1.465,9		100		1.465,9		2,2	
4	Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan satu dan dua	28,51		100		28,47		100		351,25		100		350,75		★
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		1.100		193,8		74		74		100		74		6,73	🚧
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100		83,827		100		83,827		83,827		83,827		83,827		
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		550		32,2		21		21		100		21		3,81	
6	Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100		100		100		100		100		100		100		★

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★:telah tercapai, 🚧:akan tercapai, 🚧:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Sosial** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase PMKS yang diberdayakan; persentase penanganan warganegara migran korban kekerasan yang tertangani; persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti; persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan satu dan dua; dan persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

F. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kinerja penyelenggaraan urusan tenaga kerja ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.121
 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		895		2,3		-		-		-		-			
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80		100		-		-		-		-		-		🚧

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		9.225		846,7		275		275		100		275		2,98	
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6,61		63,018		2,59		63,018		2.433,13		63,018		953,37		★
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	48,36		3143,20		38		3143,20		8.271,58		3143,20		6.499,59		★
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		8.875		884,5		285		285		100					
4	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	69		66,995		49		66,995		136,72		66,995		97,09		➡
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		3.475		280		150		150		100					
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	23,86		19,762		21,04		19,762		93,93		19,762		82,82		⚡

Sumber : Disnaker Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ⚡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 indikator kinerja **Urusan Tenaga Kerja** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan tingkat produktivitas tenaga kerja.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota.
- 3) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja dan persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan).

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.122
 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		3.350		4.092,4		543,7		543,7		100		543,7		16,23	
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,6		1,582		5,2		1,582		30,42		1,582		28,25		⚡

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		4.115		5.129,8		877,5		877,5		100		877,5			
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	100		9,679		100		9,679		9,679		9,679		9,679		👉
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		776,5		921,5		80,6		80,6		100		80,6			
3	Persentase pernikahan usia anak	4		5,32		5		5		100		5		75		👉
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		425		480		30,7		30,7		100		30,7			
4	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	92,59		100		77,70		100		128,7		100		108		★
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		870		1.018,8		74,6		74,6		100		74,6			
5	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	45,95		14,14		20,22		14,14		69,93		14,14		30,77		👉
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		900		1.051,1		78,5		78,5		100		78,5			
6	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	100		100		100		100		100		100		100		★

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, 👉 :akan tercapai, 👉 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase OPD yang memiliki data gender dan anak serta persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase pernikahan usia anak.
- 3) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase ARG pada belanja langsung APBD, persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif serta persentase Desa/Kelurahan layak anak.

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan pangan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.123
Capaian Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		856,7		540		3.020		3.020		100		3.020		352,52	

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
1	Persentase lumbung pangan yang aktif	29,72		16,05		20,72		16,05		77,46		16,05		54		🚧
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		8.650		866,1		525		525		100		525		6,07	
2	Jumlah ketersediaan cadangan pangan	20		60		20		60		300		60		300		★
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		308		24,1		50		50		100		50		16,23	
3	Persentase penurunan desa rawan pangan	12		14,86		12		14,86		123,83		14,86		123,83		★
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		429		42,7		60		60		100		60		13,99	
4	Persentase pangan segar yang aman	80		100		80		100		125		100		125		★

Sumber : Dispertan Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★ :telah tercapai, 🚧 :akan tercapai, 🚧 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Pangan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu jumlah ketersediaan cadangan pangan, persentase penurunan desa rawan pangan dan persentase pangan segar yang aman.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase lumbung pangan yang aktif.

4. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.124
 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		685		107		100		100		100		100		14,59	
1	Penanganan sengketa pertanian yang dilakukan melalui mediasi	60		100		60		100		166,67		100		166,67		★
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		1.015		185		70		70		100		70		6,89	
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	80		100		80		100		125		100		125		★
3	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	60		0		60		0		0		0		0		🚧
4	Persentase penetapan tanah	80		100		80		100		125		100		125		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	untuk pembangunan fasilitas umum															
5	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	80		100		80		100		125		100		125		★
6	Bidang tanah yang bersertifikat	76		61,07		64		64		100		64		84,21		➡

Sumber : Disperkim Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🚧 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Pertanahan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai, yaitu penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi, persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, dan tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu bidang tanah yang bersertifikat.
- 3) Terdapat 1 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tersedianya tanah Obyek *Landreform* (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah *Absentee*

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui capaian 9 program dengan 15 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.125
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		3.385		423,9		130		130		100		130		3,84	
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		7.193,8		779,4		527,1		527,1		100		527,1		7,33	
2	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	100		100		100		100		100		100		100		★
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	69,67		69,65		69,07		69,65		100,84		69,65		99,97		➡
4	Indeks Kualltas Air	47,83		50		46,56		50		107,39		50		104,54		★
5	Indeks Kualitas Udara	89,58		86,26		89,43		86,26		86,26		86,26		96,29		🚧
6	Indeks Tutupan Lahan	70,02		72,66		70,08		72,66		103,68		72,66		103,77		★
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM		1.720		119		100		100		100		100		5,81	

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	AN HAYATI (KEHATI)															
7	Persentase Pengelolaan Kehati	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		570		18,7		20		20		100		20		3,5	
8	Persentase Pengendalian B3 & LB3	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		1.300		74,5		160		160		100		160		12,3	
9	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	100		100		100		100		100		100		100		★
10	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	30		26,582		28		26,582		26,582		26,582		88,61		👉
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		2.085		391,7		171		171		100		171		8,2	
11	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		1.019		63,7		34		34		100		34		3,34	
12	Persentase Penghargaan yang diberikan	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		165		20,8		40		40		100		40		24,24	
13	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		53.925		8.319,5		5.222,8		5.222,8		100		5.222,8		9,68	
14	Persentase sampah yang terangkut	85		81		82		82		100		82		96,47		➡
15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	77		56,304		75		56,304		56,304		56,304		73,12		👉

Sumber : DLH Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 👉 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 15 indikator kinerja **Urusan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 10 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun, persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan, indeks kualitas air, indeks tutupan lahan, persentase pengelolaan Kehati, persentase pengendalian B3 & LB3, persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina, persentase kelompok masyarakat yang teredukasi, persentase penghargaan yang diberikan dan persentase penanganan pengaduan masyarakat.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota dan persentase sampah yang terangkut.
- 3) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu indeks kualitas udara disebabkan bertambahnya pabrik baru sebagai dampak negatif banyaknya investasi yang masuk ke Kabupaten Pemalang; ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebabkan masih ringannya sanksi yang diberikan kepada pelanggar; dan terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota yang disebabkan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Kabupaten Pemalang hanya berjumlah 1 unit dan kapasitasnya sudah penuh sehingga sudah tidak mampu lagi menampung sampah dari TPS (Tempat Pembuangan Sementara) yang ada.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		9.492,3		1.800,9		1.218,6		1.218,6		100		1.218,6		12,84	
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	82,88		78,72		76,13		78,72		103,4		78,72		94,98		
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		2.575,6		357,2		395,4		395,4		100		395,4		15,35	
2	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	98,75		99,81		98,25		99,81		101,59		99,81		101,07		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		3.275,3		659,5		538,1		538,1		100		538,1		16,43	
3	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	100		25,64		41,03		41,03		100		41,03		41,03		
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		262,5		33,6		48,2		48,2		100		48,2		18,36	
4	Persentase data kependudukan yang mutakhir	97		98,02		93		98,02		105,39		98,02		101,05		

Sumber : Disdukcatpil Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: :telah tercapai, :akan tercapai, :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dan persentase data kependudukan yang mutakhir.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan tabel berikut.

Tabel 2.127
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENATAAN DESA		3.730,6		297,5		414,7		414,7		100		414,7		11,12	
1	Persentase desa tertata	50,47		1,90		7,11		1,90		26,72		1,90		3,76		🟡
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA		1.775		152,7		149,1		149,1		100		149,1		8,4	
2	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa	77,73		37,44		61,5		61,5		100		61,5		79,12		🟢
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		16.375		3.039,4		3.673,1		3.673,1		100		3.673,1		22,43	
3	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik	50,47		1,42		13,27		1,42		10,7		1,42		2,81		🟡
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		6.486,6		687,3		668,3		668,3		100		668,3		10,3	
4	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya	48,59		16,09		21,49		16,09		74,87		16,09		33,11		🟡

Sumber : Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: 🟢 :telah tercapai, 🟡 :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa.
- 2) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase desa tertata disebabkan masih rendahnya desa yang sudah menetapkan batas desa dan mempunyai rencana tata ruang wilayah desa dikarenakan keterbatasan anggaran menyebabkan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang belum dapat melaksanakan fasilitasi secara optimal; persentase desa beradministrasi pemerintahan baik disebabkan masih rendahnya desa yang sudah melaksanakan pelayanan dan menyajikan data desa secara digital dikarenakan keterbatasan anggaran menyebabkan Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

belum dapat melaksanakan fasilitasi secara optimal; dan persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya disebabkan masih kurangnya pembinaan dan pendampingan dari instansi terkait.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.128
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		11.700		693,2		657,3		657,3		100		657,3		5,61	
1	Persentase Pasangan Usia Subur yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun	33		35		35		35		100		35		93,94		➡
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		40.050		8.012,2		13.329,1		13.329,1		100		13.329,1		33,28	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern	24		70,25		22,5		70,25		312,22		70,25		292,71		★
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		6.050		768,5		713,5		713,5		100		713,5		11,79	
3	Cakupan PUS yang ber KB yang diberdayakan	86,14		85,64		85,48		85,64		100,19		85,64		99,42		➡

Sumber : Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang, 2022
Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu angka prevalensi kontrasepsi modern.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun dan cakupan PUS yang ber KB yang diberdayakan.

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.129
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		51.177,1		2.969,7		2.327,2		2.327,2		100		2.327,2		4,55	
1	Persentase penyelenggaraan lalu lintas	90		100		70		100		142,86		100		111,11		★
2	Persentase penyelenggaraan angkutan jalan	95		100		85		100		117,65		100		105,26		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
3	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,42		0,32		0,44		0,32		127,27		0,32		123,81		★
4	Rasio konektivitas	87,85		77,86		75,75		77,86				77,86		88,63		🚧
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		2.605		240		334,5		334,5		100		334,5		12,84	
5	Persentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi	100		70		100		70		70		70		70		🚧

Sumber : Dishub Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, 🚧 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 indikator kinerja **Urusan Perhubungan** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase penyelenggaraan lalu lintas, persentase penyelenggaraan angkutan jalan dan kinerja lalu lintas kabupaten/kota.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu rasio konektivitas; dan persentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.130
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		17.877,3		3.771,5		2.235,7		2.235,7		100		2.235,7		12,5	
1	Persentase Ketersediaan Informasi Publik	90		70		75		77		100		75		83,33		➡
2	Proporsi penduduk yang mengakses informasi publik	30		5		10		10		100		10		33,33		➡
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90		41,18		75		41,18		45,75		41,18		45,75		🚧
4	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	65		51,30		45		51,30		114		51,30		78,93		➡
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	60		50		50		50		100		50		83,33		➡
6	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40		40		40		40		100		40		100		★
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		26.185		5.853,8		5.161,9		5.161,9		100		5.161,9		19,71	
7	Persentase <i>Network</i> terintegrasi	76		70,73		72		70,73		98,24		70,73		93,07		🚧
8	Persentase Organisasi	100		70,73		100		70,73		70,73		70,73		70,73		🚧

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo															

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: 🟢:telah tercapai, 🔵:akan tercapai, 🟡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Komunikasi dan Informatika** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu akses publik terhadap informasi keuangan daerah.
- 2) Terdapat 4 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase ketersediaan informasi publik; proporsi penduduk yang mengakses informasi publik; persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan.
- 3) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi; persentase *network* terintegrasi, dan persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.

1.1. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.131
Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				0,15		0		0		0		0		0	
1	Persentase Koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya	100		100		100		100		100		100		100		🟢
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI		1.400		80,2		82,2		82,2		100		82,2		5,87	
2	Persentase koperasi aktif dan patuh	36		29,04		28		29,04		103,7		29,04		80,67		🔵
3	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	43		28,885		36		28,885		80,24		28,885		67,17		🟡
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP		625		89,5		9,3		9,3		100		9,3		1,49	
4	Persentase KSP/USP sehat	40		30,25		32		32		100		32		80		🔵
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		2.125		98		625,1		625,1		100		625,1		29,42	
5	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih	4		18,7		0,75		18,7		2,493		18,7		467,5		🟢
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA		3.025		180,1		185		185		100		185		6,11	

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)															
6	Persentase pertumbuhan usaha mikro	5,6		7,75		4,4		7,75		176,14		7,75		138,39		★
7	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	38,66		25,791		35,66		25,791		72,32		25,791		66,71		👉
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		11.525		1.384,9		895,5		895,5		100		895,5		7,77	
8	Persentase UMKM yg dibina	1,58		1,49		1,51		1,51		100		1,51		95,57		➡

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 👉 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu Persentase koperasi yang melakukan perluasan pelayanannya, persentase anggota/karyawan koperasi yang terlatih dan persentase pertumbuhan usaha mikro.
- 2) Terdapat 3 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase koperasi aktif dan patuh, persentase KSP/USP sehat dan persentase UMKM yg dibina.
- 3) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu meningkatnya koperasi yang berkualitas dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha.

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.132
 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		1.030,6		26,1		83,9		83,9		100		83,9		8,14	
1	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	3,20		-40		2		-40		-2000		-40		-1250		👉
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		1.074		7		109,9		109,9		100		109,9		10,23	
2	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal	100		0		100		50		50		50		50		👉
3	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	6		3,127		3		3,127		104,23		3,127		52,12		➡
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		12.669,3		360,6		162		162		100		162		1,28	
4	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal	97		98,71		95		98,71		103,9		98,71		101,76		★
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		2.284,9		262,1		301,3		301,3		100		301,3		13,19	

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
5	persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu	50		85,71		42		85,71		204		85,71		171,42		★
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		159,5		12,2		30,3		30,3		100		30,3		18,99	
6	Persentase realisasi perijinan	100		160,28		100		160,28		160,28		160,28		160,28		★

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Penanaman Modal** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal, persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu dan persentase realisasi perijinan.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota.
- 3) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase peningkatan jumlah investor disebabkan adanya pandemi Covid-19 membuat lesunya perekonomian sehingga banyak usaha yang gulung tikar dan banyak investor yang membatasi bahkan menghentikan usahanya; dan persentase terlaksananya promosi penanaman modal disebabkan pada tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan promosi penanaman modal akibat keterbatasan anggaran.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olah raga ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.133
 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEPEMUDAAN		5.305		226,9		215		215		100		215		4,05	
1	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	86,96		91,30		80		91,30		114,13		91,30		104,99		★
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,11		0,05		0,04		0,05		125		0,05		45,45		➡
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	33,88		19,895		30,01		19,895		66,29		19,895		58,72		➡
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SANG KEOLAHRAGAAN		31.650		2.681,4		1.795		1.795		100		1.795		5,67	
4	Persentase prestasi olahraga	20		47,83		42,85		47,83		111,62		47,83		239,15		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
5	Peningkatan prestasi olahraga	30		0		10		0		0		0		0		🔴
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		1.545		300		100		100		100		100		6,47	
6	Persentase anggota pramuka yang dibina	100		3,57		25		3,57		14,28		3,57		3,57		🔴

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: 🟢:telah tercapai,🔵 :akan tercapai, 🔴:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Kepemudaan dan Olah Raga** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan persentase prestasi olahraga.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
- 3) Terdapat 3 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; peningkatan prestasi olahraga; dan persentase anggota pramuka yang dibina

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan statistik ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.134
 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		1.800		147,7		218,5		218,5		100		218,5		12,14	
1	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar	60		22		20		22		110		22		36,67		🔵
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100		🟢
3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100		🟢

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: 🟢:telah tercapai,🔵 :akan tercapai, 🔴:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Statistik** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar.

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan persandian ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		1.488		194,4		181,4		181,4		100		181,4		12,19	
1	Persentase konten informasi yang telah diamankan	100		20		40		40		100		40		40		➡
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100		20		40		40		100		40		40		➡

Sumber : Diskominfo Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 indikator kinerja **Urusan Persandian** yaitu persentase konten informasi yang telah diamankan dan tingkat keamanan informasi pemerintah adalah akan tercapai.

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.136
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		4.565		442,4		340,8		340,8		100		340,8		7,47	
1	Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		1.145		64,4		39		39		100		39		3,41	
2	Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		4.070		668,6		325,6		325,6		100		325,6		8	
3	Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi	100		100		100		100		100		100		100		★

Sumber : Dindikbud Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 3 indikator kinerja **Urusan Kebudayaan** yaitu persentase warisan budaya tak benda, sejarah Pemalang dan warisan budaya benda yang diregistrasi adalah telah tercapai.

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.137
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		7.060		774,6		275		275		100		275		3,89	
1	Persentase perpustakaan terstandarisasi	5,66		1,69		2,28		2,28		100		2,28		40,28		➡
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	55,55		54,32		55,35		54,32		98,14		54,32		97,79		↔
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO		275		0		0		0		0		0		0	
3	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	55,50		0		0		0		0		0		0		↔

Sumber : Dinpusarda Kabupaten Pemalang
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ↔:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Perpustakaan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase perpustakaan terstandarisasi.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat disebabkan adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19, masih terbatasnya sarana prasarana perpustakaan dan kelengkapan koleksi bacaan; dan persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan disebabkan di Tahun 2021 tidak dilaksanakan kegiatan pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara karena keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing anggaran, dimana anggaran daerah difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		2.300		131,3		65		65		100		65		2,83	
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	17,7		74		17,70		74		418,08		74		418,08		★
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		110		0		10		10		100		10		9,09	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an	7,74		4,16		6,45		4,16		64,49		4,16		49,70		↔

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP		60		0		0		0		0		0		0	
3	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup	100		0		0		0		0		0		0		🔴

Sumber : Dinpusarda Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: 🟢 :telah tercapai, 🔵 :akan tercapai, 🔴 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Urusan Kearsipan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan persentase penerbitan ijin penggunaan arsip tertutup. Hal ini disebabkan pada tahun 2021 belum dilaksanakan kegiatan inventarisasi arsip statis sebagai bahan pertanggungjawaban serta tidak ada penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup

G. Urusan Pemerintahan Pilihan
 1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.139
 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		13.024		1.271,1		538,7		538,7		100		538,7		4,14	
1	Persentase TPI yang memenuhi standar	89		67		69		69		100		69		77,53		🔵
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		13.765		1.889,1		625		625		100		625		4,54	
2	persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani	33		18		21		21		100		21		63,64		🔵
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		1.025		139,1		71,2		71,2		100		71,2		6,95	
3	Persentase peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD)	4		4		4		4		100		4		100		🟢
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		8.195		757		290		290		100		290		3,54	
4	Persentase Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang aman pangan	78,87		53,87		58,87		58,87		100		58,87		74,64		🔵

Sumber : Disperik Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: 🟢 :telah tercapai, 🔵 :akan tercapai, 🔴 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 4 indikator kinerja **Urusan Kelautan dan Perikanan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD).
- 2) Terdapat 3 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase TPI yang memenuhi standar, persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani dan persentase Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang aman pangan.

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan pariwisata ditunjukkan melalui capaian 4 program dengan 9 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.140
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		73.600,7		3.047,4		966,9		966,9		100		966,9		1,31	
1	Persentase kunjungan obyek wisata	100		49,60		100		49,60		49,60		49,60		49,60		
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	50		0		0		0		0		0		0		
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	10		-8,415		10		-8,415		-8,415		-8,415		-85,15		
4	Tingkat hunian akomodasi	39,02		21,187		26,65		21,187		79,5		21,187		54,29		
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,73		0,80		0,5		0,80		160		0,80		109,59		
6	Jumlah PAD retribusi pariwisata	2,27		0,812		1,55		0,812		52,39		0,812		35,77		
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		2.045		302,9		380		380		100		380		18,58	
7	Persentase objek wisata yang dipromosikan	100		100		100		100		100		100		100		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		345		0		0		0		0		0		0	
8	Persentase sarana dan prasarana Ekraf yang dimanfaatkan	100		40		40		40		100		40		40		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		4.035		300,5		166,7		166,7		100		166,7		4,13	
9	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	100		25		82		25		30,49		25		25		

Sumber : Disparpora Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: :telah tercapai, :akan tercapai, :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 9 indikator kinerja **Urusan Pariwisata** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD dan persentase objek wisata yang dipromosikan.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase sarana dan prasarana Ekraf yang dimanfaatkan.
- 3) Terdapat 6 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase kunjungan obyek wisata, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota, tingkat hunian akomodasi, jumlah PAD retribusi pariwisata dan persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 membuat mobilitas dan aktivitas sektor pariwisata sangat dibatasi bahkan dihentikan.

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan pertanian ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 6 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.141
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		15.627		1.858,5		3.934,8		3.934,8		100		3.934,8			
1	Persentase Sarana Pertanian sesuai kebutuhan (bibit, pupuk, Alsintan)	80		80		80		80		100		80		100		★
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		38.362,1		8.458,3		3.276,2		3.276,2		100		3.276,2			
2	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	35		20		20		20		100		20		57,14		➡
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		3.365		229,4		479,2		479,2		100		479,2			
3	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	10,96		10,35		10,32		10,35		100,29		10,35		94,43		➡
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		1.620		322,9		106,2		106,2		100		106,2			
4	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	20		20		20		20		100		20		100		★
	PROGRAM PERIJINAN USAHA PERTANIAN		1.000		0		0		0		0		0			
5	Persentase jumlah usulan ijin usaha pertanian	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		12.435		1.089,1		269,9		269,9		100		269,9			
6	Persentase kelompok tani aktif	5		5		5		5		100		5		100		★

Sumber : Dispertan Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 6 indikator kinerja **Urusan Pertanian** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 4 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan, persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian, persentase jumlah usulan ijin usaha pertanian, dan persentase kelompok tani aktif.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik dan persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular.

4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan ditunjukkan melalui capaian 6 program dengan 8 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		535		20,3		155		155		100		155		28,97	
1	Persentase Pelaku Usaha yang diawasi perijinannya	0,5		0,5		0,5		0,5		100		0,5		100		★
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	9		100		8,4		100		1.190,47		100		1.111,11		★
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		23.168		4.421,1		2.700		2.700		100		2.700		11,65	
3	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat	5,88		0		5,88		0		0		0		0		🚚
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		4.270		475,3		257,3		257,3		100		257,3		6,03	
4	Persentase stabilasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	80		100		80		100		125		100		125		★
5	Persentase kinerja realisasi pupuk	100		85,943		96		85,943		89,52		85,943		86,81		🚚
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		4.465		67,9		240		240		100		240		5,38	
6	Persentase pertumbuhan nilai ekspor	27,5		100		25,5		100		392,16		100		363,64		★
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		2.150		297,8		115		115		100		115		5,35	
7	Persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang	32		19,842		28		28		100		28		87,5		➡
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN		2.376,5		384,4		50,1		50,1		100		50,1		2,1	

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PRODUK DALAM NEGERI															
8	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya	1		30		0,5		30		6000		30		3000		★

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 8 indikator kinerja **Urusan Perdagangan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 5 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya, persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan), persentase stabilasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting, persentase pertumbuhan nilai ekspor dan persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya.
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang.
- 3) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat dan persentase kinerja realisasi pupuk.

5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan perindustrian ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 9 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.143
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		4.050		687,4		581,6		581,6		100		581,6		14,36	
1	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK	40		0		30		0		0		0		0		➡
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	60		62,5		30		62,5		208,33		62,5		104,17		★
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	6		4,2		5		5		100		5		83,33		➡
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		1.220		77,1		50		50		100		50		4,09	
4	Persentase Industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI)	100		100		100		100		100		100		100		★
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	100		0		100		0		0		0		0		➡

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	(IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota															
6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		0		100		0		0		0		0		➡
7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100		0		100		0		0		0		0		➡
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		2.765		88,4		40,4		40,4		100		40,4		1,46	
8	Persentase industri yang masuk dalam SIINAS	100		17,5		100		17,5		17,5		17,5		17,5		➡
9	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100		Belum rilis		100		Belum rilis				Belum rilis		Belum rilis		

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Pemalang, 2022
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, ➡ :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 9 indikator kinerja **Urusan Perindustrian** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK dan persentase industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI).
- 2) Terdapat 1 indikator dengan status akan tercapai, yaitu pertambahan jumlah industri kecil dan menengah.
- 3) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan persentase industri yang masuk dalam SIINAS. Hal ini disebabkan di Tahun 2021 tidak dilaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perindustrian serta pemantauan dan analisis ijin usaha industri kecil dan menengah.
- 4) Terdapat 1 indikator belum tersedia datanya, yaitu tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini.

6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan transmigrasi ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 1 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		1.495		15		15		15		100		15		1	
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	40		20		20		20		100		20		50		➡

Sumber : Disnaker Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian indikator kinerja **Urusan Transmigrasi** yaitu persentase transmigran yang ditempatkan adalah akan tercapai.

H. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.145
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat Daerah

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		33.155		38.246		39.008		39.008		100		39.008		117	
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana	59,59		98,12		57,87		98,12		169,6		98,12		164,66		★
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		19.751		2.774		17.219		17.219		100		17.219		87,18	
2	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Kesra yang terlaksana	94,40		98,48		91,93		98,48		107,12		98,48		104,32		★
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		9.602		1.664		2.637		2.637		100		2.637		27,46	
3	Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	72,13		100		100		100		100		100		138,64		★

Sumber : Setda Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 3 indikator kinerja **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah** yaitu persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum, di Bidang Kesra dan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana adalah telah tercapai.

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat DPRD ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 3 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.146
Capaian Kinerja Unsur Sekretariat DPRD

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		203.084,9		38.287,7		40.092,7		40.092,7		100		40.092,7		19,74	
1	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia	100		89,68		100		89,68		89,68		89,68		89,68		
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		60.752		14.792,3		16.076,7		16.076,7		100		16.076,7		26,46	
2	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia	80,15		82,83		74,12		82,83		111,75		82,83		103,34		
3	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia	89,15		43,00		86,85		43,00		49,51		43,00		48,23		

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang, 2022
Keterangan: :telah tercapai, :akan tercapai, :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 3 indikator kinerja **Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase layanan kepada DPRD serta dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia.

I. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Perencanaan ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 4 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.147
Capaian Kinerja Unsur Perencanaan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		5.486,7		712,7		422,7		422,7		100		422,7		7,7	
1	Tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD	100		100		100		100		100		100		100		

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		13.429,1		1.123,5		1.267,2		1.267,2		100		1.267,2		9,44	
2	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100		★
3	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100		★
4	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100		100		100		100		100		100		100		★

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🚧 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 4 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Perencanaan** yaitu tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD , tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM, bidang EkoSDA dan bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah telah tercapai.

2. Keuangan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Keuangan ditunjukkan melalui capaian 3 program dengan 17 indikator yang dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah, yaitu BPKAD dan Bapenda sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.148

Capaian Kinerja Unsur Keuangan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		2.515.991,5		508.751,8		477.268,5		477.268,5		100		477.268,5		18,97	
1	Persentase penyampaian raperda APBD sesuai ketentuan	100		75		100		75		75		75		75		🚧
2	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	60		69,51		60		69,51		115,85		69,51		115,85		★

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
3	Persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan	100		100		100		100		100		100		100		★
4	Persentase penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan	100		100		100		100		100		100		100		★
5	Persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan	100		100		100		100		100		100		100		★
6	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,20		10,35		13,14		10,35		78,77		10,35		78,41		🚦
7	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-4,86		-11,01		-4,9		-11,01		-26,54		-11,01		-26,54		🚦
8	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	60		69,51		60		69,51		115,85		69,51		115,85		★
9	Opini Laporan Keuangan	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		★
10	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	4,25		5,67		4,25		5,67		133,41		5,67		133,41		★
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		49.570		662,7		1.709,1		1.709,1		100		1.709,1		3,44	
11	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan BMD	100		100		100		100		100		100		100		★
12	Manajemen Aset	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		34.311,6		939,3		1.600		1.600		100		1.600		4,66	
13	Rasio PAD terhadap total pendapatan	13,50		13,881		13,5		13,881		102,82		13,881		102,82		★
14	Persentase WP tertagih terhadap data pajak daerah yang ditetapkan (PBB)	78		80,69		78		80,69		103,45		80,69		103,45		★
15	Rasio pajak daerah terhadap PAD	25		24,28		25		24,28		97,12		24,28		97,12		🚦
16	Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan	100		116,67		100		116,67		116,67		116,67		116,67		★
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5		-18,9532		5		-18,9532		-379,06		-18,9532		-379,06		🚦

Sumber : Bapenda Kabupaten Pemalang, 2022
 BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🚦 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 17 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Keuangan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 12 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase belanja urusan pemerintahan umum, persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan, persentase penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan, persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan, rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi *transfer*

- expenditures), opini laporan keuangan, rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya, persentase peningkatan tertib administrasi penatausahaan BMD, manajemen aset, rasio PAD terhadap total pendapatan, persentase WP tertagih terhadap data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) dan persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan.
- 2) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase penyampaian Raperda APBD sesuai ketentuan, rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, rasio pajak daerah terhadap PAD dan deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

3. Kepegawaian

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Kepegawaian ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 7 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.149
Capaian Kinerja Unsur Kepegawaian

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		36.600,6		3.217		3.636		3.636		100		3.636		9,9	
1	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	4,0		0,45		3,6		0,45		12,5		0,45		11,25		👉
2	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	2,0		1,44		1,6		1,44		90		1,44		72		👉
3	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	100		100		100		100		100		100		100		★
4	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	2,0		0		1,60		0		0		0		0		👉
5	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	100		82,29		100		82,29		82,29		82,29		82,29		👉
6	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	100		67		100		67		67		67		67		👉
7	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	90		230		70		230		328,57		230		255,56		★

Sumber : BKD Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: ★ :telah tercapai, 🟡 :akan tercapai, 👉 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 7 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Kepegawaian** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi dan persentase tingkat kedisiplinan ASN.
- 2) Terdapat 5 indikator dengan status perlu upaya keras, yaitu persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya, persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya, persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya, persentase layanan administrasi kepegawaian dan persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan.

4. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan melalui capaian 1 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.150
Capaian Kinerja Unsur Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		5.925		427		645		645		100		645		10,88	
1	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	86		81		82		82		100		82		95,35		➡
2	Indeks Inovasi Daerah	32,50		30,32 (inovatif)		30,5		30,5		100		30,5		93,85		➡

Sumber : Bappeda Kabupaten Pemalang, 2022
Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ➡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 indikator kinerja **Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan** yaitu persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan indeks inovasi daerah adalah akan tercapai.

Indeks inovasi daerah di Kabupaten Pemalang diukur mulai tahun 2019 dengan nilai 170 dan meningkat pada tahun 2020 dengan nilai 796 masuk kategori inovatif. Di Tahun 2021, metode pengukuran berubah dan tidak dapat disetarakan, Kabupaten Pemalang mendapat nilai sebesar **30,32** tetap masuk dalam kategori inovatif.

Untuk meningkatkan nilai Indeks Inovasi Daerah, perangkat daerah, kecamatan, pemerintahan desa, dan masyarakat telah didorong untuk melakukan inovasi. Di antaranya melalui lomba Kreativitas dan Inovasi tingkat Kabupaten Pemalang, maupun lomba inovasi pelayanan publik, dan inovasi-inovasi tersebut telah diterapkan. Inovasi-inovasi tersebut diantaranya adalah :

1. E-Commerce AMANDEWI (Disparpora);
2. Si Bolang Mahir Plus Plus (Si Buah Hati Lahir Pulang Membawa Akta Kelahiran Plus KK & KIA Plus JKN-KIS – Puskesmas Rowosari);
3. Gebrak Kaki (Gerakan Bersama Baca Buku KIA untuk Menekan Kematian Ibu – Puskesmas Kalimas);
4. SITIRTA (Sistem Informasi Terpadu Tirta Mulia – PDAM Kabupaten Pemalang);
5. PIMPRO (Pengendalian Multi Proyek – DPU TR Kab. Pemalang);
6. Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD – Disdukcatpil Kab. Pemalang);
7. SIEMAS (Sistem Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan -Bakesbangpol kab. Pemalang);
8. Batu Akik (bayar non tunai uji KIR Kendaraan – Dishub kab. Pemalang);
9. Sambatsung (Sistem Aduan Masyarakat Berbasis Elektronik Langsung – DPMPTSP Kb. Pemalang);

10. Aplikasi www.gelanganting.com (Gerakan penanggulangan Stunting – Desa Losari Kec. Ampelgading);
11. Aplikasi Anak Bunda (Aplikasi anak balita untuk data antropometri dengan kartu – Desa Bulakan kec. Belik);
12. Gemari Ceting Kayu (Gerakan Makan Ikan Cegah Stunting Kakang Mbakyu – Desa Kalirandu Kec. Petarukan);
13. Nasi Ceting (Nutrisi untuk cegah stunting – Desa Surajaya kec. Pemalang)
14. Klanting (Kelompok Laki-laki anti Stunting – Desa Tumbal Kec. Comal);
15. Buka Cawet (Basis Terpadu Keterbukaan Data Desa Cawet – desa Cawet Kec. Watukumpul);
16. SIPILKETOS (Sistem Pemilihan Ketua Osis – SMPN 1 Randudongkal);
17. POC TENNAS (pupuk organic cair tempe nasi nanas – Siti Rokhamah desa Gunungtiga Kec. Belik);
18. WEDUS SI DALANG (WISATA EDUKASI SENI DAN BUDAYA PEMALANG – Anggi Supriyono desa Gombong Kec. Belik);
19. FAN PLASMODIUM FLINDER AIR (Kipas Pembasmi Kuman Di Dalam Ruang – Maghfiroh & Muchsolih Desa Moga Kec. Moga);
20. TEPABINGLE (Teknologi Paving Biopori Single - Dias Fajar Fathan Al Azka siswa SMAN 2 Pemalang);
21. Salep Ketajamer (Limbah Daun Ketapang Gugur & Rimpang Jahe Merah - Susyaton Amanah, Kun Mustafid, Rofiatun Ikhsaniah siswa SMK PGRI 3 Randudongkal).

Adanya kerja sama dengan perguruan tinggi, beberapa UMKM di Kabupaten Pemalang telah diberikan fasilitasi dalam pengelolaan usahanya, dari kepemilikan perizinan, manajemen, bahkan digitalisasi pemasaran melalui marketplace.

J. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Kinerja penyelenggaraan unsur pengawas ditunjukkan melalui capaian 2 program dengan 2 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.151
Capaian Kinerja Unsur Pengawas

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		10.025		1.032,2		1.413,6		1.413,6		100		1.413,6		14,1	
1	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100		85		83		83		100		83		83		➡
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		8.425,5		960,3		623,7		623,7		100		623,7		7,4	
2	Cakupan pendampingan dan asistensi	100		80		80		80		100		80		80		➡

Sumber : Inspektorat Kabupaten Pemalang, 2022

Keterangan: 🟢:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🟡 :perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 2 indikator kinerja **Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan** yaitu cakupan penyelenggaraan pengawasan serta pendampingan dan asistensi adalah akan tercapai.

K. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Kinerja penyelenggaraan unsur kewilayahan ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		6.504		867,2		544,9		544,9		100		544,9		8,38	
1	Persentase pelayanan publik yang tersedia	87,30		90,56		87,3		90,56		103,73		90,56		103,73		★
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		58.096,9		8.364,4		1.625,1		1.625,1		100		1.625,1		2,79	
2	Persentase masyarakat desa yang aktif	96,79		95,69		95,36		95,69		100,35		95,69		98,86		➡
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		2.854		1.359,1		175,1		175,1		100		175,1		6,14	
3	Persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		8.582		498,7		796,8		796,8		100		796,8		9,28	
4	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani	100		100		100		100		100		100		100		★
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		9.424,5		1.685,7		736		736		100		736		7,8	
5	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik	84,49		72,63		71,88		72,63		101,04		72,63		85,96		➡

Sumber : Kecamatan, 2022

Keterangan: ★:telah tercapai, ➡ :akan tercapai, 🟡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, capaian realisasi 5 indikator kinerja **Unsur Kewilayahan** adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat 3 indikator dengan status telah tercapai, yaitu persentase pelayanan publik yang tersedia, persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan dan persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani.
- 2) Terdapat 2 indikator dengan status akan tercapai, yaitu persentase masyarakat desa yang aktif dan persentase desa bertata kelola pemerintahan baik.

L. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaraan unsur kesatuan bangsa dan politik ditunjukkan melalui capaian 5 program dengan 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

No	Indikator	Target RPJMD 2021-2026		Realisasi RKPD 2021		Target RKPD 2022		Realisasi RKPD 2022		Capaian RKPD 2022 (%)		Realisasi RKPD s/d 2022		Capaian RPJMD s/d 2022 (%)		Status
		K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp(juta)	K	Rp	K	Rp(juta)	K	Rp	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		2.520		1.179,3		620		620		100		620		24,6	
1	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	95		80,85		82		82		100		82		86,32		➡
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		16.063,3		1.597,1		1.318,5		1.318,5		100		1.318,5		8,2	
2	Persentase masyarakat yang paham politik	70		50		50		50		100		50		71,43		➡
	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		4.270		709,9		433		433		100		433		10,14	
3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan	100		65		70		70		100		70		70		➡
	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		3.400		79,2		30		30		100		30		0,88	
4	Persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	80		65		60		65		108,3		65		81,25		➡
	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		5.285		711,8		100		100		100		100		1,89	
5	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial	80		64,94		60		64,94		108,23		64,94		81,18		➡

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Pemalang, 2022
 Keterangan: ★:telah tercapai, ➡:akan tercapai, ➡:perlu upaya keras

Terhadap target akhir RPJMD 2021-2026, status capaian 5 indikator kinerja **Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik** yaitu persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan; paham politik; paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan; paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial; serta paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya adalah akan tercapai.

2.3 Rangkuman Evaluasi Kinerja Pembangunan

Kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pemalang diukur dari ketercapaian program pembangunan daerah dibandingkan dengan target yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021, dari 247 indikator program pembangunan daerah, sebanyak 105 indikator (42,51%) berstatus telah tercapai; 58 indikator (23,48%) berstatus akan tercapai; 83 indikator (33,6%) berstatus perlu upaya keras; dan 1 indikator (0,40%) data belum tersedia

Tabel 2.154
Rangkuman Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Pemalang
Tahun 2021

No	Status Pencapaian Indikator	Jumlah Indikator	%
1	Telah Tercapai (hijau)	105	42,52
2	Akan Tercapai (biru)	58	23,48
3	Perlu Upaya Keras (kuning)	83	33,60
4	Data Belum Tersedia	1	0,40
Total Indikator		247	100

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2021 bersumber dari isu strategis yang tercantum di RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dengan fokus kepada tema pembangunan Tahun 2023, yaitu **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**. Perumusan masalah perurusan dilakukan dengan melihat capaian indikator program di tiap urusan. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut dipetakan untuk menentukan isu strategis di Tahun 2023.

2.4.1. Permasalahan yang Berkaitan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

- a. Masih rendahnya kepatuhan terhadap Perda dan Perbup;
- b. Tingginya resiko bencana;
- c. Beberapa indikator SPM belum memenuhi target;
- d. Reformasi birokrasi belum dijalankan secara optimal;
- e. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- f. Masih tingginya kesenjangan gender;
- g. Mulai lunturnya kebudayaan daerah;
- h. Terdapat kelompok fanatik agama;
- i. Tingginya angka kemiskinan dan adanya kemiskinan ekstrem;
- j. Tingginya tingkat pengangguran;
- k. Masih rendahnya kemandirian desa;
- l. Masih terdapat ketimpangan antar wilayah;
- m. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi;
- n. Belum terpenuhinya ketersediaan infrastruktur wilayah dan permukiman yang layak;
- o. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

2.4.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Perlu dilaksanakannya pengelolaan pendidikan SD, SMP, PAUD, nonformal/kesetaraan dalam rangka pencapaian SPM
- b. Masih rendahnya angka partisipasi PAUD di tahun 2021, yaitu sebesar 68,9%
- c. Di tahun 2021 masih terdapat 4,8% anak usia SD yang tidak mengikuti pendidikan SD
- d. Di tahun 2021 masih terdapat 11,9% anak usia SMP yang tidak mengikuti pendidikan SMP
- e. Masih rendahnya partisipasi pendidikan kesetaraan di tahun 2021, yaitu sebesar 11,4%
- f. Belum optimalnya pengembangan kurikulum yang dilaksanakan di tahun 2021, yaitu sebesar 99,92%
- g. Di tahun 2021 belum ada SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal
- h. Belum optimalnya fasilitasi pendidik dan tenaga pendidik di tahun 2021, yaitu sebesar 93,74%
- i. Di tahun 2021 masih terdapat 0,06% pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang belum bersertifikat

2. Kesehatan

- a. Masih rendahnya daya tampung RS di tahun 2021, yaitu sebesar 0,088 per 1000 penduduk
- b. Masih rendahnya RS rujukan terakreditasi di tahun 2021, yaitu sebesar 77,78%
- c. Harus terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil
- d. Harus terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu bersalin
- e. Harus terpenuhinya pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- f. Harus terpenuhinya pelayanan kesehatan balita
- g. Masih rendahnya pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar di tahun 2021, yaitu sebesar 23,6%
- h. Masih rendahnya pelayanan kesehatan orang usia 15-29 tahun di tahun 2021, yaitu sebesar 47,0%
- i. Masih rendahnya pelayanan kesehatan orang usia > 60 tahun di tahun 2021, yaitu sebesar 30,1%
- j. Masih rendahnya pelayanan kesehatan penderita hipertensi di tahun 2021, yaitu sebesar 38,9%
- k. Masih rendahnya pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus di tahun 2021, yaitu sebesar 54,3%
- l. Di tahun 2021, masih terdapat 0,9% penderita ODGJ yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal
- m. Masih rendahnya pelayanan kesehatan penderita TBC di tahun 2021, yaitu sebesar 29,5%
- n. Masih rendahnya pelayanan deteksi dini HIV di tahun 2021, yaitu sebesar 58,7%

- o. Masih rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan di tahun 2021, yaitu sebanyak 195 nakes per seratus ribu penduduk
- p. Di tahun 2021, masih terdapat 11% sarana kefarmasian alkes dan PIRT yang belum memenuhi standar
- q. Masih rendahnya desa siaga yang aktif di tahun 2021, yaitu sebesar 4,95%

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya jaringan sumber daya air dalam kondisi baik di tahun 2021, yaitu sebesar 70,26%
- b. Masih terdapat kawasan permukiman rawan banjir yang belum terlindungi infrastruktur pengendalian banjir
- c. Masih terdapat kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, akresi yang belum terlindungi infrastruktur pengaman pantai
- d. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi di tahun 2021, yaitu sebesar 70,26%
- e. Di tahun 2021, masih terdapat 9,3% penduduk yang belum memiliki akses air minum
- f. Di tahun 2021, masih terdapat 9,3% rumah tangga yang belum memiliki akses air minum melalui jaringan SPAM
- g. Masih rendahnya sarana prasarana persampahan sesuai standar di tahun 2021, yaitu sebesar 19,58%
- h. Di tahun 2021, masih terdapat 5,4% penduduk yang belum memiliki akses pengelolaan limbah domestik
- i. Di tahun 2021, masih terdapat 5,4% rumah tangga yang belum memiliki akses pengolahan air limbah domestik
- j. Masih rendahnya jaringan drainase dalam kondisi baik di tahun 2021, yaitu sebesar 75,20%
- k. Belum tertibnya bangunan gedung pemerintah daerah
- l. Masih terdapat bangunan dan lingkungan yang tidak sesuai dengan peraturan perencanaan tata bangunan
- m. Masih rendahnya kepatuhan IMB di tahun 2021, yaitu sebesar 1%
- n. Masih rendahnya panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di tahun 2021, yaitu sebesar 68,28%
- o. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan kabupaten di tahun 2021, yaitu sepanjang 522,86 km
- p. Masih rendahnya penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi
- q. Di tahun 2021, belum terdapat tenaga operator/teknisi/analisis bersertifikat
- r. Perlu adanya pencegahan terjadinya kecelakaan konstruksi
- s. Terdapat aturan rencana tata ruang yang harus dipatuhi berupa RTRW dan RDTR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Terdapat korban bencana yang membutuhkan pembangunan rumah layak huni
- b. Terdapat korban bencana yang membutuhkan rehabilitasi rumah layak huni
- c. Terdapat masyarakat terdampak relokasi yang membutuhkan pembangunan rumah layak huni
- d. Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di tahun 2021, yaitu sebesar

0,97%

- e. Masih rendahnya penanganan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di tahun 2021, yaitu baru tertangani sebesar 25,68%
- f. Masih rendahnya RTLH yang tertangani di tahun 2021, yaitu sebesar 25,51%
- g. Masih rendahnya pengurangan jumlah unit RTLH di tahun 2021, yaitu hanya berkurang sebanyak 17,25%
- h. Belum optimalnya kelengkapan PSU pada kawasan permukiman di tahun 2021, yaitu baru sebanyak 0,032% perumahan yang dilengkapi PSU

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a. Perlunya upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- b. Terdapat Perda dan Perbup mengandung sanksi yang harus ditegakkan
- c. Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di tahun 2021, yaitu sebesar 64,41%
- d. Sampai dengan tahun 2021 belum ada desa/kelurahan tanggap kebakaran yang terbentuk
- e. Masih tingginya ancaman bencana
- f. Di tahun 2021, masih terdapat 6,47% penduduk yang belum memperoleh layanan informasi rawan bencana
- g. Di tahun 2021, masih terdapat 6,39% penduduk yang belum memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- h. Di tahun 2021, masih terdapat 0,64% penduduk yang belum memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- i. Masih rendahnya desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk di tahun 2021, yaitu sebanyak 4,95%

6. Sosial

- a. Perlunya pemberdayaan PSKS
- b. Masih terdapat warganegara migran yang menjadi korban kekerasan
- c. Harus terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti
- d. Harus terpenuhinya jaminan perlindungan sosial untuk penduduk sejahtera satu dan dua
- e. Di tahun 2021, masih terdapat 16,17% korban bencana alam dan sosial yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
- f. Perlunya pemeliharaan taman makam pahlawan

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Perlu kontrol agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Pemalang sesuai dengan rencana tenaga kerja
- b. Masih rendahnya tenaga kerja bersertifikat kompetensi di tahun 2021, yaitu sebanyak 63,02%
- c. Perlu ditingkatkannya produktivitas tenaga kerja
- d. Di tahun 2021, masih terdapat 33,01% tenaga kerja yang belum ditempatkan (dalam dan luar negeri)
- e. Masih rendahnya perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak di tahun 2021, yaitu sebanyak 19,76%

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Masih rendahnya penganggaran responsif gender, di tahun 2021 hanya sebesar 1,58% dari total APBD
- b. Di tahun 2021, masih terdapat 9,68% perempuan yang menjadi korban kekerasan
- c. Di tahun 2021, masih terjadi pernikahan dini yaitu sebanyak 5,32%
- d. Perlunya data gender dan anak bagi OPD
- e. Masih rendahnya desa/kelurahan layak anak di tahun 2021, yaitu sebanyak 14,14%
- f. Masih terdapat anak yang memerlukan perlindungan khusus

3. Pangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan di tahun 2021, dimana hanya sebanyak 16,05% yang aktif
- b. Perlunya disiapkan cadangan pangan untuk bencana
- c. Masih terdapat desa rawan pangan, dimana di tahun 2021 hanya menurun sebanyak 14,86%
- d. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengkonsumsi pangan segar dan aman

4. Pertanian

- a. Masih terjadi sengketa pertanahan yang memerlukan mediasi
- b. Perlunya pengawasan agar pemanfaatan tanah sesuai dengan peruntukannya
- c. Masih terdapat Tanah Obyek Landreform yang siap didistribusikan
- d. Adanya kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
- e. Adanya kebutuhan lokasi pembangunan untuk penanaman modal
- f. Di tahun 2021, masih terdapat 38,93% bidang tanah yang belum bersertifikat

5. Lingkungan Hidup

- a. Perlunya disusun dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan
- b. Masih terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pemalang di tahun 2021, yaitu sebesar 69,65
- d. Rendahnya indeks kualitas air di tahun 2021, yaitu sebesar 50
- e. Belum optimalnya indeks kualitas udara di tahun 2021, yaitu sebesar 86,26
- f. Rendahnya indeks tutupan lahan di tahun 2021, yaitu sebesar 72,66
- g. Perlu ditumbuhkannya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
- h. Pentingnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
- i. Perlunya pengawasan dan pembinaan kegiatan lingkungan hidup
- j. Masih rendahnya ketaatan penanggungjawab kegiatan izin lingkungan di tahun 2021 yaitu sebesar 26,58%
- k. Perlunya edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat
- l. Perlunya penghargaan kepada penggiat lingkungan hidup
- m. Masih adanya pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup
- n. Di tahun 2021 masih terdapat 19% sampah yang belum terangkut

- o. Masih rendahnya pengelolaan sampah di tahun 2021, yaitu sebesar 56,30%

6. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Di tahun 2021 masih terdapat 21,28% masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan
- b. Di tahun 2021 masih terdapat 0,19% masyarakat yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil
- c. Masih rendahnya Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama di tahun 2021, yaitu sebanyak 10 OPD
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan di tahun 2021, yaitu masih sebesar 98,02%

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Belum optimalnya penataan desa di tahun 2021, dimana baru 4 desa yang sudah masuk dalam kategori desa tertata
- b. Masih rendahnya desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa di tahun 2021, yaitu masih sebanyak 79 desa
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di tahun 2021 sehingga baru sebanyak 3 desa yang mempunyai administrasi pemerintahan baik
- d. Masih rendahnya cakupan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) di tahun 2021, yaitu sebesar 16,09%

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Di tahun 2021, masih terdapat 35% PUS yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun
- b. Belum optimalnya prevalensi kontrasepsi modern di tahun 2021, yaitu sebesar 70,25%
- c. Masih rendahnya PUS ber-KB yang diberdayakan di tahun 2021, yaitu sebanyak 14,36%

9. Perhubungan

- a. Perlunya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas
- b. Perlunya pengaturan penyelenggaraan angkutan jalan
- c. Masih tingginya kepadatan lalu lintas di tahun 2021, yaitu sebesar 0,32
- d. Masih rendahnya konektivitas Kabupaten Pemalang di tahun 2021, yaitu sebesar 77,86
- e. Di tahun 2021, baru 70% syarat pembangunan pelabuhan yang sudah terpenuhi

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Masih rendahnya ketersediaan informasi publik di tahun 2021, yaitu sebesar 70%
- b. Masih rendahnya penduduk yang mengakses informasi publik di tahun 2021, yaitu sebesar 5%
- c. Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di tahun 2021, yaitu sebesar 41,18%
- d. Masih rendahnya masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas di tahun 2021, yaitu sebanyak 51,30%
- e. Masih rendahnya ketersediaan informasi tentang sumber daya untuk

- pelayanan di tahun 2021, yaitu sebesar 50%
- f. Masih rendahnya akses publik terhadap informasi keuangan daerah di tahun 2021, yaitu sebesar 40%
- g. Masih rendahnya *network* terintegrasi di tahun 2021, yaitu sebesar 70,73%
- h. Di tahun 2021, masih terdapat 12 OPD yang belum terhubung akses internet yang disediakan Diskominfo

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Perlunya pelaksanaan perluasan pelayanan koperasi
- b. Di tahun 2021 sebanyak 70,96% koperasi tidak aktif
- c. Masih rendahnya koperasi yang berkualitas di tahun 2021, yaitu sebanyak 28,89%
- d. Di tahun 2021, hanya sebanyak 30,25% KSP/USP dinyatakan sehat
- e. Masih rendahnya anggota/karyawan koperasi yang terlatih di tahun 2021, yaitu sebanyak 18,7%
- f. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro di tahun 2021, yaitu sebesar 7,75%
- g. Di tahun 2021, hanya sebanyak 25,79% usaha mikro yang menjadi wirausaha
- h. Belum optimalnya pembinaan kepada UMKM yang dilaksanakan di tahun 2021, yaitu hanya sebesar 1,49%

12. Penanaman Modal

- a. Penurunan jumlah investor yang masuk di Kabupaten Pemalang di tahun 2021, yaitu minus 40%
- b. Tidak dilaksanakannya promosi penanaman modal di tahun 2021
- c. Rendahnya peningkatan investasi di tahun 2021, yaitu sebesar 3,13%
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non peijinan penanaman modal di tahun 2021 yaitu sebesar 98,71%
- e. Di tahun 2021, masih terdapat 14,29% pelaku usaha yang tidak memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu
- f. Perlunya pelayanan perijinan yang prima

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Masih terdapat 8,7% organisasi kepemudaan yang tidak aktif di tahun 2021
- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di tahun 2021 hanya sebesar 0,05%
- c. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 2021 hanya sebesar 19,89%
- d. Masih rendahnya prestasi olahraga di tahun 2021 yaitu sebesar 47,83%
- e. Di tahun 2021, tidak terdapat medali olah raga yang dimenangkan Kabupaten Pemalang
- f. Masih rendahnya anggota pramuka yang dibina di tahun 2021 yaitu sebanyak 3,57%

14. Statistik

- a. Di tahun 2021, baru tersedia sebanyak 22% data statistik sektoral yang sesuai standart
- b. Pentingnya data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan perangkat daerah
- c. Pentingnya data statistik dalam evaluasi pembangunan perangkat daerah

15. Persandian

- a. Di tahun 2021, baru sebanyak 20% konten informasi yang telah diamankan
- b. Masih rendahnya tingkat keamanan informasi pemerintah di tahun 2021, yaitu sebesar 20%

16. Kebudayaan

- a. Perlunya pengelolaan warisan budaya tak benda
- b. Perlunya pengelolaan sejarah Pemalang
- c. Perlunya pengelolaan warisan budaya benda

17. Perpustakaan

- a. Masih minimnya perpustakaan yang sudah sesuai standart nasional di tahun 2021, yaitu sebanyak 1,69%
- b. Masih rendahnya nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di tahun 2021 yaitu sebesar 54,32
- c. Di tahun 2021 tidak dilaksanakan pelestarian naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara

18. Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan arsip, dimana di tahun 2021 hanya sebanyak 74% arsip yang terkelola
- b. Belum optimalnya perlindungan dan penyelamatan arsip, dimana di tahun 2021 hanya sebanyak 4,16% arsip yang dapat dilindungi
- c. Di tahun 2021 tidak terdapat pengajuan izin penggunaan arsip tertutup

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Di tahun 2021, masih terdapat 33% TPI di Kabupaten Pemalang yang belum memenuhi standart
- b. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana budidaya di tahun 2021, yaitu sebesar 18%
- c. Masih rendahnya peningkatan pengawasan perikanan umum daratan di tahun 2021, yaitu sebesar 4%
- d. Masih rendahnya unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan di tahun 2021, yaitu sebesar 53,87%

2. Pariwisata

- a. Masih rendahnya kunjungan obyek wisata di tahun 2021, yaitu sebesar 49,60%
- b. Di tahun 2021 tidak terdapat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pemalang
- c. Menurunnya perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Pemalang di tahun 2021 yaitu sebanyak minus 8,42%
- d. Masih rendahnya tingkat hunian akomodasi di tahun 2021 yaitu sebesar 21,19%
- e. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2021 yaitu sebesar 0,8%
- f. Masih rendahnya PAD tahun 2021 yang berasal dari retribusi pariwisata yaitu sebesar 0,81%
- g. Perlunya promosi obyek wisata yang ada
- h. Di tahun 2021, hanya sebesar 40% sarana dan prasarana ekraf yang

dimanfaatkan

- i. Di tahun 2021, hanya sebanyak 25% tenaga kerja di sektor pariwisata yang sudah disertifikasi

3. Pertanian

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pertanian yang tersedia, dimana di tahun 2021 baru tercukupi sebanyak 80%
- b. Di tahun 2021, hanya sebanyak 20% prasarana pertanian dalam kondisi baik
- c. Masih terdapat kasus penyakit hewan menular di tahun 2021
- d. Dari kejadian bencana pertanian yang terjadi di tahun 2021, hanya sebanyak 20% yang dapat terfasilitasi
- e. Perlunya peningkatan layanan perijinan usaha pertanian yang prima
- f. Di tahun 2021, hanya sebanyak 5% kelompok tani yang aktif

4. Perdagangan

- a. Masih rendahnya pelaku usaha yang dapat diawasi perijinannya di tahun 2021 yaitu sebanyak 0,5%
- b. Perlunya fasilitasi perijinan dari pengajuan pelaku usaha
- c. Di tahun 2021 tidak dilaksanakan penilaian terhadap sarana distribusi perdagangan
- d. Perlunya dijaga stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
- e. Belum optimalnya kinerja realisasi pupuk di tahun 2021, yaitu sebesar 85,94%
- f. Perlunya peningkatan pertumbuhan nilai ekspor
- g. Masih rendahnya alat-alat ukur takar timbang yang di tera ulang di tahun 2021, yaitu sebanyak 19,84%
- h. Di tahun 2021, baru sebanyak 30% pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya

5. Perindustrian

- a. Di tahun 2021, tidak melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan perindustrian
- b. Masih rendahnya pencapaian sasaran pembangunan industri di tahun 2021, yaitu sebesar 62,5%
- c. Di tahun 2021, pertambahan jumlah industri kecil dan menengah hanya sebesar 4,2%
- d. Pentingnya fasilitasi perijinan usaha industri
- e. Di tahun 2021 tidak dilaksanakan pemantauan dan pengawasan ijin industri
- f. Masih rendahnya industri yang masuk ke dalam SIINAS di tahun 2021, yaitu sebanyak 17,5%
- g. Belum optimalnya ketersediaan informasi industri

6. Transmigrasi

- a. Masih terdapat 80% transmigran yang belum ditempatkan

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang administrasi umum di tahun 2021, yaitu sebesar 98,12%

- b. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang kesejahteraan rakyat di tahun 2021, yaitu sebesar 98,48%
- c. Pentingnya koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya dukungan untuk layanan DPRD di tahun 2021, yaitu sebesar 89,68%
- b. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD di tahun 2021, yaitu sebesar 82,83%
- c. Belum optimalnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD di tahun 2021, yaitu sebesar 43%

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a. Perlu dijaga keselarasan antara indikator kinerja RKPD dengan indikator kinerja RPJMD
- b. Perlu dijaga keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang PPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- c. Perlu dijaga keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang EkoSDA dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- d. Perlu dijaga keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah rumpun bidang IPW dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah

2. Keuangan

- a. Penyampaian Raperda APBD belum sesuai ketentuan
- b. Perlunya dialokasikan belanja urusan pemerintahan umum
- c. Perlunya dijaga agar SP2D terbit sesuai ketentuan
- d. Perlunya dijaga agar penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan
- e. Perlunya dijaga agar penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan
- f. Masih tingginya alokasi belanja pegawai
- g. Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total
- h. Perlunya dijaga kualitas laporan keuangan daerah
- i. Masih terdapat anggaran sisa dari tahun sebelumnya
- j. Perlunya dijaga tertib administrasi penatausahaan BMD
- k. Perlunya ditingkatkan manajemen aset daerah
- l. Masih rendahnya rasio PAD terhadap total pendapatan di tahun 2021, yaitu sebesar 14,03%
- m. Di tahun 2021, masih terdapat 19,31% wajib pajak belum tertagih dari data pajak daerah
- n. Masih rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD di tahun 2021, yaitu sebesar 24,28%
- o. Perlunya disusun kebijakan pendapatan
- p. Masih tingginya deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN di tahun 2021, yaitu sebesar 0,45%
- b. Masih rendahnya ASN yang meningkatkan kualifikasi pendidikannya di tahun 2021, yaitu hanya sebanyak 1,44%
- c. Pentingnya penilaian kinerja aparatur
- d. Di tahun 2021 tidak dilaksanakan evaluasi kinerja pejabat pimpinan tinggi administrator dan pengawas
- e. Belum optimalnya layanan administrasi kepegawaian di tahun 2021, yaitu sebesar 82,29%
- f. Di tahun 2021, hanya sebesar 67% sistem kepegawaian yang telah dikembangkan
- g. Perlunya dijaga kedisiplinan ASN

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya penggunaan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di tahun 2021, yaitu masih sebesar 81%
- b. Belum optimalnya inovasi daerah yang dilakukan, yaitu di tahun 2021 Kabupaten Pematang Jaya masuk dalam level kedua (inovatif) indeks inovasi daerah

F. Unsur Pengawas

1. Inspektorat

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pengawasan di tahun 2021, yaitu masih sebesar 85%
- b. Belum optimalnya pendampingan dan asistensi kepada instansi yang membutuhkan di tahun 2021, yaitu masih sebesar 80%

G. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Belum optimalnya pelayanan publik yang dilaksanakan kecamatan di tahun 2021, yaitu sebesar 90,56%
- b. Belum optimalnya peran serta masyarakat desa dan kelurahan di tahun 2021, yaitu sebesar 95,69%
- c. Perlu koordinasi dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan
- d. Perlu koordinasi dalam penanganan potensi konflik di tingkat desa dan kecamatan
- e. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terkait tata kelola pemerintahan desa, dimana di tahun 2021 baru sebanyak 72,63% desa yang sudah bertata kelola pemerintahan baik

H. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Masih banyak masyarakat yang belum paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, di tahun 2021 baru sebanyak 80,85%

- b. Masih banyak masyarakat yang belum paham politik, di tahun 2021 baru sebanyak 50%
- c. Kurangnya peran organisasi kemasyarakatan dalam penanganan masalah sosial kemasyarakatan, di tahun 2021 baru sebanyak 65%
- d. Masih banyak masyarakat yang belum paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial, di tahun 2021 baru sebanyak 64,94%
- e. Masih banyak masyarakat yang belum paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di tahun 2021 baru sebanyak 65%

2.4.3. Isu strategis Pembangunan

Perumusan isu strategis di Tahun 2023 didapatkan dari pemetaan permasalahan perurutan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK); arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023; serta RKP 2023. Adapun permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar.**

Dalam satu dekade, pembangunan manusia di Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan yang dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Kabupaten Pemalang Tahun 2011 sebesar 59,66 meningkat menjadi 66,56 pada Tahun 2021. IPM Kabupaten Pemalang mengalami peningkatan dari kategori rendah menjadi sedang sejak Tahun 2012. Walaupun meningkat, IPM Kabupaten Pemalang masih sangat jauh dari IPM Jawa Tengah yaitu sebesar 72,16 pada Tahun 2021. Beberapa hal yang menyebabkan kualitas SDM belum optimal :

a) Pendidikan yang belum optimal

Beberapa permasalahan di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 di bidang pendidikan adalah masih rendahnya rata-rata lama sekolah sebesar 6,45 tahun dan masih rendahnya harapan lama sekolah sebesar 11,96 tahun. Upaya mewujudkan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pemalang menghadapi hambatan serius karena berdasarkan data Disdukcatpil Kabupaten Pemalang terdapat sekitar 35 ribu anak usia 7–18 tahun yang tidak sekolah (ATS) dengan beragam penyebab.

b) Derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal

Beberapa permasalahan di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 di bidang kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sebesar 73,53 tahun lebih rendah dari UHH Jawa Tengah sebesar 74,47 tahun. Masih ditemukannya angka kematian pada ibu melahirkan sebanyak 129,34 per 100.000 kelahiran, naik dari Tahun 2020 sebesar 58,85. Kenaikan tersebut diakibatkan banyak ibu melahirkan yang terkena Covid-19. Masih ditemukan pula angka kematian bayi sebesar 4,4 per 1.000 kelahiran dan angka kematian balita sebesar 4,85 per 1.000 kelahiran. Angka kesakitan di Kabupaten Pemalang masih cukup tinggi baik penyakit menular (DBD, TBC, HIV AIDS, kusta dan filariasi) maupun penyakit tidak menular (hipertensi, *diabetes mellitus*, kanker, dan jantung) serta masih ditemukannya kasus stunting sebesar 10,35%. Masalah lainnya adalah perilaku masyarakat yang kurang sehat, lingkungan yang tidak sehat

dan pelayanan yang belum optimal. Masih berlangsungnya pandemi Covid-19 merupakan tantangan untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat.

c) Tenaga kerja yang belum mampu menjawab kebutuhan pasar

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pemalang semakin membaik. Pada Tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pemalang sebesar 6,71% atau sebanyak 43.288 orang, turun 0,93% dibandingkan Tahun 2020. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 978.908 orang terdapat 8,10% atau sebanyak 79.300 penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Walaupun membaik, TPT di Kabupaten Pemalang masih lebih tinggi dibanding Jawa Tengah. Dinas Tenaga Kerja memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

d) Kualitas pelayanan dasar belum optimal

Pada Tahun 2021 masyarakat belum mendapat pelayanan dasar secara maksimal terlihat dari belum semua SPM tercapai 100%, meliputi angka partisipasi PAUD masih 68,57%; angka partisipasi pendidikan dasar masih 95,19%; angka partisipasi sekolah menengah pertama masih 88,06%; angka partisipasi pendidikan kesetaraan masih 8,85%; layanan kesehatan warganegara usia pendidikan dasar masih 23,62%; layanan kesehatan warganegara produktif masih 47,02%; layanan kesehatan warganegara usia lanjut masih 30,12%; layanan kesehatan penderita hipertensi masih 38,92%; layanan kesehatan penderita diabetes mellitus masih 54,31%; layanan kesehatan ODGJ masih 99,14%; layanan kesehatan terduga TBC masih 29,48%; layanan kesehatan warganegara resiko terinfeksi HIV masih 58,69%; penyediaan akses air minum masih 90,66%; penyediaan akses pengelolaan limbah domestik masih 94,61%; warganegara yang memperoleh layanan akibat penegakkan Perda dan Perkada masih 60%; warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana masih 93,53%; warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana masih 93,61%; warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masih 99,36%; warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masih 96,98%; penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti masih 20,21%; anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti masih 36,79%; warganegara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti masih 39,80%; gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti masih 28,10%; dan korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial masih 83,83%.

e) Kualitas perempuan, anak dan pemuda yang masih belum optimal

Kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Pemalang belum terlaksana secara optimal. Capaian IPG Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebesar 86,49 berada di bawah capaian Jawa Tengah sebesar 92,48 dan Nasional sebesar 91,27. Hal ini menunjukkan upaya pemberdayaan perempuan masih belum optimal, masih terjadi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

- f) Pemajuan budaya dan peningkatan minat baca

Minat baca menjadi salah satu alat ukur terkait peningkatan kualitas SDM. Minat baca dapat dilihat dari nilai budaya literasi dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Pada Tahun 2021 capaian nilai budaya literasi Kabupaten Pemalang sebesar 22,38 dan indeks pembangunan literasi masyarakat sebesar 9,96 yang berada pada klasifikasi sangat rendah.

2. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi

Terjadinya pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap kegiatan perekonomian Kabupaten Pemalang. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 mengalami kontraksi (penurunan) dibanding Tahun 2019. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,80% dan di Tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif sebesar minus 0,61%. Di tahun 2021, perekonomian sudah mulai membaik ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19%. Tiga sektor unggulan Kabupaten Pemalang adalah pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.

Pandemi Covid-19 yang belum dipastikan kapan akan berakhir menjadi salah satu ancaman paling besar bagi perekonomian daerah saat ini. Isu lain adalah bagaimana terus memperkuat sektor-sektor unggulan Kabupaten Pemalang agar tetap tumbuh positif karena merupakan kontributor terbesar pada perekonomian Kabupaten Pemalang, serta bagaimana memperkuat sektor koperasi dan UKM yang juga menjadi penyokong perekonomian daerah saat terjadi Pandemi Covid-19, maupun sektor-sektor lainnya yang hampir seluruhnya terdampak pandemi Covid-19 seperti pariwisata, perhotelan, transportasi dan investasi.

3. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah

Kesenjangan antar wilayah disebabkan oleh infrastruktur yang belum optimal, layanan perhubungan antar wilayah yang belum terkoneksi dan kualitas lingkungan hidup yang belum optimal.

Capaian infrastruktur jalan kondisi mantap (baik dan cukup) Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 sebesar 68,28% turun sebesar 0,38% dari Tahun 2020 sebesar 68,66%. Cakupan jaringan irigasi dalam kondisi baik pada Tahun 2021 sebesar 70,26% turun sebesar 2,78% dari Tahun 2020 sebesar 73,04%. Jumlah data base backlog Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sekitar 70.000 unit dan telah layak huni sebesar 25,51% pada Tahun 2021. Cakupan akses air minum yang layak sebesar 90,66% pada Tahun 2021. Cakupan akses limbah domestik (septic tank) pada Tahun 2021 sebesar 94,61%. Perlu upaya seksama untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian layanan infrastruktur dalam kondisi keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Capaian layanan perhubungan melalui pelayanan angkutan dilihat dari rasio konektivitas. Pada tahun 2021 rasio konektivitas Kabupaten Pemalang sebesar 77,86 naik sebesar 7,86 dari Tahun 2020 sebesar 70,00.

Kualitas lingkungan hidup yang baik dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD). Pada Tahun 2021, IKLHD Kabupaten Pemalang sebesar 69,65, lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar 68,92. Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan mengelola sampah.

4. Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah

Reformasi birokrasi belum terlaksana secara optimal karena Indeks Profesional Pegawai belum mencapai standar yang ditentukan yaitu sebesar 64,29 (rendah) pada Tahun 2021, ketersediaan informasi publik pada Tahun 2021 juga masih belum optimal yaitu sebesar 70%. Pengelolaan keuangan sudah mencapai WTP, namun masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Begitu juga dengan maturitas SPIP dan akuntabilitas APIP, walaupun sudah mencapai level 3, perlu dilakukan peningkatan untuk mengurangi tingkat kesalahan dan korupsi di Kabupaten Pemalang.

Pelayanan publik yang belum optimal menyebabkan terhambatnya pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat. Namun, belum semua perangkat daerah yang memberikan pelimpahan kewenangan ke kecamatan.

5. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pemalang pada Tahun 2021 mengalami kenaikan 0,54 poin dibandingkan Tahun 2020 yaitu dari 16,02% menjadi 16,56%. Jumlah penduduk miskin di Tahun 2021 bertambah sebanyak 6,05 ribu orang dibandingkan Tahun 2020 yaitu dari 209,03 ribu orang menjadi 215,08 ribu orang. Kabupaten Pemalang merupakan kabupaten termiskin keempat se Provinsi Jawa Tengah.

Persoalan kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih bermuara pada hal mendasar antara lain menyangkut akses terhadap kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi yang berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, serta tata kelola penanggulangan kemiskinan antara lain terkait data dan ketepatan sasaran intervensi. Dampak pandemi Covid-19 juga masih menjadi permasalahan yang harus tetap diwaspadai dan diantisipasi karena dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten Pemalang.

Pandemi Covid-19 dapat memunculkan kemiskinan baru setiap waktu. Isu strategis lain terkait penanggulangan kemiskinan adalah mandatori kebijakan pemerintah pusat untuk mencapai tingkat kemiskinan ekstrem nol (*zero*) persen pada Tahun 2024. Sesuai dengan kondisi kemiskinan ekstrem saat ini (9,52%) atau 124,27 ribu jiwa, Kabupaten Pemalang menjadi kabupaten termiskin ekstrem kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Mandat kebijakan ini harus dikawal dengan baik mengingat tantangan PKE sangat kompleks, karena merupakan akar dari kelompok masyarakat miskin dengan ciri utama kelompok masyarakat usia tidak produktif, tanpa keahlian dan pendidikan rendah.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Munculnya pandemi Covid-19 memiliki dampak negatif, tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga aktivitas ekonomi masyarakat. Tahun 2020 sebagai masa paling berat dimana resesi ekonomi terjadi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi (minus) baik nasional maupun daerah. Tahun 2021 menjadi momentum untuk pemulihan baik dari aspek ekonomi maupun kesehatan sehingga tahun berikutnya akan menjadi tonggak percepatan pertumbuhan ekonomi.

Isu terkait iklim investasi sebagai dampak putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menjadi perhatian. Meskipun Pemerintah Pusat telah memberikan kepastian kepada para pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri, bahwa investasi yang telah, sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin, perlu ditindaklanjuti dengan upaya nyata di daerah untuk dapat mengawal proses investasi tersebut sehingga dapat terealisasi dan berdampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah. Upaya nyata pengawalan investasi tersebut telah dilaksanakan di Kabupaten Pemalang, terlihat dari peningkatan investasi yang masuk selama Tahun 2021 sebesar 3,13%, terdapat 21 investor berskala nasional yang masuk dan peningkatan jumlah investasi berskala nasional menjadi sebesar Rp171,69 milyar. Hal ini berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja sehingga di Tahun 2021 terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sebesar 6,71% dari sebesar 7,64% di Tahun 2020.

Pasca pandemi Tahun 2020, kebijakan pembangunan Nasional difokuskan kepada upaya pemulihan dan transformasi ekonomi, pemerataan wilayah, ketahanan sosial ekonomi dan penanganan bencana. Arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah yang mendukung kebijakan pusat difokuskan kepada pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE); pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah. Sedangkan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Pemalang guna mendukung dan sinergi dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 difokuskan pada penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana; pembangunan SDM berkarakter budaya unggul, penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE); pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI); penguatan kebijakan pemerataan

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur; dan pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

Tahun 2023 adalah tahun kedua implementasi RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026. Berdasarkan RPJMD serta mengacu pada arah kebijakan pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan capaian pembangunan Kabupaten Pemalang pada tahun sebelumnya, maka target pembangunan Kabupaten Pemalang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Capaian Pembangunan Kabupaten Pemalang
Tahun 2019-2023

No	Indikator Pembangunan Daerah	Capaian			Target/Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	PDRB ADHK (Rp.miliar)	18.267,19	18.155,59	18.916,26	19.604,81	20.332,15
2.	PDRB (ADHB) perkapita (Rp.ribu)	19.560	17.540	18.490	14.600	14.700
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,80	-0,61	4,19	3,64	3,71
4.	TPT (%)	6,45	7,64	6,71	7,35	7,20
5.	Kemiskinan (%)	15,41	16,02	16,56	15,60	15,39
6.	Inflasi (%)	2,71	2,36	1,53	2,36	2,36
7.	IPM	66,32	66,32	66,56	67,39	68,17

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2022
RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pemalang berdasarkan *baseline* Tahun 2019 terus mengalami peningkatan sebesar 5,80% dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp. 18,267 Triliun, kemudian pada Tahun 2020, akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,61%. Selanjutnya, di Tahun 2021 ekonomi daerah tumbuh moderat sebesar 4,19% dan diproyeksikan di Tahun 2022 tumbuh menjadi sebesar 3,64% dan di tahun perencanaan yaitu Tahun 2023, ekonomi diproyeksikan akan tumbuh dikisaran 3,71%. Pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan merupakan hasil kontribusi pertumbuhan yang progresif utamanya dari sektor pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan serta sektor perdagangan dimana ketiga sektor tersebut merupakan komponen pembentuk PDRB paling dominan selama ini.

Pendapatan perkapita yang direpresentasikan dengan PDRB perkapita ADHB masyarakat Kabupaten Pemalang pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp19,56 juta dan diproyeksikan pada Tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14,60 juta dan Rp14,70 juta atau meningkat rata-rata sebesar 0,68% per tahun, dan Tahun 2020 menjadi tahun *kontraksi* pertumbuhan pendapatan perkapita yaitu sebesar -10,33% karena pandemi Covid-19.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan kemiskinan. Capaian TPT dan kemiskinan pada Tahun 2019 masing-masing sebesar 6,45% dan 15,41%, dan pada Tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 7,64% dan 16,02%; Tahun 2021 terjadi penurunan pengangguran dan peningkatan kemiskinan sehingga menjadi masing-masing sebesar 6,71% dan 16,56%. Sedangkan di Tahun 2022, TPT dan kemiskinan diproyeksikan akan semakin membaik/mengalami penurunan yaitu menjadi 7,35% dan 15,60% dan proyeksi di tahun perencanaan (2023) diharapkan kembali menurun menjadi sebesar 7,20% dan 15,39%. Pembangunan

harus juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditunjukkan dengan semakin tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai manifestasi dari pembangunan manusia. Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 IPM Kabupaten Pemalang sebesar 66,32 dan Tahun 2020 di tengah pandemi, IPM stagnan sebesar 66,32. Di Tahun 2021, IPM meningkat menjadi sebesar 66,56 dan pada 2022 IPM ditargetkan menjadi sebesar 66,39 dan 2023 menjadi sebesar 68,17.

Angka inflasi sebagai salah satu komponen indikator ekonomi makro pada Tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 2,71% dan 2,36%. Namun, mengalami penurunan di Tahun 2021 menjadi sebesar 1,53%. Hingga Tahun 2023, diproyeksikan Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu menjaga inflasi tahunan pada rata-rata kisaran 2,36% guna mendukung kondusivitas perekonomian daerah baik dari sisi permintaan maupun penawaran (*supply and demand perspectives*) khususnya terhadap pengendalian harga-harga barang kebutuhan yang masuk kategori *non administered prices* (harga barang kebutuhan yang tidak ditentukan oleh pemerintah atau berdasarkan mekanisme pasar).

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat mendorong ketercapaian indikator lain yang sangat terkait seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, peningkatan pendapatan dan aspek sosial ekonomi yang lain. Namun dengan adanya kejadian luar biasa yaitu bencana non alam pandemi Covid-19, beberapa sektor utama kecuali sektor pertanian dan industri pengolahan, di Tahun 2020 mengalami kontraksi, antara lain lapangan usaha perdagangan, konstruksi dan jasa, dengan pertumbuhan masing-masing sektor sebesar -3,49%; -2,43% dan -1,26%. Berikut gambaran data secara lengkap realisasi dan proyeksi PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel 3.2
Realisasi PDRB ADHK Kabupaten Pemalang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020		2021	
		Rp (Juta)	Pert.	Rp (Juta)	Pert.	Rp (Juta)	Pert.	Rp (Juta)	Pert.	Rp (Juta)	Pert.
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.981.817,04	3,14	4.151.223,81	4,25	4.205.833,39	1,32	4.419.014,08	5,07	4.623.437,40	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	749.308,41	7,7	773.506,69	3,23	769.607,55	-0,5	775.453,35	0,76	798.945,99	3,03
C	Industri Pengolahan	3.375.595,13	5,26	3.555.530,68	5,33	3.834.064,34	7,83	3.785.732,87	-1,26	3.918.972,91	3,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21.609,01	5,31	22.827,81	5,64	23.970,69	5,01	24.439,02	1,95	25.959,24	6,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.894,29	4,6	14.489,81	4,29	15.095,38	4,18	15.441,80	2,29	16.301,35	5,57
F	Konstruksi	702.870,34	7,75	751.342,57	6,9	819.722,77	7,9	790.982,34	-2,43	850.373,09	7,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.764.653,21	6,02	2.912.820,71	5,36	3.120.035,29	7,11	3.011.268,20	-3,49	3.205.117,03	6,44
H	Transportasi dan Pergudangan	490.632,34	6,1	525.816,58	7,17	568.337,15	8,09	389.224,54	-31,52	396.871,11	1,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	912.838,22	5,88	989.250,88	8,37	1.078.844,76	9,06	1.037.270,54	-3,85	1.107.854,84	6,8
J	Informasi dan Komunikasi	437.632,28	14,01	493.959,44	12,87	554.594,24	12,28	649.012,73	17,02	685.738,75	5,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	489.437,05	5,58	509.975,88	4,2	528.581,88	3,65	539.629,94	2,09	552.736,57	2,43
L	Real Estate	303.891,71	5,98	321.433,27	5,77	341.772,37	9,13	350.982,83	0,06	365.618,82	4,17
M,N	Jasa Perusahaan	60.164,41	7,55	65.409,82	8,72	72.306,37	10,54	65.914,59	-8,84	67.995,07	3,16
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	520.624,16	3,08	536.375,45	3,03	554.001,69	3,29	547.281,92	-1,21	542.683,52	-0,84
P	Jasa Pendidikan	874.593,96	8,22	942.363,82	7,75	1.015.425,91	7,75	1.014.899,25	-0,05	1.016.132,06	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	168.684,32	8,97	184.188,10	9,19	200.114,45	8,65	215.962,39	7,92	217.054,94	0,51
R,S,T,U	Jasa Lainnya	468.738,12	8,99	515.373,50	9,95	564.891,55	9,61	523.087,03	-7,4	524.468,98	0,26
PDRB Total		16.336.984,00	5,61	17.265.888,82	5,69	18.267.199,78	5,8	18.155.597,42	-0,61	18.916.261,68	4,19

Sumber : BPS Kabupaten Pemalang, 2022

Berdasar Tabel 3.2, pada masa pandemi Tahun 2020, lapangan usaha dominan yaitu pertanian dan industri pengolahan meskipun mengalami penurunan pertumbuhan, tidak sampai mengalami kontraksi. Sedangkan lapangan usaha dominan yang lain yaitu perdagangan mengalami kontraksi, sehingga perlu ada upaya untuk melakukan pemulihan ekonomi agar bisa kembali tumbuh positif. Intervensi pada pelaku usaha skala mikro (terdampak Covid-19) melalui fasilitasi pelatihan ketrampilan dan manajemen, pemanfaatan teknologi (produksi dan pemasaran) guna menumbuhkan inovasi produk, serta pengembangan jejaring usaha dapat menjadi alternatif untuk mempercepat pemulihan usaha. Selain itu juga ada fasilitasi pemberian bantuan modal usaha untuk para pelaku usaha yang kekurangan modal akibat dampak Covid-19. Upaya tersebut membuahkan hasil ditandai dengan pertumbuhan lapangan usaha perdagangan di Tahun 2021 sebesar 6,44% lebih besar daripada pertumbuhan lapangan usaha pertanian (4,63%) dan industri pengolahan (3,52%).

Struktur ekonomi Kabupaten Pemalang diprediksi akan terus mengalami pergeseran dan terjadi kecenderungan proporsi lapangan usaha pertanian dalam PDRB yang cenderung menurun, sedangkan proporsi sektor industri dan perdagangan cenderung terus meningkat, meskipun sempat melambat akibat merebaknya wabah Covid-19. Namun dalam beberapa waktu ke depan, lapangan usaha industri pengolahan akan menduduki posisi terbesar sebagai kontributor PDRB, disusul pertanian dan perdagangan. Data secara lengkap kontribusi lapangan usaha dalam PDRB Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.3
Realisasi Distribusi % PDRB ADHB Kabupaten Pemalang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,70	26,49	25,44	27,02	27,10
B	Pertambangan dan Penggalian	4,42	4,26	3,99	4,06	3,98
C	Industri Pengolahan	21,60	21,62	21,99	21,94	21,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
F	Konstruksi	4,29	4,43	4,60	4,44	4,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,17	15,16	15,45	14,83	15,17
H	Transportasi dan Pergudangan	2,62	2,62	2,69	1,88	1,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,01	5,08	5,20	5,01	5,21
J	Informasi dan Komunikasi	2,02	2,10	2,21	2,57	2,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,11	3,05	3,07	3,10
L	Real Estate	1,62	1,63	1,68	1,68	1,66
M,N	Jasa Perusahaan	0,35	0,36	0,38	0,35	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,16	3,08	3,04	2,79
P	Jasa Pendidikan	5,81	5,92	6,07	6,09	5,78
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,05	1,07	1,10	1,18	1,13
R,S,T, U	Jasa Lainnya	2,74	2,81	2,88	2,65	2,53
Total		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2022

Mengacu pada Tabel 3.3, maka sektor yang paling sesuai untuk dikembangkan dan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam menentukan arah kebijakan ekonominya adalah industri berbasis

pertanian (agro-industri). Agroindustri yang merupakan sub sistem agribisnis dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan menjaga kestabilan harga produk pertanian karena terciptanya rangkaian hulu-hilir yang saling mengkait yang membentuk rantai pasok. Tentunya hal ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan petani dan jejaring usaha antara kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dengan sektor pengolahan serta perluasan pasar produk pertanian dan produk olahan. Sektor industri berbasis agro harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Para pelaku agro-industri lokal harus mulai diperkenalkan platform *e-business* dalam menjalankan usaha/bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dapat dilakukan secara kelompok/klaster.

Sektor perdagangan yang menempati urutan ketiga terbesar kontribusinya terhadap PDRB diproyeksikan dapat terus tumbuh signifikan sehingga dapat ikut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah daerah harus pro aktif memberikan pendampingan baik melalui pengembangan jejaring pasar maupun dalam pemanfaatan *e-commerce* bagi pelaku usaha (dari hulu ke hilir) sebagai upaya untuk mendongkrak volume perdagangan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil. Secara agregat, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Pemalang sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4
Realisasi PDRB ADHB Kabupaten Pemalang
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.836.489,48	6.270.308,32	6.482.922,70	6.975.981,72	7.437.436,79
B	Pertambangan dan Penggalian	966.070,90	1.008.805,95	1.017.466,77	1.047.170,81	1.091.793,34
C	Industri Pengolahan	4.722.013,91	5.118.414,59	5.602.868,49	5.666.208,16	6.025.481,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24.868,69	27.114,19	28.511,93	28.891,35	30.548,37
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.183,26	15.932,01	16.684,61	18.056,25	19.267,73
F	Konstruksi	938.795,86	1.049.239,02	1.171.432,23	1.147.022,59	1.280.473,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.315.846,01	3.587.584,57	3.938.037,69	3.830.256,80	4.165.041,83
H	Transportasi dan Pergudangan	573.709,40	620.816,07	685.552,33	485.597,26	506.574,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.094.350,96	1.201.929,28	1.326.140,86	1.294.098,10	1.429.398,13
J	Informasi dan Komunikasi	440.605,19	496.969,63	564.011,32	662.941,66	700.950,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	685.803,22	737.231,99	778.018,54	793.892,59	851.668,69
L	Real Estate	354.812,45	384.782,82	428.953,27	432.902,23	456.410,80
M,N	Jasa Perusahaan	76.223,03	85.110,81	96.778,95	90.783,18	95.368,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	719.029,31	748.795,55	784.904,52	784.668,65	766.380,20
P	Jasa Pendidikan	1.269.111,41	1.400.237,00	1.547.358,12	1.572.178,71	1.587.455,60
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228.891,69	253.098,49	279.191,60	305.060,53	308.990,75
R,S,T,U	Jasa Lainnya	598.719,40	664.529,97	734.767,84	685.109,45	693.665,47
PDRB Total		21.860.524,17	23.670.900,26	25.483.601,77	25.820.820,04	27.446.905,64

Sumber: BPS Kabupaten Pemalang, 2022

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah menggambarkan realisasi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pemalang berkaitan dengan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang akan diuraikan berikut.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasar atas capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2019-2021, maka pendapatan Tahun 2022 diharapkan dapat meningkat lebih tinggi. Kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, kemampuan masyarakat serta tidak menimbulkan kontra produktif pada perekonomian masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan dalam struktur APBD Kabupaten Pemalang.

Mengingat situasi pandemi yang menyebabkan turunnya pendapatan PAD pada tahun anggaran 2020, maka pada Tahun 2023 pengelolaan PAD difokuskan pada upaya pemulihan penerimaan PAD agar kembali kepada kondisi sebelum pandemi. Dengan asumsi pandemi telah berhasil dikendalikan, maka pemulihan penerimaan PAD diperkirakan dapat tercapai, sehingga pada RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan PAD dapat lebih berkontribusi optimal dalam pembiayaan APBD. Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dirumuskan 4 (empat) strategi peningkatan PAD, meliputi:

1. Pemutahiran basis data; ditujukan untuk mendapatkan data akurat dan terkini dari potensi pajak dan retribusi, termasuk pemetaan celah kesenjangan antara realisasi pendapatan dengan potensi yang seharusnya. Strategi ini dilaksanakan dengan kegiatan studi potensi maupun pemutahiran basis data objek maupun wajib pajak. Data yang dihasilkan juga bisa dijadikan dasar pemetaan, evaluasi dan perumusan alternatif perbaikan dan inovasi tata kelola.
2. Penataan regulasi; dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian pengaturan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah. Selain itu, penyesuaian regulasi juga ditujukan untuk menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi terutama pada tarif dan dasar pengenaan pajak/retribusi. Strategi ini juga diarahkan untuk menyusun payung hukum bagi ide-ide perbaikan dan inovasi tata kelola pajak dan retribusi seperti penataan pengelolaan parkir, pengelolaan pasar, elektronifikasi/digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini untuk menjembatani operasi pemerintahan yang harus berlandaskan pada pengaturan regulasi yang sudah ditetapkan tetapi di sisi lain pemerintahan juga dituntut menghasilkan ide-ide inovasi dalam melakukan pelayanan publik. Dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan perkembangan dunia usaha, beberapa tarif retribusi maupun harga dasar pengenaan pajak yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini akan mengalami penyesuaian. Penataan regulasi juga akan menggali potensi item pajak baru terutama pada retribusi pemakaian kekayaan daerah.

3. Perbaikan dan inovasi tata kelola; ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan penerimaan PAD melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kemudahan pengelolaan PAD. Selain elektronifikasi sistem pemungutan pajak dan retribusi maka diperlukan penataan/perbaikan tata kelolanya secara menyeluruh. Pengelolaan pajak daerah diarahkan untuk terus meningkatkan kemudahan dan transparansi pemungutan pajak daerah. Pada sektor retribusi perbaikan tata kelola utamanya dilakukan pada beberapa obyek retribusi terbesar dan yang mendapatkan perhatian publik seperti: parkir tepi jalan umum, pelayanan pasar dan pelayanan kebersihan serta retribusi tempat pariwisata/olahraga. Perbaikan tata kelola juga meliputi pengembangan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas diiringi dengan pembangunan budaya kerja yang mengedepankan integritas guna membangun *trust*/kepercayaan dari wajib pajak dan retribusi. Salah satu prioritasnya adalah pemenuhan kebutuhan tenaga teknis penilai dan pemeriksa pajak daerah.
4. Peningkatan sinergi dan kolaborasi; ditujukan untuk membangun ekosistem pengelolaan PAD yang terhubung dan saling mendukung peningkatan PAD seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (*Tax Clearance*) antara sistem perijinan dengan sistem pajak daerah termasuk penegakkannya oleh petugas penegak Peraturan Daerah. Peningkatan kerjasama dengan pihak lain seperti Kantor ATR BPN, PT Bank Jateng, PT. PLN dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) perlu terus dilakukan dalam upaya peningkatan PAD.

Disamping itu jenis penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penerimaan hasil investasi pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu dioptimalkan potensinya. Pada BUMD milik Pemerintah Kabupaten Pemalang, pihak eksekutif maupun legislatif bisa memberikan masukan pada rencana bisnis yang ingin dijalankan terutama pada target laba yang akan menentukan jumlah PAD pada tahun yang akan datang. Realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021*)	Tahun 2022**)	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	2.449.008.577.285	2.605.036.997.158	2.429.931.663.000	2.545.962.865.000	2.562.943.505.000
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	328.375.466.698	365.401.063.510	300.394.955.000	358.353.030.000	375.333.670.000
4.1.01	Pajak Daerah	80.569.759.532	88.731.761.139	86.122.000.000	87.241.200.000	91.257.400.000
4.1.02	Retribusi Daerah	31.403.033.411	28.569.342.183	38.903.588.000	39.534.700.000	44.690.650.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.371.187.915	22.500.844.418	21.049.367.000	26.049.198.000	28.914.675.000
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	195.031.485.840	225.599.115.770	154.320.000.000	205.527.932.000	210.470.945.000
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.957.807.388.064	2.076.664.463.648	2.129.536.708.000	2.187.609.835.000	2.187.609.835.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.816.252.594.531	1.905.397.611.251	1.972.284.308.000	1.980.764.339.000	1.980.764.339.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.554.793.533	171.266.852.397	157.252.400.000	206.845.496.000	206.845.496.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	162.825.722.523	162.971.470.000	0,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	162.825.722.523	6.000.000.000	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	156.971.470.000	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022
Bapenda Kabupaten Pemalang, 2022
*) LRA APBD TA 2021 (unaudited)
**) APBD TA 2022 (Perda Nomor 15 Tahun 2021)

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan APBD Tahun 2023 disusun proyeksi/Target Pendapatan Daerah dengan struktur pendapatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	2022	2023	% (+/-)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.429.931.663.000	2.545.962.865.000	4,78
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.394.955.000	358.353.030.000	19,29
4.1.01	Pajak Daerah	86.122.000.000	87.241.200.000	1,30
4.1.02	Retribusi Daerah	38.903.588.000	39.534.700.000	1,62
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.049.367.000	26.049.198.000	23,75
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.320.000.000	205.527.932.000	33,18
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.129.536.708.000	2.187.609.835.000	2,73
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.972.284.308.000	1.980.764.339.000	0,43
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.252.400.000	206.845.496.000	31,54
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	-
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022
Bapenda Kabupaten Pemalang, 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek *multiplier* yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program prioritas pembangunan daerah, dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yaitu:

- 1. Efisiensi dan efektivitas anggaran; dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yaitu dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun rencana alokasi untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :
 - a. SPM Pendidikan Rp263.165.625.920,00
 - b. SPM Kesehatan Rp 1.958.634.800,00
 - c. SPM Pekerjaan Umum Rp 10.974.488.000,00
 - d. SPM Permukiman Rakyat Rp 4.000.000.000,00
 - e. SPM Trantibumlinmas Rp 835.000.000,00
 - f. SPM Sosial Rp 510.687.900,00

Harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- 2. Prioritas penggunaan anggaran; diprioritaskan untuk mendanai kegiatan peningkatan infrastruktur terutama jalan; menunjang pencapaian Visi Misi dan Program Unggulan Dewi (Desa Wisata), Dedi (Desa Digital), Desi (Desa Sinergi) dan Koin (Kota Industri); penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan upaya mendukung prioritas nasional, antara lain pembangunan SDM, pembangunan

infrastruktur, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Termasuk kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Adapun alokasi penggunaan anggaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Belanja *Mandatory Spending*
 - Alokasi Dana Desa Rp113.229.695.000,00
 - Anggaran penguatan APIP Rp 5.000.000.000,00
 - Anggaran peningkatan SDM Rp 3.193.300.000,00
 - Bagi Hasil PDRD kepada Pemdes Rp 13.077.282.000,00
 - Dana Kelurahan (11 kelurahan) Rp 5.500.000.000,00
 - Pendampingan PSN Air Baku di Pulosari Rp 2.300.000.000,00
 - b. Anggaran yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmark*)
 - BLUD RSUD Rp140.544.932.000,00
 - Kapitasi JKN Puskesmas Rp 65.000.000.000,00
 - Operasional Puskesmas Rp 18.000.000.000,00
 - Iuran BPJS JKN PBI Daerah Rp 27.365.183.000,00
 - Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 35.178.395.000,00
 - Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp452.421.011.000,00
 - Dana Insentif Daerah Rp 4.656.546.000,00
 - Dana Desa Rp320.431.408.000,00
 - c. Belanja Wajib dan Mengikat Lainnya
 - Gaji dan tunjangan ASN dan PPPK Rp748.124.000.000,00
 - Gaji/tunjangan dan penerimaan lain DPRD Rp 27.809.230.000,00
 - Gaji/tunjangan dan penerimaan KDH Rp 785.318.000,00
 - Tambahan Penghasilan Pegawai Rp138.207.694.000,00
 - Insentif Pemungutan PDRD Rp 5.638.640.000,00
 - Iuran BPJS JKN Kades dan Perangkat Desa Rp 2.810.000.000,00
 - Hibah Bantuan Keuangan Partai Politik Rp 943.508.000,00
 - Belanja Tidak Terduga Rp 11.000.000.000,00
 - Pendamping TMMD Rp 837.000.000,00
 - Belanja Hibah dan Bansos Rp 45.000.000.000,00
 - Anggaran Kewilayahan Hasil Musrenbang Rp 25.000.000.000,00
 - d. Belanja Program Unggulan dan Rutin
 - Anggaran rutin kantor seluruh OPD Rp177.274.886.000,00
 - Anggaran program unggulan Bupati Rp 66.634.837.000,00
 - Infrastruktur Jalan Rp110.000.000.000,00
3. Tolok ukur dan target kinerja; belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. Transparansi dan akuntabel; setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut

pula proses, keluaran dan hasil.

5. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bahwa mulai tanggal 28 November 2023 sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Adapun tenaga honorer yang ada dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, secara bertahap akan diangkat menjadi PPPK. Di tahun 2021, sejumlah 332 honorer telah diangkat menjadi PPPK dan di tahun 2022 sejumlah 1.354 honorer yang telah diangkat. Pada penganggaran tahun 2023 masih dialokasikan untuk tenaga honorer, namun hanya sampai bulan November.

Arah kebijakan belanja daerah masa lalu dan Tahun 2023 dapat dilihat dari realisasi dan proyeksi belanja daerah Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel 3.7 berikut.

Tabel 3.7
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	2.664.990.530.908	2.524.565.945.884	2.469.130.208.000	2.565.962.865.000	2.642.943.505.000
5.1	Belanja Operasi	1.797.305.047.387	1.836.753.267.382	1.893.576.205.913	1.903.281.850.000	1.963.496.669.000
5.1.01	Belanja Pegawai	1.129.022.379.192	1.093.751.149.412	1.231.392.030.500	1.182.136.349.000	1.169.822.428.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	553.030.864.195	661.157.063.587	602.306.871.542	657.819.110.000	652.240.918.000
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	111.212.329.000	76.596.757.383	55.767.503.871	57.161.691.000	134.652.153.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.039.475.000	5.248.297.000	4.109.800.000	6.164.700.000	6.781.170.000
5.2	Belanja Modal	342.593.987.691	180.049.321.707	99.326.340.087	154.102.026.000	160.749.844.000
5.2.01	Belanja Modal Tanah	547.159.229	-	500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.655.036.324	63.839.003.719	41.843.141.858	46.027.456.000	50.630.201.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	222.354.769.440	53.414.838.586	10.255.475.079	17.761.053.000	19.537.158.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	32.026.519.797	49.290.559.472	33.584.597.150	67.169.194.000	64.810.734.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.010.502.901	13.504.919.930	13.143.126.000	13.144.323.000	15.771.751.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	44.928.357.830	9.821.362.300	10.000.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	44.928.357.830	9.821.362.300	10.000.000.000	11.000.000.000	15.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	480.163.138.000	497.941.994.495	466.227.662.000	497.578.989.000	503.696.992.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.261.739.000	11.661.890.495	12.502.559.000	12.677.590.000	13.594.805.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	469.901.399.000	486.280.104.000	453.725.103.000	484.901.399.000	490.102.187.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022
*) LRA APBD TA 2021 (unaudited)
**) APBD TA 2022 (Perda Nomor 15 Tahun 2021)

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan APBD Tahun 2022 disusun proyeksi/Target Belanja Daerah dengan struktur belanja sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Target/Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	2022	2023	% (+/-)
5	BELANJA DAERAH	2,469,130,208,000	2,565,962,865,000	3,92
5.1	Belanja Operasi	1,893,576,205,913	1,903,281,850,000	0,51
5.1.01	Belanja Pegawai	1,231,392,030,500	1,182,136,349,000	(4)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	602,306,871,542	657,819,110,000	9,22
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	55,767,503,871	57,161,691,000	2,50
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4,109,800,000	6,164,700,000	50
5.2	Belanja Modal	99,326,340,087	154,102,026,000	55,15
5.2.01	Belanja Modal Tanah	500,000,000	10,000,000,000	1.900
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41,843,141,858	46,027,456,000	10
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10,255,475,079	17,761,053,000	73,19
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	33,584,597,150	67,169,194,000	100
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,143,126,000	13,144,323,000	0,01
5.3	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	11,000,000,000	10,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000	11,000,000,000	10,00
5.4	Belanja Transfer	466,227,662,000	497,578,989,000	6,72
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12,502,559,000	12,677,590,000	1,40
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	453,725,103,000	484,901,399,000	6,87

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA; pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan Pinjaman Daerah; penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari pembentukan Dana Cadangan; penyertaan modal daerah; pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2023 diarahkan pada upaya pengurangan SiLPA melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Investasi daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah dapat memberikan manfaat berupa :

1. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan

investasi pemerintah daerah;

2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

Penyertaan modal merupakan bentuk investasi langsung Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilaksanakan dengan terlebih dahulu dilakukan analisis investasi oleh penasehat investasi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Penasehat investasi akan melakukan analisis terhadap usulan penyertaan modal yang disampaikan BUMD untuk mengetahui apakah investasi Pemerintah Daerah yang akan diberikan kepada BUMD memberikan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi pembiayaan daerah pada tahun lalu dan rencana target tahun berjalan 2022 dapat dilihat pada tabel realisasi dan target pembiayaan Tahun 2020–2024 berikut.

Tabel 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
6.1	Penerimaan Pembiayaan	347.906.316.058	123.924.362.435	59.198.545.000	60.000.000.000	100.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	347.906.316.058	123.924.362.435	59.198.545.000	60.000.000.000	60.000.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	40.000.000.000
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000	7.200.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000	20.000.000.000
6.2.01	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.000.000.000	7.200.000.000	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	10.000.000.000	20.000.000.000	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	339.906.316.058	116.724.362.435	39.198.545.000	20.000.000.000	80.000.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022
*) LRA APBD TA 2021 (unaudited)
**) APBD TA 2022 (Perda Nomor 15 Tahun 2021)

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk penyusunan APBD Tahun 2023 disusun proyeksi/Target Pembiayaan Daerah dengan struktur pembiayaan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Target/Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023

NO	URAIAN	2022	2023	% (+/-)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	59.198.545.000	60.000.000.000	1,35
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	59.198.545.000	60.000.000.000	1,35
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	40.000.000.000	100
6.2.01	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	20.000.000.000	100
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	20.000.000.000	100
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-
	Pembiayaan Neto (selisih pembiayaan)	39.198.545.000	20.000.000.000	(48,98)

Sumber : BPKAD Kabupaten Pematang, 2022

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, khususnya perencanaan tahun kedua. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 mengacu pada visi RPJMD, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”**. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
- 3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong;
- 4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan;
- 5. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal;
- 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

Untuk menjawab isu strategis pembangunan menuju pencapaian visi dan misi Daerah, maka dirumuskan tema pembangunan selama lima tahun sebagai berikut:



Sesuai RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Tema Pembangunan Tahun 2023 adalah **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”** dengan fokus pada : (1) penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana; (2) pembangunan SDM berkarakter budaya unggul; (3) penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19; (4) pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI); (5) penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan

Infrastruktur; dan (6) pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

Target tujuan dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1				
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang				
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
Misi 1: Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat				
Meningkatkan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat		Angka kriminalitas	angka	190
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah	Jumlah konflik sosial	kasus	0
		Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	96
			Indeks Risiko Bencana	indeks
	Meningkatnya kualitas penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	indeks	0,75
		Rasio kejadian kebakaran	%	84
Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
Mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien		IRB (Indeks Reformasi Birokrasi)	indeks	66,58
	Meningkatnya birokrasi akuntabel	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	nilai	71,15
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	indeks	1,334
		Manajemen Resiko Indeks	indeks	2,45
		Indeks Kearsipan	indeks	57,12
	Meningkatnya Birokrasi Kapabel	Indeks Profesionalitas ASN (IPA)	indeks	64,85
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	indeks	3,36
	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	indeks	82,40
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong				
Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing		IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	indeks	68,17
	Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing	Rata-rata lama sekolah	tahun	6,90
		Harapan lama sekolah	tahun	12,20
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	73,7
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	86,13
Meningkatkan nilai-nilai budaya, toleransi dan karakter bangsa		Indeks Kebudayaan	indeks	49,90
	Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	7,89
	Meningkatnya kualitas budaya literasi di masyarakat	Nilai budaya literasi	indeks	24,80
		Indeks kerukunan umat beragama	indeks	68,94
	Meningkatnya solidaritas keagamaan	Jumlah konflik agama	kasus	0
Meningkatkan penanganan kemiskinan, pengangguran dan kesejahteraan		Angka kemiskinan	%	15,39
	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dalam rangka penurunan pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,75
		PDRB per kapita	Ribu Rp	14.700

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Tahun 2023
sosial				
Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan				
Meningkatkan sinergitas pembangunan desa dan kota dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah		Indeks Desa Membangun	indeks	0,7672
	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	%	10,900
		Indeks ketimpangan antar wilayah	indeks	0,37800
	Terwujudnya pengembangan Kota	Persentase kelengkapan infrastruktur Kecamatan	%	14,29
Misi 5 : Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal				
Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi unggulan dalam upaya kemandirian ekonomi daerah		Pertumbuhan ekonomi	%	4,19-4,50
		Laju Inflasi	%	2,36
	Meningkatnya produktivitas dan nilai ekonomi berbasis potensi lokal	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1
		Persentase pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	5,14
		Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	0,5
		Persentase Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	%	1,25
		Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal	%	3
	Meningkatnya realisasi penanaman modal			
Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan				
Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	indeks	71,18
	Meningkatnya cakupan universal akses	Persentase capaian universal akses	%	89,13
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio Konektivitas	indeks	70
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	indeks	52
	Meningkatnya pembangunan yang sesuai tata ruang	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	indeks	69,37
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,48
		Indeks Kualitas Air	Indeks	47,28
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	70,12

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

4.2.1 Prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mempunyai tema “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”, dengan arah kebijakan, meliputi :

- 1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, yang dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
 - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
 - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
 - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan, yang dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
 - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
 - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
 - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
 - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
 - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
 3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan **decent job** yang dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
 - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
 - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
 - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
 4. Mendorong pemulihan dunia usaha yang dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
 - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
 - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
 - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
 - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
 5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan yang dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
 - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;
 - c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
 - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
 - e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55-6,6,08%; dan
 - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) yang dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
 - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
 - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi yang dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m³/detik;
 - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak termasuk 11,5 aman);
 - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
 - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
 - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
 - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha

Adapun prioritas dan fokus pembangunan Nasional Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas dan Fokus Pembangunan dalam RKP 2023

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan
		2. Akselerasi peningkatan nilai tambah <i>agrofishery industry</i> , kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
		2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah yang belum berkembang
		3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif
		4. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah
		5. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
		2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
		3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
		4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		5. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
		6. Pengentasan kemiskinan

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Peningkatan produktivitas dan daya saing
		1. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter
		2. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
		3. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	4. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
		1. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah
		2. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan
		3. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
		4. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	5. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur
		1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
		2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pembangunan karbon rendah
		1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
		2. Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil
		3. Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber
		4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi
		5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warganegara Indonesia (WNI) di luar negeri

Sumber : Perpres Nomor 18 Tahun 2020

- Target sasaran makro pembangunan nasional Tahun 2023, meliputi :
1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 – 5,9%;
 2. Penurunan Emisi Gas Rumah sebesar 27,02%;
 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,3 – 6%;
 4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375 – 0,378;
 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29 – 73,35%;
 6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7-8%;
 7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
 8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

4.2.2. Prioritas Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan tahun ke lima pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 yang diarahkan untuk **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**, meliputi:

1. Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

2. Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.3
Prioritas dan Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
1	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara keberlanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/<i>food estate</i>, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan <i>database</i>, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian; 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi; 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan; 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan padangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman serta mutu dan keamanan pangan segar; 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk, pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keberantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keberantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM; 6) Peningkatan <i>eco socio tourism</i> berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata; 7) Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel, pemberian fasilitas kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepeminatan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha; 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah dan pansela; 9) Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (<i>Ngelongi, Nggunakke dan Ngolah</i>), penerapan <i>Good Mining Practise</i>, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
		10) Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penganggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana
2	Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	1) Penyediaan <i>basic need access</i> (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UKM) dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih dan listrik murah); 2) Penguatan <i>sustainable livelihood</i> (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (<i>community based</i>), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan dan pengembangan ekonomi digital; 3) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal; 4) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan social, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja serta membangun kesatuan sistem <i>demand</i> dan <i>supply side</i> tenaga kerja.
3	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	1) Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya dan kearifan lokal; 2) Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan serta penyelenggaraan even olahraga; 3) Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak; 4) Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.
4	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan	1) Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, <i>open government</i> melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2) Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja,

No	Prioritas Provinsi Jateng	Fokus Pembangunan
	kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan pengautan sistem integritas internal instansi; 3) Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta poses bisnis pemerintahan daerah; 4) Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal; 5) Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer dan penguatan peran BUMD.

Sumber: *SE Gubernur Jateng Nomor: 050/0017371 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.*

Target sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, meliputi:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 80,00;
3. Angka kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka 3,00 ± 1 persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta Rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;
10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72, 75;
12. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,57.

4.2.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2023, meliputi :

1. Bidang Pendidikan, antara lain :
 - Bantuan kepada PAUD/RA/KB/TK/MI/SD/SMP/MTs
2. Bidang Kesehatan, antara lain :
 - Penanganan stunting
3. Bidang Pembangunan, antara lain :
 - Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana dan prasarana desa
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan produksi/usaha perikanan

- Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan produksi/usaha pertanian
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana persampahan
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana umum kelurahan
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan senderan jalan
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan senderan/bronjong/talud sungai
 - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana olahraga
 - Pengaspalan/rabat beton jalan
 - Pengadaan sumur bor pertanian dan pompoa
 - Pengadaan sumur dangkal dan pompa/jaringan air minum
 - Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan
 - Normalisasi sungai
 - Renovasi cungkup makam
4. Bidang Ekonomi, antara lain :
- Bantuan bibit tanaman
 - Bantuan dana Kelompok Usaha Bersama/KUB
 - Bantuan ternak
 - Pelatihan keterampilan kepada kelompok/UMKM
 - Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes
5. Bidang Sosial Budaya, antara lain:
- Bantuan kepada yayasan/kelompok masyarakat/ormas
 - Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)

4.2.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
3. Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023;
4. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
5. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pemalang pada penyusunan RKPD Tahun 2023;
6. Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Tahun 2021;
7. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Komitmen nasional untuk mencapai target *Sustainable Development Goal (SDG's)*;
9. Hasil capaian penanggulangan kemiskinan dan program unggulan.

Selanjutnya, penyusunan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disusun untuk mendukung :

1. Pencapaian SPM;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah sesuai target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023;
3. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023;
4. Pemecahan permasalahan dan isu strategis Daerah, meliputi :
 - a. Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar;
 - b. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi;
 - c. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah;
 - d. Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah;
 - e. Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 yang diarahkan untuk **“Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**, meliputi :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana;
2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul;
3. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19;
4. Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI);
5. Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur;
6. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak.

Prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel IV.4
Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
1	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1) Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS; 2) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian; 3) Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI); 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
		pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan lumbung pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan; 5) Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> dan keberantaraan pasar (<i>market linkages</i>), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen; 6) Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan <i>event</i> pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekerjasama dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (<i>Tourism Information Center</i>), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual; 7) Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor; 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>reuse, reduce, dan recycle</i>), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat; 9) Peningkatan pelayanan penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran; 10) Peningkatan kondusivitas wilayah melalui pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik.
2	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “NJUH SEKOLAH MANING”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi; 2) Peningkatan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda; 3) Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca; 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan kepesertaan JKN, peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana <i>sport area</i>; 5) Pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
		(LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan); 6) Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko dan pengelolaan arsip serta peningkatan kompetensi dan <i>Merit System</i> .
3	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19	1) Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem melalui penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial; 3) Pengurangan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan cakupan <i>universal access</i> dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem; 4) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang, penguatan <i>database</i> kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal; 5) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat; 6) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM.
4	Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	1) Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi; peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa); pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata; 2) Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet, pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital; peningkatan pemanfaatan <i>website</i> desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (<i>smart village</i>); 3) Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar <i>smart city</i> , peningkatan keterbukaan informasi publik; 4) Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Fokus Pembangunan
		melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.
5	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	1) Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah; 2) Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan; 3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS).
6	Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	1) Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan <i>database</i> gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak; 2) Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 3) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak.

Target sasaran makro pembangunan Tahun 2023 pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, meliputi:

1. Angka kriminalitas sebanyak 190 kasus;
2. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 148;
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 66,58;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,17;
5. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sebesar 86,13;
6. Indeks Kebudayaan sebesar 49,90;
7. Indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,94;
8. Angka kemiskinan sebesar 15,39 persen;
9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,75 persen;
10. Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,7672;
11. Indeks ketimpangan antar wilayah sebesar 0,37800;
12. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,19-4,50 persen;
13. Laju Inflasi sebesar 2,36 persen;
14. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebesar 71,18;
15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) sebesar 69,37;

Prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 beserta strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya dikaitkan dengan isu strategis pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Strategi	Arah Kebijakan
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “NJUH SEKOLAH MANING”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi
			Peningkatan pelestarian budaya	Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda
			Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	Peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca
			Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan SPM bidang kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana <i>sport area</i>
			Pembangunan kependudukan	Pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan)

		Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko serta pengelolaan arsip
			Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan <i>database</i> gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak
				Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
				Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan	Peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS
			Peningkatan produktivitas sektor pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian
			Peningkatan produksi perikanan	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI)
			Peningkatan ketahanan pangan	Peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan

				masyarakat dengan lumbung pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan
			Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> dan keperantaraan pasar (<i>market linkages</i>), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen
			Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan <i>event</i> pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekerjasama dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (<i>Tourism Information Center</i>), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual;
			Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor
			Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>reuse, reduce, dan recycle</i>), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat
			Peningkatan pelayanan penanganan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran
			Peningkatan kondusivitas wilayah	Pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum

				dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik
3	Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	Pengembangan kota kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah
			Peningkatan konektivitas	Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan
			Peningkatan pengelolaan sumberdaya air	Peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS)
4	Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah	Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem)	Penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi
				Peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa)
				Pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata
			Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet	Pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital
				Peningkatan pemanfaatan <i>website</i> desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (<i>smart village</i>)
			Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar <i>smart city</i> , peningkatan keterbukaan informasi publik
			Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat	Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat

5	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19	Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem	Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial
			Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem	Peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial
			Pengurangan wilayah kantong kemiskinan	Peningkatan cakupan <i>universal access</i> dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem
			Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang, penguatan <i>database</i> kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal
			Pengurangan pengangguran	Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja

				melalui paltihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangrian minat
			Peningkatan pendapatan masyarakat	Penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM

Selanjutnya keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Tahun 2020					
No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
1	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan	Peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “NJUH SEKOLAH MANING”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Prioritas 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
		Peningkatan pelestarian budaya	Pelestarian warisan budaya benda dan tak benda	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	
		Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat	Peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan, peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca		
		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan SPM bidang kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana <i>sport area</i>		
		Pembangunan kependudukan	Pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi		

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
			Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan)		
		Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko serta pengelolaan arsip		
2	Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender	Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan <i>database</i> gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak	Prioritas 3 : Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
3	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan Peningkatan produktivitas sektor pertanian Peningkatan produksi perikanan Peningkatan ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) Peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdaya saing dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Prioritas 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Prioritas 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
			pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan lumbung pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan		
		Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui <i>e-commerce</i> dan keperantaraan pasar (<i>market linkages</i>), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen		
		Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan <i>event</i> pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekerjasama dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (<i>Tourism Information Center</i>), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual;		
		Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal	Peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor		
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (<i>reuse, reduce, dan recycle</i>), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat		

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		Peningkatan pelayanan penanganan bencana	Peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran		
		Peningkatan kondusivitas wilayah	Pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik		
4	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	Pengembangan kota kecamatan	Peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah	Prioritas 1 : Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Prioritas 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		Peningkatan konektivitas	Pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan		
		Peningkatan pengelolaan sumberdaya air	Peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS)		
5	Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem)	Penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi	Prioritas 4 : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Prioritas 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
			Peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa)		
			Pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata		
		Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet	Pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital		
			Peningkatan pemanfaatan <i>website</i> desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (<i>smart village</i>)		
		Peningkatan kualitas sistem	Integrasi sistem perencanaan, penganggaran,		

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
		pemerintahan berbasis elektronik	evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar <i>smart city</i> , peningkatan keterbukaan informasi publik		
		Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat	Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat		
6	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19	Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem Pengurangan wilayah kantong kemiskinan Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan	Penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial Peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial Peningkatan cakupan <i>universal access</i> dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang, penguatan <i>database</i> kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data	Prioritas 2 : Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)	Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing

No	Prioritas Kabupaten Pemalang	Strategi	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten	Prioritas RKPD Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Nasional
			Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal		
		Pengurangan pengangguran	Peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkaran minat		
		Peningkatan pendapatan masyarakat	Penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM		

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang dengan isu strategis pembangunan, misi Kepala Daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7

Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Misi dan Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pemalang Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
1	Belum optimalnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kesetaraan gender dan pencapaian pelayanan dasar	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong	Bidang Pendidikan, antara lain : Bantuan kepada PAUD/RA/KB/TK/MI/SD/SMP/MTs
		Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil <i>gender</i> dan ramah anak	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong	Bidang Kesehatan, antara lain : Penanganan stunting
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	Misi 1 : Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Misi 5 Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal	Bidang Ekonomi, antara lain : - Bantuan bibit tanaman - Bantuan dana Kelompok Usaha Bersama/KUB - Bantuan ternak - Pelatihan keterampilan kepada kelompok/UMKM - Peningkatan kapasitas pengelola Bumdes
3	Masih tingginya kesenjangan antar wilayah	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur	Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan Misi 6 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan	Bidang Pembangunan, antara lain : - Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk sarana dan prasarana desa - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan drainase - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan produksi/usaha perikanan - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan produksi/usaha pertanian - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan gedung - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jembatan - Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana persampahan

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Misi	Pokok Pikiran Dewan
				• Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana umum kelurahan • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan senderan jalan • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan senderan/bronjong/talud sungai • Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana olahraga • Pengaspalan/rabat beton jalan • Pengadaan sumur bor pertanian dan pompoa • Pengadaan sumur dangkal dan pompa/jaringan air minum • Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan • Normalisasi sungai • Renovasi cungkup makam
4	Belum optimalnya reformasi birokrasi, pelayanan publik dan inovasi daerah	Pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	Misi 2 : Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Misi 4 : Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan	
5	Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19	Misi 3 : Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran dan gotong royong	Bidang Sosial Budaya, antara lain: • Bantuan kepada yayasan/kelompok masyarakat/ormas • Rehab rumah tidak layak huni (RTLH)

Sedangkan keterkaitan antara prioritas pembangunan dan program pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
I	PRIORITAS 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,66	4,5	Diskoperindag	Prioritas 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan Prioritas 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
		Laju Inflasi (%)	2,36	2,36		
		Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	-1,26	1,50		
		Persentase pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (%)	5,11	5,20		
		Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB (%)	-3,49	1,40		
		Persentase Kontribusi Pariwisata dalam PAD (%)	0,94	1,75		
		Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal (%)	-90,5	6		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (indeks)	68,58	69,82		
		Angka kriminalitas (angka)	200	180		
		Kasus konflik sosial (kasus)	0	0		
		Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	100	90		
		Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (indeks)	165	130		
		Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,55	1,00		
		Rasio kejadian kebakaran (%)	90	78		
		Indeks kerukunan umat beragama (indeks)	NA	71,87		
		Kasus konflik agama (kasus)	0	0		
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK (%)	0	40	Diskoperindag	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	0	60		
		Pertambahan jumlah industri kecil dan	0,25	6		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		menengah (%)				
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI) (%)	100	100	Diskoperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota (%)	100	100		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100	100		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100	100		
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang masuk dalam SIINAS (%)	100	100	Diskoperindag	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	23,8	100		
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (bibit, pupuk, Alsintan) (%)	80	80	Dispertan	
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	20	35	Dispertan	
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	10,30	10,36	Dispertan	
7	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (%)	7,60	20	Dispertan	
8	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani aktif (%)	5	5,00	Dispertan	
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase TPI yang memenuhi standar (%)	64,00	89,00	Disperik	
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani (%)	15,00	33,00	Disperik	
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan perikanan umum darat (PUD) (%)	4	24,00	Disperik	
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang aman pangan (%)	48,87	78,87	Disperik	
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk	Persentase lumbung pangan yang aktif (%)	16	29,72	Dispertan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
	Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan					
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan (%)	50	20,00	Dispertan	
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan (%)	12	12	Dispertan	
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman (%)	100	80	Dispertan	
17	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang diawasi perijinannya (%)	0,5	0,5	Diskoperindag	
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	8,04	9		
18	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat (%)	0	5,88	Diskoperindag	
19	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	100	80	Diskoperindag	
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	95	100		
20	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor (%)	-34	27,5	Diskoperindag	
21	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (%)	3,16	32	Diskoperindag	
22	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya (%)	0,4	1	Diskoperindag	
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kunjungan obyek wisata (%)	100	100	Disparpora	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	0	50		
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota(%)	(28,84)	10		
		Tingkat hunian akomodasi (%)	24,17	39,02		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0,40	0,73		
		Jumlah PAD retribusi pariwisata (Milyar Rp)	1,26	2,27		
24	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek wisata yang dipromosikan (%)	100	100	Disparpora	
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (%)	32	100	Disparpora	
26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	-35.85	3,20	DPMPSTP	
27	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal (%)	100	100	DPMPSTP	
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten /	-90,5	5,00		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		kota (%)				
28	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal (%)	98	97	DPMPTSP	
29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu (%)	27,61	50	DPMPTSP	
30	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan (%)	157,30	100	DPMPTSP	
31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun (%)	100	100	DLH	
32	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan (%)	100	100	DLH	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (indeks)	68,58	69,67		
		Indeks Kualltas Air (indeks)	47,33	47,83		
		Indeks Kualitas Udara (indeks)	85,62	89,58		
		Indeks Tutupan Lahan (indeks)	73,56	70,2		
33	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Kehati (%)	0	100	DLH	
34	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 & LB3 (%)	100	100	DLH	
35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina (%)	100	100	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	27	30		
36	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi (%)	100	100	DLH	
37	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan yang diberikan (%)	100	100	DLH	
38	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	100	100	DLH	
39	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut (%)	80	85	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	74,97	77		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		Kab/Kota (%)				
40	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	75	95	Bakesbangpol	
41	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham politik (%)	40	70	Bakesbangpol	
42	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan (%)	50	100	Bakesbangpol	
43	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial (%)	50	80	Bakesbangpol	
44	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (%)	75	100	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan (%)	56	85,00		
45	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,55	0,85	BPBD	
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	94	99		
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	94	95		
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	99,71	100		
		Cakupan desa/kelurahan tangguh bencana (%)	3,15	11,26		
46	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	65,52	90	Satpol PP	
		Persentase Desa/ Kelurahan tanggap kebakaran (%)	0	15		
47	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham Ketahanan Bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan peghayat kepercayaan (%)	45	80	Bakesbangpol	
II	Prioritas 2 : Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	66,32	70,00		Prioritas 3 : Meningkatkan
		Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,42	7,50		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		Harapan lama sekolah (tahun)	11,95	12,50		Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing Prioritas 4 : Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
		Usia Harapan Hidup (tahun)	73,4	74		
		Indeks Kebudayaan (indeks)	NA	59,06		
		Persentase warisan budaya yang ditetapkan (%)	3,57	9,8		
		Nilai budaya literasi (%)	1,2	27,23		
		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	61,09	70		
		Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (nilai)	67,7	73		
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)	1,330	1,340		
		Manajemen Resiko Indeks (level)	1,53	3,00		
		Indeks Kearsipan (indeks)	42	60		
		Indeks Profesionalitas ASN (IPA) (indeks)	64,35	65,59		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Nonformal/ Kesetaraan (%)	100	100	Dindikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	55	100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	98	100		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	83	100		
		Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	50	100		
2	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Pengembangan kurikulum yg dilaksanakan (%)	100	100	Dindikbud	
		Persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan local (%)	100	100		
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (%)	100	100	Dindikbud	
		Persentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat (%)	100	100		
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (rasio)	0,81	0,67	Dinkes	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama) (%)	50	50		
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatn ibu hamil (%)	92,56	0,50		
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatn ibu bersalin (%)	98,4	100		
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatn bayi baru lahir (%)	99,58	100		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	68,44	100		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	23,24	100		
		Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	36,81	100		
		Persentase warga negara usia > 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	34,93	100		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	13,35	100		
		Persentase penderita diabetes militus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	32,73	100		
		Persentase penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	61,67	100		
		Persentase penderita TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	29,79	100		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	30,87	100		
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (rasio)	194,23	18,5	Dinkes	
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar (%)	0	98	Dinkes	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	100	Dinkes	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian penduduk (%)	35	33	Dinsos KBPP	
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	20,59	70,56	Dinsos KBPP	
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan PUS yang ber KB yang diberdayakan (%)	85,64	86,14	Dinsos KBPP	
11	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	73,11	82,88	Disdukcatpil	
12	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	88,98	98,75	Disdukcatpil	
13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama (%)	10,26	100	Disdukcatpil	
14	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang mutakhir (%)	98,85	97	Disdukcatpil	
15	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi (%)	100	100	Dindikbud	
16	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi (%)	100	100	Dindikbud	
17	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi (%)	100	100	Dindikbud	
18	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan terstandarisasi (%)	0,9	5,66	Dinpusarda	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	55,25	55,55		
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata kelola kesekretariatan dan rumah tangga KDH/WKDH/Sekda yang efektif dan efisien (%)	100	100	Setda	
		Persentase terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien (%)	100	100		
		Persentase terwujudnya pelayanan keprotokolan pimpinan daerah yang efektif dan efisien (%)	100	100		
20	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	50	100	Setda	
		Persentase terwujudnya tata kelola	100	100		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien (%)				
		Persentase terwujudnya tata kelola produk hukum daerah yang baik (%)	100	100		
		Persentase tata kelola peningkatan kesejahteraan rakyat yang baik (%)	100	100		
21	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	100	100	Setda	
		Persentase terwujudnya peningkatan tata kelola dan administrasi pembangunan daerah (%)	100	100		
		Persentase terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100	100		
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (rasio)	56,34	56		
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	9,9	10		
22	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD (%)	99,49	100	Bappeda	
23	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang PMM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	82,14	100	Bappeda	
		Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	85,71	100		
		Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang IPW dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	83,33	100		
24	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (%)	80	100	Bappeda	
		Indeks Inovasi Daerah (indeks)	796	30,82		
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program antara KUA PPAS dan APBD (%)	100	100,00	BPKAD	
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja (%)	95	80,00		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		Persentase Hasil Analisis Kondisi Keuangan Daerah (%)	100	100,00		
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan (rasio)	13,12	13,20		
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-4,92	-4,86		
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (rasio)	60	60		
		Opini Laporan Keuangan	100	100		
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (rasional)	4,27	4,20		
26	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD (%)	95	95,00	BPKAD	
		Manajemen Aset (%)	100	100		
27	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan	12,72	13,50	Bapenda	
		Persentase WP tertagih terhadap data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) (PBB) (%)	68,33	78,00		
		Rasio pajak daerah terhadap PAD (rasio)	25,87	25,00		
		Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan (%)	100	100,00		
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	0	5		
28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan (%)	80,54	100	Inspektorat	
29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi (%)	70	100	Inspektorat	
30	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (%)	7,12	17,7	Dinpusarda	
31	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban (%)	5,45	7,74	Dinpusarda	
32	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)	3,50	4,00	BKD	
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)	1,50	2,00		
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)	100	100		
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)	1,50	2,00		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	100	100			
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)	100	100			
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN (%)	62,50	90			
33	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar (%)	2	60	Diskominfo		
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100			
34	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	20	100	Diskominfo		
		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	20	100			
35	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia (%)	82,33	100	Sekretariat DPRD		
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia (%)	56,93	100			
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia (%)	100	100	Sekretariat DPRD		
37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase prestasi olahraga (%)	23,66	29,00	Disparpora		
		Peningkatan prestasi olahraga	0	49			
38	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase anggota pramuka yang dibina (%)	3,57	100,00	Disparpora		
III	Prioritas 3 : Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemic Covid-19	Angka kemiskinan (%)	16,02	14,30			Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,64	6,75			
		PDRB perkapita (ribu Rp)	14.446	15.000			
		Persentase capaian universal akses (%)	88,18	90			
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi (%)	0,89	100	Disnaker		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	30,98	6,61			
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten	34,19	69	Disnaker		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		/ kota (%)				
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	19,04	100	Disnaker	
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan(%)	0	100	Disnaker	
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif dan patuh (%)	25,68	36	Diskoperindag	
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	26,97	43	Diskoperindag	
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP sehat (%)	27,56	40	Diskoperindag	
7	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih (%)	0,40	4	Diskoperindag	
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMkM)	Persentase pertumbuhan usaha mikro (%)	17,5	5,6	Diskoperindag	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	34,16	38,66		
9	Program Pengembangan UMKM	Prosentase UMKM yg dibina (%)	1,18	1,58	Diskoperindag	
10	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang diberdayakan (%)	16,07	72	Dinsos KBPP	
11	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase warga negara migran korban kekerasan yang ditangani (%)	0	15	Dinsos KBPP	
12	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	17	85	Dinsos KBPP	
13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan satu dan dua (%)	28,45	37	Dinsos KBPP	
14	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (%)	85	85	Dinsos KBPP	
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik (%)	100	100	Dinsos KBPP	
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	60,87	86,96	Disparpora	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
	Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,05	0,35		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	28,08	33,8		
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum (%)	86,2	92	DPU TR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota (%)	86,2	92		
18	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	19,28	24,36	DLH	
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik (%)	92,69	97	DLH	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	92,69	97		
20	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	71,12	82	Disperkim	
21	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana (%)	100	100	Disperkim	
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota (%)	100	100		
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota (%)	100	100		
22	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1,63	0,36	Disperkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	36,88	95,0		
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang tertangani (%)	21,67	45		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	78,33	55,00		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
IV	Prioritas 4 : Pengembangan digitalisasi data, informasi komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	Indeks Desa Membangun (indeks)	0,7115	0,8289		Prioritas 7 : Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Persentase Desa Mandiri (%)	3,791	21,327		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	3,34	4,00		
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	81,75	83		
1	Program Penataan Desa	Persentase desa tertata (%)	0,47	50,47	Dinpermasdes	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa (%)	36,49	77,73	Dinpermasdes	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik (%)	0	50,47	Dinpermasdes	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya (%)	15,61	48,59	Dinpermasdes	
5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Informasi Publik (%)	66,00	90	Diskominfo	
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi public (%)	1	30		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	66,0	90		
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota (%)	27,00	65		
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	40,00	60		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	30.00	40		
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase <i>Network</i> terintegrasi (%)	70,73	76	Diskominfo	
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70,73	100		
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	87,30	85,09	Kecamatan	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa yang aktif (%)	94,69	96,79	Kecamatan	
9	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)	99,14	94,64	Kecamatan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL	
10	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (%)	100	100	Kecamatan		
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (%)	66,63	85,16	Kecamatan		
V	Prioritas 5 : Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Indeks ketimpangan antar wilayah (indeks)	0,38024	0,368		Prioritas 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	71,03	71,33			
		Persentase kelengkapan infrastruktur Kecamatan (%)	14,29	35,71			
		Rasio Konektivitas (%)	NA	80			
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi (indeks)	46	55			
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW (%)	100	100			
1	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan (%)	60	50	DPU TR		Prioritas 5 : Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
2	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Presentase kesesuaian Bangunan dan Lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan Tata Bangunan (%)	60.00	20.00	DPU TR		
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (rasio)	0,22	0,32			
3	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Kelengkapan PSU pada Kawasan Permukiman/ Perumahan (%)	NA	45	Disperkim		
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase penyelenggaraan lalu lintas (%)	50	90	Dishub		
		Presentase penyelenggaraan angkutan jalan (%)	80	95			
		Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,44	0,42			
		Rasio konektivitas	Na	76,75			
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Prosentase persyaratan pembangunan Pelabuhan (%)	70	100	Dishub		
6	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap (km)	68,66	88,69	DPU TR		
		Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota (km)	525,74	679,15	DPU TR		
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi (%)	5	10	DPU TR		
		Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,35	2,11			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan	0	0			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
		pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
8	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	68	68	DPU TR	
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (abrasi)	5	50		
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	0,01		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	73	82		
9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (%)	100	100	DPU TR	
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penangan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	60	60		
11	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	80	80	Disperkim	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanab Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	60	60		
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80	80		
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	80	80		
		Bidang tanah yang bersertifikasi (%)	58,08	76		
VI	Prioritas 6 : Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	85,83	88		Prioritas 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	4,85	75	Dinsos KBPP	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROGRAM RPJMD 2021-2026)	INDIKATOR KINERJA	KINERJA AWAL PERENCANAAN (2020)	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD (2026)	PD PENANGGUNG JAWAB	SASARAN/ARAH KEBIJAKAN NASIONAL
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	100	0,057	Dinsos KBPP	berdaya saing
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pernikahan usia anak	5,32	0,8	Dinsos KBPP	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	74,07	30	Dinsos KBPP	
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	22,5	45,95	Dinsos KBPP	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	100	0,08	Dinsos KBPP	

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Strategi pengembangan wilayah Kawasan Bregasmalang merupakan bagian dari percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Berdasar Perpres tersebut terdapat 11 (sebelas) Program Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.9
Evaluasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019
sampai dengan Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Implementasi
1	Pembangunan Jaringan Air Baku Kabupaten Pemalang	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih (JAB) Kabupaten Pemalang yang dilakukan adalah Pembangunan Jaringan Air Baku Pulosari Kabupaten Pemalang. Pembangunan JAB ini direncanakan akan mengambil air dari sumber mata air di Kabupaten Banyumas tepatnya di kawasan Hutan Lindung sekitar Hutan Raya Baturraden. Air dari sumber tersebut akan dialirkan melalui pipa sepanjang sekitar 16.000 m dan akan melewati Perhutani KPH Banyumas Timur dan KPH Pekalongan Barat. Kegiatan fisik JAB akan dibiayai dengan dana APBN melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Program Pembangunan Jaringan Air Bersih (JAB) Kabupaten Pemalang yaitu : - Penyusunan dokumen Survei Investigasi dan Desain (SID) Air Baku Pulosari Tahun 2019 oleh jajaran BBWS Pemali-Juana. - Pengusulan RKP Nasional Tahun 2022 dengan status super prioritas - Rencana pelaksanaan konstruksi Tahun 2022 oleh BBWS Pemali-Juana dan jaringan kelengkapannya Tahun 2023 melalui Ditjen Cipta Karya dan/ atau APBD Kabupaten Pemalang. - MoU antara Perumda Air Minum Tirta Mulia Pemalang dengan KPH Banyumas Timur dan KPH Pekalongan Barat Tahun 2021 - Dalam progres melengkapi Readines Criteria Amdal dan Persetujuan Tata Ruang/ Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) - Pemenuhan RC oleh Perumda Air Minum Tirta Mulia masih berproses dan masih terkendala dengan perijinan dan perbaikan dokumen AMDAL paska sidang Penilaian Kerangka Ancuan (KA) di DLHK Provinsi Jawa Tengah, paralel dengan pemenuhan syarat untuk KKPR kawasan hutan.
2	Pembangunan Bendungan Karanganyar	Program Pembangunan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pemalang direncanakan akan dibiayai dari dan APBN. Rencana ini akan berlokasi di Kecamatan Bantarbolang dan akan berdampak pada 5 (lima) desa yaitu Desa Wanarata, Desa Suru, Desa Karanganyar, Desa Sumurkidang dan Desa Banjarsari. Berkaitan dengan rencana pembangunan ini, Pemerintah Kabuaten Pemalang dalam hal ini DPU-TR Kabupaten Pemalang telah melaksanakan studi awal untuk sosialisasi dan menangkap respon masyarakat terkait dengan rencana pembangunan bendungan dan gambaran dampak yang akan terjadi. Pada Tahun 2020 Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Penyusunan Pra Studi Kelayakan Waduk Karanganyar. Terdapat dinamika pada masyarakat karena jika ketinggian bendungan maksimal maka terdapat 3 (tiga) dusun di Wanarata dan 1 (satu) dusun di Suru akan terdampak. Terdapat wacana pengurangan ketinggian bendungan atau merubah desain menjadi <i>long storage dam</i>. Pada Tahun 2021 hal tersebut akan dimatangkan dalam penyusunan Studi Kelayakan oleh BBWS Pemali-Juana namun ternyata terkena refocusing anggaran. Tahun 2022 ini juga belum terdapat kejelasan. Tahapan yang direncanakan dalam Program Pembangunan Bendungan Karanganyar di Kabupaten Pemalang dengan super prioritas ini adalah : - FS Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Implementasi
		- DED dan Model Tes Tahun 2022 - Amdal dan LARAP Tahun 2023 - Sertifikasi Desain Tahun 2024 - Ground Breaking Tahun 2025-2028 - Konstruksi rencana dilakukan tahun 2025-2029
3	Penanganan Kerusakan Pantai Kabupaten Pemalang	Kegiatan ini merupakan kewenangan provinsi Jawa Tengah dan dibutuhkan anggaran yang sangat besar melalui APBN Perencanaan yang telah dilakukan dalam penanganan kerusakan pantai Kabupaten Pemalang dan juga pantai Kabupaten/ Kota Tegal adalah : - DED 2017 (APBD Prov) oleh Dinas PU SDA Taru Prov. Jawa Tengah - Perlu penyesuaian Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K) - Penyusunan Detail Design Penanganan Rob (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang) oleh Dinas PU SDA Taru Prov. Jawa Tengah. - Fokus penanganan kerusakan pantai pada 8 (delapan) desa wilayah Kecamatan Ulujami. - Penanganan untuk mengatasi genangan rob di Kabupaten Pemalang ini adalah dengan membuat sistem polder yaitu, suatu sistem yang mengisolasi suatu area beserta sistim drainasenya terhadap masuknya air dari luar sistem. - Komponen yang diperlukan dalam sistim polder tersebut meliputi : • Tanggul Laut untuk melindungi/mencegah masuknya air laut ke daratan yang masuk secara langsung dari laut. • Peningkatan Tanggul Sungai Comal, Sungai Banger, Sungai Sembilangan Utara dan Sungai Sragi Lama Kab. Pemalang. • Kolam Retensi (Polder / Long Storage) dan Pompa. • Perbaikan sistem drainase yang berada didalam sistem polder • Pintu Pengatur untuk keperluan Irigasi Tambak pada lokasi yang masih terdapat areal tambak • Perbaikan Muara Sungai Banger dan Bangunan Jetty • Penanganan Abrasi - Dimungkinkan terdapat perubahan desain. - Status Super Prioritas - Konstruksi tahun 2024-2025
4	Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang	Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang direncanakan berlokasi di eks tanah HGU Mekenzy, dengan kawasan terdampak di wilayah Kecamatan Petarukan (Desa Kendarejo, Klareyan & Kendadoyong) dan Desa Pesantren Kec. Ulujami dengan pendanaan investasi swasta murni. Terdapat investor yang telah memperoleh izin prinsip namun belum terdapat realisasi, karena investor berencana membentuk kawasan industri energi terpadu dengan melibatkan investor lainnya. Dibutuhkan akses jalan langsung dari jalan arteri pantura dengan membangun ruas jalan baru yang dapat dilewati kendaraan berat/ truck tronton. Diperlukan juga ketersediaan air baku untuk pembangunan KI, operasional dan kebutuhan pekerja. Hingga saat ini belum ada info lanjutan dari investor dan belum masuk RKP Nasional tahun 2022. Fasilitasi Ijin prinsip, ijin lokasi, IMB,Amdal, dan Andalalin disiapkan oleh DPMPTSP Kab Pemalang Pembangunan Kawasan Energi Terpadu Kabupaten Pemalang : - Status Strategis - Pendanaan Swasta
5	Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang	Program Pembangunan Pasar Pagi Kabupaten Pemalang direncanakan akan didanai melalui APBN, saat ini dalam : - Status Strategis (Quickwin) - Belum masuk dalam RKP Nasional Tahun 2022 - Readines criteria telah siap - Penanggungjawab proyek adalah Kementrian PUPR - Jajaran Diskoperindag Kabupaten Pemalang masih terkendala pematangan lahan dan riviur DED oleh Kementerian PU. Target pematangan lahan dan riviur DED adalah bulan Agustus 2022 agar bulan Oktober 2022 dapat dilakukan lelang. Masih dalam proses pengalihan status Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di lokasi

No	Program/ Kegiatan	Implementasi
		pembangunan pasar
6	Pembangunan STA Kabupaten Pemalang	Pembangunan STA Kabupaten Pemalang : - Penyusunan Studi kelayakan pembangunan Sta (FS) tahun 2021 menggunakan APBD Kabupaten - Diusulkan dalam RKP Nasional Tahun 2022 - Status lanjut Prioritas - Lokasi Kecamatan Pulosari/ Belik - Pengadaan Lahan dan penyusunan Masterplan/ dialokasikan anggaran perubahan 2022 dengan dana APBD Kabupaten
7	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong Kabupaten Pemalang masuk dalam RKA-KL pada tahun 2021 dengan anggaran Dana alokasi Khusus (DAK) dengan proges kegiatan : Tahap 1 : - Volume 1.052 m2 dengan nilai anggaran 2.922.456.000 (DAK) - Status pelaksanaan pembangunan - Penanggung jawab proyek adalah Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Pemenang Tender PT. Putra Nangro Aceh - Sudah selesai dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 208.5/BAHPP/BPT/VIII/2021 Tahap II - Akan dilakukan kegiatan yang menjadi P1 yaitu : a. Jalan kawasan PPP Asemdayong Rp. 661.500.000,- b. Jalan Kawasan Pelabuhan Desa Asemdayong Rp.529.200.000,- c. Jalan akses penghubung kawasan pelabuhan Rp. 5.953.500.000,-
8.	Pengembangan Ekonomi berbasis Koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan	Belum adanya kejelasan rencana aksi, komitmen dan kemampuan Penanggung Jawab Proyek serta perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara K/L terkait mengenai prioritas program pada Perpres 79 ini
9.	Pengembangan Ekonomi berbasis pesantren	Belum adanya kejelasan rencana aksi, komitmen dan kemampuan Penanggung Jawab Proyek serta perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut antara K/L terkait mengenai prioritas program pada Perpres 79 ini
10.	Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana SMK Unggulan Sektor Industri Pariwisata, Industri kreatif, ketahanan pangan dan kemaritiman	Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana SMK Unggulan Sektor Industri Pariwisata, Industri kreatif, ketahanan pangan dan kemaritiman masuk kedalam RKA-KL Tahun 2021 dengan Penanggungjawab Dinas Pendidikan Provisini Jawa Tengah. Dalam Tahapan persiapan DED, FS dan data pendukung lainnya
11.	Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk Kabupaten Pemalang	Diakomodir dan dilaksanakan tahun 2022 dan Tahun 2023

Salah satu isu strategis Kabupaten Pemalang adalah masih tingginya kesenjangan antar wilayah, dimana daerah perkotaan mempunyai akses sarana prasarana umum yang lebih baik dan lengkap dibanding dengan daerah perdesaan. Agar kesenjangan antar wilayah dapat diturunkan, maka pembangunan yang dilaksanakan harus merata di semua wilayah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038, salah satu strategi guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan perkembangan wilayah adalah mengembangkan fungsi masing-masing Satuan Wilayah Pembangunan (SWP). Kabupaten Pemalang terbagi atas 5 (lima) SWP, yaitu :

- a. SWP Pemalang, meliputi Kecamatan Pemalang, Taman dan Petarukan dengan pengembangan fungsi pusat Pemerintahan Daerah, perdagangan dan jasa, industri transportasi, pariwisata, pertanian tanaman pangan, dan perikanan.
- b. SWP Comal, meliputi Kecamatan Ampelgading, Comal, Ulujami dan Bodeh dengan pengembangan fungsi perdagangan dan jasa, pertanian tanaman pangan, pariwisata, industri, pertambangan, dan perikanan.
- c. SWP Randudongkal, meliputi Kecamatan Randudongkal, Bantarbolang dan Warungpring dengan pengembangan fungsi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, industri, kehutanan, perikanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- d. SWP Belik, meliputi Kecamatan Belik dan Watukumpul dengan pengembangan fungsi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, agroindustri, kehutanan, perdagangan dan jasa, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.
- e. SWP Moga, meliputi pertanian hortikultura, pertanian tanaman pangan, pariwisata, perikanan, agroindustri, pertambangan, dan pengelolaan kawasan lindung.

Pembangunan yang dilaksanakan hendaknya merata pada kelima SWP tersebut sesuai pengembangan fungsi dan potensinya masing-masing.

Kebijakan lain yang diambil untuk pemerataan pembangunan adalah ditetapkannya plafon indikatif wilayah kecamatan (PIWK). PIWK adalah alokasi dana APBD yang digunakan untuk mengakomodir usulan dalam perencanaan partisipatif guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan berdasarkan prioritas hasil musrenbang kecamatan sebesar 25 Milyar rupiah setiap tahunnya yang dibagi untuk 14 kecamatan sesuai indeks kecamatan.

Adapun komponen yang digunakan untuk menghitung indeks kecamatan, meliputi jumlah penduduk, jumlah desa, luas wilayah, kondisi geografis, penduduk miskin, realisasi swadaya masyarakat, dan pelestarian kegiatan. Selanjutnya hasil penghitungan PIWK untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan Tahun 2023

	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Jumlah Desa		Luas Wilayah		Kondisi Geografis		Penduduk Miskin			Realisasi Swadaya Masyarakat		Pelestarian Kegiatan		Total Skor		Rincian Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (Rp.)
		Jumlah	Bobot = % X 1	Jumlah	Bobot = % X 3	Luas Wilayah	Bobot = % X 1	Skor	Bobot = % X 3	Jumlah	%	Bobot = % X 1	%	Bobot = % X 2	%	Bobot = % X 2	Total Skor	%	Total skor (%) X Rp.25 M
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Moga	76.437	5,02	10	13,51	41,40	3,71	3,25	22,41	53.013	69,36	7,30	5,17	20,45	76,11	19,92	92	0,071	1.775.597.050
2	Pulosari	63.818	4,19	12	16,22	87,52	7,84	3,75	25,86	44.920	70,39	7,41	7,10	28,08	75,00	19,63	109	0,084	2.100.714.487
3	Belik	122.844	8,07	12	16,22	124,54	11,16	4,00	27,59	99.114	80,68	8,50	5,50	21,75	70,00	18,32	112	0,086	2.146.227.799
4	Watukumpul	77.675	5,10	15	20,27	129,02	11,56	4,75	32,76	60.740	78,20	8,24	8,50	33,62	79,00	20,68	132	0,102	2.542.755.752
5	Bodeh	64.144	4,21	19	25,68	85,98	7,70	3,50	24,14	48.460	75,55	7,96	4,20	16,61	55,00	14,40	101	0,077	1.936.449.270
6	Bantarbolang	87.944	5,78	17	22,97	139,19	12,47	3,25	22,41	60.152	68,40	7,20	2,50	9,89	40,00	10,47	91	0,070	1.753.799.144
7	Randudongkal	115.200	7,57	18	24,32	90,32	8,09	3,25	22,41	59.909	52,00	5,48	3,10	12,26	47,00	12,30	92	0,071	1.777.665.138
8	Pemalang	208.114	13,67	20	27,03	101,93	9,13	2,25	15,52	102.567	49,28	5,19	1,50	5,93	50,00	13,09	90	0,069	1.722.298.272
9	Taman	192.770	12,66	21	28,38	67,41	6,04	2,25	15,52	117.808	61,11	6,44	2,00	7,91	45,00	11,78	89	0,068	1.706.233.432
10	Petarukan	176.271	11,58	20	27,03	81,92	7,34	2,50	17,24	129.193	73,29	7,72	2,50	9,89	47,00	12,30	93	0,072	1.790.327.212
11	Ampelgading	76.973	5,06	16	21,62	53,30	4,78	2,50	17,24	57.117	74,20	7,82	2,10	8,31	50,00	13,09	78	0,060	1.498.140.862
12	Comal	97.163	6,38	18	24,32	26,54	2,38	2,25	15,52	70.580	72,64	7,65	1,60	6,33	42,00	10,99	74	0,057	1.414.887.413
13	Ulujami	117.240	7,70	18	24,32	60,55	5,43	2,75	18,97	79.495	67,81	7,14	1,70	6,72	43,00	11,25	82	0,063	1.568.017.689
14	Warungpring	45.708	3,00	6	8,11	26,31	2,36	3,25	22,41	25.854	56,56	5,96	3,10	12,26	45,00	11,78	66	0,051	1.266.886.481
		1.522.301	100	222	300	1.115,93	100	43,50	300	1.008.922	949,48	100	50,57	200	764,11	200	1.300	1,000	25.000.000.000

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Pemalang, 2022
Kabupaten Pemalang Dalam Angka, 2022
DTKS Kabupaten Pemalang, 2022 (diolah)

Indikasi program yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 di masing-masing SWP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11
Intervensi Program Pada Tahun 2023 Berdasar SWP

No	Prioritas Daerah	Intervensi Program Indikatif	SWP
I	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemalang, Belik, Moga
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyuluhan Pertanian	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemalang, Comal
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemalang, Comal
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pemalang, Comal
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pemalang, Comal
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Pemalang, Randudongkal Belik
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemalang, Randudongkal Belik
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Pemalang, Randudongkal Belik
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pemalang, Randudongkal Belik
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemalang, Moga
		Program Pemasaran Pariwisata	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Promosi Penanaman Modal	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Persampahan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga

No	Prioritas Daerah	Intervensi Program Indikatif	SWP
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penanggulangan Bencana	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
II	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		
		Program Pengelolaan Pendidikan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Kurikulum	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengendalian Penduduk	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pendaftaran Penduduk	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pencatatan Sipil	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Sejarah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Arsip	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
III	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemic		

No	Prioritas Daerah	Intervensi Program Indikatif	SWP
	Covid-19		
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Hubungan Industrial	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMkM)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan UMKM	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Sosial	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Rehabilitasi Sosial	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penanganan Bencana	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemalang
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengembangan Perumahan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Kawasan Permukiman	Pemalang, Comal
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
IV	Pengembangan digitalisasi data, informasi komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)		
		Program Penataan Desa	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
V	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur		

No	Prioritas Daerah	Intervensi Program Indikatif	SWP
		Program penataan bangunan gedung	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program penataan bangunan dan lingkungannya	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pengelolaan Pelayaran	Pemalang
		Program penyelenggaraan jalan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program penyelenggaraan penataan ruang	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Penatagunaan Tanah	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
VI	Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak		
		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Perlindungan Perempuan	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pemalang, Comal, Randudongkal, Belik, Moga

4.4. Pagu Indikatif Per Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah beserta besaran pagu indikatif Tahun 2023, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.12
Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
Total Pagu Indikatif				1.368.355.028.470	100	
I	PRIORITAS 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,19-4,50	31.719.256.350	2,318	
		Laju Inflasi (%)	2,36			
		Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB (%)	1			
		Persentase pertumbuhan sektor Pertanian Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB (%)	5,14			
		Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB (%)	0,5			
		Persentase Kontribusi Pariwisata dalam PAD (%)	1,25			
		Pertumbuhan nilai realisasi penanaman modal (%)	3			
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) (indeks)	69,37			
		Angka kriminalitas (angka)	190			
		Kasus konflik sosial (kasus)	0			
		Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (%)	96			
		Indeks Risiko Bencana (indeks)	148			
		Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,75			
		Rasio kejadian kebakaran (%)	84			
		Indeks kerukunan umat beragama (indeks)	68,94			
		Kasus konflik agama (kasus)	0			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK (%)	30	327.200.000	0,024	Diskoperindag
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (%)	30			
		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah (%)	6			
2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI) (%)	100	50.000.000	0,004	Diskoperindag
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota (%)	100			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100			
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (%)	100			
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase industri yang masuk dalam SIINAS (%)	100	40.400.000	0,003	Diskoperindag
		Tersedianya iuformasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100			
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian sesuai kebutuhan (bibit, pupuk, Alsintan) (%)	80	3.934.845.580	0,288	Dispertan
5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	25	3.602.253.000	0,263	Dispertan
6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	10,33	479.254.420	0,035	Dispertan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian (%)	20	106.200.000	0,008	Dispertan
8	Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kelompok tani aktif (%)	5	638.014.000	0,047	Dispertan
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase TPI yang memenuhi standar (%)	74	538.781.000	0,039	Disperik
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Prosentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani (%)	24,00	705.000.000	0,052	Disperik
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase peningkatan pengawasan perikanan umum darat (PUD) (%)	4	71.219.000	0,005	Disperik
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Unit Pengolahan dan Pemasaran Ikan yang aman pangan (%)	63,87	340.000.000	0,025	Disperik
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase lumbung pangan yang aktif (%)	22,97	3.020.000.000	0,221	Dispertan
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan cadangan pangan (%)	20	525.000.000	0,038	Dispertan
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penurunan desa rawan pangan (%)	12	50.000.000	0,004	Dispertan
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang aman (%)	80	60.000.000	0,004	Dispertan
17	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Pelaku Usaha yang diawasi perijinannya (%)	0,5	95.000.000	0,007	Diskoperindag
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	8,5			
18	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang memenuhi syarat (%)	5,8	2.700.000.000	0,197	Diskoperindag
19	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	80	287.350.000	0,021	Diskoperindag
		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	97			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
20	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor (%)	26	240.000.000	0,018	Diskoperindag
21	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase alat-alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang (%)	29	115.000.000	0,008	Diskoperindag
22	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya (%)	0,6	80.100.000	0,006	Diskoperindag
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase kunjungan obyek wisata (%)	100	1.022.765.350	0,075	Disparpora
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	100			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota(%)	10			
		Tingkat hunian akomodasi (%)	29,32			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	0,55			
		Jumlah PAD retribusi pariwisata (Milyar Rp)	1,71			
24	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase objek wisata yang dipromosikan (%)	100	330.000.000	0,024	Disparpora
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi (%)	100	216.750.000	0,016	DPMPTSP
26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor (%)	3,05	83.914.500	0,006	DPMPTSP
27	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase terlaksananya Promosi Penanaman Modal (%)	100	109.980.000	0,008	DPMPTSP
		Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota (%)	2			
28	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase terselenggaranya Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal (%)	96	162.029.236	0,012	DPMPTSP
29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu (%)	44	301.321.500	0,022	DPMPTSP
30	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase realisasi perijinan (%)	100	30.370.764	0,002	DPMPTSP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun (%)	100	130.000.000	0,010	DLH
32	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan (%)	100	527.152.000	0,039	DLH
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota (indeks)	69,37			
		Indeks Kualitas Air (indeks)	47,28			
		Indeks Kualitas Udara (indeks)	89,48			
		Indeks Tutupan Lahan (indeks)	70,12			
33	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Pengelolaan Kehati (%)	100	100.000.000	0,007	DLH
34	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengendalian B3 & LB3 (%)	100	20.000.000	0,001	DLH
35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina (%)	100	160.000.00	0,012	DLH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota (%)	28			
36	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi (%)	100	171.000.000	0,012	DLH
37	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan yang diberikan (%)	100	34.000.000	0,002	DLH
38	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	100	40.000.000	0,003	DLH
39	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut (%)	83	5.592.848.000	0,409	DLH
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	76			
40	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	85	600.000.000	0,044	Bakesbangpol

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
41	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham politik (%)	55	1.518.508.000	0,111	Bakesbangpol
42	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan (%)	80	433.000.000	0,032	Bakesbangpol
43	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial (%)	65	100.000.000	0,007	Bakesbangpol
44	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan (%)	100.00	1.055.000.000	0,077	Satpol PP
		Persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan (%)	70.00			
45	Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (indeks)	0,75	700.000.000	0,051	BPBD
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	96			
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	95			
		Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100			
		Cakupan desa/kelurahan Tangguh bencana (%)	7,21			
46	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	75	225.000.000	0,016	Satpol PP
		Persentase Desa/ Kelurahan tanggap kebakaran (%)	20,27			
47	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham Ketahanan Bangsa, pencegahan penyalahgunaan narkoba, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan (%)	65	50.000.000	0,004	Bakesbangpol

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
II	Prioritas 2 :	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (indeks)	68,17	1.134.242.426.470	82,891	
	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	Rata-rata lama sekolah (tahun)	6,9			
		Harapan lama sekolah (tahun)	12,2			
		Usia Harapan Hidup (tahun)	73,7			
		Indeks Kebudayaan (indeks)	49,9			
		Persentase warisan budaya yang ditetapkan (%)	7,89			
		Nilai budaya literasi (%)	24,8			
		Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	66,58			
		Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (nilai)	71,15			
		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (indeks)	1,334			
		Manajemen Resiko Indeks (level)	2,25			
		Indeks Kearsipan (indeks)	50			
		Indeks Profesionalitas ASN (IPA) (indeks)	64,85			
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase terkelolanya pendidikan SD, SMP, PAUD, Nonformal/ Kesetaraan (%)	100	234.612.204.800	17,146	Dindikbud
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	100			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	100			
		Tingkat partisipasi warganegara usia 7-18 yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	100			
2	Program Pengembangan Kurikulum	Prosentase Pengembangan kurikulum	100	170.288.000	0,012	Dindikbud

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		yg dilaksanakan (%)				
		Persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan local (%)	100			
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (%)	100	239.750.000	0,018	Dindikbud
		Persentase pendidik dan tenaga pendidik SD dan SMP yang bersertifikat (%)	100			
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (rasio)	0,83	246.052.981.400	17,982	Dinkes
		Persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama) (%)	40			
		Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatn ibu hamil (%)	100			
		Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatn ibu bersalin (%)	100			
		Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatn bayi baru lahir (%)	100			
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	100			
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	100			
		Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	100			
		Persentase warga negara usia > 60 tahun yang mendapat pelayanan kesehtan sesuai standar (%)	100			
		Persentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100			
		Persentase penderita diabetes militus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100			
		Persentase penderita ODGJ yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		Persentase penderita TBC yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelynan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100			
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk (rasio)	197	10.037.500.000	0,734	Dinkes
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan alkes yang memenuhi standar (%)	77	233.542.000	0,017	Dinkes
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	100	345.292.600	0,025	Dinkes
8	Program Pengendalian Penduduk	Persentase kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian penduduk (%)	35	609.503.600	0,45	Dinsos KBPP
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	23	13.863.297.900	1,013	Dinsos KBPP
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Cakupan PUS yang ber KB yang diberdayakan (%)	85,84	227.242.700	0,017	Dinsos KBPP
11	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan (%)	77,82	1.218.605.000	0,089	Disdukcatpil
12	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil (%)	98,38	395.481.000	0,029	Disdukcatpil
13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama (%)	56,41	538.154.000	0,039	Disdukcatpil
14	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase data kependudukan yang mutakhir (%)	94	48.250.000	0,004	Disdukcatpil
15	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi (%)	100	340.839.000	0,025	Dindikbud
16	Program Pembinaan Sejarah	Persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi (%)	100	39.042.250	0,003	Dindikbud
17	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase warisan budaya benda yang diregistrasi (%)	100	335.694.750	0,025	Dindikbud
18	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan	3,13	275.000.000	0,02	Dinpusarda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		terstandarisasi (%)			0,029	
		Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (%)	55,45			
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terwujudnya tata kelola kesekretariatan dan rumah tangga KDH/WKDH/Sekda yang efektif dan efisien (%)	100	38.757.903.236	2,832	Setda
		Persentase terwujudnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien (%)	100			
		Persentase terwujudnya pelayanan keprotokolan pimpinan daerah yang efektif dan efisien (%)	100			
20	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terwujudnya Pelayanan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (%)	100	17.219.934.773	1,258	Setda
		Persentase terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien (%)	100			
		Persentase terwujudnya tata kelola produk hukum daerah yang baik (%)	100			
		Persentase tata kelola peningkatan kesejahteraan rakyat yang baik (%)	100			
21	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (%)	100	2.506.438.991	0,183	Setda
		Persentase terwujudnya peningkatan tata kelola dan administrasi pembangunan daerah (%)	100			
		Persentase terwujudnya tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta sesuai ketentuan yang berlaku (%)	100			
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (rasio)	56			
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	10			
22	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tingkat Keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD (%)	100	772.773.000	0,056	Bappeda

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
23	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang PMM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100	1.267.227.000	0,093	Bappeda
		Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang Ekonomi SDA dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100			
		Tingkat Keeselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rumpun Bidang IPW dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (%)	100			
24	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (%)	83	695.000.000	0,051	Bappeda
		Indeks Inovasi Daerah (indeks)	30,52			
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Nomenklatur dan Pagu Program antara KUA PPAS dan APBD (%)	100	494.982.040.000	36,174	BPKAD
		Persentase Penyerapan Anggaran Belanja (%)	74			
		Persentase Hasil Analisis Kondisi Keuangan Daerah (%)	100			
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan (rasio)	13,15			
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-4,89			
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) (rasio)	60			
		Opini Laporan Keuangan	100			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (rasio)	4,23			
26	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD (%)	95	1.709.100.000	0,125	BPKAD
		Manajemen Aset (%)	100			
27	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap total pendapatan	13,5	1.600.000.000	0,117	Bapenda
		Persentase WP tertagih terhadap data pajak daerah yang ditetapkan (PBB) (PBB) (%)	78			
		Rasio pajak daerah terhadap PAD (rasio)	25			
		Persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan (%)	100			
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	5			
28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan (%)	85	3.068.278.470	0,224	Inspektorat
29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan pendampingan dan asistensi (%)	85	623.747.000	0,046	Inspektorat
30	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja (%)	17,7	65.000.000	0,005	Dinpusarda
31	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban (%)	7,1	10.000.000	0,001	Dinpusarda
32	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya (%)	3,7	2.787.736.000	0,204	BKD
		Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya (%)	1,7			
		Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi (%)	100			
		Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya (%)	1,7			
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian (%)	100			
		Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan (%)	100			
		Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	75			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		(%)				
33	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase statistik sektoral yang tersedia sesuai standar (%)	30	218.575.000	0,016	Diskominfo
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100			
34	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase konten informasi yang telah diamankan (%)	100	181.425.000	0,013	Diskominfo
		Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	100			
35	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia (%)	75,45	15.949.264.000	1,166	Sekretariat DPRD
		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia (%)	87,45			
36	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kepada DPRD yang tersedia (%)	100	40.220.315.000	2,939	Sekretariat DPRD
37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase-prestasi olahraga (%)	26	215.000.000	0,016	Disparpora
		Peningkatan prestasi olahraga	46			
38	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Prosentase anggota pramuka yang dibina (%)	50	1.810.000.000	0,132	Disparpora
III	Prioritas 3 : Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemic Covid-19	Angka kemiskinan (%)	15,39	20.548.073.000	1,502	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,75			
		PDRB perkapita (ribu Rp)	14.700			
		Persentase capaian universal akses (%)	89,13			
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi (%)	3,52	425.000.000	0,031	Disnaker
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,59			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		(%)				
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota (%)	54	705.000.000	0,052	Disnaker
3	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	21,88	150.000.000	0,011	Disnaker
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan(%)	30	15.000.000	0,001	Disnaker
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase koperasi aktif dan patuh (%)	30	45.000.000	0,003	Diskoperindag
		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	36			
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Prosentase KSP/USP sehat (%)	34	10.000.000	0,001	Diskoperindag
7	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase anggota/ karyawan koperasi yang terlatih (%)	1	630.000.000	0,046	Diskoperindag
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Prosentase pertumbuhan usaha mikro (%)	4,7	205.000.000	0,015	Diskoperindag
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha (%)	35,66			
9	Program Pengembangan UMKM	Prosentase UMKM yg dibina (%)	1,53	1.503.585.000	0,110	Diskoperindag
10	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang diberdayakan (%)	28,1	307.000.000	0,022	Dinsos KBPP
11	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase warga negara migran korban kekerasan yang ditangani (%)	100	504.000	0,000	Dinsos KBPP
12	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	51	414.496.000	0,030	Dinsos KBPP
13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemberian Jaminan Perlindungan Sosial pada Penduduk yang terdaftar ditingkat kesejahteraan	28,48	1.465.906.100	0,107	Dinsos KBPP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		satu dan dua (%)				
14	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota (%)	100	74.093.900	0,005	Dinsos KBPP
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Prosentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik (%)	100	23.000.000	0,002	Dinsos KBPP
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	73,91	215.000.000	0,016	Disparpora
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,19			
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	30,98			
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum (%)	89	5.599.794.000	0,409	DPU TR
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota (%)	89			
18	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar (%)	21,67	200.000.000	0.015	DPU TR
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik (%)	94	5.374.694.000	0,393	DPU TR
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	94			
20	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik (%)	76	410.000.000	0,030	DPU TR
21	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana (%)	100	575.000.000	0,042	Disperkim

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota (%)	100			
		Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota (%)	100			
22	Program Kawasan Permukiman	Persentase luas Kawasan Permukiman Kumuh (%)	1,09	1.450.000.000	0,106	Disperkim
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani (%)	65			
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH yang tertangani (%)	33	750.000.000	0.055	Disperkim
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	67			
IV	Prioritas 4 : Pengembangan digitalisasi data, informasi komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)	Indeks Desa Membangun (indeks)	0,7672	21.826.393.250	1,595	
		Persentase Desa Mandiri (%)	10,9			
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	3,36			
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (%)	82,4			
1	Program Penataan Desa	Persentase desa tertata (%)	18,87	414.754.400	0,030	Dinpermasdes
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat PADes nya dari hasil kerjasama desa (%)	61,14	149.190.400	0,011	Dinpermasdes
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa beradministrasi pemerintahan baik (%)	18,87	3.673.105.650	0,268	Dinpermasdes
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya (%)	28,73	668.311.000	0,49	Dinpermasdes

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
	Hukum Adat					
5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Ketersediaan Informasi Publik (%)	80	2.235.775.000	0,163	Diskominfo
		Proporsi penduduk yang mengakses informasi public (%)	15			
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	80			
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota (%)	50			
		Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (%)	55			
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	40			
6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Network terintegrasi (%)	73	5.211.928.000	0,381	Diskominfo
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100			
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan Publik yang tersedia	87,3	577.378.500	0,042	Kecamatan
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase masyarakat desa yang aktif (%)	95,71	7.263.009.100	0,531	Kecamatan
9	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan (%)	100	192.447.000	0,014	Kecamatan
10	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani (%)	100	769.848.200	0,056	Kecamatan
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Persentase desa bertata kelola pemerintahan baik (%)	73,74	670.646.000	0,049	Kecamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
V	Prioritas 5 : Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur	Indeks ketimpangan antar wilayah (indeks)	0,378	159.518.879.400	11,658	
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (indeks)	71,18			
		Persentase kelengkapan infrastruktur Kecamatan (%)	14,29			
		Rasio Konektivitas (%)	70			
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi (indeks)	52			
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW (%)	100			
1	Program penataan bangunan gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik Sesuai Tertib Administrasi Tata Bangunan (%)	50	6.285.000.000	0,459	DPU TR
2	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Presentase kesesuaian Bangunan dan Lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan Tata Bangunan (%)	20	225.000.000	0,016	DPU TR
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (rasio)	0,26			
3	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Kelengkapan PSU pada Kawasan Permukiman/ Perumahan (%)	36	1.920.540.000	1,204	Disperkim
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase penyelenggaraan lalu lintas (%)	75	2.327.291.400	0,170	Dishub
		Persentase penyelenggaraan angkutan jalan (%)	85			
		Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0,43			
		Rasio konektivitas	76			
5	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase persyaratan pembangunan Pelabuhan (%)	100	334.580.000	0,024	Dishub
6	Program penyelenggaraan jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap (km)	80,86	142.841.477..000	10,439	DPU TR
		Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota (km)	619,15			
7	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi (%)	10	150.000.000	0,11	DPU TR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	1,23			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0			
8	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik (%)	68	5.034.991.000	0,368	DPU TR
		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (abrasi)	7			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0,01			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	69			
9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang (%)	100	200.000.000	0,015	DPU TR
10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi	60	150.000.000	0,011	Disperkim
11	Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	80	50.000.000	0,004	Disperkim
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	60			
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	80			
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	80			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN/PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	%	PD PENANGGUNG JAWAB
		Bidang tanah yang bersertifikasi (%)	67			
VI	Prioritas 6 : Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,13	500.000.000	0,037	
1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	5,4	165.000.000	0,012	Dinsos KBPP
2	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	100	135.000.000	0,010	Dinsos KBPP
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase pernikahan usia anak	4,75	55.000.000	0,004	Dinsos KBPP
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data gender dan anak	81,48	20.000.000	0,001	Dinsos KBPP
5	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak	27,03	84.039.000	0,006	Dinsos KBPP
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif	100	40.961.000	0,003	Dinsos KBPP

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2023 mendatang untuk membiayai belanja daerah berasal dari pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.545.962.865.000,- (dua trilyun lima ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan pembiayaan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Pendapatan daerah berasal dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp358.353.030.000,- (tiga ratus lima puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 14,08%. Pendapatan Transfer sebesar Rp2.187.609.835.000,- (dua trilyun seratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan kontribusi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.980.764.339.000, (satu trilyun sembilan ratus delapan puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 77,8%. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp206.845.496.000,- (dua ratus enam milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 8,12%. Sedangkan dari sisi pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Pemalang masih tetap mengandalkan SiLPA (Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) yang diperkirakan sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) yang akan dipergunakan untuk menutup defisit anggaran belanja sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan membiayai pembentukan dana cadangan sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) serta penyertaan modal daerah sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) secara rinci kerangka pendanaan dan belanja daerah berdasarkan struktur APBD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
 Kerangka Proyeksi Pendanaan dan Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2023	%
4	PENDAPATAN DAERAH	2.545.962.865.000	100,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	358.353.030.000	14,08
4.1.01	Pajak Daerah	87.241.200.000	3,43
4.1.02	Retribusi Daerah	39.534.700.000	1,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.049.198.000	1,02
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	205.527.932.000	8,07
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.187.609.835.000	85,92
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.980.764.339.000	77,80
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	206.845.496.000	8,12
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	-
4.3.02	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	-
5	BELANJA DAERAH	2,565,962,865,000	100,00
5.1	Belanja Operasi	1,903,281,850,000	74,17
5.1.01	Belanja Pegawai	1,182,136,349,000	46,07
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	657,819,110,000	25,64
5.1.03	Belanja Bunga	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-
5.1.05	Belanja Hibah	57,161,691,000	2,23
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,164,700,000	0,24
5.2	Belanja Modal	154,102,026,000	6,01
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10,000,000,000	0,39
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,027,456,000	1,79
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17,761,053,000	0,69
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	67,169,194,000	2,62
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,144,323,000	0,51
5.3	Belanja Tidak Terduga	11,000,000,000	0,43
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11,000,000,000	0,43
5.4	Belanja Transfer	497,578,989,000	19,39
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12,677,590,000	0,49
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	484,901,399,000	18,90
	Surplus / Defisit	20.000.000.000	
6	Pembiayaan	20.000.000.000	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	60.000.000.000	100,00
6.1.01	SiLPA	60.000.000.000	100,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000.000	100,00
6.2.01	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	50,00
6.2.03	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	50,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0
	Pembiayaan Netto	20.000.000.000	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SiLPA)	0	

Sumber : BPKAD Kabupaten Pemalang, 2022
 Bapenda Kabupaten Pemalang, 2022

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dijabarkan kedalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang

Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan yang terdiri dari 14 kecamatan, dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Beberapa program dan kegiatan yang langsung memberikan kontribusi terhadap penyelesaian 5 (lima) isu strategis pembangunan mendapat alokasi pendanaan karena sesuai 6 (enam) prioritas pembangunan daerah di Tahun 2023. Program dan kegiatan prioritas tersebut tersaji pada tabel:

Tabel 5.2.
Program dan Kegiatan Prioritas RKPD 2023

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	PD
I	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana			
	1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Diskoperindag
	2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Diskoperindag
	3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Diskoperindag
	4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Dispertan
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	
	5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Dispertan
			Pengembangan Prasarana Pertanian	
	6	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dispertan
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	
7	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Dispertan	
8	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Dispertan	
9	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperik	
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat		

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
		Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Disperik
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
11	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Disperik
12	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Disperik
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
13	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dispertan
14	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Dispertan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
15	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dispertan
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
16	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Dispertan
17	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Diskoperindag
		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
18	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskoperindag
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
19	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Diskoperindag
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
20	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diskoperindag
21	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Diskoperindag
22	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Diskoperindag
23	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Disparpora
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
24	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Disparpora
25	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Disparpora
26	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	DPMPTSP
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
27	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
28	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	DPMPTSP
29	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
30	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP
31	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	DLH
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
32	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DLH
33	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	DLH
34	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	DLH
35	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	DLH
36	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	DLH

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
	Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
37	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DLH
38	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	DLH
39	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	DLH
40	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
41	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Bakesbangpol
42	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
43	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
44	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Satpol PP
45	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BPBD
46	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Satpol PP
47	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Bakesbangpol
II	Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dindikbud
2	Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dindikbud
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar,	Dindikbud

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
		PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinkes
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinkes
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinkes
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinkes
8	Program Pengendalian Penduduk	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
9	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dinsos KBPP
10	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	PD
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
11	Program Pendaftaran Penduduk		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Disdukcatpil
			Penataan Pendaftaran Penduduk	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
12	Program Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcatpil
13	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcatpil
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
14	Program Pengelolaan Profil Kependudukan		Penyusunan Profil Kependudukan	Disdukcatpil
15	Program Pengembangan Kebudayaan		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
16	Program Pembinaan Sejarah		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dindikbud
17	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Dindikbud
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
18	Program Pembinaan Perpustakaan		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinpusarda
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Setda
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
			Penataan Organisasi	
20	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Administrasi Tata Pemerintahan	Setda
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
21	Program Perekonomian Dan Pembangunan		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Setda
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
22	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
23	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bappeda
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
24	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Bappeda
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
25	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	BPKAD
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
26	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
27	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Bapenda
28	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
29	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
30	Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Dinpusarda
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	
31	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Dinpusarda
32	Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	BKD
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
		Pengembangan Kompetensi ASN	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
33	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
34	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
35	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Sekretariat DPRD
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
		Peningkatan Kapasitas DPRD	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
36		Layanan Administrasi DPRD	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sekretariat DPRD
37	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Disparpora
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
38	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Disparpora
III	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemic Covid-19		
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Disnaker
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker
3	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker
		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker
5	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah	Diskoperindag
6	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diskoperindag
7	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Diskoperindag
8	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMkM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Diskoperindag
9	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Diskoperindag
10	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
11	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dinsos KBPP
12	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Dinsos KBPP

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dinsos KBPP
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
14	Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
15	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disparpora
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
17	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
18	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
20	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
21	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Disperkim
		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	
		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
22	Program Kawasan Permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Disperkim
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	
23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Disperkim

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	PD
IV	Pengembangan digitalisasi data, informasi komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (Desa Digital/DEDI)			
	1	Program Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Dinpermasdes
	2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Dinpermasdes
	3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermasdes
	4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinpermasdes
	5	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
	6	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan	
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		
9	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
10	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan	
11	Program Pembinaan Dan Pengawasan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan	
V	Penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur			
	1	Program penataan bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	DPU TR
	2	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
	3	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Disperkim
	4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Dishub
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD		Kegiatan	PD
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
	5	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Dishub
	6	Program penyelenggaraan jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	DPU TR
	7	Program pengembangan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	DPU TR
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
	8	Program pengelolaan sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
VI	9	Program penyelenggaraan penataan ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	DPU TR
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
	10	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Disperkim
	11	Program Penatagunaan Tanah	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Disperkim
	Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak			
	1	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
	2	Program Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

No	Prioritas Daerah dan Program RKPD	Kegiatan	PD
3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinsos KBPP
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Pembangunan Kabupaten Pemalang di Tahun 2023 diarahkan untuk Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana, dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan, melalui peningkatan kapasitas industri kecil; peningkatan pengelolaan sentra dan kluster industri berbahan baku lokal; pengembangan kawasan industri Pemalang dan pengembangan industri dalam konsep Kota Industri (KOIN); serta penguatan SIINAS;
- 2) Peningkatan produktivitas sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; peningkatan produksi peternakan dan pengawasan mobilisasi hewan ternak dan kesehatan hewan ternak dan masyarakat veteriner; peningkatan sarana dan prasarana pertanian; peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani berbasis korporasi dan penyuluh; pengembangan kawasan pangan; fasilitasi izin usaha pertanian; dan penguatan penanganan bencana pertanian;
- 3) Peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan ikan (pengembangan alat tangkap ramah lingkungan) dan produksi budidaya, peningkatan pemberdayaan nelayan tangkap dan budidaya, peningkatan kualitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI); perlindungan nelayan; serta peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI);
- 4) Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat untuk pencapaian pola pangan harapan; ketersediaan pangan dengan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pemenuhan pangan keluarga, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat dengan lumbung

pangan; pengelolaan distribusi pangan; peningkatan keanekaragaman pangan dengan konsumsi seimbang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan keamanan pangan;

- 5) Peningkatan perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas dan kuantitas pasar rakyat sebagai sarana distribusi, peningkatan pemasaran melalui *e-commerce* dan keberantaraan pasar (*market linkages*), peningkatan kualitas produk standar ekspor dan peningkatan perlindungan konsumen;
- 6) Peningkatan peran pariwisata dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kunjungan wisatawan dengan peningkatan kualitas obyek wisata dan penguatan desa wisata (DEWI) dengan memanfaatkan potensi alam yang dimiliki sebagai obyek wisata baru, peningkatan *event* pariwisata skala lokal dan regional, pengembangan jejaring pemasaran dan bekrjasama dengan sekolah di Kabupaten Pemalang, pembentukan TIC (*Tourism Information Center*), pengembangan destinasi wisata baru dan wisata virtual;
- 7) Peningkatan nilai investasi dalam penanaman modal melalui peningkatan kualitas pelayanan perijinan, pengembangan iklim penanaman modal, memberikan informasi peta potensi investasi, peningkatan promosi investasi, pembangunan mall pelayanan publik, kemudahan perizinan dan pemberian insentif pada investor;
- 8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan keanekaragaman hayati dan tutupan lahan, pengawasan kualitas udara dan air, peningkatan pengelolaan sampah dengan metode 3R (*reuse, reduce, dan recycle*), peningkatan pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA), penanganan limbah B3 (sementara dan penyimpanan), pengawasan usaha/kegiatan lingkungan yang berijin, dan penguatan kelompok masyarakat;
- 9) Peningkatan pelayanan penanganan bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, optimalisasi peran relawan dan peningkatan sarana prasarana penanganan bencana termasuk kebakaran;
- 10) Peningkatan kondusivitas wilayah melalui pencegahan dan penurunan potensi konflik dan gangguan ketentraman serta ketertiban umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ideologi Pancasila, karakter kebangsaan, keberagaman dan politik.

Selanjutnya prioritas yang kedua adalah pembangunan SDM berkarakter budaya unggul, dengan fokus pada :

- 1) Peningkatan kualitas pendidikan dan pemenuhan SPM bidang pendidikan melalui peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, penanganan ATS dengan program “NJUH SEKOLAH MANING”, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan menengah dan tinggi;
- 2) Peningkatan pelestarian budaya melalui pelestarian warisan budaya benda dan tak benda;
- 3) Peningkatan budaya literasi pada satuan pendidikan dan masyarakat melalui peningkatan kualitas perpustakaan dengan perbaikan sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan layanan perpustakaan secara digital (iPemalang), peningkatan kegiatan perpustakaan pasca baca, penambahan koleksi bacaan,

peningkatan pelayanan perpustakaan keliling, penyediaan pojok baca/Taman Baca Masyarakat (TBM) di Ruang Terbuka Publik (RTP) dan pelaksanaan berbagai kegiatan pembudayaan gemar membaca;

- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pemenuhan SPM bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di fasilitas kesehatan, pembangunan fasilitas rujukan, peningkatan kesehatan ibu dan anak, peningkatan kesehatan lingkungan, pemberdayaan dan promosi kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan meningkatkan kepesertaan JKN, peningkatan perilaku hidup sehat dalam konsep keluarga sehat peningkatan partisipasi olahraga dengan penyediaan fasilitas sarana prasarana *sport area*;
- 5) Pembangunan kependudukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dengan meningkatkan partisipasi keluarga berencana (KB), meningkatkan kualitas kelembagaan (BKB, BKL, BKR), pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi dengan Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa (LABKD), Layanan Administrasi Kependudukan Online (Lakone) dan mobil pelayanan (moyan);
- 6) Peningkatan akuntabilitas pembangunan dan profesionalisme ASN melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang inovatif berdasarkan kebijakan manajemen resiko dan pengelolaan arsip serta peningkatan kompetensi dan *Merit System*.

Prioritas pembangunan yang ketiga adalah penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang terdampak pandemi Covid-19, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE), dengan fokus pada :

- 1) Pengurangan beban hidup masyarakat miskin ekstrem melalui penanganan Anak Tidak Sekolah (P-ATS) dengan pemberian beasiswa tingkat SD dan SMP; penyediaan pembiayaan sekolah bagi penduduk miskin peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberian Jamkesda dan bantuan kepesertaan JKN PBI; penanganan kerawanan pangan; dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pemberian bantuan beras dan bantuan langsung tunai (BLT), pemberian jaminan dan perlindungan sosial sesuai dengan SPM bidang sosial;
- 2) Peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui peningkatan kesempatan kerja dan keterampilan dengan memberi kemudahan investasi dan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja; peningkatan peran desa dalam upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan pengembangan potensi desa (produk unggulan desa/prudes, Bumdes dan Bumdesma); peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil dengan pemberdayaan UMKM; peningkatan peran pemuda dalam berwirausaha dan inklusi sosial dengan pembinaan kewirausahaan pemuda dan pelatihan literasi berbasis inklusi sosial;
- 3) Pengurangan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan cakupan *universal access* dengan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan sumber air minum, fasilitas listrik murah, penyediaan fasilitas BAB, dan penanganan kawasan kumuh; serta peningkatan konektivitas antar

wilayah dengan melaksanakan pembangunan jalan di daerah kemiskinan ekstrem;

- 4) Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan melalui penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Pemalang, penguatan *database* kemiskinan dengan pelaksanaan verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat, optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
- 5) Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kapasitas calon tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi sesuai pangsa pasar; peningkatan produktivitas kerja; peningkatan kapasitas dan kuantitas BLK; peningkatan kesempatan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan bursa kerja; peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui kepemilikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan), penyelesaian hubungan industrial (tripartit); dan peningkatan partisipasi transmigrasi melalui penjangkauan minat;
- 6) Peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan usaha mikro ke dalam kluster yang telah terbentuk, pendataan usaha mikro, peningkatan kewirausahaan, pengembangan usaha mikro, penguatan koperasi sebagai salah satu akses permodalan, dan pemberian subsidi bunga pinjaman UMKM.

Adapun prioritas pembangunan keempat adalah pengembangan digitalisasi data, informasi, komunikasi serta layanan masyarakat di Desa (DEDI), dengan fokus pada :

- 1) Pengembangan Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang (Sidekem) yang terintegrasi melalui penyajian dan pemanfaatan data potensi desa yang didukung keamanan sistem informasi; peningkatan digitalisasi data dan informasi desa, meliputi data kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), penataan wilayah, mitigasi bencana, pendidikan (anak tidak sekolah/ATS), kemiskinan (DTKS), dan regulasi desa (JDIH desa); pemanfaatan teknologi digital dan internet dalam layanan desa, meliputi layanan kesehatan (lansia, ibu, anak, bayi), mitigasi bencana, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan desa wisata;
- 2) Pemberdayaan lembaga desa dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet, pemanfaatan Layanan Desa Mandiri (LDM), aplikasi kependudukan Lakone, layanan desa wisata digital; peningkatan pemanfaatan *website* desa dan media sosial desa, serta fasilitasi menuju Desa Pintar (*smart village*);
- 3) Peningkatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik difokuskan pada integrasi sistem perencanaan, penganggaran, evaluasi dan monitoring, implementasi 6 pilar *smart city*, peningkatan keterbukaan informasi public;
- 4) Peningkatan pelayanan publik yang didekatkan ke masyarakat melalui pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Prioritas pembangunan kelima adalah penguatan kebijakan pemerataan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dengan fokus pada :

- 1) Pengembangan kota kecamatan melalui peningkatan sarana dan prasarana kewilayahan, sarana prasarana publik dan konektivitas komunikasi antar wilayah;
- 2) Peningkatan konektivitas melalui pembangunan, pemeliharaan dan rehab jalan/jembatan yang menghubungkan daerah potensi perekonomian dan

pariwisata; peningkatan jalan antar desa menjadi jalan kabupaten; peningkatan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, mempermudah moda transportasi, dan peningkatan kelaikan angkutan;

- 3) Peningkatan pengelolaan sumberdaya air melalui peningkatan kualitas, operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada Wilayah Sungai (WS);

Dan prioritas pembangunan keenam adalah pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil *gender* dan ramah anak, dengan fokuskan pada :

- 1) Peningkatan kualitas perencanaan responsif gender (PUG), penguatan *database* gender dan anak, dan penguatan kelembagaan penanganan kekerasan perempuan dan anak;
- 2) Peningkatan pendapatan perempuan rentan, peningkatan pemahaman partisipasi politik perempuan, dan peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
- 3) Peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak serta perwujudan kabupaten layak anak.

Enam Prioritas dengan program sebagaimana tabel V.2 diatas dijabarkan dalam kegiatan-sub kegiatan sesuai Urusan Pemerintahan sebagaimana uraian dibawah ini.

5.2.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, dengan target capaian persentase terkelolanya pendidikan dan tingkat partisipasi SD, SMP, PAUD dan kesetaraan masing-masing sebesar 100%. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang Pendidikan yang dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan melakukan penambahan ruang kelas baru sebanyak 3 unit, pembangunan perpustakaan sekolah sebanyak 3 unit, pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah sebanyak 4 paket, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sebanyak 32 unit, rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 14 paket, pengadaan mebel sekolah sebanyak 5 paket, penyediaan beasiswa untuk 1300 siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 14 paket, penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik sebanyak 23.000 siswa, pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sebanyak 1.968 siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 9.008 orang serta pengelolaan Dana BOS pada 738 sekolah.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan melakukan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 42 paket, rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 2 unit, pengadaan mebel sekolah sebanyak 10 paket, penyediaan beasiswa untuk 850 siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa sebanyak 19 paket, penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik sebanyak 23.200 siswa, pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa sebanyak 3.590

- siswa, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah pada 5 sekolah, pengelolaan Dana BOS pada 66 sekolah serta peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS sebanyak 116 sekolah.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen di 70 unit PAUD dan pengelolaan Dana BOP pada 792 unit PAUD.
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan melakukan penyelenggaraan proses belajar serta pengelolaan Dana BOP pada 16 satuan pendidikan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum, dengan target capaian persentase pengembangan kurikulum yang dilaksanakan serta persentase SD dan SMP yang memiliki kurikulum muatan lokal masing-masing sebesar 100%, dilakukan dengan kegiatan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar melalui pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dengan peserta sebanyak 400 guru.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan target capaian persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang terfasilitasi serta persentase pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP bersertifikat masing-masing sebesar 100%, dilakukan dengan kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan melalui perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan serta penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan sejumlah 100 orang.

2. Kesehatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target capaian rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk sebesar 0,76; persentase rumah sakit rujukan terakreditasi (minimal strata utama) sebesar 50% dan pemenuhan SPM bidang Kesehatan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pembangunan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya sebanyak 1 unit, rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas sebanyak 2 unit, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 2 unit, pengadaan obat dan vaksin sebanyak 10 paket serta pengadaan bahan habis pakai sebanyak 5 paket.
 - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 21.858 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin sebanyak 20.865 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebanyak 19.871 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan balita sebanyak 78.149 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebanyak 199.094 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif sebanyak 807.347 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebanyak 179.928 orang, pengelolaan

pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebanyak 137.824 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sebanyak 18.561 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebanyak 1.158 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis sebanyak 16.019 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sebanyak 31.784 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa, pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat, pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga, pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan, pengelolaan pelayanan promosi kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya, pengelolaan surveilans kesehatan, pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa sebanyak 100 orang, pengelolaan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA sebanyak 1 orang, pengelolaan upaya kesehatan khusus, pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan, pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan sekolah sebanyak 100 orang, penyelenggaraan kabupaten sehat, operasional pelayanan Puskesmas sebanyak 25 Puskesmas, operasional pelayanan kesehatan lainnya, pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di kabupaten sebanyak 25 unit, investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal) sebanyak 1 investigasi, pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah, serta penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT).

- 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan melakukan pengelolaan data dan informasi kesehatan, pengelolaan sistem informasi kesehatan, serta pengadaan alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet sebanyak 4 unit.
 - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebanyak 12 unit; peningkatan tata kelola rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten sebanyak 5 unit; peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan sebanyak 2 unit; serta penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan target capaian rasio tenaga kesehatan per seratus ribu penduduk sebesar 197, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan; pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan.

- 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota dengan melakukan perencanaan dan distribusi serta pemerataan SDM kesehatan; pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar sebanyak 10 orang; pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan.
 - 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat kabupaten sebanyak 10 orang.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dengan target capaian persentase sarana kefarmasian, alkes dan PIRT yang memenuhi standar sebesar 80%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT).
 - 2) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan melakukan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan IRT dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT.
 - 3) Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga dengan melakukan pemeriksaan post market pada produk makanan-minuman IRT yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sebanyak 12 unit.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat dengan target capaian cakupan desa siaga sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat pada 25 desa siaga.
 - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat pada 96.000 rumah tangga
 - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) pada 5 UKBM.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan target capaian persentase jaringan sumber daya air dalam kondisi baik sebesar 68%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA WS kewenangan kabupaten sebanyak 1 dokumen; pembangunan bangunan perkuatan tebing sepanjang 0,05 km dan normalisasi/restorasi sungai sepanjang 0,6 km.
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan sepanjang 0,679 km; operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan sepanjang 0,1 km.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan target capaian persentase penduduk yang memiliki akses air minum sebesar 90,7% dilakukan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota melalui pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan sebanyak 90 SR dan peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan sebanyak 486 SR. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum.
 - c. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan target capaian persentase terbangunnya sarana prasarana persampahan sesuai standar sebesar 21,67% dilakukan dengan kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota melalui pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang melayani 50 rumah tangga dan rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS sebanyak 1 unit.
 - d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan target capaian persentase penduduk yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik sebesar 94,6% dilakukan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota melalui pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman yang melayani 350 rumah tangga. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum.
 - e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan target capaian persentase jaringan drainase dalam kondisi baik sebesar 75,20% dilakukan dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainasi yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota melalui rehabilitasi saluran drainase perkotaan sepanjang 2.100 meter; operasi dan pemeliharaan sistem drainase sepanjang 1.350 meter.
 - f. Program Penataan Bangunan Gedung dengan target capaian persentase bangunan gedung pemerintah daerah dalam kondisi baik sesuai tertib administrasi tata bangunan sebesar 50% dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian IMB dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung melalui penyelenggaraan penerbitan IMB, sertifikat laik fungsi, peran tenaga ahli bangunan gedung, pendataan bangunan gedung serta implementasi SIMBG sebanyak 100 dokumen; perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah kabupaten/kota sebanyak 4 dokumen; rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota sebanyak 2 unit.

- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan target capaian persentase kesesuaian bangunan dan lingkungannya dengan peraturan dan perencanaan tata bangunan sebesar 20% serta rasio kepatuhan IMB sebesar 1% dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota melalui penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 1 kawasan.
- h. Program Penyelenggaraan Jalan dengan target capaian persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 69,53% atau 619,15 km dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota melalui penyusunan rencana, kebijakan dan strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan sebanyak 6 dokumen; survei kondisi jalan/jembatan sebanyak 7 lokasi; pelebaran jalan menuju standar sepanjang 1 km; rekonstruksi jalan sepanjang 15 km; rehabilitasi jalan sepanjang 74 km; pemeliharaan rutin jalan sepanjang 225,49 km; pembangunan jembatan sepanjang 12 m; pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 1.000 m; penanggulangan bencana/tanggap darurat sepanjang 25 km.
- i. Program Pengembangan Jasa Konstruksi dengan target capaian persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi sebesar 10%, rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 1,23% dan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebesar 0% dilakukan dengan kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui pelaksanaan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebanyak 25 orang; fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi sebanyak 25 orang.
- j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan target capaian persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota guna peningkatan investasi daerah dengan melakukan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang sebanyak 3 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR kabupaten/kota sebanyak 5 kegiatan.
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi pelaksanaan penataan ruang sebanyak 4 kegiatan.
 - 4) Penyelenggaran penataan ruang sebagai dukung untuk penataan akses reformasi agraria.

4. Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan dengan target capaian pemenuhan SPM bidang perumahan dan kawasan permukiman sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan identifikasi

- perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan; pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.
- 2) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana sebanyak 1 orang; sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR-FLPP sebanyak 1 orang.
 - 3) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 15 unit; penyusunan site plan dan/DED bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen; pembangunan rumah bagi korban bencana sebanyak 1 unit; pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 1 unit.
 - 4) Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan melakukan pelaksanaan pembagian rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 15 unit; penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana kabupaten/kota atau relokasi program kabupaten/kota sebanyak 15 dokumen.
 - 5) Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus dengan melakukan fasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik/penghuni rumah susun sebanyak 12 laporan; penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus sebanyak 1 dokumen.
 - 6) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik sebanyak 15 dokumen.
- b. Program Kawasan Permukiman dengan target capaian persentase luas kawasan permukiman kumuh sebesar 0,97% dan persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten yang ditangani sebesar 65%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengenfalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh sebanyak 12 kegiatan.
 - 2) Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan melakukan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebanyak 2 dokumen; pembentukan/pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh sebanyak 1 kegiatan; penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh sebanyak 5 kegiatan.

- 3) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan melakukan penyusunan rencana tapak (site plan) dan DED peremajaan/pemugaran permukiman kumuh sebanyak 2 dokumen; perbaikan RTLH sebanyak 15 unit; kerjasama perbaikan RTLH beserta PSU sebanyak 5 unit.
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan target capaian persentase RTLH yang tertangani sebesar 33% dan berkurangnya jumlah unit RTLH sebanyak 67% dilakukan dengan kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota melalui perbaikan RTLH untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar sebanyak 25 unit.
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan target capaian persentase kelengkapan PSU pada kawasan permukiman/perumahan sebesar 36% yang dilakukan dengan kegiatan urusan penyelenggaraan PSU perumahan melalui perencanaan penyediaan PSU perumahan sebanyak 1 dokumen; penyediaan PSU di perumahan untuk menunjang fungsi hunian sebanyak 10 lokasi; koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan sebanyak 10 kegiatan; verifikasi dan penyerahan PSU permukiman dari pengembang sebanyak 5 dokumen.

5. Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sebesar 100% dan persentase Perda dan Perbup yang ditegakkan sebesar 100%. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pencegahan gangguan trantibum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli di 14 kecamatan, pengamanan di 10 unit obyek vital dan pengawalan 60 rombongan tamu VVIP; penindakan atas gangguan trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa sebanyak 80 kasus; koordinasi penyelenggaraan trantibumlinmas tingkat kabupaten/kota sebanyak 3 kegiatan; pemberdayaan linmas dalam rangka trantibum sebanyak 400 satlinmas; peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM sebanyak 120 orang; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan trantibum sebanyak 4 unsur; penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakkan Perda dan perkada kepada 34 orang. Patroli yang dilakukan Satpol PP selain untuk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum juga diarahkan untuk penanganan ATS, yaitu dengan menjaring anak usia sekolah yang berkeliaran di jalan pada

- saat jam sekolah. Diharapkan anak yang tertangkap akan jera dan mendorongnya untuk kembali melanjutkan sekolah.
- 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan melakukan sosialisasi penegakkan Perda dan Perbup kepada 25 peserta; pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup sebanyak 24 peraturan; dan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perbup sebanyak 24 peraturan.
 - 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan kapasitas dan karier PPNS sebanyak 4 orang.
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan target capaian persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebesar 75% dan persentase desa/kelurahan tanggap kebakaran sebesar 20,27%. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota dengan peserta sebanyak 200 orang; pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota sebanyak 100 kasus; penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran sebanyak 50 orang; pembinaan aparatur pemadam kebakaran sebanyak 27 orang; penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran sebanyak 25 instansi.
 - 2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk 150 orang; pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran sebanyak 40 orang; dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana sebanyak 40 stel.
- c. Program Penanggulangan Bencana dengan target capaian Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,75; cakupan warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 96%; cakupan warganegara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebesar 95%; cakupan warganegara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar 100% dan cakupan desa/kelurahan tangguh bencana sebesar 7,21%. Program ini mendukung pemenuhan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan penyusunan kajian risiko bencana kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen; sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana) kepada 150 orang.
 - 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan melakukan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap

bencana sebanyak 2 unit; pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan; penanganan pascabencana kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan; gladi kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 90 orang.

- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan melakukan respon cepat darurat bencana kabupaten/kota sebanyak 3 SKPDB; penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota untuk 2.000 orang.

6. Sosial

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan target capaian persentase PSKS yang diberdayakan sebesar 40,13%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang sebanyak 1 kegiatan.
 - 2) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 10 orang; peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten.kota sebanyak 14 orang; peningkatan kemampuan PSKS keluarga kewenangan kabupaten/kota sebanyak 20 keluarga; peningkatan kemampuan PSKS kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten/kota sebanyak 2 lembaga; peningkatan kemampuan SDM dan penguatan LK3 sebanyak 13 sertifikat.
- b. Program Penanganan Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan target capaian persentase penanganan warganegara migran korban kekerasan yang tertangani sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal melalui fasilitasi pemulangan warganegara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untu dipulangkan ke desa/kelurahan asal sebanyak 2 orang.
- c. Program Rehabilitasi Sosial dengan target capaian pemenuhan SPM bidang sosial sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan melakukan penyediaan permakanaan untuk 200 orang; penyediaan sandang untuk 150 orang; penyediaan alat bantu sebanyak 11 orang; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 30 orang; pemberian bombingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 145 orang; pemberian bimbingan sosial kepada keluaraga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat sebanyak 177 orang; fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah, dan KIA sebanyak 30 orang; pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 25 orang; pemberian layanan data dan pengaduan sebanyak 70 orang; pemberian layanan kedaruratan sebanyak 42 orang; pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 10 orang; pemberian

layanan rujukan sebanyak 25 orang.

- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dengan melakukan pemberian layanan data dan pengaduan sebanyak 20 orang; pemberian layanan kedaruratan sebanyak 20 orang; penyediaan permakanan sebanyak 12 orang; penyediaan sandang sebanyak 12 orang; penyediaan alat bantu sebanyak 5 orang; penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti sebanyak 12 orang; pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 12 orang; pemberian bimbingan sosial kepada keluarag PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA sebanyak 12 orang; fasilitasi pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah dan KIA sebanyak 25 orang; pemberian akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 10 orang; pemberian pelayanan penelusuran keluarga sebanyak 10 orang; pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebagianuak 10 orang; pemberian layanan rujukan sebanyak 10 orang; kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan target capaian persentase pemberian jaminan perlindungan sosial pada penduduk yang terdaftar di tingkat kesejahteraan satu dan dua sebesar 28,48%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan melakukan penjangkauan anak-anak terlantar sebanyak 10 orang; rujukan anak-anak terlantar sebanyak 10 orang; pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar sebanyak 77 orang.
 - 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 84.100 orang; pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 78.750 keluarga; fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga sebanyak 75 keluarga; fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat sebanyak 10 orang.
- e. Program Penanganan Bencana dengan target capaian persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan makanan untuk 50 orang; penyediaan sandang untuk 25 orang; penyediaan tempat penampungan pengungsi sebanyak 3 unit; penanganan khusus bagi kelompok rentan sebnayak 50 orang; pelayanan dukungan psikososial untuk 25 orang.
 - 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana sebanyak 1 kampung; koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana sebanyak 37 orang.
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target capaian persentase taman makan pahlawan dalam kondisi baik sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota melalui rehabilitasi sarana dan prasarana TMP nasional

kabupaten/kota sebanyak 1 makam; pemeliharaan TMP nasional kabupaten/kota sebanyak 1 makam; dan pengamanan TMP nasional kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.

5.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target capaian persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 6,61% dan tingkat produktivitas tenaga kerja sebesar 48,36%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan melakukan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasar klaster kompetensi sebanyak 64 orang.
 - 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta kepada 10 LPKS.
 - 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dengan melakukan penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi sebanyak 10 perizinan.
 - 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan melakukan pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil sebanyak 3 perusahaan.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan target capaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota sebesar 66,99% dilakukan dengan kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota melalui pelayanan antar kerja sebanyak 10.000 orang dan perluasan kesempatan kerja untuk 80 orang.
- c. Program Hubungan Industrial dengan target capaian persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) sebesar 21,88%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan sebanyak 5 perusahaan.
 - 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan suatu daerah kabupaten/kota sebanyak 3 kasus; pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah kabupaten/kota sebanyak 4 LKS; dan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 60 orang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target capaian persentase ARG pada belanja langsung APBD sebesar 5,40%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG sebanyak 1 kegiatan; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG sebanyak 2 kegiatan; dan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kepada 40 perangkat daerah.
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi kepada 20 organisasi.
 - 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan sebanyak 50 orang.
- b. Program Perlindungan Perempuan dengan target capaian persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan sebanyak 100 orang; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan sebanyak 50 layanan.
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan sebanyak 1 kegiatan; dan penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus sebanyak 50 orang.
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target capaian persentase pernikahan usia anak sebesar 4,75%, program ini dilakukan melalui kegiatan:
 - 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak sebanyak 20 perangkat daerah; pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan perlindungan anak bagi keluarga sebanyak 3 kegiatan; dan pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga sebanyak 1 kegiatan.
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi

- kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebanyak 22 lembaga; peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebanyak 33 orang; dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga sebanyak 1 kegiatan.
- 3) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pelaksanaan penyediaan layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan perlindungan anak sebanyak 15 layanan.
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target capaian persentase OPD yang memiliki data gender dan anak sebesar 81,48% dilakukan dengan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui penyediaan data gender dan anak kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen; serta penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) dengan target capaian persentase desa/kelurahan layak anak sebesar 27,03%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha sebanyak 20 organisasi; serta koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.
 - 2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 50 anak; koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 1 kegiatan; pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 1 kegiatan; dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak sebanyak 1 kegiatan.
- f. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target capaian persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan komprehensif sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak serta koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan 40 perangkat daerah.
 - 2) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 50 anak; koordinasi dan

sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 50 anak; pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 2 jenis; dan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus sebanyak 1 kegiatan.

3. Pangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan target capaian persentase lumbung pangan yang aktif sebesar 22,97% dilakukan dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui penyediaan infrastruktur lumbung pangan sebanyak 3 unit; penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya di 2 desa; serta koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik di 5 unit lumbung pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target capaian jumlah ketersediaan cadangan pangan sebanyak 20 ton, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan melakukan penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan sebanyak 15 komoditas; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya sebanyak 1 kegiatan; pemantauan stok, pasokan dan harga pangan sebanyak 54 komoditas di 6 pasar; pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan sebanyak 18 kelompok sejumlah 620 orang; dan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia pada 4 gapoktan.
 - 2) Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan sebanyak 1 kegiatan; penyusunan rencana kebutuhan pangan lokal sebanyak 13 kegiatan, dan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebanyak 4 ton.
 - 3) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan melakukan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita per tahun sebanyak 1 kegiatan; dan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di 7 desa.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan target capaian persentase penurunan desa rawan pangan sebesar 12%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dengan melakukan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan sebanyak 40 desa.
 - 2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan

kabupaten/kota sebanyak 4 kegiatan; dan pelaksanaan, pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan sebanyak 7 kecamatan.

- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan target capaian persentase pangan segar yang aman sebesar 80% dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota melalui penguatan kelembagaan keamanan pangan segar sebanyak 1 kegiatan; dan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan sebanyak 3 produk.

4. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan target capaian penanganan sengketa pertanahan yang dilakukan melalui mediasi sebesar 60% dilakukan dengan kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sebanyak 2 dokumen; dan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan sebanyak 4 kasus.
- b. Program Penatagunaan Tanah dengan target capaian persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sebesar 80%; tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absantee sebesar 60%; persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sebesar 80%; tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal sebesar 80%; dan bidang tanah yang bersertifikat sebanyak 67% dilakukan dengan kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah sebanyak 100 titik lokasi.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target capaian persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan melakukan pembuatan dan pelaksanaan KLHS rencana tata ruang sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan melakukan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sebanyak 1 dokumen serta KLHS RPJPD sebanyak 1 dokumen
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan target capaian persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan sebesar 100%; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 69,65; Indeks Kualitas Air sebesar 47,83;

Indeks Kualitas Udara sebesar 89,48; dan Indeks Tutupan Lahan sebesar 70,02 dilakukan dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut sebanyak 2 kegiatan; koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebanyak 1 kegiatan; dan pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota sebanyak 2 kegiatan.

- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati) dengan target capaian persentase pengelolaan kehati sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keanekaragaman hayati sebanyak 1 dokumen.
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) dengan target capaian persentase pengendalian B3 dan LB3 sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3 melalui verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan syarat administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 sebanyak 25 kegiatan.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan target capaian persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina sebesar 100% dan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab sebesar 28% dilakukan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 30 kegiatan.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan target capaian persentase kelompok masyarakat yang teredukasi sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang LH untuk lembaga kemasyarakatan sebanyak 4 lembaga; dan pendampingan gerakan peduli LH sebanyak 11 kegiatan.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan target capaian persentase penghargaan yang diberikan sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan LH pada 11 entitas.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan target capaian persentase penanganan pengaduan masyarakat sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota melalui pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH sebanyak 15 pengaduan.

- i. Program Pengelolaan Persampahan dengan target capaian persentase sampah yang terangkut sebesar 83% dan terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota sebesar 76% dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah melalui penyusunan kaidah dan strategi daerah pengelolaan sampah sebanyak 1 dokumen; pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sebanyak 1 kegiatan; penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolah dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota sebanyak 80.000 ton sampah; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota sebanyak 110 unit.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program Pendaftaran Penduduk dengan target capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan sebesar 78,72%. Pada program ini akan ditingkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan Kartu Keluarga, KTP elektronik serta surat keterangan pindah melalui kegiatan :
 - 1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk sebanyak 25.000 dokumen; peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk sebanyak 12 kegiatan; serta pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan sebanyak 14.400 dokumen.
 - 2) Penataan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pengadaan dokumen kependudukan selain bangko KTP-el, formulir dan uku terkait pendaftaran penduduk sebanyak 2 dokumen.
 - 3) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan melakukan pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk sebanyak 250 dokumen.
- b. Program Pencatatan Sipil dengan target capaian persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil sebesar 98,75%. Pada program ini akan ditingkatkan kualitas pelayanan dalam penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan serta akta kematian yang dilakukan dengan kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil melalui pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting sebanyak 32.000 dokumen; dan peningkatan dalam pelayanan catatan sipil sebanyak 2 layanan.
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target capaian persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama sebesar 56,41%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan melakukan pengolahan dan penyajian data kependudukan sebanyak 12 dokumen; serta kerjasama pemanfaatan data kependudukan sebanyak 6 dokumen.
 - 2) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan melakukan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,

- evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan informasi adminduk sebanyak 1 dokumen.
- 3) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi adminduk sebanyak 6 kegiatan; fasilitasi terkait pengelolaan informasi adminduk sebanyak 12 kegiatan; sosialisasi terkait pengelolaan informasi adminduk sebanyak 18 kegiatan; serta komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebanyak 2 kegiatan.
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan target capaian persentase data kependudukan yang mutakhir sebesar 97% dilakukan dengan kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan melalui penyediaan data kependudukan sebanyak 1 dokumen dan penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain sebanyak 1 dokumen.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa dengan target capaian persentase desa tertata sebesar 18,87% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa melalui pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa sebanyak 1 desa; fasilitasi tata wilayah desa sebanyak 15 desa; fasilitasi kewenangan desa sebanyak 40 desa; dan fasilitasi sarana dan prasarana desa sebanyak 211 desa.
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan target capaian persentase desa yang meningkat PADesa-nya dari hasil kerjasama desa sebesar 61,14% dilakukan dengan kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa melalui fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten sebanyak 14 kegiatan; fasilitasi kerjasama antar dengan pihak ketiga dalam kabupaten sebanyak 3 kegiatan; dan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan sebanyak 6 kegiatan.
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target capaian persentase desa beradministrasi pemerintahan baik sebesar 18,87% dilakukan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa melalui fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sebanyak 4 data; fasilitasi penyusunan produk hukum desa di 211 desa; fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa di 211 desa; fasilitasi pengelolaan keuangan desa di 211 desa; pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 42 orang; fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa di 211 desa; evaluasi pengawasan peraturan desa di 211 desa; penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di 175 desa; fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di 41 desa; fasilitasi penyusunan profil desa di 211 desa; fasilitasi manajemen pemerintahan desa di 211 desa; fasilitasi pengelolaan aset desa di 14 desa; pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD sebanyak 424 orang; fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa di 10 desa; fasilitasi pembinaan laporan kepala desa di 211 desa; dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan di 3 desa/kelurahan.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan target capaian persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang berdaya sebesar 28,73% dilakukan dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karangtaruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat sebanyak 4 kegiatan; peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karangtaruna), lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat sebanyak 250 lembaga; fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan PADesa sebanyak 20 kegiatan; fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna sebanyak 1 kegiatan; fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat sebanyak 1 kegiatan; serta fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebanyak 222 kegiatan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk dengan target capaian persentase Pasangan Usia Subur yang memiliki istri usia dibawah 20 tahun sebesar 34% dilakukan dengan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota melalui perumusan parameter kependudukan.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target capaian angka prevalensi kontrasepsi modern sebesar 24%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan lokal.
 - 2) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dengan melakukan penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakkan, pelaynan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas KB/PLKB.
 - 3) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian pendidtribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya; peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebanyak 400 orang; pelayanan KB medis sebanyak 20 orang; penyediaan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan menggunakan MKJP; pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 600

- kegiatan; dukungan operasional pelayanan KB bergerak di 14 kecamatan; dan peningkatan kesertaan KB pria sebanyak 80 orang.
- 4) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB dengan melakukan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB sebanyak 2 organisasi; serta pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di 237 kampung KB.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target capaian cakupan PUS yang ber-KB yang diberdayakan sebesar 85,84%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melakukan pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, UPPKS dan pemberdayaan ekonomi keluarga sebanyak 51 kelompok; pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebanyak 2.950 lembar kartu kembang anak, 2 unit rak besi dan 9.813 unit sarana lainnya; orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebanyak 56 kegiatan; orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebanyak 288 orang; penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga di 222 desa/kelurahan; serta promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - 2) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan melakukan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi mitra kerja sebanyak 1 kegiatan.

9. Perhubungan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target capaian persentase penyelenggaraan lalu lintas sebesar 90%; persentase penyelenggaraan angkutan jalan sebesar 95%, kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C ratio) sebesar 0,42; serta rasio konektivitas sebesar 86,6, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan melakukan pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; dan pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota.
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan melakukan pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota sebanyak 2 unit; penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan; serta rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan.

- 3) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung).
 - 4) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota.
 - 5) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor; pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor; serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 1 unit.
 - 6) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota; serta forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.
 - 7) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan dengan melakukan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor sebanyak 50 inspeksi/audit; pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantau terminal sebanyak 2 inspeksi/audit.
 - 8) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 kabupaten sebanyak 1.200 kegiatan.
 - 9) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota sebanyak 23 kegiatan.
 - 10) Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan menyediakan data dan informasi tarif kelas ekonomi angkutan orang dan angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Pengelolaan Pelayaran dengan target capaian persentase persyaratan pembangunan pelabuhan yang terpenuhi sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau melalui fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau sebanyak 1 dokumen. Hal ini guna mendukung perwujudan pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik dengan target capaian persentase ketersediaan informasi publik sebesar 80%; proporsi penduduk yang mengakses informasi publik sebesar 15%; persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sebesar 80%; persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar 50%; informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan sebesar 55%; serta akses publik terhadap informasi keuangan daerah sebesar 40% dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui monitoring opini dan aspirasi publik; pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik; pengelolaan media komunikasi publik; pelayanan informasi publik; layanan hubungan media; kemitraan dengan pemangku kepentingan; penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; penguatan tata kelola komisi informasi di daerah; penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; serta penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota.
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target capaian persentase network terintegrasi sebesar 73% dan persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Diskominfo sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah.
 - 2) Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah; pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik; penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah; pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten cerdas; serta pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan target capaian persentase koperasi aktif dan patuh sebesar 30% dan meningkatnya koperasi yang berkualitas sebesar 36% dilakukan dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota melalui pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi sebanyak 50 koperasi; serta pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 2 kegiatan.

- b. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan target capaian persentase KSP/USP sehat sebesar 34% dilakukan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi sebanyak 50 koperasi.
- c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan target capaian persentase anggota/karyawan koperasi yang terlatih sebanyak 4 % dilakukan dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi sebanyak 190 orang.
- d. Program Pemberdayaan UMKM dengan target capaian persentase pertumbuhan usaha mikro sebesar 5,6% dan meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha sebanyak 35,66% dilakukan dengan kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan melalui pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro sebanyak 1 kegiatan; pemberdayaan melalui kemitraan usah mikro sebanyak 2 kegiatan; fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro sebanyak 30 orang; serta koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro sebanyak 1 kegiatan.
- e. Program Pengembangan UMKM dengan target capaian persentase UMKM yang dibina sebesar 1,53% dilakukan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil melalui fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi sebanyak 12 kegiatan.

12. Penanaman Modal

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target capaian persentase peningkatan jumlah investor sebesar 3,05%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penetapan kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 2 regulasi.
 - 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan melakukan penyusunan rencana umum penanaman modal sebanyak 1 dokumen.
- b. Program Promosi Penanaman Modal dengan target capaian persentase terlaksananya promosi penanaman modal sebesar 100% dan persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota sebesar 3,127% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal sebanyak 1 dokumen; serta pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal sebanyak 1 kegiatan.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target capaian persentase terselenggaranya pelayanan perijinan dan non perijinan penanaman modal

sebesar 97% dilakukan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota melalui penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang melayani 5.250 ijin; pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal sebanyak 250 kegiatan; serta penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan sebanyak 4 layanan pengaduan.

- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target capaian persentase pelaku usaha yang memberikan pelaporan dan kegiatan tepat waktu sebesar 50% dilakukan dengan kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 15 kegiatan; koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 8 kegiatan; serta koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 100 kegiatan.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan target capaian persentase realisasi perijinan sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 1 data.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan target capaian persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebesar 86,96%; tingkat pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri sebesar 0,07%; serta tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 30,98%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda pelopor; koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula; dan pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi RAD.
 - 2) Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten sebanyak 1 kegiatan.
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dengan target capaian persentase prestasi olahraga sebesar 20% dan peningkatan prestasi olahraga sebanyak 15 medali, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan

- single event tingkat kabupaten sebanyak 1 kegiatan; partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaraan kejuaraan sebanyak 400 peserta.
- 2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan melakukan pemberian penghargaan olahraga kabupaten kepada 50 olahragawan.
 - 3) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan melakukan pengembangan organisasi keolahragaan pada 3 organisasi.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dengan target capaian persentase anggota pramuka yang dibina sebanyak 50% dilakukan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan melalui peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah.

14. Statistik

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target capaian persentase statistik sektoral sesuai standar sebesar 30%; persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah sebanyak 100% dan persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah sebanyak 100% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral; peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi; serta membangun metadata statistik sektoral.

15. Persandian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan target capaian persentase konten informasi yang telah diamankan sebesar 100% dan tingkat keamanan informasi pemerintah sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik; serta penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

16. Kebudayaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan dengan target capaian persentase warisan budaya tak benda yang diregistrasi sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan sebanyak 2 kegiatan.
 - 2) Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan obyek pemajuan tradisi budaya; serta pembinaan SDM, lembaga dan pranata tradisional sebanyak 5 kegiatan.

- b. Program Pembinaan Sejarah dengan target capaian persentase sejarah Pemalang yang diregistrasi sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pemberdayaan SDM dan lembaga sejarah lokal kabupaten/kota.
- c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan target capaian persentase warisan budaya benda yang diregistrasi sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan pengawasan cagar budaya keluar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.

17. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan dengan target capaian persentase perpustakaan terstandarisasi sebesar 3,13% dan nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 55,45 program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten/kota sebanyak 4 layanan.
- 2) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum sebanyak 1 perpustakaan; serta pengembangan literasi berbasis inklusi sosial sebanyak 4 perpustakaan.

18. Kearsipan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip dengan target capaian tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja sebesar 17,7%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis sebanyak 500 berkas; pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis sebanyak 460 berkas; pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten/kota sebanyak 5 kegiatan.
 - 2) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis sebanyak 500 arsip.
 - 3) Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN sebanyak 2 layanan.
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan target capaian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebesar 7,1% dilakukan dengan kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun melalui penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun terhadap 1.000 arsip.

5.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target capaian persentase TPI yang memenuhi standar sebesar 74%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan penyediaan data dan informasi sumber daya ikan sebanyak 2 dokumen serta penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap sebanyak 50 unit.
 - 2) Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan kapasitas nelayan kecil sebanyak 200 orang.
 - 3) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan melakukan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI serta pelayanan penyelenggaraan TPI.
 - 4) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pelayanan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT sebanyak 100 rekomendasi.
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan target capaian persentase sarana dan prasarana budidaya yang tertangani sebesar 24%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan melakukan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil sebanyak 7 kelompok; pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil sebanyak 2 kelompok; pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha sebanyak 3 kelompok; serta pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebanyak 3 kelompok.
 - 2) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan melakukan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan sebanyak 1 dokumen; penyediaan prasarana pembudidayaan ikan sebanyak 5 unit; penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan sebanyak 5 unit; pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya sebanyak 5 kegiatan; serta perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat seluas 2.194 Ha.
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan target capaian persentase peningkatan pengawasan perikanan umum daratan (PUD) sebesar 4% dilakukan dengan kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota melalui pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan sebanyak 4 kegiatan.

- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan target capaian persentase unit pengolahan dan pemasaran ikan yang aman pangan sebesar 63,87%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil dengan melakukan penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dengan melakukan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.
 - 3) Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil.

2. Pariwisata

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan target capaian persentase kunjungan obyek wisata sebesar 100%; persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan sebesar 100%; persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten sebesar 10%; tingkat hunian akomodasi sebesar 29,32%; kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 0,73%; serta jumlah PAD retribusi pariwisata sebanyak 1,71 milyar rupiah, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan melakukan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota.
 - 2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan melakukan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota; pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota; serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
 - 3) Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan fasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata.
- b. Program Pemasaran Pariwisata dengan target capaian persentase obyek wisata yang dipromosikan sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota melalui penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri; fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota; penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota baik dalam dan luar negeri; serta peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri.
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan target capaian persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi sebanyak 100% dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata; sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata; serta fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target capaian persentase sarana pertanian sesuai kebutuhan (bibit, pupuk, alsintan) sebesar 80%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan melakukan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi sebanyak 2 jenis alat dan mesin pertanian, kepada 128 KPL dan 9.700 petani; pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 3 jenis alat pasca panen.
 - 2) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan melakukan peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman sebanyak 4 jenis.
 - 3) Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer dengan melakukan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan sebanyak 15 jenis di 5 tempat.
 - 4) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengujian mutu benih dan bibit ternak untuk 10 hektar.
 - 5) Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan melakukan pengadaan benih/bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain sebanyak 5 komoditas.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target capaian persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik sebesar 25%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Pengembangan Prasarana Pertanian dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya sebanyak 221 orang.
 - 2) Pembangunan Prasarana Pertanian dengan melakukan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani sebanyak 7 unit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani sebanyak 3 unit; pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan di kecamatan serta sarana pendukungnya sebanyak 3 unit.
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target capaian persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 10,35%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis sebanyak 35 kali.

- 2) Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan sebanyak 5 unit.
 - 3) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner sebanyak 2 unit.
 - 4) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan melakukan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan di 14 pasar sebanyak 4 kegiatan; pengawasan peredaran hewan dan produk hewan sebanyak 3 jenis;
 - 5) Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan dengan melakukan pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan di 3.000 tempat.
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target capaian persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian sebesar 20% dilakukan dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota melalui pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di 14 kecamatan sebanyak 3 kegiatan.
- e. Program Penyuluhan Pertanian dengan target capaian persentase kelompok tani aktif sebesar 5% dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa sebanyak 14 kegiatan; pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa sebanyak 7 kegiatan.

4. Perdagangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan target capaian persentase pelaku usaha yang diawasi perizinannya sebanyak 0,5% dan persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) sebesar 9%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan melakukan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sebanyak 1 dokumen.
 - 2) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan melakukan fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang.
 - 3) Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap pengguna akhir bahan berbahaya (PA-B2) maupun produsen B2 (P-B2) sebanyak 42 kegiatan.

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan target capaian persentase sarana distribusi perdagangan yang memenuhi syarat sebesar 5,88%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan melakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan sebanyak 1 unit.
 - 2) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya dengan melakukan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan sebanyak 12 kegiatan.
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan target capaian persentase stabilisasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting sebesar 80% dan persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 97%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan melakukan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat sebanyak 12 kegiatan.
 - 2) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 kabupaten/kota sebanyak 240 kegiatan; pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 kabupaten/kota sebanyak 2 kegiatan.
 - 3) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan melakukan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi sebanyak 12 kegiatan.
- d. Program Pengembangan Ekspor dengan target capaian persentase pertumbuhan nilai ekspor sebesar 27,5% dilakukan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten/kota pada 10 pelaku usaha; pameran dagang nasional dengan 20 pelaku usaha; pameran dagang lokal dengan 20 pelaku usaha; serta pembinaan pelaku usaha ekspor sebanyak 10 pelaku usaha.
- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan target persentase alat-alat ukur takar timbang dan pelengkapannya (UTTP) yang ditera ulang sebanyak 29% dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan melalui pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang sebanyak 5.000 unit; serta pengawasan/penyuluhan metrologi legal sebanyak 3.000 unit.
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan target capaian persentase pelaku usaha yang difasilitasi pemasarannya sebesar 1% dilakukan dengan kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten pada 5 UMKM; serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

5. Perindustrian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Pembangunan Industri dengan target capaian persentase dokumen perencanaan perindustrian sesuai RPIK sebesar 30%; persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK sebesar 60%; dan pertambahan jumlah industri kecil dan menengah sebanyak 6% dilakukan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota melalui koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri.
- b. Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota dengan target capaian persentase industri yang mendapat fasilitasi ijin usaha industri (IUI) sebanyak 100%; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota sebanyak 100%; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebanyak 100%; serta Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebanyak 100% dilakukan dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan kabupaten/kota dalam SIINAS yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan target capaian persentase industri yang masuk dalam SIINAS sebesar 100% dan tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota melalui fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui SIINas.

6. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan target capaian persentase transmigran yang ditempatkan sebanyak 30% dilakukan dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota melalui koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 daerah kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan.

5.2.4. UNSUR PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian Persentase koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Administrasi Umum yang terlaksana sebesar 59,59%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penataan Organisasi dengan melakukan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan sebanyak 2 kegiatan; fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana sebanyak 2 kegiatan; peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi sebanyak 2 kegiatan; monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana sebanyak 2 kegiatan; koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah sebanyak 1 kegiatan.
 - 2) Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan melakukan fasilitasi keprotokolan sebanyak 12 kegiatan; fasilitasi komunikasi pimpinan sebanyak 12 kegiatan; serta pendokumentasian tugas pimpinan sebanyak 12 kegiatan.
 - 3) Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan melakukan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 2 orang; penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 12 paket; serta pelaksanaan medical check up kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 2 orang.
 - 4) Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dengan melakukan penyediaan kebutuhan rumah tangga kepala daerah sebanyak 12 paket; penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah sebanyak 12 paket; serta penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah sebanyak 12 paket.
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target capaian Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang Kesra yang terlaksana sebesar 94,40%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan melakukan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah sebanyak 12 dokumen; fasilitasi bantuan hukum sebanyak 2 kasus; serta pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum sebanyak 4 dokumen.
 - 2) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan melakukan fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual sebanyak 4 kegiatan; pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial sebanyak 2 dokumen; serta pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Administrasi Tata Pemerintahan dengan melakukan penataan administrasi pemerintahan sebanyak 2 kegiatan; pengelolaan administrasi kewilayahan sebanyak 2 kegiatan; serta fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah sebanyak 3 kegiatan.
 - 4) Fasilitasi Kerja Sama Daerah dengan melakukan fasilitasi kerjasama dalam negeri sebanyak 10 kerjasama; fasilitasi kerjasama luar negeri sebanyak 1 kerjasama; serta evaluasi pelaksanaan kerjasama sebanyak 2 kegiatan.

c. Program Perekonomian dan Pembangunan dengan target capaian Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan di Bidang perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana sebesar 72,13%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan melakukan fasilitasi penyusunan program pembangunan sebanyak 6 dokumen; pengendalian dan evaluasi program pembangunan sebanyak 4 kegiatan; serta pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan sebanyak 4 laporan.
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa sebanyak 55 dokumen; pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebanyak 4 dokumen; serta pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa pada 20 orang.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD sebanyak 3 kegiatan; pengendalian distribusi perekonomian sebanyak 4 kegiatan; serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil sebanyak 1 dokumen.
- 4) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sebanyak 2 kegiatan; koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup sebanyak 1 kegiatan; serta koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air sebanyak 2 kegiatan.

2. Sekretariat DPRD

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target capaian persentase layanan kepada DPRD yang tersedia sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan melakukan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD sebanyak 50 orang; penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD sebanyak 50 paket; serta pelaksanaan medical check up DPRD sebanyak 50 orang.
- 2) Layanan Administrasi DPRD dengan melakukan penyelenggaraan administrasi kenagitaan DPRD sebanyak 5 dokumen; fasilitasi fraksi DPRD sebanyak 35 kegiatan; fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD sebanyak 15 kegiatan; serta penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD sebanyak 9 paket.

b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan target capaian persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok DPRD yang tersedia sebesar 80,15% dan persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi lain DPRD yang tersedia sebesar 87,45%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dengan melakukan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah sebanyak 3 dokumen; pembahasan rancangan peraturan daerah sebanyak 15 kegiatan; penyelenggaraan kajian perundang-undangan sebanyak 15 dokumen; fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik

sebanyak 15 dokumen; serta penyusunan tata tertib DPRD sebanyak 1 dokumen.

- 2) Pembahasan Kebijakan Anggaran dengan melakukan pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 kegiatan; pembahasan perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 1 kegiatan; pembahasan APBD sebanyak 1 kegiatan; pembahasan APBD perubahan sebanyak 1 kegiatan; serta pembahasan pertanggungjawaban APBD sebanyak 1 kegiatan.
- 3) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan melakukan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum sebanyak 25 kegiatan; bidang infrastruktur sebanyak 25 kegiatan; bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 25 kegiatan; bidang perekonomian sebanyak 25 kegiatan; pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebanyak 5 kegiatan; pengawasan penggunaan anggaran sebanyak 15 kegiatan; serta pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah sebanyak 1 kegiatan.
- 4) Peningkatan Kapasitas DPRD dengan melakukan pendalaman tugas DPRD sebanyak 4 dokumen; publikasi dan dokumentasi dewan sebanyak 4 dokumen; penyediaan kelompok pakar dan tim ahli sebanyak 15 orang; penyediaan tenaga ahli fraksi sebanyak 6 orang; penyelenggaraan hubungan masyarakat sebanyak 25 kegiatan; serta penyusunan program kerja DPRD sebanyak 1 dokumen.
- 5) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dengan melakukan kunjungan kerja dalam daerah sebanyak 140 kegiatan; penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 1 dokumen; serta pelaksanaan reses sebanyak 20 kegiatan.
- 6) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dengan melakukan penyusunan kode etik DPRD sebanyak 1 dokumen; serta pengawasan kode etik DPRD sebanyak 5 kegiatan.
- 7) Fasilitasi Tugas DPRD dengan melakukan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD; penyusunan laporan kinerja DPRD sebanyak 2 laporan; fasilitasi pelaksanaan tugas badan musyawarah sebanyak 15 kegiatan; dan fasilitasi tugas pimpinan DPRD sebanyak 15 kegiatan.

5.2.5. UNSUR PENUNJANG

1. Perencanaan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan target capaian tingkat keselarasan antara program RKPD dengan RPJMD sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan melakukan pelaksanaan konsultasi publik sebanyak 1 kegiatan; koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah sebanyak 1 kegiatan; pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota sebanyak 1 kegiatan; koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota sebanyak 3 dokumen, yaitu RKPD Kabupaten Pematang

Tahun 2024, Perubahan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2022 dan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2045.

- 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen; serta penyusunan profil pembangunan daerah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen.
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melakukan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah sebanyak 4 laporan.
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target capaian tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen; Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 28 OPD; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 28 OPD; serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 4 dokumen.
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen; Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 7 OPD; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 7 OPD; serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA sebanyak 4 dokumen.
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan melakukan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) sebanyak 4 dokumen; Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 6 OPD; Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 6 OPD; serta Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 4 dokumen.

2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan urusan penunjang pengelola keuangan daerah yang diampu oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan target capaian persentase penyampaian raperda APBD sesuai ketentuan sebesar 100%; persentase belanja urusan pemerintahan umum sebesar 60%; persentase SP2D yang terbit sesuai ketentuan sebesar 100%; persentase penyampaian raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai ketentuan sebesar 100%; persentase penyampaian laporan keuangan daerah sesuai ketentuan sebesar 100%; rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan sebesar 13,15%; deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD sebesar -4,89%; rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) sebesar 60%; opini lapoaran keuangan dengan hasil WTP; serta rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya sebesar 4,25%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan melakukan koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 2 dokumen; serta koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD sebanyak 5 dokumen.
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan melakukan koordinasi dan pengelolaan kas daerah sebanyak 48 kegiatan; koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran perhitungan fihak ketiga sebanyak 5.740 laporan; penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan sebanyak 1 dokumen; serta pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/ kota sebanyak 95 orang.
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan melakukan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran sebanyak 14 dokumen; konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLID dan laporan keuangan pemerintah daerah sebanyak 14 dokumen; koordinasi dan penyusunan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan raperbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebanyak 2 dokumen.
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melakukan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan sebanyak 1.700 laporan; pengelolaan dana darurat dan mendesak sebanyak 50 laporan; pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota sebanyak 422 laporan.

- 5) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dengan melakukan implementasi dan pemeliharaan SIPD bidang keuangan daerah sebanyak 2 dokumen; serta pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota sebanyak 75 orang.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan target capaian persentase peningkatan tertib administrasi penatausahaan BMD sebesar 100% dan manajemen aset sebesar 100% dilakukan dengan kegiatan pengelolaan barang milik daerah melalui pengamanan barang milik daerah sebanyak 383 obyek; optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sebanyak 55 kegiatan; serta penyusunan laporan barang milik daerah sebanyak 1 laporan.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan target capaian rasio PAD terhadap total pendapatan sebesar 13,50%; persentase WP tertagih terhadap data pajak daerah yang ditetapkan sebesar 78%; rasio pajak daerah terhadap PAD sebesar 25%; persentase kebijakan pendapatan yang diselesaikan sebanyak 100% ; serta deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD sebesar 5% dilakukan dengan kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui perencanaan pengelolaan pajak daerah sebanyak 2 dokumen; analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah sebanyak 3 dokumen; penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 6 kegiatan; penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah sebanyak 2 unit; pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah sebanyak 117 laporan; pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah sebanyak 10 laporan; penilaian PBB perdesaan dan perkotaan serta BPHTB sebanyak 20 obyek pajak; penetapan wajib pajak daerah sebanyak 718.000 dokumen; pelayanan dan konsultasi pajak daerah sebanyak 12 layanan; penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah sebanyak 50 dokumen; penagihan pajak daerah; penyelesaian keberatan pajak daerah; pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah; serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah sebanyak 4 kegiatan.

3. Kepegawaian

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Kepegawaian Daerah dengan target capaian Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sebesar 3,70%, Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya sebesar 1,70%, persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi 100%, Persentase Pejabat pimpinan tinggi administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya 1,70%, Persentase layanan administrasi kepegawaian 100%, Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan 100%, serta persentase tingkat kedisiplinan ASN sebesar 90%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan mengadakan dengan melakukan penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN sebanyak 1 dokumen; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK sebanyak 2 kegiatan; koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian sebanyak 400 SK; pengelolaan sistem informasi kepegawaian sebanyak 9.000 record; serta

evaluasi data, informasi dan sistem informasi kepegawaian sebanyak 1 kegiatan.

- 2) Mutasi dan Promosi ASN dengan melakukan pengelolaan mutasi ASN sebanyak 520 PNS; pengelolaan kenaikan pangkat ASN sebanyak 6.000 dokumen; serta pengelolaan promosi ASN sebanyak 140 PNS;
- 3) Pengembangan Kompetensi ASN dengan melakukan peningkatan kapasitas kinerja ASN sebanyak 200 orang; pengelolaan asesment center sebanyak 500 orang; pengelolaan pendidikan lanjutan ASN; serta koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat sebanyak 1.713 orang.
- 4) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan melakukan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebanyak 13 kegiatan; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai sebanyak 600 orang; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai untuk 100 orang usulan; pembinaan disiplin ASN sebanyak 60 kegiatan; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sebanyak 20 kasus; serta pelayanan proses izin perceraian pegawai sebanyak 25 kasus.

4. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan dengan target capaian persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sebesar 83% dan indeks inovasi daerah sebesar 30,52. Program ini dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan melakukan penelitian dan pengembangan pariwisata sebanyak 1 dokumen; serta penelitian dan pengembangan kesehatan sebanyak 1 dokumen.
- 2) Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan melakukan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi sebanyak 2 dokumen; uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi sebanyak 30 laporan; diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sebanyak 2 laporan; sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan sebanyak 2 kegiatan; serta fasilitasi hak kekayaan intelektual sebanyak 2 item.

5.2.6. UNSUR PENGAWAS

1. Inspektorat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan target capaian cakupan penyelenggaraan pengawasan sebesar 85%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah sebanyak 11 kegiatan; pengawasan keuangan pemerintah daerah sebanyak 13 kegiatan; reviu laporan kinerja sebanyak 5 kegiatan; reviu laporan keuangan sebanyak 16 kegiatan; pengawasan desa sebanyak 17 kegiatan; kerjasama pengawasan internal dengan 5 instansi;

- serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sebanyak 120 kegiatan.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan melakukan penanganan penyelesaian kerugaian negara/daerah sebanyak 13 kasus; pengawasan dengan tujuan tertentu sebanyak 13 kegiatan.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan target capaian cakupan penyelenggaraan pengawasan sebesar 85%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan sebanyak 1 kebijakan.
 - 2) Pendampingan dan Asistensi dengan melakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah sebanyak 26 kegiatan; pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian RB sebanyak 44 kegiatan; koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebanyak 1 dokumen; serta pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas sebanyak 5 kegiatan.

5.2.7. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target capaian persentase pelayanan publik yang tersedia sebesar 87,30%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target capaian persentase masyarakat desa yang aktif sebesar 95,71 %, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target capaian persentase gangguan trantibum tingkat desa dan kecamatan yang dapat diselesaikan sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum dengan target capaian persentase potensi konflik tingkat desa dan kecamatan yang tertangani sebesar 100%, program ini dilakukan melalui kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target capaian persentase desa bertata kelola pemerintahan baik sebesar 73,74%, program ini dilakukan melalui kegiatan :

- 1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5.2.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut::

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan target capaian persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan sebanyak 85% dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan melalui penyusunan program kerja, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan masing-masing sebanyak 8 dokumen, 100 orang dan 2 dokumen. Melalui program ini akan dilakukan pembumih nilai – nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi masyarakat sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik dengan target capaian persentase masyarakat yang paham politik sebanyak 55% dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik melalui penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, Pemilu/Pemilu kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah. Dalam rangka persiapan pemilihan Kepala Daerah dan persiapan pemilihan Presiden, melalui program ini akan dilakukan sosialisasi pada 14 Kecamatan di Kabupaten Pematang yang direncanakan melibatkan sebanyak 800 peserta. Selanjutnya akan dilakukan pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah serta adanya pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Dalam rangka memperluas informasi tentang pendidikan politik juga akan dilakukan penguatan iklan layanan pendidikan politik sesuai amanat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik

- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan target capaian persentase organisasi kemasyarakatan yang paham penanganan masalah sosial kemasyarakatan sebanyak 80% dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan melalui penyusunan program kerja, penyusunan bahan perumusan kebijakan; pelaksanaan kebijakan di bidang penfartaran Ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Pada program ini akan ada gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi dalam rangka mensukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target capaian persentase masyarakat yang paham ketahanan ekonomi, sosial dan budaya sebesar 65% dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN dan PN), koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Pada program ini memuat pembinaan bagi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/ 6397/ SJ Tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.,
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan target capaian persentase masyarakat yang paham kewaspadaan dan deteksi dini konflik sosial sebanyak 65% dilakukan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial melalui pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing; tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelmbagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah. Melalui program ini juga akan dilakukan pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Penanganan potensi ancaman, hambatan, dan gangguan di daerah juga akan dilakukan melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan tim kewaspadaan dini dan pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan perangkat daerah, direncanakan program penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pendukung operasional perangkat daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) perangkat daerah.

Berikut ini adalah rekapitulasi pagu indikatif pada setiap program prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Secara rinci untuk penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagunya termuat dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Tabel V.3
Rekapitulasi Pagu Indikatif Program Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2023

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	589.730.835.800	
Pendidikan	235.022.242.800	DINDIKBUD
Program Pengelolaan Pendidikan	234.612.204.800	
Program Pengembangan Kurikulum	170.288.000	
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	239.750.000	
Kesehatan	256.669.316.000	DINKES
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	246.052.981.400	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.037.500.000	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	233.542.000	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat	345.292.600	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.320.956.000	DPU TR
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.034.991.000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	5.599.794.000	
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	200.000.000	
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.374.694.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	410.000.000	
Program Penataan Bangunan Gedung	6.285.000.000	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	225.000.000	
Program Penyelenggaraan Jalan	142.841.477.000	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	150.000.000	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	200.000.000	
Perumahan Rakyat Dan Permukiman	4.695.540.000	DISPERKIM
Program Pengembangan Perumahan	575.000.000	
Program Kawasan Permukiman	1.450.000.000	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	750.000.000	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	1.920.540.000	
Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.980.000.000	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.055.000.000	SATPOL PP
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	225.000.000	SATPOL PP
Program Penanggulangan Bencana	700.000.000	BPBD
Sosial	2.285.000.000	DINSOS KBPP
Program Pemberdayaan Sosial	307.000.000	
Program Penanganan Warganegara Migran Korban Tindak Kekerasan	504.000	
Program Rehabilitasi Sosial	414.496.000	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.465.906.100	
Program Penanganan Bencana	74.093.900	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	23.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	50.897.247.050	
Tenaga Kerja	1.280.000.000	DISNAKER
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	425.000.000	
Program Penempatan Tenaga Kerja	705.000.000	
Program Hubungan Industrial	150.000.000	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000.000	DINSOS KBPP
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	165.000.000	
Program Perlindungan Perempuan	135.000.000	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	55.000.000	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	20.000.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	84.039.000	
Program Perlindungan Khusus Anak	40.961.000	
Pangan	3.655.000.000	DISPERTAN
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	3.020.000.000	
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	525.000.000	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	450.000.000	
Program Pengawasan Keamanan Pangan	60.000.000	
Pertanahan	200.000.000	DISPERKIM
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	150.000.000	
Program Penatagunaan Tanah	50.000.000	
Lingkungan Hidup	6.775.000.000	DLH
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	130.000.000	
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	527.152.000	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)	100.000.000	
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)	20.000.000	
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	160.000.000	
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	171.000.000	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	34.000.000	
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	40.000.000	
Program Pengelolaan Persampahan	5.592.848.000	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.200.490.000	DISDUKCATPIL
Program Pendaftaran Penduduk	1.218.605.000	
Program Pencatatan Sipil	395.481.000	
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	538.154.000	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	48.250.000	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.905.361.450	DINPERMASDES
Program Penataan Desa	414.754.400	
Program Peningkatan Kerjasama Desa	149.190.400	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.673.105.650	
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	668.311.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.700.044.200	DINSOS KBPP
Program Pengendalian Penduduk	609.503.600	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	13.863.297.900	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	227.242.700	
Perhubungan	2.661.871.400	DISHUB
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.327.291.400	
Program Pengelolaan Pelayaran	334.580.000	
Komunikasi dan Informatika	7.447.703.000	DISKOMINFO
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2.235.775.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	5.211.928.000	
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.393.585.000	DISKOPERINDAG
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	45.000.000	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	10.000.000	
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	630.000.000	
Program Pemberdayaan UMKM	205.000.000	
Program Pengembangan UMKM	1.503.585.000	
Penanaman Modal	687.616.000	DPMPPTSP
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	83.914.500	
Program Promosi Penanaman Modal	109.980.000	
Program Pelayanan Penanaman Modal	162.029.236	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	301.321.500	
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	30.370.764	
Kepemudaan dan Olahraga	2.240.000.000	DISPARPORA
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	215.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	215.000.000	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.810.000.000	
Statistik	218.575.000	DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	218.575.000	
Persandian	181.425.000	DISKOMINFO
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	181.425.000	
Kebudayaan	715.576.000	DINDIKBUD
Program Pengembangan Kebudayaan	340.839.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Program Pembinaan Sejarah	39.042.250	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	335.694.750	
Perpustakaan	275.000.000	DINPUSARDA
Program Pembinaan Perpustakaan	275.000.000	
Kearsipan	75.000.000	DINPUSARDA
Program Pengelolaan Arsip	65.000.000	
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	10.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	15.609.132.350	
Kelautan dan Perikanan	1.655.000.000	DISPERIK
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	538.781.000	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	705.000.000	
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	71.219.000	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	340.000.000	
Pariwisata	1.569.515.350	DISPARPORA
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.022.765.350	
Program Pemasaran Pariwisata	330.000.000	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	216.750.000	
Pertanian	8.760.567.000	DISPERTAN
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.934.845.580	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.602.253.000	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	479.254.420	
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	106.200.000	
Program Penyuluhan Pertanian	638.014.000	
Perdagangan	3.517.450.000	DISKOPERINDAG
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	95.000.000	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.700.000.000	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	287.350.000	
Program Pengembangan Ekspor	240.000.000	
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	115.000.000	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	80.100.000	
Perindustrian	417.600.000	DISKOPERINDAG
Program Perencanaan Pembangunan Industri	327.200.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Program Pengendalian Ijin Usaha Industri Kabupaten/Kota	50.000.000	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	40.400.000	
Transmigrasi	15.000.000	DISNAKER
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15.000.000	
UNSUR PENDUKUNG	114.653.856.000	
Sekretariat Daerah	58.484.277.000	SETDA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	38.757.903.236	
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	17.219.934.773	
Program Perekonomian dan Pembangunan	2.506.438.991	
Sekretariat DPRD	56.169.579.000	SETWAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	40.220.315.000	
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	15.949.264.000	
UNSUR PENUNJANG	504.662.140.000	
Perencanaan	2.040.000.000	BAPPEDA
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	772.773.000	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.267.227.000	
Keuangan	498.291.140.000	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	494.982.040.000	BPKAD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.709.100.000	BPKAD
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.600.000.000	BAPENDA
Kepegawaian	2.787.736.000	BKD
Program Kepegawaian Daerah	2.787.736.000	
Penelitian dan Pengembangan	695.000.000	BAPPEDA
Program Penelitian dan Pengembangan	695.000.000	
UNSUR PENGAWAS	3.692.025.470	
Inspektorat	3.692.025.470	INSPEKTORAT
Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.068.278.470	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	623.747.000	
UNSUR KEWILAYAHAN	9.473.328.800	14 KECAMATAN
Kecamatan	9.473.328.800	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	577.378.500	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	7.263.009.100	
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	192.447.000	
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	769.848.200	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	670.646.000	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	2.701.508.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3
Kesatuan Bangsa dan Politik	2.701.508.000	BAKESBANGPOL
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	600.000.000	
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1.518.508.000	
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	433.000.000	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	50.000.000	
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100.000.000	
NON URUSAN	1.209.477.879.530	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.209.477.879.530	
TOTAL	2.565.962.865.000	

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. IKU Perangkat Daerah adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. sedangkan IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Selain IKU dan IKK, perlu ditetapkan juga panduan dalam pencapaian pemenuhan SPM tahunan.

Dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah Tahun 2021, IKU Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah untuk Tahun 2023 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pemalang dan Perangkat Daerah
Beserta Target Tahun 2023

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
1	Angka Kriminalitas			Angka	190	190	Bakesbangpol
		1	Jumlah konflik sosial	Kasus	0	0	Bakesbangpol
		2	Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	%	100	100	Bakesbangpol
		3	Persentase adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum	%	96	96	Satpol PP
		4	Persentase kawasan patuh ketentraman dan ketertiban umum	%	7,14	7,14	Satpol PP
2	Indeks Resiko Bencana			Indeks	148	148	BPBD
		1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,75	0,75	BPBD
		2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD
		3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	100	BPBD
		4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan evakuasi dan tanggap darurat	%	100	100	BPBD
		5	Persentase layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam	%	20	20	BPBD
		6	Rasio kejadian kebakaran	%	84	84	Satpol PP
		7	Cakupan pelayanan kebakaran	%	35	35	Satpol PP
3	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	66,58	66,58	Setda
		1	Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dibawah bidang Pemerintahan dan kesejahteraan perekonomian	%	73	73	Setda
		2	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang pemerintahan dan kesra	%	92,27	92,27	Setda
		3	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perekonomian dan pembangunan	%	68,40	68,40	Setda
		4	Persentase pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan dibidang	%	58,37	58,37	Setda

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
			administrasi umum				
		5	Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) komponen perencanaan	Indeks	22,28	22,28	Bappeda
		6	Persentase dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang baik	%	34,15	34,15	Bappeda
		7	Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	80	80	BPKAD
		8	Hasil pengukuran Indeks Kesesuaian Dokumen Penganggaran (Bobot Nilai 15)	Bobot nilai	15	15	BPKAD
		9	Hasil pengukuran Indeks Penyerapan Anggaran (BN 20)	Bobot nilai	20	20	BPKAD
		10	Hasil pengukuran Indeks Kondisi Keuangan Daerah (BN 15)	Bobot nilai	20	20	BPKAD
		11	Persentase pemanfaatan BMD (93%)	%	93	93	BPKAD
		12	Persentase Barang Milik Daerah yang dimiliki (50%)	%	60	60	BPKAD
		13	Rasio peningkatan PAD	%	13,50	13,50	Bapenda
		14	Rasio PAD terhadap total pendapatan Daerah	%	6,2	6,2	Bapenda
		15	Maturitas SPIP	Angka	3,0390	3,0390	Inspektorat
		16	Kapabilitas APIP	Level	3	3	Inspektorat
		17	Indeks Kearsipan	Indeks	57,12	57,12	Dinpusarda
		18	Persentase Perangkat Daerah yang mampu mengelola arsip dengan baik	%	40	40	Dinpusarda
		19	Indeks Profesional ASN (IPA)	Indeks	64,85	64,85	BKD
		20	Persentase Kompetensi ASN	%	57,50	57,50	BKD
		21	Persentase Kinerja ASN	%	80,30	80,30	BKD
		22	Persentase Tingkat Pendidikan ASN	%	51,10	51,10	BKD
		23	Persentase Tingkat Disiplin ASN	%	99,7	99,7	BKD
		24	Indeks SPBE	Indeks	3,36	3,36	Diskominfo
		25	Persentase <i>network</i> terintegrasi	%	82	82	Diskominfo
		26	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	2,4	2,4	Diskominfo
		27	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	79	79	Diskominfo
		28	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas	%	4	4	Diskominfo
		29	Persentase penduduk yang terpapar informasi publik	%	45	45	Diskominfo
		30	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	Indeks	80	80	Disdukcatpil

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
			layanan administrasi kependudukan				
		31	Cakupan layanan administrasi kependudukan	%	81,65	81,65	Disdukcatpil
		32	Indeks kepuasan DPRD terhadap layanan sekretariat DPRD	Indeks	87,25	87,25	Sekretariat DPRD
		33	Cakupan layanan Sekretariat DPRD	%	79,38	79,38	Sekretariat DPRD
		34	Indeks kepuasan layanan kelitbangan	Indeks	88	88	Bappeda
		35	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan	%	83	83	Bappeda
		36	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82	82	Kecamatan Bantarbolang
		37	Cakupan layanan kecamatan	%	94,69	94,69	Kecamatan Bantarbolang
		38	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85,5	85,5	Kecamatan Petarukan
		39	Cakupan layanan kecamatan	%	94,89	94,89	Kecamatan Petarukan
		40	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85	85	Kecamatan Moga
		41	Cakupan layanan kecamatan	%	89,69	89,69	Kecamatan Moga
		42	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	83,50	83,50	Kecamatan Pemalang
		43	Cakupan layanan kecamatan	%	88,53	88,53	Kecamatan Pemalang
		44	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	79	79	Kecamatan Randudongkal
		45	Cakupan layanan kecamatan	%	96,44	96,44	Kecamatan Randudongkal
		46	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	86	Kecamatan Watukumpul
		47	Cakupan layanan kecamatan	%	94,67	94,67	Kecamatan Watukumpul
		48	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	82	82	Kecamatan Ampelgading
		49	Cakupan layanan kecamatan	%	93,33	93,33	Kecamatan Ampelgading
		50	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85,31	85,31	Kecamatan Belik
		51	Cakupan layanan kecamatan	%	95,33	95,33	Kecamatan Belik
		52	Indeks kepuasan masyarakat terhadap	Indeks	79	79	Kecamatan

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
			layanan kecamatan				Pulosari
		53	Cakupan layanan kecamatan	%	93,89	93,89	Kecamatan Pulosari
		54	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	78,25	78,25	Kecamatan Bodeh
		55	Cakupan layanan kecamatan	%	91,39	91,39	Kecamatan Bodeh
		56	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	85	85	Kecamatan Comal
		57	Cakupan layanan kecamatan	%	89,33	89,33	Kecamatan Comal
		58	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86,23	86,23	Kecamatan Ulujami
		59	Cakupan layanan kecamatan	%	89,45	89,45	Kecamatan Ulujami
		60	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	86	86	Kecamatan Warungpring
		61	Cakupan layanan kecamatan	%	88,22	88,22	Kecamatan Warungpring
		62	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan	Indeks	81,5	81,5	Kecamatan Taman
		63	Cakupan layanan kecamatan	%	78,98	78,98	Kecamatan Taman
4	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)			Indeks	66,40	68,17	Setda
		1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	6,90	6,90	Dindikbud
		2	Harapan lama sekolah	Tahun	12,20	12,20	Dindikbud
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	100	Dindikbud
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	100	Dindikbud
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	100	Dindikbud
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar/ menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	100	Dindikbud

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
		7	Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai	B	B	Dindikbud
		8	Usia Harapan Hidup	Tahun	73,7	73,7	Dinkes
		9	Angka Kematian Ibu	%	58	58	Dinkes
		10	Angka Kematian Bayi	%	4,9	4,9	Dinkes
		11	Persentase balita stunting	%	10	10	Dinkes
		12	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,18	0,18	Dinkes
		13	TFR	Angka	2,48	2,48	
		14	ASFR (15-49 tahun)	Angka	35,00	35,00	Dinkes
		15	Angka prevalensi kontrasepsi modern/ <i>modern contraceptive prevalence</i> (mCP)	%	23,30	23,30	Dinkes
		16	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	10,08	10,08	Dinkes
		17	Persentase persediaan pangan	%	25	25	Dispartan
		18	Persentase infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	%	22,97	22,97	Dispartan
		19	Skor PPH	Angka	94,1	94,1	Dispartan
		20	Persentase tertanganinya kejadian kerawanan pangan	%	28,57	28,57	Dispartan
		21	Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	50	50	Disparpora
		22	Jumlah perolehan medali pada <i>event</i> olahraga regional	Medali	15	15	Disparpora
		23	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,07	0,07	Disparpora
		24	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,98	30,98	Disparpora
		25	Persentase wirausaha pemula	%	83,33	83,33	Disparpora
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Indeks	86,13	86,13	Dinsos KBPP
		1	Indeks Pembedayaan Gender (IDG)	Indeks	82,60	82,60	Dinsos KBPP
		2	Indeks PUG/Penghargaan APE	Indeks	Utama	Utama	Dinsos KBPP
		3	Indeks PA/Penghargaan KLA	Indeks	Nindya	Nindya	Dinsos KBPP
6	Indeks Kebudayaan			Indeks	49,90	49,90	Dindikbud
		1	Persentase warisan budaya yang ditetapkan	%	7,89	7,89	Dindikbud
		2	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	60,80	60,80	Dindikbud
		3	Nilai budaya literasi	Indeks	24,80	24,80	Dinpusarda
		4	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	7,600	7,600	Dinpusarda
7	Indeks kerukunan			Indeks	68,94	68,94	Bakesbangpol

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
	umat beragama						
		1	Jumlah konflik agama	Kasus	0	0	Bakesbangpol
		2	Persentase potensi konflik agama yang tertangani	%	100	100	Bakesbangpol
8	Angka Kemiskinan			%	15,39	15,39	Setda
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			%	7,2	6,75	Disnaker
		1	Persentase pengangguran yang ditangani	%	12,91	12,91	Disnaker
		2	Indeks ketenagakerjaan	Indeks	26,47	26,47	Disnaker
		3	Persentase PPKS yang ditangani	%	17,87	17,87	Dinsos KBPP
		4	Persentase penduduk tingkat kesejahteraan 1 dan 2 yang mendapat pemberdayaan, jaminan perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial	%	57,48	57,48	Dinsos KBPP
		5	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	57	57	Dinsos KBPP
		6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	Dinsos KBPP
		7	Persentase koperasi yang berkualitas	%	36	36	Diskoperindag
		8	Persentase usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil	%	0,058	0,058	Diskoperindag
		9	Persentase usaha mikro yang berijin	%	35,66	35,66	Diskoperindag
		10	Persentase perempuan yang diberdayakan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan	%	0,06	0,06	Dinsos KBPP
		11	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan	%	52	52	Dinsos KBPP
10	Indeks Desa Membangun			Indeks	0,7672	0,7672	Dinpermasdes
		1	Persentase Desa Berdaya	%	4,25	4,25	Dinpermasdes
		2	Jumlah Desa Berdaya	Desa	9	9	Dinpermasdes
11	Indeks ketimpangan antar wilayah			Indeks	0,37800	0,37800	DPU TR

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
		1	Persentase Kecamatan yang memiliki infrastruktur lengkap	%	7,14	7,14	DPU TR
		2	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik sesuai administrasi tata bangunan	%	3,36	3,36	DPU TR
12	Pertumbuhan ekonomi			%	3,71	4,19 - 4.50	Setda
13	Laju Inflasi			%	2,36	2,36	Setda
		1	Persentase pertumbuhan PDRB pada sektor industri pengolahan dalam PDRB	%	1	1	Diskoperindag
		2	Pertumbuhan industri kecil dan menengah	%	6	6	Diskoperindag
		3	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi, mobil dan sepeda motor dalam PDRB	%	0,5	0,5	Diskoperindag
		4	Pertumbuhan volume perdagangan besar dan eceran dalam Daerah	%	2	2	Diskoperindag
		5	Persentase pertumbuhan nilai ekspor	%	26	26	Diskoperindag
		6	Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	2,58	2,58	Dispertan
		7	Produktivitas pertanian (padi)	Kw/Ha	57,75	57,75	Dispertan
		8	Produksi kopi	kg	895	895	Dispertan
		9	Produksi daging dan telur	kg	15.661.756	15.661.756	Dispertan
		10	Persentase produksi sektor perikanan dalam PDRB	%	3,57	3,57	Disperik
		11	Produksi perikanan tangkap	kg	18.827.995	18.827.995	Disperik
		12	Produksi perikanan budidaya	Kg	19.273519	19.273519	Disperik
		13	Produksi hasil olahan perikanan	Kg	12.005.837	12.005.837	Disperik
		14	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB	%	0,5	0,5	Diskoperindag
		15	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	8,5	8,5	Diskoperindag
		16	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	Disparpora
		17	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara perkebangsaan	%	50	50	Disparpora
		18	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	%	10	10	Disparpora

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
		19	Persentase tingkat hunian akomodasi	%	29,32	29,32	Disparpora
		20	Persentase kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD	%	0,55	0,55	Disparpora
		21	Persentase perkembangan sub sektor ekonomi kreatif potensial	%	66,67	66,67	Disparpora
		22	Pertumbuhan nilai realisasi PMA dan PMDN	%	3	3	DPMPTSP
		23	Persentase peningkatan PMA dan PMDN	%	3	3	DPMPTSP
14	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)			Indeks	71,18	71,18	Bappeda
		1	Capaian universal akses airminum	%	89	89	DPU TR
		2	Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan	%	89	89	DPU TR
		3	Capaian akses sanitasi lingkungan (drainase, persampahan & air limbah domestik)	%	65	65	DPU TR
		4	Persentase rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan limbah domestik	%	94	94	DPU TR
		5	Persentase sarana dan prasarana persampahan sesuai standar	%	25	25	DPU TR
		6	Persentase jaringan drainase dalam kondisi baik	%	76	76	DPU TR
		7	Persentase luasan kawasan kumuh	%	0,4	0,4	Disperkim
		8	Persentase RTLH tertangani	%	33	33	Disperkim
		9	Rasio konektivitas	Rasio	87,1	87,1	Dishub
		10	Persentase pelayanan angkutan jalan	%	32,43	32,43	Dishub
		11	Level of Service	Rasio	0,43	0,43	Dishub
		12	Indeks konektivitas	%	95,77	95,77	DPU TR
		13	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	69,53	69,53	DPU TR
		14	Indeks kinerja sistem irigasi	%	52	52	DPU TR
		15	Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai RTRW	%	100	100	DPU TR
		16	Persentase sengketa tanah yang diselesaikan	%	60	60	Disperkim
		17	Persentase sertifikasi kepemilikan hak atas tanah terfasilitasi	%	95	95	Disperkim
15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)			Indeks	69,37	69,37	DLH

No	IKU Pemerintah Kabupaten	No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target RKPD Tahun 2023	OPD
		1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	80	80	DLH
		2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks	89,48	89,48	DLH
		3	Skor indeks pencemaran air	Indeks	47,28	47,28	DLH
		4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100	100	DLH
		5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	DLH
		6	Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	DLH
		7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	40	40	DLH
		8	Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	%	43,083	43,083	DLH
		9	Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0563	0,0563	DLH
		10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pemalang	%	98,77	98,77	DLH
		11	Persentase Penanganan sampah	%	71,83	71,83	DLH
		12	Persentase pengurangan sampah	%	26,94	26,94	DLH

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penetapan IKK setiap urusan pemerintahan Kabupaten Pemalang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Kabupaten Pemalang Beserta Target Tahun 2023

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENDIDIKAN				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	55	100	100

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98	100	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	83	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/ atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	64,7	100	100
5	Sekolah berakreditasi minimal B	Nilai	B	B	B
KESEHATAN					
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 Penduduk	0,75	0,76	0,76
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	%	50	40	40
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,56	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	98,40	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	99,58	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	68,44	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	23,24	100	100
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	36,81	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	34,93	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	13,35	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,73	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	61,67	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	29,79	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	30,7	100	100
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang	%	5	7	7

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota				
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	%	0,1	0,1	0,1
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	67	69	69
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	86,20	89	89
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,69	94	94
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	0,22	0,26	0,26
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	%	68,66	69,53	69,53
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0,35	1,23	1,23
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	0	0	0
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100
2	Fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Ha	36,88	73,5	73,5
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	78,33	67,00	67,00
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	NA	36	36
	KETENTRAMAN KETERTIBAN PERLINDUNGAN UMUM				
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	75	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	56	70	70
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	94	96	96
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	%	94	95	95

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	pengecahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	99,71	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	65,52	75	75
	SOSIAL				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	17	51	51
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	85	100	100
	TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	80	80
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,89	3,52	3,52
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	31	40,59	40,59
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS bipartit, struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	19,04	21,88	21,88
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	34,19	54	54
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	4,84	5,40	5,40
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0,13	0,11	0,11
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	100	100	100
	PANGAN				
1	Skor PPH	nilai	92,6	94,1	94,1
2	Persentase ketersediaan pangan	%	62,5	25,0	25,0
	LINGKUNGAN HIDUP				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	nilai	68,58	69,37	69,37
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	74,97	76	76
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	%	27	28	28

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENDATANGAN SIPIL				
1	Perekaman KTP elektronik	%	99,87	99,90	99,90
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	21,01	35	35
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	94,21	93,5	93,5
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama	%	10,26	56,41	56,41
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50	35,29	35,29
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	ASFR (15-49) tahun	35	35,00	34,00	34,00
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	20,59	23,00	23,00
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	10,12	10,08	10,08
	PERHUBUNGAN				
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	%	Na	70	70
2	V/C ratio	rasio	0,44	0,43	0,43
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	71	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	66	80	80
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	27	50	50
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	40	55	55
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	30	40	40
	KOPERASI DAN UKM				
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	26,97	36	36
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	34,16	35,66	35,66

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan PMA & PMDN	%	-90,5	3	3
	PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,00	0,07	0,07
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	28,08	30,98	30,98
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	15	15
	STATISTIK				
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
	PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	20	40	40
	KEBUDAYAAN				
1	Terlestarikannya cagar budaya	%	90,52	100	100
	PERPUSTAKAAN				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	55,25	55,45	55,45
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	7,033	7,600	7,600
	KEARSIPAN				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	%	7,12	17,70	17,70
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	5,45	7,10	7,10
	KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	1000 ton	35,89	38	38
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ kap/ thn	34,46	34,5	34,5
	PARIWISATA				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	0	50	50

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mancanegara per kebangsaan				
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-28,84	10	10
3	Tingkat hunian akomodasi	%	24,17	29,32	29,32
	PERTANIAN				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	63,20	63,23	63,23
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	10,30	10,33	10,33
3	Produksi peternakan utama (daging sapi, daging ayam dan telur ayam)	ton	8.531	8.560	8.560
	PERDAGANGAN				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	%	8,04	8,5	8,5
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	95	97	97
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	3,16	15	15
	PERINDUSTRIAN				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	0,25	6	6
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	30	30
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100
	TRANSMIGRASI				
1	Persentase transmigran yang ditempatkan	%	20	30	30
	SEKRETARIAT DAERAH				
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	9,90	10,4	10,4
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	56,34	57	57
	KEUANGAN				
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,12	13,16	13,16
2	Rasio PAD	%	12,72	13,5	13,5
3	Rasio belanja urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	60	60
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	-4,92	-4,89	-4,89

No.	Urusan/Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (Tahun 2020)	Target Kinerja RPJMD Tahun 2023	Penyesuaian Target Kinerja RKPD Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	5	5
6	Manajemen Aset	%	100	100	100
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,27	4,25	4,25
	KEPEGAWAIAN				
1	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	110,81	120	120
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5,27	7,00	7,00
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	1,00	3,00	3,00
	PENGAWASAN				
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	3,0375	3,0390	3,0390
2	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3

Sumber : RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

- Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemenuhan SPM merupakan prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. SPM terdiri dari lima bidang, meliputi :
1. SPM bidang Pendidikan
 2. SPM bidang Kesehatan
 3. SPM bidang Pekerjaan Umum
 4. SPM bidang Permukiman Rakyat
 5. SPM bidang Sosial

Tabel 6.3
Target Dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Pembilang	Penyebut	Anggaran (Rp)
BIDANG PENDIDIKAN						
1	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	209.038	209.038	229.596.364.100
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100	48.324	48.324	439.539.000
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	2.948	2.948	6.216.267.000
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	100	-	-	-
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	35.381	35.381	26.913.455.820
BIDANG KESEHATAN						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	21.858	21.858	404.105.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	20.685	20.685	606.990.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	19.871	19.871	72.489.800
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan	100	78.149	78.149	100.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Pembilang	Penyebut	Anggaran (Rp)
		kesehatan				
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	199.094	199.094	190.050.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	807.347	807.347	100.000.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	179.928	179.928	125.000.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	137.824	137.824	60.000.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah warga negara penderita diabetes militus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	18.561	18.561	50.000.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	1.158	1.158	100.000.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	16.019	16.019	75.000.000
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	31.784	31.784	75.000.000
BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	1.335.605	1.335.605	5.599.794.000
2	Penyediaan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan layanan air limbah domestik	100	1.411.151	1.411.151	5.374.694.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Pembilang	Penyebut	Anggaran (Rp)
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	2.000.000.000
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100	100	100	2.000.000.000
BIDANG TRANTIBUMLINMAS						
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kab/Kota	100	500	500	25.000.000
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	5.000	5.000	125.000.000
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	2.000	2.000	275.000.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	1.873	1.873	300.000.000
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	1200	1200	110.000.000
BIDANG SOSIAL						
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	77	77	186.056.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	217	217	62.110.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	103	103	38.228.000
4	Rehabilitasi sosial	Jumlah warga	100	100	100	150.200.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target 2023 (%)	Pembilang	Penyebut	Anggaran (Rp)
	dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti				
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100	60	60	74.093.900

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target Tahun 2023. Oleh karena itu, pelaksanaan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta dapat memperbaiki capaian kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan pemantapan terhadap kinerja pembangunan daerah yang telah tercapai pada tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 masih dalam suasana penanganan pandemi Covid-19 sekaligus pemulihan kondisi masyarakat dengan penerapan pola kebiasaan baru. Untuk itu, Daerah diharapkan mampu melakukan formulasi upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi. Maka tema yang diangkat dalam RKPD Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur”**.

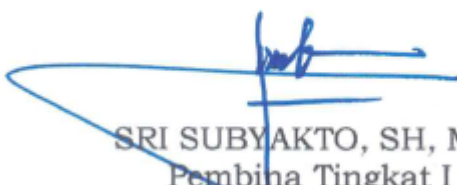
RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pemalang Tahun 2023, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, serta menjadi dasar bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Selain itu, RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023 juga akan menjadi acuan bagi seluruh *pentahelix* pemangku kepentingan pembangunan (masyarakat, akademisi, dunia usaha dan media) untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Pemalang guna bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang makin meningkat dan pelayanan publik yang semakin baik untuk mewujudkan visi **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** sebagaimana yang dicita-citakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006